mizan

J.B. Banawiratma, Zainal Abidin Bagir, (ed.)

DIALOG ANTARUMAT BERAGAMA

GAGASAN DAN PRAKTIK DI INDONESIA

PROGRAM STUDI AGAMA DAN LINTAS BUDAYA
CENTER FOR RELIGIOUS AND CROSS-CULTURAL STUDIES
GRADUATE SCHOOL, UNIVERSITAS GADJAH MADA

Dialog Antarumat Beragama

MIZAN PUBLIKA adalah lini khusus Penerbit Mizan yang mencurahkan penerbitan karya-karya ilmiah dan pemikiran terpilih yang serius, orisinal, dan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan pemikiran dan infrastruktur ilmiah di Indonesia.

Dialog Antarumat Beragama

Gagasan dan Praktik di Indonesia

Penulis dan Peneliti:
J.B. Banawiratma, Zainal Abidin Bagir, Fatimah Husein
Suhadi Cholil, Novita Rakhmawati, Ali Amin
Budi Asyhari, Mega Hidayati

Program Studi Agama dan Lintas Budaya
(Center for Religious and Cross-Cultural Studies)
Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada
2010

Dialog Antarumat Beragama: Gagasan dan Praktik di Indonesia

Penulis dan Peneliti:
J.B. Banawiratma, Zainal Abidin Bagir, Fatimah Husein
Suhadi Cholil, Novita Rakhmawati, Ali Amin
Budi Asyhari, Mega Hidayati

© 2010

All rights reserved
Cetakan I, Oktober 2010

Diterbitkan oleh Penerbit Mizan Publika
Anggota IKAPI
PT Mizan Publika
Jl. Puri Mutiara Raya No. 72
Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430
Telp. (62-21) 75910212, Faks. (61-21) 75915759
http://www.mizan.com
E-mail: mizan.scholar@yahoo.com

Didistribusikan oleh:
Mizan Media Utama (MMU)
Jl. Cinambo (Cisaranten Wetan) No. 146
Ujung Berung, Bandung 40294
Telp. (62-22) 7815500, Faks. (62-22) 7802288
E-mail: mizanmu@bdg.centrin.net.id

Perwakilan:
Jakarta: (021) 7874455, 78891213; Surabaya: (031) 8281857, 60050097; Pekanbaru: (0761) 20716, 29811; Medan (061) 7360841; Makassar: (0411) 873655; Malang: (0341) 567853; Palembang: (0711) 815544; Yogyakarta (0274) 885485; Serang: (0254) 214254; Bali (0361) 482826; Bogor: (0251) 8318344; Banjarmasin: (0511) 3252374

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
....
Jakarta: Mizan Publika, 2010. xx + 290 hlm; 13 x 20,5 cm

bibliografi.

Indeks.

ISBN: 978-602-97633-1-7

Daftar Isi

Kata Pengantar - vii
Glosarium – xvii

Bagian I: Teori dan Sejarah Dialog

1. Apa itu Dialog? - 3
2. Menelusuri Dialog Agama dalam Sejarah – 23

Bagian II: Ragam Dialog di Indonesia

3. Jejak-jejak Kemenag di Jalan Dialog Antaragama – 65
4. Wajah Dialog Agama dalam Diplomasi Indonesia – 97
5. Menggerakkan Dialog dari Bawah – 131
6. Mengkaji Agama secara Dialogis di Perguruan Tinggi – 187

Bagian III: Masa Depan Dialog di Indonesia

1. Dari Fakta Menuju Cita-cita – 233

Catatan-catatan – 251

Lampiran

Daftar Peserta Focused Group Discussion "Interreligious Dialogue" I, CRCS, Sekolah Pascasarjana, UGM, 28 Januari 2008 – 275

Daftar Peserta Focused Group Discussion "Interreligious Dialogue" II, CRCS, Sekolah Pascasarjana, UGM, 17 November 2008 – 276

Syllabus Interreligious Dialogue: Theories and Practices 2009 – 277

Biodata Peneliti dan Penulis – 287

Kata Pengantar

Dibanding banyak negara lain di Asia maupun dunia, Indonesia telah memiliki sejarah panjang praktik dialog antarumat beragama. Hal itu terlihat ketika ada kesempatan melakukan perbandingan praktik tersebut dalam forum-forum dialog antarumat beragama atau diskusi mengenai dialog pada tingkat regional dan internasional. Dialog sebagai aktivitas yang terlembagakan di Indonesia telah dimulai sejak 1960-an, dipromosikan dengan gencar oleh pemerintah; dilakukan pada tingkat masyarakat; dan juga dikembangkan dalam dunia akademis. Sementara dialog telah sering dilakukan dan banyak gagasan mengenai dialog dikembangkan, namun *kajian* mengenai praktik dialog tersebut belum jamak.

Buku ini ingin mencatat pengalaman amat kaya tersebut dan sedikit banyak mensistematisasikannya, tanpa bertendensi menyajikan dokumentasi yang lengkap. Berdasarkan

seleksi atas sebagian aktivitas yang dilakukan pada wilayah-wilayah dialog yang berbeda, kami mencoba menelusuri ragam dialog yang telah terjadi, dan memilah mana yang masih dapat dikembangkan untuk masa depan.

Ada banyak cara yang mungkin digunakan untuk memotret pengalaman dialog itu, dan hal tersebut juga bergantung pada bagaimana mendefinisikan dialog. Kami mendefenisikannya dengan mempertimbangkan tujuan penulisan buku ini, yaitu menampilkan praktik dialog antarumat beragama, sebagaimana yang umum dipahami sekarang, dalam beragam bentuknya. Dengan begitu, pembaca buku ini, khususnya yang tidak terlalu mengikuti perkembangan dialog, diharapkan mendapat gambaran yang cukup baik mengenainya, mulai dari sejarah awal hingga perkembangan mutakhir.

Kami juga mengharapkan para pelaku dialog sendiri, baik perseorangan maupun lembaga-lembaga masyarakat sipil, dan juga pihak pemerintah yang menaruh perhatian pada dialog, dapat memperoleh gambaran besar, katakanlah semacam peta, menyangkut apa yang terjadi di luar lingkungan mereka. Buku ini diharapkan dapat menyajikan gambaran yang cukup komprehensif, yaitu mampu memotret selengkap mungkin ragam dialog yang telah dilakukan di Indonesia, beserta motivasi dan perkembangannya, tanpa bertendensi menyajikan dokumentasi sejarahnya secara teperinci. Tujuan terakhir, yang mesti disampaikan dengan rendah hati, semoga buku ini bisa menjadi awal bagi penelitian-penelitian sosial mengenai praktik dialog, yang dalam pengamatan kami belum cukup banyak dilakukan.

Untuk keperluan tersebut, dialog di sini didefinisikan secara cukup longgar agar dapat menangkap sebanyak mung-

kin upaya yang telah dilakukan. Sebagai langkah sistematisasi awal, berdasarkan pengamatan awal, kami membagi dialog menjadi tiga kelompok, *pertama*, dialog yang disponsori pemerintah, terutama oleh Kementerian Agama (sebelumnya disebut Departemen Agama) yang mengawali sejarah dialog di Indonesia; kemudian oleh Kementerian Luar Negeri, melalui Diplomasi Publiknya yang baru dimulai beberapa tahun lalu. *Kedua*, dialog yang dilakukan atau difasilitasi oleh lembaga masyarakat sipil, baik yang memfokuskan pada dialog, maupun yang mengangkat isu-isu lain yang bersentuhan dengan dialog. *Ketiga*, dialog dalam bentuknya yang lain, yang dikembangkan di lembaga-lembaga akademis, khususnya pada tingkat pascasarjana, dan terutama dalam bentuk pengembangan studi agama yang memiliki implikasi pada dialog. Batasan lain adalah bahwa kami memfokuskan diri pada *lembaga* pelaksana, fasilitator, atau yang mengembangkan dialog—bukan pada individu atau tokoh pelaku dialog.

Meskipun potret yang ingin ditampilkan cukup komprehensif, namun kami menyadari bahwa—karena pelbagai keterbatasan—hal itu harus dibayar dengan mengorbankan perincian. Dengan demikian, hal yang diharapkan dapat disajikan adalah semacam peta besar dengan beberapa *landmark*-nya; untuk menghidupkan potret ini memang diperlukan beberapa perincian. Karena itu, kami memilih setidaknya beberapa ilustrasi penting pada setiap wilayah dialog.

Dalam bab mengenai dialog yang disponsori pemerintah (Bab 3), khususnya menyangkut upaya diplomasi publik Kementerian Luar Negeri, hampir semua peristiwa hingga akhir 2008 dapat ditampilkan, meski tanpa deskripsi te-

perinci. Hal itu tentu berbeda dengan dialog Kementerian Agama (Kemenag), sebagai respons atas konflik dan potensi konflik antarumat beragama. Untuk itu, kami memilih beberapa lembaga dalam Kemenag yang menjadi pusat dalam melaksanakan kebijakan terkait dialog—dalam bahasa Kemenag *upaya menciptakan kerukunan umat beragama*.

Jenis kesulitan lain muncul dalam upaya mengangkat dialog di masyarakat sipil (Bab 5). Dalam hal itu, Indonesia tampaknya memang luar biasa. Sejak 1980-an, organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian besar pada dialog menjamur—baik organisasi yang mengkhususkan pada dialog; yang menjadikan dialog sebagai bagian dari agenda yang lebih besar (misalnya perjuangan untuk kesetaraan gender, atau lembaga yang menaruh perhatian pada masalah agama dan masyarakat secara umum); atau organisasi keagamaan. Karena banyaknya jumlah organisasi seperti itu dengan rentang sejarah cukup panjang (setidaknya hampir tiga dasawarsa), proses seleksi menjadi sangat sulit, sehingga hanya sebagian kecil dari lembaga tersebut yang bisa ditampilkan. Kesulitan serupa terjadi pula pada bab mengenai dialog di dunia akademik (Bab 6) dalam tingkatan lebih rendah. Bab tersebut difokuskan pada beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta dan sekitarnya untuk beberapa alasan. Seleksi ini tidak mengada-ada karena, seperti akan ditunjukkan pada bab tersebut, dalam hal ini Yogya memang istimewa.

Karena alasan-alasan tersebut, banyak lembaga pelaku dialog yang sudah cukup mapan terpaksa tidak dapat ditampilkan semuanya di sini. Penentuan lembaga mana yang kami pilih untuk masuk atau tidak, bukan berdasar hanya pada nilai pentingnya atau kualitas lembaga-lembaga terse-

but, tapi juga demi mengungkap beragam jenis lembaga atau model dialognya. Karena keterbatasan jumlah lembaga yang diangkat, kami harus mengakui bahwa penelitian ini baru bisa disebut sebagai penelitian awal mengenai praktik dialog antarumat beragama di Indonesia. Meski demikian, dengan segala keterbatasan itu, kami berharap setidaknya kami sudah berhasil menangkap ragam dan karakteristik dialog di masing-masing wilayah, dan dengan begitu ada peta besar yang dapat membantu kita memahami (sejarah) praktik dialog di Indonesia, sekaligus membuka jalan untuk penelitian-penelitian lain yang lebih dalam dan teperinci.

***

Proses penelitian dan penulisan buku ini sendiri sebetulnya juga merupakan sebentuk dialog yang patut kami syukuri. Upaya ini disponsori oleh Program Studi Agama dan Lintas Budaya (atau sering disebut dengan CRCS [Center for Religious and Cross-cultural Studies]), Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Namun, sejak awal, konsepsi dilakukan secara bersama-sama dengan kolega-kolega kami dari lembaga-lembaga lain yang memiliki latar disiplin maupun agama yang berbeda pula. Kelebihan setiap upaya dialog ialah adanya kontrol langsung atas praduga-praduga yang mungkin dimiliki masing-masing orang tanpa disadari; kekurangan, kekeliruan, atau bahkan sekadar ketidaktepatan penggunaan kata, dapat segera ditunjukkan anggota lain untuk diperbaiki. Namun, seperti halnya setiap upaya dialog atau kolaborasi, hal ini memang berakibat pada lebih banyaknya waktu yang harus diberikan. Namun, tanpa itu juga, jika hanya satu orang

yang melaksanakan penelitian dan penulisan ini, kami yakin buku ini masih butuh jauh lebih banyak waktu untuk berada di tangan pembaca.

Untuk mengisi posisi koordinator dalam tim ini, CRCS mengundang J.B. Banawiratma yang telah lama terlibat dalam, serta menulis tentang, dialog, juga telah beberapa tahun membantu mengajar di CRCS, salah satunya matakuliah *Interreligious Dialogue*, dan kini aktivitasnya terpusat di Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), Yogyakarta. Matakuliah tersebut diampu bersama-sama dengan Fatimah Husein dari Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang juga turut terlibat dalam tim ini. Banawiratma menulis bab pertama dan terakhir, sedangkan Fatimah menulis Bab 2. Anggota lain adalah Zainal Abidin Bagir, Direktur CRCS-UGM (menulis Bab 6) dan Suhadi Cholil (menulis Bab 5)—ketika itu menjadi koordinator akademik CRCS-UGM. Keempat orang tersebut terlibat dalam tim sejak awal, Desember 2007, dan tidak hanya terlibat dalam penulisan buku ini, tapi juga dalam program pengembangan gugus studi Dialog Antaragama di CRCS yang akan dijelaskan di bawah.

Selain itu, tim penelitian dan penulisan buku ini juga dibantu oleh Mega Hidayati, lulusan CRCS yang kini menjadi mahasiswa doktoral di ICRS-Yogya (Indonesian Consortium of Religious Studies, merupakan konsorsium UGM, UKDW, dan UIN Yogyakarta). Pada Agustus 2008 Mega, yang menulis tesis master dan baru memulai disertasi doktoralnya mengenai dialog antaragama, harus meninggalkan Yogya untuk melaksanakan *sandwich program* doktoralnya di Union Theological Seminary, New York, di bawah Paul Knitter, teolog kondang dari AS yang telah banyak

menulis buku mengenai dialog. Tugas Mega mendukung tim peneliti dengan menyediakan bahan-bahan digantikan oleh Budi Asyhari, lulusan CRCS yang juga membantu beberapa penelitian di CRCS. Budi menjadi salah seorang pengumpul data yang tekun; rajin mencari literatur, mengontak beberapa lembaga, dan mewawancarai beberapa orang di Yogya dan Jakarta. Bersamaan dengan itu, Novita Rakhmawati, dia menyelesaikan S1 di Hubungan Internasional Universitas Indonesia dan ketika itu baru memulai menulis tesisnya mengenai dialog sebagai mahasiswa CRCS yang disponsori Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), bergabung ke dalam tim, khususnya menulis bagian mengenai dialog di Kemenlu (Bab 4). Ali Amin bergabung dengan CRCS pada Juli 2008 dan menuliskan Bab 3.

Untuk penulisan, pada awalnya masing-masing orang mengerjakan masing-masing bab lalu secara cukup intensif dibicarakan bersama untuk direvisi. Dengan demikian, setiap anggota tim telah meninggalkan jejaknya pada setiap halaman buku ini.

Penelitian untuk penulisan buku ini sendiri dimulai pada Desember 2007 dengan diadakannya beberapa pertemuan di antara anggota tim. Pencarian data literatur dan wawancara langsung secara esensial dibingkai oleh dua kali *Focussed Group Discussion* (FGD). Yang pertama berlangsung pada Januari 2008, ketika penelitian baru akan dimulai. FGD pertama itu sekaligus menjadi penggalian data awal, karena yang kami undang—dan hampir semuanya hadir—adalah tokoh-tokoh aktivis LSM, wakil akademik, dan pemerintah, yang telah lama terlibat dalam dialog dan dengan demikian menjadi bagian dari sejarah dialog di Indonesia. Hasil FGD kemudian ditindaklanjuti dengan

pencarian data serta wawancara, kemudian pada November 2008 untuk kedua kalinya kami mengundang beberapa orang untuk mengomentari draf yang telah disusun.

Kami benar-benar beruntung, dan bersyukur, bahwa hampir semua orang yang kami undang bersedia datang dan memberikan kontribusi luar biasa. Khususnya pada FGD pertama, kami melihat para peserta—yang sebagian besar sudah saling mengenal melalui aktivitas-aktivitas dialog—amat antusias, mungkin karena, meski dialog telah banyak dilakukan, jarang ada kesempatan untuk mengambil jarak dari aktivitas-aktivitas itu dan bersama-sama membicarakannya secara kritis. Sekitar setengah dari peserta FGD pertama kembali untuk mengikuti FGD kedua, sementara setengah lainnya adalah peserta baru yang kami undang untuk melihat lubang-lubang dalam draf pertama. Kehadiran para peserta FGD sangat esensial bagi penulisan buku ini; tanpa mereka, kisah yang disampaikan di sini tidak akan terjalin dengan cukup baik. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih tak terhingga bagi mereka (daftar peserta FGD terlampir). Ucapan terima kasih harus kami sampaikan pada beberapa lembaga dan narasumber yang kami hubungi di luar FGD, termasuk beberapa perpustakaan. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga untuk NZAid yang, setelah acara *Alliance of Civilizations* dan *Asia-Pacific Regional Interfaith Dialogue* ke-3 di New Zealand, menaruh perhatian besar pada upaya penulisan ini dan memberikan bantuan finansial.

Secara menyeluruh, penelitian dan penulisan buku ini adalah satu bagian dari program yang lebih besar. Aktivitas lain dalam program Desember 2007-2008 ini adalah revisi silabus matakuliah *Interreligious Dialogue* (namanya

kemudian diganti menjadi *Dialogue: Theories and Practices*) yang ditawarkan setiap tahun di CRCS. Hasil dari aktivitas tersebut ada di bagian akhir buku ini (lampiran).

Dalam lingkup yang lebih luas, upaya ini sendiri dilakukan dalam rangka pengembangan kurikulum CRCS. CRCS memiliki tiga gugus studi yang menjadi panduan untuk pengembangan kurikulumnya, yakni Hubungan Antaragama, Agama dan Budaya Lokal, serta Agama dan Isu-isu Kontemporer. Pada 2010, CRCS genap berusia 10 tahun, kiranya hal tersebut dapat menjadi momen penting yang menandai—setelah sekian lama berproses—pencapaian yang telah dibuatnya. Perbaikan kurikulum yang didasarkan hasil riset untuk masing-masing gugus tersebut, dan juga pada pengalaman 10 tahun pengelolaan CRCS, diharapkan akan menjadikan CRCS sebagai lembaga studi agama yang cukup kuat, dan sedikit banyak menyumbang kontribusi dalam pengembangan dialog antaragama di Indonesia, bahkan di dunia internasional.

Akhirnya, tidak berlebihan kalau kami harus mengulangi sekali lagi bahwa buku ini baru merupakan penelitian awal yang tidak lengkap, dan karena itu penting untuk dilanjutkan. Kalau buku ini bisa memberikan peta besar praktik dialog di Indonesia dan membantu pelaksanaan penelitian lebih lanjut, maka dapat kami katakan bahwa tujuan penulisan sudah tercapai.[]

Glosarium

ACRP : Asian Conference on Religion and Peace

Balibang Depag: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Agama

BKAUB : Badan Konsultasi Antar-Umat Beragama

CRCS : Center for Religious and Cross-Cultural Studies

CRWRC : Christian Reformed World Relief Committee

CSRD : Centre For Religious and Socio-Cultural Diversity

DC : Dialogue Center

Depag : Departemen Agama

Deplu : Departemen Luar Negeri

DGI : Dewan Gereja-gereja di Indonesia

DIAN/Interfidei: Institut Dialog Antar-Iman di Yogyakarta Indonesia/An Institute for inter-faith dialogue in Indonesia
DPKB : Desk Pengembangan Kehidupan Bergereja
eLalem : Lembaga Antar-Iman Maluku
EYID : The European Year of Intercultural Dialogue
FCHI : Forum Cendekiawan Hindu Indonesia
FKAUB : Forum Komunikasi Antar-Umat Beragama
FKUB : Forum Kerukunan Umat Beragama
GIMD : Global Intermedia Dialogue
GKJ : Gereja Kristen Jawa
HAK : Hubungan Agama dan Kepercayaan
IAIN : Institut Agama Islam Negeri
ICIS : International Conference of Islamic Scholars
ICMI : Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
ICRP : Indonesian Conference for Religion and Peace
ICRS : Indonesian Consortium for Religious Studies
IMM : Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
IRB : Ilmu Religi dan Budaya
IRM : Ikatan Remaja Muhammadiyah
ISAT : The International Scholars Annual Trialogue
ISKA : Ikatan Sarjana Katolik Indonesia
IUIAG : Indonesia-UK Islamic Advisory Group
KAMI : Komite Aksi Mahasiswa Indonesia
KCBI : Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia
Kemenag : Kementerian Agama
Kemenlu : Kementerian Luar Negeri

KMA : Keputusan Menteri Agama
KUB : Kerukunan Umat Beragama
KWI : Konferensi Waligereja Indonesia
LKiS : Lembaga Kajian Islam dan Sosial
LPKUB : Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama
LPKUB : Lembaga Pengkajian untuk Kerukunan Umat Beragama
Madia : Masyarakat Dialog Antaragama
Matakin : Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia
MAWI : Majelis Agung Waligereja Indonesia
MUI : Majelis Ulama Indonesia
NIFCON : The Network for Interfaith Concerns
PA : Perbandingan Agama
PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa
PCID : Pontificial Council for Interreligious Dialogue
PGI : Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia
PHDI : Parisada Hindu Dharma Indonesia
PIKI : Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia
PKUB : Pusat Kerukunan Umat Beragama
PLIP : Pusat Layanan Informasi Perempuan
PPKB : Pusat Penelitian Kehidupan Beragama
PPKI : Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PSAA : Pusat Studi Agama-Agama
PSAP : Pusat Studi Agama dan Peradaban
PT : Perguruan Tinggi
SEAGST : South East Asian Graduate School of Theology

SKB : Surat Keputusan Bersama
STAIN : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
STTh : Sekolah Tinggi Theologia
UIN : Universitas Islam Indonesia
UKDW : Universitas Kristen Duta Wacana
UKSW : Universitas Kristen Satya Wacana
USD : Universitas Sanata Dharma
Walubi : Perwakilan Umat Buddha Indonesia
WCRP : The World Conference on Religion and Peace
WFDD : World Faiths Development Dialogue
WI : Wahid Instititute
WMAUB : Wadah Musyawarah Antar-Umat Beragama

Bagian 1:
Landasan Teoretis dan Historis

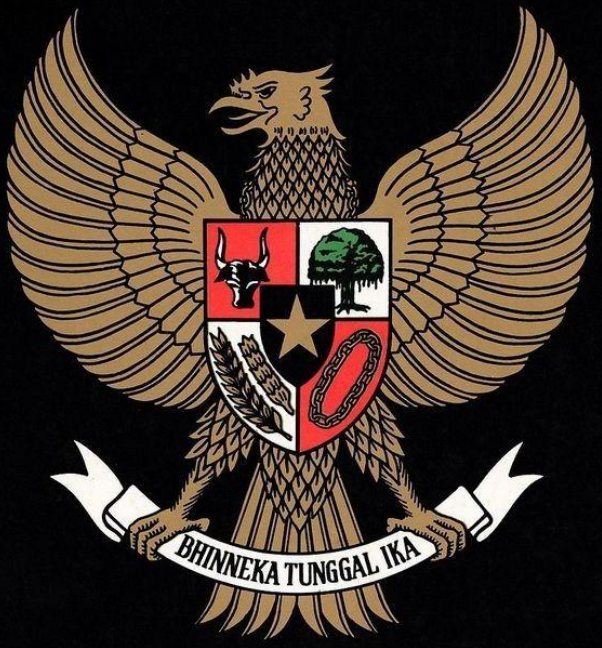

PANCASILA

KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

PERSATUAN INDONESIA

KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAK-SANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN

KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

1

Apa Itu Dialog?

Buku ini berusaha mengungkap realitas kontemporer dialog antarumat beragama (*interreligious dialogue*) di Indonesia, dan menelaah ke mana arahnya. Untuk itu, pertama-tama perlu kami tegaskan pengertian yang kami gunakan sebagai kacamata untuk membaca kenyataan dialog antarumat beragama di Indonesia. Sebelum bergumul dengan realitas itu, baik pula kita sadari pentingnya dialog antarumat beragama. Kemudian, perlu dikemukakan juga bagaimana kami mendekati realitas tersebut.

Dialog dalam Arti Apa?

Dialog antara umat Islam dan umat Kristiani di Indonesia dimulai pada 1969, demikian dikemukakan oleh almarhum Prof. Mukti Ali. Pada 1970, di Ajaltoun, Libanon, Sidang Dewan Gereja Sedunia mengadakan konsultasi mengenai

dialog antarorang beriman. Pada kesempatan itu dari Indonesia hadir A. Mukti Ali, yang membawakan makalah *Dialogue between Muslims and Christians in Indonesia and Its Problems*. Beliau mengatakan,

> Dialog antara Islam dan Kristen baru dimulai pada 1969. Inisiatif tersebut datang dari saya sendiri, dan setelah mendiskusikan hal tersebut dengan teman-teman Kristiani saya maka dialog tersebut berlangsung. Pada November 1969 pertemuan pertama dilaksanakan di sebuah Kolese Katolik, dihadiri oleh seorang Muslim (saya sendiri), dua orang Katolik dan tiga orang Protestan … Pada pertemuan kedua Bulan Desember, saya menyampaikan pemikiran–yang sebenarnya bukan merupakan makalah ilmiah–mengenai opini saya tentang (sikap) Vatikan terhadap umat non-Kristen, misalnya Yahudi, Muslim, dan lain-lainnya, tentang posisi Paus, dan sebagainya.[1]

Dialog antarumat beragama di Indonesia dalam buku ini menunjuk pada dialog sejak sekitar 1969 itu. Dialog antarorang beriman dan beragama yang berbeda memang sudah terjadi sejak mereka berjumpa. Kedatangan agama baru senantiasa bertemu dengan iman atau agama yang sudah ada sebelumnya. Perjumpaan itu telah mengantarkan dialog pada dataran yang berbeda-beda, bahkan hingga dataran teologis. Meski demikian, buku ini mempercakapkan dialog semenjak kurang lebih 1969, dengan kata lain semenjak dialog antar orang berbeda iman dan agama mendapat bentuk yang lebih terorganisir dan lebih institusional. Akhir 1960-an dan awal 1970-an di lingkungan Kristiani memang merupakan babak baru dalam memandang relasi dengan umat beragama lain. Sesudah Konsili Vatikan II

(1962-1965), Gereja Katolik Roma lebih mengusahakan dialog dengan umat beragama lain. Demikian pula dalam lingkungan Gereja-gereja Kristen Protestan semenjak diadakan Sidang Komite Sentral Dewan Gereja Sedunia (DGD) di Addis Ababa, Etiopia, 1971, yang mengeluarkan *Panduan Sementara untuk Dialog*.[2]

Buku ini hanya mengangkat dialog antara umat Islam dan umat Kristiani, karena di Indonesia dua kelompok inilah yang sering mengalami kesulitan satu dengan yang lain, dan juga yang menggulirkan usaha-usaha eksplisit untuk memperkembangkan dialog. Dengan fokus tersebut kami tetap menghargai dan memperhitungkan peranan saudara-saudari beragama dan beriman lain yang dengan cara masing-masing ikut serta mengembangkan hubungan antarumat beragama yang lebih baik dan lebih berarti.

Menurut Mukti Ali, dialog antarorang beriman yang dijalankan oleh para pengajar, dan bukan para politisi, secara pribadi lebih membuahkan hasil ketimbang dialog antarorang-orang beriman yang dijalankan secara formal pada tataran pemerintahan.[3] Meski demikian, pelbagai kelompok pada dataran organisasi kemasyarakatan atau institusi negara juga turut menggerakkan usaha dialog. Buku ini memperhatikan kenyataan itu dan berusaha mengungkap apa saja yang benar-benar memiliki potensi untuk mengembangkan dialog antarumat beragama.

Dalam buku ini, kami memakai kata agama (*religion*) dan iman (*faith*) yang meski masing-masing mempunyai pengertian dan nuansa berbeda, namun saling berhubungan. Sebagai konsekuensinya, kami menggunakan istilah *dialog antarumat beragama* atau *dialog lintas agama* (*interreligious dialogue*), dan *dialog antarumat beriman* atau *dialog*

lintas iman (*interfaith dialogue*). Istilah *iman* menunjuk pada pengalaman orang yang menyerahkan diri kepada Allah, kepada Yang Ilahi atau Yang Ultim, dan menghayati penyerahan diri itu secara individual maupun komunal. Istilah *agama* menunjuk pada sosialisasi dan institusionalisasi pengalaman keimanan tersebut, yang tampak dalam kehidupan komunitas, ajaran, dan ibadahnya. Sejalan dengan pengertian itu, dialog lintas iman dapat terjadi dengan, atau tanpa, melibatkan institusi agama. Dialog antariman atau *interfaith dialogue* dimengerti sebagai dialog antarumat berbeda iman yang dijalankan secara personal maupun secara komunal, sedangkan dialog antaragama merupakan dialog yang dijalankan oleh umat berbeda agama dengan lebih terorganisir dan secara langsung atau tidak langsung menyangkut institusi agama. Dialog antarumat beragama selayaknya juga memperkembangkan iman para pelakunya.

Dengan sadar kami memilih *Dialog antarumat Beragama: Gagasan dan Praktik di Indonesia* sebagai judul buku ini ketimbang *Dialog antarumat Beriman*. Istilah dialog antar iman muncul ketika istilah agama tidak lagi bermakna netral. Istilah agama ketika itu berada di bawah hegemoni pemerintah dan banyak digunakan dengan bobot dan untuk kepentingan politik Orde Baru. Penggunaan kata iman mengandung aspek dekonstruktif, yakni mau membebaskan diri dari hegemoni tersebut sehingga dapat menggulirkan suatu gerakan. Sekarang ini kami ingin merebut kembali istilah itu dan menempatkan istilah agama secara akademis. Iman yang menyangkut kepercayaan dan kepasrahan seseorang atau kelompok kepada *nilai akhir* tentu saja juga terkandung dalam agama. Namun, agama lebih terkait dengan komunitas beriman yang berinstitusi. Se-

bagai kenyataan sosial, agama mempunyai kecenderungan positif maupun negatif. Seluruhnya perlu ditempatkan secara wajar. Dialog tidak hanya menyangkut soal iman, dialog juga melibatkan institusi sosial, dan karena itu kami berbicara mengenai dialog antaragama.

Setiap usaha kami untuk mengungkap kenyataan dialog tidak terlepas dari pengertian yang kami miliki mengenai dialog itu sendiri. Martin Forward, misalnya, mengambil alih pengertian yang dikemukakan oleh Dewan Gereja Sedunia (World Council of Churches/WCC) 1971:

> Dialog dimulai saat orang-orang bertemu. Dialog bergantung pada pengertian timbal balik dan kepercayaan timbal balik. Melalui dialoglah dimungkinkan berbagi dalam melayani. Dialog menjadi medium untuk kesaksian yang otentik[4]

Di sini, dialog kami pahami dalam makna seluas-luasnya agar dapat menampung sebanyak mungkin potensi yang ada untuk dikembangkan. Ketika orang berbeda iman saling bertemu dan menyapa, di situ terjadi dialog antarumat beriman. Apa pun isi yang dikomunikasikan, dialog terjadi. Dialog antarumat beragama pertama-tama dilihat *dari bawah*, dari perjumpaan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Dengan pengertian itu, dialog yang secara eksplisit mengungkapkan isi iman dan agama tidaklah dikesampingkan, melainkan juga dikembangkan sesuai dengan fungsinya secara kontekstual.

Dialog yang berkembang *dari bawah* dapat digambarkan dengan tujuh dataran yang berhubungan satu sama lain. Dataran-dataran dialog itu dapat dilihat sebagai lang-

kah-langkah yang fleksibel dan dapat melompat. Dataran-dataran dialog itu juga dapat disebut momen-momen dialog sebab usaha dan tindakan berdialog umumnya tidak berangkat dari titik nol, ia juga dapat dilaksanakan pada dataran mana saja yang mungkin pada lingkungan dan waktu tertentu. Dataran-dataran atau momen-momen itu dapat digambarkan sebagai berikut:

(1) Dialog kehidupan
(2) Analisis sosial & refleksi etis kontekstual
(3) Studi tradisi-tradisi agama (saya sendiri dalam komunitas agama saya sendiri)
(4) Dialog antarumat beragama: berbagi iman dalam level pengalaman
(5) Dialog antarumat beragama: berteologi lintas agama
(6) Dialog aksi
(7) Dialog intraagama

Dataran-dataran itu dapat juga digambarkan sebagai lingkaran praksis, artinya sebagai gerak yang berangkat dari praksis yang sudah ada menuju praksis yang dikembangkan lebih lanjut. Lingkaran praksis itu tidak tertutup dan tidak berhenti, melainkan dapat menjadi proses berkelanjutan, sehingga dapat juga disebut sebagai spiral praksis.

Proses penafsiran kenyataan hidup melalui analisis sosial dan refleksi etis dapat juga diperdalam dengan penafsiran teks agama, dan dengan demikian lingkaran praksis ini juga merupakan lingkaran hermeneutik. Lingkaran praksis atau lingkaran hermeneutik tidak mulai dari titik nol;

ketujuh dataran itu bukanlah langkah-langkah yang harus dilalui semuanya, ia dapat dimulai dari mana saja dan dapat dilompati, misalnya dari dialog kehidupan sehari-hari (1) melalui analisis dan pertimbangan etis (2) melompat ke aksi (6). Dapat juga misalnya dari berbagi iman dalam level pengalaman (4) melompat ke aksi (6). Begitulah tujuh dataran ini merupakan medan dialog yang sangat fleksibel. Berikut ini keterangan singkat mengenai dataran-dataran tersebut.

Dialog pada dataran *pertama* disebut *dialog kehidupan.* Dialog itu terjadi dalam komunitas kecil yang menghadapi hidup keseharian bersama. Anggota-anggota komunitas laki-laki dan perempuan yang berbeda-beda agama saling mengenal satu sama lain. Mereka mempunyai keprihatinan bersama mengenai kebutuhan air bersih, mengenai wabah demam berdarah, perumahan yang sehat, pembelajaran dan pendidikan yang sesuai, lapangan kerja, dan sebagainya. Mereka mengalami kondisi kehidupan bersama dan saling berbagi segala suka dan duka, keteguhan dan kekuatiran, pengharapan dan kecemasan. Dalam dialog kehidupan itu, anggota-anggota komunitas hidup berdampingan dengan semangat kerukunan berkomunitas, bertetangga, dan berteman. Dari pengalaman hidup bersama itu munculah *kepedulian bersama*.

Pada dataran *kedua*, komunitas yang terdiri dari anggota-anggota berbagai agama itu mencoba mengartikan kenyataan hidup yang dialami dan membuat pertimbangan etis. Dengan kata lain, komunitas membuat *analisis sosial* dan merumuskan *pilihan etis dalam konteksnya*, menelaah faktor-faktor penyebab situasi tersebut dan hubungan antar faktor. Analisis sosial tidaklah bebas nilai, karena itu, perlu

disadari bersama nilai apa yang disepakati dan diperjuangkan dalam kelompok. Nilai-nilai itu misalnya kedamaian dan keadilan sosial, keadilan gender dan hak-hak asasi manusia, lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan; juga misalnya kepedulian bersama akan nilai mendahulukan kebutuhan anggota yang paling miskin dan menderita dalam komunitas. Pada dataran ini komunitas juga menentukan pilihan etis yang konkret sebagai bagian dari analisis sosial. Analisis sosial tersebut masih dapat diperdalam lagi dengan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan iman para anggota komunitas.

Pada dataran *ketiga*, para anggota kelompok *menggali tradisi iman masing-masing*. Momen ini penting karena pilihan etis orang beriman juga dilandasi dan diperkuat oleh sumber iman masing-masing. Pada dataran ini, orang beragama dapat menegaskan keyakinannya mengenai apa yang menjadi kehendak Tuhan atau apa yang sejalan dengan Yang Ultim. Dapat terjadi bahwa kepedulian baru dalam konteks yang baru membawa tantangan untuk memaknai ulang tradisi tertentu, atau bahkan menemukan kembali tradisi yang sudah dilupakan. Pada dataran ini kepedulian manusiawi yang diikuti analisis sosial dan pertimbangan etis secara eksplisit disadari sebagai kepedulian iman, *saya memahami kenyataan hidup dan panggilan etis ini dari mata iman saya*.

Pada dataran *keempat*, dialog terjadi dengan *berbagi pengalaman iman dalam komunitas lintas iman*. Berpangkal pada tradisi iman dan agama masing-masing, para peserta berbagi pengalaman iman dan kekayaan spiritual. Dengan cara itu para peserta saling memperkaya satu sama lain. Orang beriman terlibat dalam imannya sendiri dalam

keterbukaan terhadap tradisi-tradisi religius lain (*commitment and openness*). Mereka berbagi pengalaman doa, pengalaman kontemplasi, pengalaman mengenai cara-cara mencari, menemukan dan mengikuti Allah atau Misteri kehidupan. Melalui momen ini, umat beragama menghindari cara-cara manipulatif dan agresif dan sekaligus menimba kekayaan tradisi agama lain.

Pada dataran *kelima*, dialog terjadi dalam *pergumulan teologis lintas iman dan agama*. Teolog atau spesialis berbagai bidang dapat berbagi pemahaman dalam level ilmiah. Mereka mengkomunikasikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai warisan religius masing-masing seraya menghargai dan belajar dari pemahaman tradisi-tradisi lain. Pergumulan lintas iman dan agama diharapkan saling memperkaya dan juga dapat memunculkan pemaknaan ulang dan orientasi ulang tradisi dalam penghayatan iman aktual.

Dalam berbagi pergumulan teologis, proses historis setiap agama harus menjadi pertimbangan. Hal-hal yang masih perlu diteliti bahkan yang dicurigai perlu didiskusikan juga. Misalnya, suatu kelompok dapat mendiskusikan isu kristenisasi, islamisasi dan juga pandangan yang berbeda mengenai situasi sosial. Melalui pengalaman berbagi dan bersaksi, kelompok tersebut dapat lebih sadar bahwa interpretasi seseorang selalu terbatas; bahwa diperlukan proses dialog dan interpretasi ulang terus-menerus.

Hubungan antaragama yang terbuka dan jujur memerlukan landasan teologis yang terbuka pula. Keterbukaan dalam praktik dan teologi akan menyuburkan satu sama lain. Dalam mengembangkan teologi yang terbuka, umat beragama tidak hanya berpikir secara tekstual melainkan juga secara kontekstual. Dalam komunitas antaragama,

hal itu berarti melakukan komunikasi intertekstual dan interkontekstual secara kritis. Dengan demikian, apa yang diterima sebagai pesan yang diwahyukan melalui teks, diungkapkan dan diwujudkan dalam dialog dengan kehidupan sehari-hari, begitu pula panggilan dan pesan yang diterima dalam hidup sehari-hari diteguhkan melalui dialog dengan teks. Dengan cara itu, teologi-teologi kontekstual dapat lebih mendekati pengalaman inti dari iman dan perwujudannya secara bertanggungjawab di sini, saat ini.

Dataran *keenam* adalah *dialog aksi*. Dialog antaragama seharusnya mengkaji masalah-masalah sosial dan mengarah pada keterlibatan kemasyarakatan. Umat beragama tidak dapat menghindari kenyataan bahwa mereka merupakan bagian dari masyarakat dan politik. Harmoni antaragama tanpa kepedulian bersama untuk mengolah konteks sosial dan politik akan cenderung memelihara harmoni yang palsu dan tidak adil. Melalui dialog, aksi kelompok yang terdiri dari berbagai agama dapat memberdayakan rakyat dengan perspektif keadilan sosial, keadilan gender, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup. Di tengah-tengah kenyataan kultural, politis, dan ekonomis yang ambivalen, respons kontekstual berarti menegaskan afirmasi atau konfrontasi untuk menuju transformasi kehidupan sosial dan politik. Kelompok umat lintas agama dengan demikian menjadi komunitas yang melayani kepentingan umum, menjadi komunitas dialogis dan transformatif.

Sampailah kita pada dataran *ketujuh*, yakni *dialog intraagama.* Setelah menjalani macam-macam dataran dialog antariman atau setelah mengalami dialog lintas iman dan lintas agama, setiap orang kembali pada iman pribadinya. Pada dataran ini selayaknya terjadi otokritik. Kritik ter-

hadap penghayatan iman saya dapat berupa peneguhan, tetapi juga dapat berupa teguran. Hidup beriman dan beragama yang sudah diperkaya dapat memperbaharui diri dan menjadikan lebih hidup lagi. Umat beragama menjadi orang-orang beriman yang lebih baik secara personal dan komunal. Orang Islam menjadi Muslim yang lebih baik, orang Kristen menjadi Kristiani lebih baik, dan seterusnya. Sikap kritis terhadap diri sendiri dapat muncul sejak awal perjumpaan, tidak usah menunggu setelah semua dataran dialog pernah dilewati. Semakin mendalam perjumpaan lintas iman dan lintas agama, semakin mendalam juga perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam menghidupi iman dan agamanya sendiri.

Tentu saja dialog juga dapat dilihat sebagai tujuan menengah atau sebagai tujuan instrumental. Dialog bukan merupakan tujuan akhir, melainkan sesuatu yang dijalankan untuk mencapai tujuan selanjutnya. Namun, tujuan hidup bersama tidaklah dapat dicapai dengan baik tanpa keterlibatan semua pihak. Dalam cakrawala holistik, partisipasi dan rasa bagi keseluruhan merupakan keutamaan. Dengan demikian, dialog merupakan *gaya hidup* orang beriman dan beragama, merupakan sesuatu yang perlu dan harus dijalankan kalau seseorang atau komunitas mau setia kepada panggilan manusiawi dan ilahiah.

Berbagai dataran dialog *dari bawah* yang dijalani secara terbuka dan jujur akan memunculkan unsur-unsur yang penting untuk kehidupan bersama, yakni *pertobatan* dan *pengampunan*. Bertobat berarti menyadari kekurangan, kesalahan dan dosa yang telah dilakukan dan sekaligus percaya akan belaskasih dan pengampunan Ilahi yang tanpa batas. Pertobatan merupakan *pengharapan baru*, sebab orang

tidak terpenjara pada masa lalu, dan masa depan tetap terbuka. Kesediaan untuk mengampuni adalah tanda bahwa seseorang siap menerima pengampunan Ilahi yang tanpa batas. Sebaliknya, tidak bersedia mengampuni yang lain merupakan tanda bahwa seseorang tidak siap menerima belas kasih dan pengampunan Ilahi yang tanpa batas itu.

Pentingnya Dialog Antarumat Beragama

Pernyataan *orang Kristen dan Islam hidup rukun di sini*[5] dapat diucapkan di banyak tempat di Indonesia, bahkan sebagian besar umat Kristen dan umat Islam di Indonesia hidup rukun. Meski begitu, tidak berarti tidak ada masalah dalam hubungan antar komunitas agama di Indonesia, sebagian masalah bahkan berujung pada kekerasan, seperti dilaporkan dalam dua *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia* (untuk 2008 dan 2009) yang dikeluarkan Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), UGM. Kekerasan berskala besar seperti yang terjadi di Maluku dan Poso memang tidak terjadi lagi beberapa tahun belakangan ini, namun ketegangan-ketegangan masih terus berlanjut.

Persoalan menyangkut rumah ibadah, misalnya, masih menjadi ganjalan serius dalam hubungan antarkomunitas agama, khususnya Kristiani dengan Muslim. Setiap tahun masih tercatat belasan kasus menyangkut rumah ibadah, terutama menyangkut gereja, dan sebagian berupa kekerasan dalam bentuk penutupan paksa atau bahkan pembongkaran bangunan rumah ibadah. Telah ada peraturan yang diperbarui pada 2006 (Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006) untuk memastikan semua warganegara

mendapatkan hak beribadahnya, namun penegakan hukum seringkali tidak berjalan dengan baik.

Jenis ketegangan lain yaitu yang menyangkut meningkatnya wacana penyesatan, dan dalam beberapa kasus juga berakhir dengan kekerasan. Pada 2009 saja, *Laporan Tahunan* CRCS mencatat 25 kasus penyesatan dan 11 kasus lain khusus menyangkut pengikut Ahmadiyah. SKB yang dikeluarkan Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung pada Juni 2008 mengenai Ahmadiyah tidak menyelesaikan masalah, malahan mungkin memberi justifikasi terhadap tindak kekerasan oleh beberapa kelompok masyarakat atas para pengikut Ahmadiyah. Apa yang dialami Ahmadiyah itu hanyalah ekor dari kekerasan-kekerasan fisik yang telah mereka alami pada tahun-tahun terakhir ini.

Di luar ketegangan-ketegangan tersebut, masih ada masalah-masalah lain menyangkut hubungan antar maupun intra kelompok agama di Indonesia. Misalnya, kelompok-kelompok agama nonresmi (di luar enam agama yang diakui hukum Indonesia) maupun aliran kepercayaan masih mendapat diskriminasi secara hukum. Mereka memang bisa hidup di Indonesia, tapi pemerintah tidak memberikan perlindungan yang sama dengan perlindungan maupun bantuan yang diberikan kepada enam agama yang resmi diakui pemerintah (bahkan, bisa dikatakan, perlindungan hanya diberikan kepada kelompok arus utama dalam keenam agama itu, sementara kelompok-kelompok bukan arus utama tidak dilindungi, contohnya kasus Ahmadiyah dalam Islam atau Saksi Jehovah dalam Kristen).

Dari gejala-gejala umum tersebut, secara spontan kita dapat mengatakan bahwa membangun hubungan antaru-

mat beragama sangatlah mendesak bagi kehidupan bersama di Indonesia. Berbagai alasan dan pertimbangan dapat dikemukakan untuk menunjukkan betapa pentingnya dialog antarumat beragama.[6] Kita mulai dengan melihat *tuntutan sosiologis*. Tidak ada satu kelompok umat beragama mana pun yang mampu menyelesaikan masalah-masalah kehidupan bersama secara sendirian, sebab penyelesaian masalah yang ideal menuntut partisipasi seluas mungkin. Pilihan yang tersedia hanyalah membangun harmoni sejati yang kukuh atau membiarkan harmoni yang rapuh berkepanjangan.

Dari sisi *penalaran filosofis* (epistemologis), makin lama juga makin luas disadari bahwa pengetahuan manusia terbatas dan karena itu tidak masuk akal mengemukakan klaim absolut mengenai pencapaian manusiawi. Pengetahuan manusia akan berkembang kalau terbuka terhadap pandangan-pandangan yang berbeda. Tanpa sikap terbuka dan kritis, pengetahuan manusia menjadi gumpalan rumus beku yang akan semakin jauh dari kenyataan hidup.

Umat beragama masih mempunyai *alasan teologis* atau *alasan religius* untuk gerakan dialog antaragama. Agama sebagai institusionalisasi pengalaman iman merupakan kenyataan sosial yang terbatas. Allah atau Misteri kehidupan manusia yang paling dalam tidak pernah mampu dikuasai oleh institusi agama manusia. Kesetiaan untuk mendengarkan, mengikuti Allah, Yang Ilahi atau Misteri kehidupan menuntut keterbukaan terhadap pengalaman dan interpretasi mengenai Allah atau Misteri itu. Allah Umat Islam dan Allah Umat Kristen adalah Allah yang sama, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub dan Allah Isa. Pada akhir masa puasa Ramadhan 1428/2007, sejumlah 138 kaum in-

telektual dan ulama Muslim menulis surat *A Common Word* (*Pernyataan yang Sama, Kata Sepakat*) kepada umat Kristen. Dalam surat itu kita temukan landasan teologis lintas agama Islam, Kristen, dan Yahudi, yang disambut hangat oleh lebih dari 3000 pemimpin Kristiani:

> Walaupun Islam dan Kekristenan jelas merupakan agama yang berbeda dan walaupun tidak mungkin memperkecil beberapa perbedaan formal mereka jelas bahwa *Kedua Hukum yang Terutama* adalah area dengan dasar yang sama dan sebuah mata rantai antara Al Qur'an, Taurat, dan Perjanjian Baru. Yang menjadi pengantar Dua Hukum dalam Taurat dan Perjanjian Baru, dan yang menjadi sumber mereka, adalah Kesatuan Allah, bahwa hanya ada satu Allah. Karena *Shema* dalam Taurat dimulai: (Ulangan 6:4) *Dengarlah, hai orang Israel: Tuhan itu Allah kita, TUHAN itu esa!* Demikian juga, Yesus mengatakan: *Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa* (Markus 12:29). Demikian juga, Allah mengatakan dalam Kitab Suci Al Qur'an: *Katakanlah* ya Muhammad: *Dialah Allah yang Maha Esa/Allah yang dituju* (untuk meminta hajat). (QS al-Ikhlas [112]:1-2). Oleh karena itu Kesatuan Allah, mengasihi Dia, dan mengasihi sesama membentuk sebuah dasar yang sama di mana Islam dan Kekristenan (dan Yahudi) ditemukan.[7]

Setiap tradisi agama mengkomunikasikan dan memberikan kesaksian mengenai bagaimana mencari, menemukan, dan mentaati atau mengikuti Allah dengan setia. Setiap kelompok umat dapat saling membantu untuk menjadi beriman secara lebih mendalam. *To be religious is to be interreligious*.

Realitas Seperti Apa dan Ke Mana?

Semenjak maraknya kekerasan berwajah agama, gambar Indonesia dengan kemajemukan agama yang hidup rukun berdampingan secara harmonis telah rusak. Wajar saja jika orang menjadi skeptis tentang makna agama. Namun, dari kegiatan kita sehari-hari, kita tahu bahwa banyak hal sudah terjadi dalam dialog antaragama. Kita perlu mengetahui lebih luas agar dapat mempertimbangkan secara kritis apa saja yang telah dilakukan, kemudian belajar dari situ sehingga kita dapat mengembangkan gerakan selanjutnya. Untuk memetakan apa yang sudah terjadi secara lebih sistematis, pertanyaan-pertanyaan berikut akan menuntun kami menelusuri realitas yang ada.

(1) Dialog antarumat beragama macam apa yang terekam dalam sejarah Indonesia?
(2) Apa yang sedang terjadi dalam dialog antarumat beragama sekarang ini?
    (a) Praktik dialog antarumat beragama yang sudah dijalankan terletak pada dataran mana? (lihat 7 dataran; isu apa, masalahnya apa, tantangannya apa?)
    (b) Kursus yang sudah ada seperti apa? (silabus)
    (c) Matakuliah yang sudah ada seperti apa? (silabus)
    (d) Penelitian yang sudah ada mengenai apa? (tema, fokus)
(3) Mengapa dibuat seperti itu menurut lembaga dan orang yang bersangkutan?
(4) Bagaimana hal-hal tersebut dijalankan oleh lem-

baga dan orang yang bersangkutan?
(5) Selanjutnya, sikap manakah yang selayaknya diambil dan bagian manakah yang perlu dikembangkan?

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut kami berharap dapat memberikan pertimbangan bagi praktik yang dijalankan di Indonesia sekarang ini. Selain itu, kami bermaksud mengembangkan gugus perkuliahan dan penelitian dialog antarumat beragama dalam program studi kami pada Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Pertanyaan (1) akan kami jawab pada Bab 2. Jawaban atas pertanyaan (2)–(4) diuraikan pada Bab 3 dan 4 dengan menggunakan *kaca mata* yang kami uraikan di depan. Akhirnya Bab 6 berusaha menjawab pertanyaan (5).

Jalan untuk Mencari Jawaban

Kami tidak bertendensi untuk mengungkap segala-galanya yang ada di Indonesia, yang kami lakukan hanyalah sekadar menyajikan potret yang terbatas. Meski demikian, dengan potret terbatas itu, kami berharap dapat memberikan inspirasi kepada siapa pun yang peduli dengan gerakan dialog antarumat beragama.

Kami menduga bahwa semua dataran dialog sebagaimana digambarkan di atas telah terjadi di Indonesia, meskipun seberapa luas belum kita ketahui. Dengan kaca mata pengertian seperti kami uraikan di depan, kami akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas melalui studi yang terbatas. Di masa awal usaha penelitian kami pada Januari 2008, kami mengadakan *Focused Group Dis-*

cussion (FGD) untuk mendengarkan informasi dan pertimbangan yang dapat membantu usaha kami. Menjelang akhir penelitian, pada 17 November 2008, sekali lagi kami menyelenggarakan *Focused Group Discussion* untuk menambah informasi sekaligus mempertajam refleksi kami.

Dalam dua kali forum itu, hadir unsur-unsur dari Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan, dan juga Pemerintah. Unsur Perguruan Tinggi yang hadir pada waktu itu adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, Universitas Satya Wacana Salatiga, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, dan Center for Religious and Cultural Studies (CRCS) Universitas Gajah Mada Yogyakarta, serta Indonesian Consortium for Religious Sudies (ICRS). Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat yang hadir adalah DIAN/ Interfidei (Yogyakarta), Fahmina (Cirebon), LKiS (Lembaga Kajian Islam dan Sosial, Yogyakarta), Mitra Wacana (Yogyakarta), IFPA (Yogyakarta), dan PERCIK (Salatiga). Hadir pula unsur dari lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan, yakni NU, Muhammadiyah, KWI, dan PGI. Kemudian hadir juga unsur dari Pemerintah, yakni Kementerian Agama RI dan Kementerian Luar Negeri RI. Informasi dari FGD itu kami lengkapi dengan data-data yang disampaikan oleh lembaga-lembaga Satunama, ICRP, Wahid Institute, OASE INTIM (Makasar), Dialogue Centre (UIN Yogyakarta), dan CRSD (UIN Yogyakarta).

Pada akhirnya, kami merefleksikan sikap macam apa yang patut diambil dan pengembangan macam apa yang diperlukan. Selain itu, secara khusus kami mengemukakan hal-hal mana yang relevan untuk mengembangkan gugus

mata kuliah *Interreligious Dialogue,* serta penelitian-penelitian selanjutnya.[]

2
Menelusuri Dialog Agama dalam Sejarah

Bagian ini membahas tentang konteks historis munculnya dialog antarumat beragama. Secara khusus bagian ini akan mengurai fenomena dialog antaragama hingga saat ini untuk menemukan prinsip-prinsip umum dan kesimpulan historis, serta melacak peristiwa-peristiwa penting yang mendasari munculnya inisiatif dialog antarumat beragama tersebut. Perlu ditegaskan bahwa bagian ini menekankan pada konteks historis dialog antarumat beragama dan bukan pada praktik dialog antarumat beragama saat ini, yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya. Perhatian utama diberikan bagi konteks historis di Indonesia. Namun, sebelumnya akan dibahas beberapa pengalaman internasional dalam dialog antaragama yang, secara langsung atau tidak langsung, terkait dengan munculnya upaya dialog serupa di Indonesia. Dengan demikian, pembahasan dalam bab ini dibagi menjadi dua bagian: (a) pengalaman inter-

nasional dialog antarumat beragama, (b) dialog antarumat beragama di Indonesia yang mencakup pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO), dan komunitas akademik.

Dialog Antarumat Beragama: Pengalaman Internasional

Upaya dialog antarumat beragama pada level internasional sudah banyak dilakukan, baik oleh lembaga keagamaan, lembaga non keagamaan, pemerintah, maupun oleh individu yang memiliki dampak internasional. Bagian ini berupaya untuk membahas beberapa institusi penting yang telah bergerak dalam bidang dialog antarumat beragama. Pembahasan ini tentu saja tidak menafikan sejumlah upaya yang dilakukan lembaga dan individu lain yang belum disebut di sini.

Dalam komunitas Katolik, upaya-upaya awal untuk pengembangan dialog antarumat beragama dapat dilacak pada saat penunjukan Angelo Giuseppe Cardinal Roncalli sebagai Paus Yohanes XXIII pada 1958. Paus tersebut mengejutkan umat Katolik di dunia ketika meminta penyelenggaraan Konsili Vatikan II bagi Gereja Katolik Roma pada 1962. Dia menyatakan keyakinannya yang teguh akan perlunya Gereja Katolik untuk terlibat dalam dialog dengan gereja-gereja lain dan dengan tradisi serta ideologi di luar Katolik. Tidak mudah untuk mendapatkan jawaban pasti atas peristiwa apa yang mendasari munculnya pemikiran Paus Yohanes XIII tersebut. Namun meningkatnya jumlah pertukaran penduduk yang menganut berbagai agama melalui imigrasi ke beberapa negara—yang membuat jarak

antarumat beragama semakin dekat—dapat menjadi salah satu penjelasan atas hal itu. Alasan lain yaitu adanya tantangan yang semakin kuat atas misi Katolik.

Paus Yohanes memimpin sendiri sesi pertama pada Konsili Vatikan II dan menentukan arah bagi terbentuknya sebuah proyek dialog antaragama. Ketika beliau wafat pada 1963, proyek tersebut dilanjutkan oleh Cardinal Montini (Paus Paulus VI). Pada masa kepemimpinan beliaulah diterbitkan sebuah koleksi dokumen tentang dialog antaragama.[1]

Kelima teks penting yang dihasilkan pada saat itu adalah: *Lumen Gentium* (*Lights of the Nations*), *Nostra Aetate* (*In Our Times*), *Dei Verbum* (*On Divine Revelation*), *Gaudium et Spes* (*Joy and Hope*), *Ad Gentes* (*To the Nations*) dan *Dignitatis Humanae* (*Dignity of the Human Person*). Sebagian dari teks-teks tersebut berbicara tentang hubungan Kristen dengan agama lain, khususnya Islam, "Namun rencana keselamatan juga merangkum mereka, yang mengakui Sang Pencipta; di antara mereka terutama kaum Muslimin, yang menyatakan, bahwa mereka berpegang pada iman Abraham, dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal dan Maharahim, yang akan menghakimi manusia pada hari kiamat."[2] Selain itu, salah satu bagian dari *Nostra Aetate* menyatakan:

> Gereja juga menghargai umat Islam, yang menyembah Allah satu-satunya, yang hidup dan berdaulat, penuh belaskasihan dan mahakuasa, Pencipta langit dan bumi, yang telah bersabda kepada umat manusia. Kaum muslimin berusaha menyerahkan diri dengan segenap hati kepada ketetapan-ketetetapan Allah juga yang bersifat rahasia, seperti dahulu Abraham—iman Islam dengan sukarela

> mengacu kepadanya—telah menyerahkan diri kepada Allah. Memang mereka tidak mengakui Yesus sebagai Allah, melainkan menghormati-Nya sebagai Nabi. Mereka juga menghormati Maria Bunda-Nya yang tetap perawan, dan pada saat-saat tertentu dengan khidmat berseru kepadanya. Selain itu mereka mendambakan hari pengadilan, bila Allah akan mengganjar semua orang yang telah bangkit. Maka mereka juga menjunjung tinggi kehidupan susila, dan berbakti kepada Allah terutama dalam doa, dengan memberi sedekah dan berpuasa.[3]

Namun, di sisi lain, beberapa orang bersikap kritis dalam melihat kenyataan bahwa *tidak ada bagian dalam teks-teks tersebut yang memiliki konsep yang cukup matang tentang dialog antaragama*, atau yang *merujuk secara eksplisit kepada Islam*,[4] walaupun menyebut kata *muslim*. Sebagian lain berpendapat bahwa walaupun teks-teks tersebut mengindikasikan adanya perubahan sikap Katolik Roma atas Islam, namun ia tidak mendiskusikan masalah status Nabi Muhammad dalam hubungannya dengan umat Katolik,[5] dan tidak berupaya untuk menunjukkan bahwa *Islam itu sendiri merupakan jalan yang tepat dan valid menuju Tuhan*.[6]

Di samping pujian dan kritik yang disampaikan terhadap teks-teks Konsili Vatikan II tersebut, ketegangan antara konsep *misi* dan *dialog* belum terpecahkan. Dalam konteks itulah dokumen *The Attitude of the Church towards the Followers of Other Religions: Reflections on Dialogue and Mission in 1984* (*Sikap Gereja terhadap Pengikut Agama Lain: Refleksi atas Dialog dan Misi Tahun 1984*) dikeluarkan oleh Sekretariat Urusan Dialog Gereja (Church's Dialogue Office).

Ketika Paus Yohanes Paulus II naik tahta pada 1978, upaya-upaya untuk dialog antaragama berlanjut. Perhatian

Paus pada upaya dialog, khususnya antara kaum Muslim dan Katolik, tampak dalam pidato-pidato yang disampaikannya pada umat Islam dalam berbagai kesempatan, atau kepada uskup yang bertugas di negara-negara Islam.[7] Namun, sikap yang cukup positif terhadap Islam tersebut mulai dipertanyakan pada saat buku *Crossing the Threshold of Hope* dipublikasikan pada 1994. Ketika membahas tentang penolakan umat Islam atas ketuhanan Yesus, misalnya, Paus berpendapat bahwa dalam agama Islam Tuhan digambarkan sebagai sesembahan yang jauh, yaitu *Tuhan yang berada di luar dunia, dan bukanlah Tuhan yang selalu bersama kita*.[8] Lebih jauh dia membandingkan antara Kristen dan Islam dan berpendapat bahwa agama Islam *sangat jauh dari agama Kristen* baik secara teologis maupun antropologis.[9]

Institusi penting lainnya yang juga bergerak dalam bidang dialog adalah Pontifical Council for Interreligious Dialogue (PCID).[10] Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan Vatikan untuk mendiskusikan hubungan antara gereja Katolik dengan agama-agama dan umat beragama lain, maka pada 19 Mei 1964 didirikan Sekretariat Vatikan bagi agama-agama non-Kristen. Sejak Maret 1984 institusi tersebut dikenal dengan nama PCID. Setelah menjalani masa-masa kebingungan menyangkut arah kerja mereka, terutama ketika dihadapkan pada isu tujuan dialog, PCID lalu memfokuskan upaya mereka pada kaum Muslim melalui sebuah komisi khusus, dan melalui sebuah publikasi berjudul *Guidelines for a Dialogue between Muslims and Christians*,[11] yang bertujuan untuk menyediakan dasar bagi dialog antara umat beragama.

Selain istilah *interreligious dialogue*, kita juga mengenal konsep *trialogue*, yaitu hubungan antara tiga agama

Abrahamik: Yahudi, Kristen, dan Islam. Mulai 1978 sampai 1984, sebuah pertemuan semi tahunan yang diikuti oleh intelektual yang tergabung dalam kelompok Trialogue diadakan di Kennedy Institute of Ethics yang berada di Georgetown University, Amerika Serikat. Pertemuan tersebut menyediakan tempat bagi lahirnya *The International Scholars Annual Trialogue* (ISAT) pada 1989. ISAT terdiri dari sembilan intelektual dari berbagai tradisi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Setiap pertemuan dihadiri oleh para intelektual yang sama guna mengukur kemajuan berdasarkan kerja-kerja bersama yang telah dilakukan sebelumnya. Memang harus diakui bahwa dampak dari pendekatan riset dan dialog berjangka panjang terhadap hubungan antara tiga agama Semitis tersebut susah untuk diprediksi. Meski demikian, terdapat keyakinan bahwa tanpa pendekatan seperti itu, perkembangan yang positif dalam hubungan antara ketiganya tidak akan terwujud.[12] Namun saat ini kegiatan ISAT terhenti karena alasan dana. Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, ISAT mengadakan pertemuan di Indonesia pada 14-19 Februari 2000 yang membahas tema *Hubungan Agama-Negara dan Pengembangan Demokrasi*. Pertemuan tersebut menghadirkan para intelektual ISAT dan dua intelektual Islam dan Kristen, serta masing-masing seorang intelektual Hindu dan Buddha. Selain beberapa makalah yang dipresentasikan, diadakan juga beberapa acara publik yang diikuti oleh para intelektual yang tergabung dalam ISAT.

Gereja Anglikan mulai memasukkan diskusi tentang dialog antaragama dalam *Lambeth Conference Resolution* (*Resolusi Konferensi Lambeth*) pada 1968. Konferensi tingkat dunia yang berlangsung sekali setiap sepuluh tahun itu

merupakan pertemuan para uskup di bawah kepemimpinan Uskup Agung dari Canterbury di London tempat mereka dapat melakukan doa dan saling bertukar informasi.[13] Jika dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya resolusi yang dihasilkan lebih berkutat pada masalah-masalah internal, dalam pertemuan tahun 1968 tersebut dihasilkan dua keputusan tentang dialog antarumat agama. Di sini juga tidak ada penjelasan pasti mengapa isu dialog antarumat beragama muncul, namun dari dua resolusi yang dihasilkan kita dapat menangkap isyarat bahwa, dalam menghadapi perubahan dunia yang menghapuskan batas-batas, termasuk batas antarumat beragama, perhatian atas masalah tersebut menjadi niscaya.

Resolusi nomor 11 (*Christianity and Other Faiths*) dari Konferensi Lambeth mendorong gereja-gereja Kristen untuk memelihara hubungan yang positif dengan berbagai umat beragama dalam bidang aksi ekonomi, sosial, dan moral. Sedangkan Resolusi nomor 12 (*Religious Dialogue*) mendorong gereja-gereja Anglikan untuk mengimplementasikan upaya-upaya dialog antarumat beragama yang sudah ditangani oleh World Council of Churches dan organisasi lain, serta menyokong baik dalam hal sumberdaya manusia maupun secara finansial.

Konferensi Lambeth pada 1978 menghasilkan Resolusi nomor 37 (*Other Faiths: Gospel and Dialogue*) yang, antara lain, merekomendasikan pertukaran pikiran dan pengalaman secara terbuka dengan masyarakat berbeda agama. Gereja-gereja Anglikan menyadari bahwa mereka memang terlibat dalam beberapa kegiatan, termasuk evangelisasi, di tempat di mana banyak terdapat umat Hindu, Buddha, Tao, Kong Hu Cu, dan Islam. Sebab itu, konferensi terse-

but mendesak seluruh Gereja Anglikan untuk mendukung umat beragama dengan cara memahami atau bekerjasama dengan mereka jika memungkinkan.

Pertemuan berikutnya yang diselenggarakan pada 1988 menghasilkan rekomendasi yang lebih esensial untuk dialog antarumat beragama, khususnya antara Muslim, Kristiani, dan Yahudi. Resolusi nomor 20 (*Interfaith Dialogue*) merekomendasikan bahwa dialog dengan umat beragama lain harus dilaksanakan secara saling menghargai dan saling mempercayai. Selain itu, resolusi tersebut juga mendesak gereja-gereja Anglikan untuk berkontribusi dalam membantu umat beragama dalam mengembangkan upaya-upaya perdamaian, keadilan sosial, dan kebebasan beragama. Di samping itu, Resolusi nomor 21 (*Interfaith Dialogue: Jewish/Christian/Muslim*) dari konferensi tersebut merekomendasikan gereja-gereja Anglikan untuk melakukan dialog dengan kaum Yahudi dan Muslim atas dasar pemahaman bersama. Selain itu, Anglican Consultative Council mendapat rekomendasi untuk membentuk komite antarumat beragama yang akan bekerja dengan the Inter-Faith Dialogue Committee dari World Council of Churches.

Setelah resolusi-resolusi yang dihasilkan pada 1988 tersebut, the Network for Interfaith Concerns (NIFCON) dari Gereja-gereja Anglikan dibentuk pada 1993 dan menjadi salah satu dari jaringan yang bekerja dalam struktur gereja Anglikan. NIFCON, melalui *networking*, pertemuan, dan publikasi, mendorong terciptanya hubungan yang terbuka dan erat antara umat Kristiani dan umat beragama lainnya; terjadinya pertukaran berita, informasi, dan ide yang berhubungan dengan isu-isu antaragama antara berbagai

propinsi gereja-gereja Anglikan; dan berbagai aksi dengan mereka yang terlibat dalam ketegangan dan konflik. NIFCON juga memiliki tugas penting—yang dibebankan oleh Konferensi Lambeth pada 1998—untuk mempelajari dan mengevaluasi hubungan Islam-Kristen dan memberi laporan secara periodik kepada Anglican Consultative Council. Sebagai hasilnya, NIFCON menerbitkan *The Christian Muslim Digest* untuk memberikan informasi kepada komunitas Anglikan dan Muslim, dan menulis beberapa laporan tentang hubungan Muslim dan Kristiani di berbagai negara.[14]

Dalam komunitas Muslim, Mu'tamar al-ʿAlam al-Islami (World Muslim Congress) didirikan di Mekkah, Saudi Arabia, pada 1926.[15] Walaupun tujuan dari organisasi itu lebih terfokus kepada isu-isu sosial dan politik dan tidak secara langsung berhubungan dengan dialog antarumat beragama, namun, pada 1969, Sekretaris Jenderal Inamullah Khan sudah mengangkat isu dialog antarumat beragama, khususnya dengan Kristen. Hal ini dapat pula dipahami dalam konteks hangatnya perbincangan tentang Konsili Vatikan II. Pada 1982, organisasi tersebut terlibat dalam dialog dengan World Council of Churches terkait pendudukan Afghanistan oleh Uni Soviet. Saat ini dialog antarumat beragama sudah menjadi bagian dari program Mu'tamar. Hal yang menarik untuk dicatat di sini adalah pedoman yang dimiliki oleh Mu'tamar, yaitu:

> Menjadi seorang Muslim berarti menjadi juru damai, yaitu seorang yang secara terus menerus berupaya mencari jalan untuk mengatasi konflik dan memelihara keinginan baik untuk kehidupan bersama yang damai. Tuhan meng-

> hendaki kita untuk hidup dalam kedamaian dan harmoni bersama ciptaan-Nya.[16]

Institusi Islam lain yang bergerak dalam bidang dialog adalah Rabitat al-ʾAlam al-Islami (Muslim World League), didirikan di Mekkah pada 1962 dan memiliki sekitar 60 anggota dari berbagai dunia. Organisasi ini berdiri atas dasar anggapan bahwa banyak terjadi kesalahpahaman tentang Islam, terutama oleh nonmuslim, dan karena itu bertujuan untuk memberi penjelasan tentang Islam kepada umat beragama lain sehingga kesalahpahaman tersebut dapat diminimalisasi. Program yang dilakukannya termasuk mempublikasikan berbagai buku tentang Islam. Rabitat memberikan tanggapan yang sangat optimis terhadap pernyataan Konsili Vatikan Kedua tentang agama-agama lain (*Nostra Aetate*). Selain itu, Sekretaris Jenderal Rabitat, Dr Abdullah bin Abdul Mohsin al-Turki, mengatakan bahwa Rabitat bertujuan untuk menciptakan harmoni antarsesama manusia melalui prinsip keadilan, dan melalui aksi kebajikan.[17]

Jamʾiyya al-Daʾwa al-Islamiyya al-ʾAlamiyyah (The World Islamic Call Society) merupakan organisasi penting lainnya yang telah membahas isu tentang hubungan Islam-Kristen. Organisasi ini dibentuk di Libya pada 1972, dengan tujuan untuk melakukan berbagai kegiatan keagamaan, budaya, dan bidang sosial serta pendidikan. Jamʾiyya memiliki hubungan dengan berbagai institusi Kristen seperti Vatikan dan Pontifical Council for Inter-Religious Dialogue. Hal tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa dialog adalah cara yang paling tepat untuk memahami satu sama lain dalam rangka menciptakan perdamaian, persaudaraan sesa-

ma manusia, membangun peradaban, dan menghindari peperangan.

The World Conference on Religion and Peace (WCRP) didirikan pada 1970 di Kyoto, Jepang, untuk mengaktualkan potensi dalam rangka melakukan aksi bersama. Lebih dari 10.000 pemuka agama dari berbagai negara berkumpul dan menegaskan perlunya aksi bersama untuk menciptakan perdamaian. Isu-isu yang menjadi perhatian WCRP termasuk transformasi konflik, hak anak, isu tentang keamanan dan perdamaian, dan hak asasi manusia, yang kemudian diwujudkan dalam berbagai aktivitas terkait. Aktivitas terkini yang menjadi perhatian mereka termasuk rekonsiliasi di Irak, mediasi melalui dialog antara kelompok-kelompok yang berseteru di Sierra Leone, dan membantu anak-anak yang terkena dampak AIDS melalui *The Hope for African Children Initiave*.[18] Dalam lingkup regional, WCRP juga memiliki hubungan erat dengan berbagai institusi sejenis, termasuk Asian Conference on Religion and Peace (ACRP) dan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP).

Selain itu, pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, dialog Islam-Kristen dan antarumat beragama sudah jauh lebih berkembang dan mencakup isu-isu yang lebih luas. Pada 1998 sebuah proyek yang diinisiasi oleh James D. Wolfensohn, Presiden World Bank, dan Lord Carey, Uskup Agung Canterburry pada saat itu, serta pemuka-pemuka agama di dunia dibentuk dengan nama World Faiths Development Dialogue (WFDD). Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk memfasilitasi dialog mengenai kemiskinan dan pembangunan di antara masyarakat dari berbagai latar agama yang berbeda, serta antara mereka dengan lembaga-lembaga pembangunan internasional. Program-program-

nya termasuk lokakarya tentang *Iman dan Pembangunan*, serta beberapa seminar mengenai alternatif dari kapitalisme global.[19]

Saudi Arabia yang selama ini belum terlibat aktif dalam upaya-upaya dialog antarumat beragama mulai menunjukkan perubahan sikap. Hal itu ditandai dengan, misalnya, kunjungan Raja Abdullah bin Abdul Aziz ke Vatikan pada November 2007. Ketika itu beliau menjelaskan sikap toleransi Islam dan sikap Islam yang anti terorisme serta kekerasan. Selain itu, perbincangan yang masih hangat adalah rencana pendirian gereja di Saudi Arabia yang, menurut *The Times* pada 18 Maret 2008, memiliki sekitar sejuta umat Kristiani. Kita dapat saja berargumentasi bahwa sikap pemerintah Saudi Arabia yang mencoba mengakomodasi kebutuhan warganya yang nonmuslim diambil karena tekanan berbagai negara (terutama Amerika Serikat dan Vatikan) sehubungan dengan wacana hak asasi manusia. Namun, harus diakui bahwa Saudi Arabia pun harus menghadapi kenyataan perubahan yang terjadi begitu cepat saat ini, di mana sekat-sekat agama yang kaku dan yang ingin ditegakkannya tidak mungkin dapat dilakukan lagi. Sambutan Raja Abdullah yang disampaikan pada Konferensi Dunia tentang Dialog di Madrid, Spanyol (16-18 Juli 2008), jelas mengindikasikan bahwa Saudi Arabia telah masuk dalam arena dialog antarumat beragama:

> Sahabat-sahabatku yang terhormat: saya datang kepada Anda dari tempat yang dekat dengan hati semua Muslim, tanah tempat Dua Masjid Suci, membawa sebuah pesan dari dunia Islam, yang mewakili para sarjana dan pemikirnya yang belum lama ini bertemu dalam lingkup Baitullah. Pesan ini menyatakan bahwa Islam merupakan

> sebuah agama yang tidak berlebih-lebihan dan bertenggang rasa; sebuah pesan yang menyerukan bagi dialog konstruktif di antara umat beragama; sebuah pesan yang berjanji membuka sebuah halaman baru bagi umat manusia yang di dalamnya, Insya Allah, musyawarah akan menggantikan konflik.[20]

Era teknologi informasi juga mulai memberikan warna lain bagi metode dialog antaragama. Pihak-pihak yang sebelumnya sulit, atau bahkan mustahil, untuk bertemu di dunia nyata dapat berdialog dengan leluasa di dunia maya melalui kecanggihan teknologi internet. Beberapa saat yang lalu muncul *Faithbook*, yang diluncurkan di *Facebook* dan merupakan gagasan sebuah organisasi Yahudi Inggris untuk mempertemukan orang dari berbagai latar belakang kepercayaan dan agama melalui internet. Uniknya, *Faithbook* yang bertujuan untuk memerangi ekstremisme keagamaan ini juga didukung oleh Muslim Institute London yang merupakan organisasi Muslim terkemuka di Inggris. Menurut Direktur Muslim Institute, Ghayasuddin Siddiqui: "Tanpa menghiraukan muatan budaya apa pun yang kita bawa, latar rasial atau keyakinan yang kita ikuti, kita harus mengakui bahwa pencipta kita adalah sama apa pun kita menyebut-Nya."[21]

Forum lain yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) adalah Alliance of Civilizations yang didirikan pada 2005 atas inisiatif pemerintah Spanyol dan Turki. Tujuan dari lembaga tersebut adalah untuk memperbaiki pemahaman dan hubungan kerjasama antarumat manusia dari berbagai latar budaya dan agama, serta membantu memerangi kekuatan yang akan menimbulkan polarisasi dan ekstremitas. Perhatian secara khusus diberikan kepada

upaya untuk mempromosikan pemahaman dan rekonsiliasi antara masyarakat *Muslim* dan *Barat*. Hal itu dapat dipahami dalam konteks situasi dunia pascapemboman di WTC Amerika Serikat pada 11 September 2001 yang membuat hubungan Barat dengan Muslim menjadi cukup kompleks. Pada April 2007, Sekretaris Jenderal PBB menunjuk Jorge Sampaio, mantan Presiden Portugal, sebagai Wakil Utama (*High Representative*) dari aliansi yang beranggotakan wakil-wakil lebih dari 85 negara. Melalui peran Sampaio, aliansi itu bekerja untuk membangun dasar bagi dialog antara masyarakat agama, politisi, media, dan sipil dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan aliansi melalui berbagai pengaruh yang mereka miliki. Aliansi tersebut bekerja dalam empat area yaitu: kaum muda, media, pendidikan, dan migrasi.[22]

Satu hal terakhir yang menarik untuk disebut di sini adalah dijadikannya 2008 sebagai tahun dialog antarbudaya Eropa (*The European Year of Intercultural Dialogue* [EYID]). Hal tersebut secara nyata didasari kenyataan bahwa Eropa kontemporer menjadi semakin beragam dalam hal budaya akibat pemekaran Uni Eropa, deregulasi peraturan ketenagakerjaan, dan globalisasi. Sebab itu muncul kebutuhan mendesak untuk menciptakan dialog antarbudaya (tentu saja mencakup umat beragama di dalamnya) yang menyiratkan penghargaan atas diversitas tersebut. EYID diwarnai oleh berbagai kegiatan dalam bidang pemuda, media, kewarganegaraan, pendidikan, dan budaya yang diselenggarakan di Eropa dan beberapa kegiatan pada level nasional di masing-masing negara anggota yang didukung oleh Uni Eropa.[23]

Dialog Antarumat Beragama: Pengalaman Indonesia

Sejarah dialog antarumat beragama di Indonesia mencakup rentang waktu yang cukup luas dan spektrum yang cukup beragam. Namun, sebagaimana disebutkan dalam Bab 1, buku ini membatasi pembahasannya pada dialog yang dimulai sejak sekitar 1969, atau sejak dialog antarumat beragama mendapat bentuk yang lebih terorganisasi dan lebih institusional, terutama antarumat Islam dan Kristen. Di antara pelaku-pelaku dialog antarumat beragama, bagian ini akan menjelaskan tiga kelompok, yaitu pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga akademik (perguruan tinggi).

Upaya Pemerintah

Upaya dialog antaragama yang dilakukan oleh pemerintah, terutama pada masa Orde Baru, tidak dapat dilepaskan dari konteks politik pada masa tersebut. Sebagaimana indikasi yang ditunjukkan, pemerintah mengambil jalan netral dalam konteks hubungan antarumat beragama, khususnya Muslim dan Kristiani, yang ditandai dengan ketidakharmonisan atau bahkan konflik. Dalam diskusi di bawah ini kita akan melihat secara kritis konteks munculnya dialog antarumat beragama yang diupayakan oleh pemerintah.

Musyawarah Antaragama

Dalam sejarah Indonesia, kita mengetahui bahwa setelah perang kemerdekaan berakhir, pada 1950-an dan awal 1960-an, Partai Komunis Indonesia mendapat dukungan besar dari Presiden Soekarno. Setelah peristiwa kudeta 1965, ke-

tika masyarakat Indonesia harus memilih salah satu agama yang diakui pemerintah, gereja-gereja dibanjiri oleh orang-orang yang baru saja memeluk Kristen. Hal itu menimbulkan paling tidak dua masalah bagi hubungan antarumat beragama, terutama Muslim dan Kristiani. Pertama, berkembangnya anggapan bahwa gereja telah memberikan tempat perlindungan bagi anggota PKI, dan kedua, meningkatnya jumlah pemeluk Kristen dan gereja di Indonesia, terutama di pulau Jawa.[24] Hal ini, walau dapat dilihat sebagai peristiwa yang dapat memicu konflik, belum menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara umat Muslim dan Kristiani, hingga pecah peristiwa Meulaboh.

Pada Juni 1967, sebuah gereja di Meulaboh, Aceh Barat, dan di Sumatera Selatan dibakar oleh penduduk Muslim setempat. Pembangunan gereja tersebut diyakini didukung oleh, antara lain, penduduk keturunan Tionghoa yang baru memeluk Kristen. Kemarahan kaum Muslim dipicu oleh kenyataan bahwa gereja tersebut dibangun di tengah pemukiman kaum Muslim yang hanya dihuni oleh sejumlah kecil umat Kristiani. Pada 1 Oktober 1967, kekerasan lain terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Beberapa pemuda Muslim merusak sekitar 20 gereja dan sekolah Katolik dan Protestan, serta membakar puluhan Injil. Kejadian itu dianggap dipicu oleh seorang guru Protestan, Mangunbahan, yang membuat pernyataan yang menghina agama dan umat Islam.[25]

Setelah peristiwa Makassar tersebut, pada 17 Oktober 1967 Komite Aksi Mahasiswa Indonesia/KAMI mengirim surat terbuka kepada Pejabat Presiden Soeharto agar menghentikan konflik tersebut dengan cara membentuk sebuah lembaga konsultasi untuk mendiskusikan toleransi antaru-

mat beragama. Selain itu, Mar'ie Muhammad, ketua KAMI saat itu, meminta pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur peliputan pers atas peristiwa konflik. Soeharto kemudian memperingatkan seluruh umat beragama untuk waspada atas upaya PKI yang berupaya memecah belah masyarakat Indonesia.[26]

Beberapa minggu setelah insiden tersebut, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mengadakan kongres ke-6 di Makassar. Soeharto menegaskan bahwa pertemuan tersebut dapat dijalankan untuk menunjukkan bahwa kondisi keamanan di Makassar sudah terkendali. Dalam pertemuan tersebut ditegaskan bahwa umat Kristen harus berupaya untuk menjaga praktik keagamaan yang damai di seluruh wilayah Indonesia. Meski begitu, PGI tetap dengan tegas mengatakan bahwa mereka harus menyebarkan Kitab Injil dan harus menerima segala risiko dari hal tersebut.[27]

Dalam konteks isu penyebaran agama inilah Musyawarah Antaragama dilaksanakan di Jakarta pada 30 November 1967 atas prakarsa pemerintah. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Menteri Agama, K.H.M. Dachlan, dan dihadiri oleh sekitar 20 tokoh Muslim, Protestan, dan Katolik. Dalam pidatonya, Soeharto menegaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan respons atas ketegangan dan konflik agama yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Lebih jauh dia memperingatkan bahwa tidak ada satu kelompok umat beragama pun yang boleh mengajak umat beragama lain untuk mengikuti agama mereka. Namun, pertemuan tersebut tidak dapat menghasilkan satu kesepakatan mengenai dakwah kepada penganut agama lain.[28]

Sejak itulah pemerintah, melalui Kementerian Agama, memperkenalkan peraturan tambahan mengenai hubungan

antarumat beragama. Pada 1969, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri menandatangani Surat Keputusan Bersama (No. 01/BER/MDN-MAG/1969) mengenai *pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadah agama oleh para pemeluknya*. Peraturan tersebut didasari, antara lain, pemikiran bahwa pemerintah perlu menjaga kebebasan setiap warga untuk memeluk dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Di antara peraturan yang penting adalah bahwa kepala daerah harus memonitor propaganda dan ibadah para pemeluk agama sehingga tidak terjadi konflik. Selain itu, kegiatan tersebut tidak boleh mengandung unsur intimidasi, penyuapan, pemaksaan, atau ancaman, dan tidak boleh mengganggu keamanan umum. SKB tersebut juga menegaskan bahwa pembangunan rumah ibadah apa pun harus mendapatkan izin dari gubernur propinsi atau pihak lain yang ditunjuk untuk mengatur masalah tersebut.[29]

Model dialog seperti di atas yang berdasar pada asumsi bahwa upaya hubungan antarumat beragama menjadi tanggungjawab para pemuka agama, dan bahwa upaya tersebut menekankan pada penjagaan jumlah pemeluk agama, telah menempatkan dialog pada komunikasi yang tidak produktif. Sunardi menegaskan bahwa hal itu disebabkan karena isu agama direduksi menjadi isu *penyebaran agama* dan harmoni yang dipromosikan oleh pemerintah dipahami sebagai tidak adanya konflik, bukan sebagai tanggungjawab bersama.[30]

Kementerian Agama dan Dialog Antarumat Beragama

Di atas telah disebutkan bahwa Musyawarah Antaragama pada 1967 tidak menghasilkan kesepakatan, terutama karena perwakilan gereja tidak bisa menyepakati butir-butir tertentu tentang penyebaran agama kepada orang yang sudah beragama. Tetapi, bahwa dialog itu merupakan sejarah awal pemerintah (Depag) dalam usaha merukunkan umat beragama merupakan hal yang patut dicatat dalam sejarah praktik dialog antarumat beragama. Wacana kerukunan umat beragama baru mendapatkan perhatian pada masa itu.

Konsep kerukunan yang dipahami dalam artian masing-masing pemeluk agama menahan diri dari *membujuk* penganut agama lain untuk masuk ke agamanya sendiri menjadi orientasi awal program dialog antarumat beragama zaman Orde Baru. Meski gagal di pertemuan awal, Menteri Agama K.H.M Dachlan dan penggantinya terus mengupayakan pertemuan tokoh-tokoh agama, konsultasi, dan upaya lainnya. Konsep tersebut menjadi jelas dalam istilah yang digunakan oleh Menteri Agama Mukti Ali (1971-1978), yaitu *agree in disagreement* (setuju dalam perbedaan). Mukti Ali, yang menempuh pendidikan S2-nya di McGill University Montreal, Canada, di bawah bimbingan Wilfred Cantwell Smith, memiliki perhatian khusus terhadap isu hubungan antarumat beragama. Bahkan sejak 1960-an pun dia sudah mulai memperkenalkan ide dialog antaragama di Yogyakarta.[31] Rintisan Mukti Ali tersebut sangat terkait dengan usaha Orde Baru dalam percepatan stabilitas sosial untuk pembangunan nasional. Dengan konsep tersebut, pemerintah (Depag) menginginkan masyarakat melupakan perbedaan dan lebih berfokus kepada kepentingan bersama, yakni pembangunan.

Dalam berbagai upaya yang dia lakukan, terkait dialog antaragama dan antarumat beragama, Mukti Ali mendapatkan kritik dari beberapa kalangan karena konsep yang ditawarkannya dianggap hanya menyentuh level politis dan psikologis masyarakat.[32] Klaim itu mungkin tidak sepenuhnya benar. Pada level wacana, Mukti Ali yang menawarkan konsep *agree in disagreement* ini mungkin memang menawarkan konsep dialog antaragama yang hanya dipahami kalangan masyarakat tertentu, tetapi melalui berbagai aktivitas *kerukunan hidup beragama* selama masa kementeriannya, dia menawarkan beberapa langkah praktis.[33] Sebagai contoh pada 1977, Kementerian Agama mengadakan Program Kerjasama Sosial Kemasyarakatan (*camping*) di Jakarta and Medan. Sekitar 10 orang mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 10 mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi, dan 10 mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara terlibat dalam diskusi mengenai isu-isu keagamaan yang dilanjutkan dengan program sosial untuk membantu masyarakat sekitarnya. Selain itu, pada 1972-1977, kementerian agama telah menyelenggarakan 23 pertemuan dialog antaragama yang berlangsung di 21 wilayah Indonesia yang melibatkan berbagai pemuka agama, pemerintah, dan kepercayaan lokal, serta mengadakan program latihan penelitian agama yang menghadirkan orang dari berbagai latar agama dalam satu forum selama 3 bulan. Namun program-program tersebut pun tidak lepas dari kritik, terutama menyangkut hasil akhir dan tindak lanjutnya.[34] Mukti Ali sendiri pun mengakui bahwa dialog antarumat beragama yang dijalankan oleh para pengajar secara pribadi lebih membuahkan hasil daripada yang dijalankan secara formal pada dataran pemerintahan.[35]

Pada masa awal Orde Baru, pemerintah menciptakan sebuah sistem yang memungkinkan mereka untuk secara lebih mudah mengetahui suara resmi masyarakat agama tertentu melalui wadah-wadah perwakilan keagamaan yang ada, seperti MUI, KWI, dan PGI. Paradigma Orde Baru adalah persatuan dan kesatuan. Kebijakan dengan menitikberatkan pada kerukunan dengan membatasi ekspresi perbedaan dan menomersatukan *persatuan* demi pembangunan tersebut dilanjutkan oleh menteri-menteri Orde Baru setelah Mukti Ali.

Alamsyah Prawiranegara (1978-1983), seorang militer, menggantikan posisi Mukti Ali. Obsesi pemimpin Orde Baru untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri baru menuntut terwujudnya kondisi sosial yang sangat stabil, dan Alamsyah dianggap sangat cocok menjadi tulang punggung presiden dalam mensosialisasikan kepentingan Orba tersebut dalam bidang agama. Untuk itu dia mengeluarkan dua Surat Keputusan (SK), yaitu SK No. 70/1978 and SK No. 77/1978, yang diperkuat dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1/1979.[36] SK 77/1978 membatasi bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia. SK tersebut mengatur bahwa bantuan hanya boleh diberikan dengan persetujuan atau rekomendasi dari Menteri Agama. Selain itu, sejalan dengan arah pembangunan keagamaan di Indonesia, SK tersebut juga mengatur bahwa keterlibatan orang-orang asing harus dibatasi.[37] Karena SK itu ditujukan kepada semua agama yang diakui oleh pemerintah, maka tidak hanya umat Kristen yang terkena dampaknya, namun juga umat Islam yang menerima bantuan dari Timur Tengah.

Selain itu, dalam tugasnya menyukseskan program Kerukunan Umat Beragama, Alamsyah Prawiranegara memperkenalkan konsep trilogi kerukunan (tri kondial), yaitu: (a) kerukunan internal antara berbagai aliran dalam satu agama tertentu; (b) kerukunan antaragama; (c) dan kerukunan antara berbagai agama dengan pemerintah.[38] Ketiga poin tersebut tidak terlepas dari konsep *penyeragaman* Orde Baru demi stabilitas nasional di mana perbedaan dianggap sebagai potensi konflik yang mengancam program pembangunan.

Tap MPR Tahun 1983 tentang asas tunggal Pancasila bisa dianggap sebagai puncak usaha Orba dalam hal penyeragaman. Pada masa Alamsyah, dan diperkuat oleh Munawir Sadzali, setiap organisasi politik dan masyarakat wajib mencantumkan Pancasila sebagai dasar gerakannya. Alamsyah bergerak ke kantong-kantong Islam untuk meyakinkan masyarakat dan para pemimpin Islam bahwa ide asas tunggal itu tidak bertentangan dengan Islam. Alamsyah menjadi juru bicara pemerintah dalam menekankan pentingnya *common platform* sebagai satu kesatuan bangsa dan negara. Alamsyah, misalnya, mengunjungi kiai-kiai karismatik untuk meyakinkan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Jika pada masa Mukti Ali dialog antaragama berorientasi pada intra dan antarumat beragama yang saling bertentangan, maka hal yang baru pada masa Alamsyah adalah upaya pemerintah untuk mengontrol agama lewat kerjasama dan kerukunan antaragama (terutama organisasi agama Islam) dengan pemerintah.

Selain itu, pada masa Alamsyah juga, Wadah Musyawarah Antar-Umat Beragama, yang pertama kali diusulkan pada 1967, dibentuk pada 1980 melalui SK No. 35/1980.

Wadah tersebut terdiri dari para pemimpin organisasi keagamaan (MUI, MAWI, DGI, Walubi dan PHDI) yang kemudian menyetujui untuk menandatangani pedoman dasar bagi hubungan antarumat beragama. Keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh wadah tersebut memiliki nilai moral yang mengikat dan digunakan sebagai saran atau rekomendasi bagi pemerintah dan masyarakat luas.[39] Wadah Musyawarah Antar-Umat Beragama cukup aktif dalam merespons berbagai kejadian, terutama yang berkaitan dengan hubungan antarumat beragama di Indonesia.[40] Namun, satu hal yang menjadi kritik atas upaya dialog yang dilakukan oleh Alamsyah adalah perbedaan penekanan yang dilakukannya dibanding dengan apa yang dilakukan oleh Mukti Ali. Djohan Effendi mengatakan bahwa jika Mukti Ali percaya bahwa kerukunan antarumat beragama harus dilakukan melalui dialog, maka Alamsyah menekankan pada pentingnya dialog melalui penciptaaan peraturan.[41]

Munawir Sjadzali menggantikan Alamsyah Prawiranegara pada 1982, namun kurang memberikan perhatian pada isu dialog antarumat beragama. Dia memang mengundang tokoh-tokoh agama yang tergabung dalam Wadah Musyawarah Antar-Umat Beragama pada 1983, namun dengan tujuan untuk membicarakan keinginan pemerintah untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Pada era keemasan Orde Baru, 1980-an, Munawir Sjadzali tidak lagi bertugas secara khusus (meski meneruskan) untuk mendamaikan hubungan antarumat beragama dan dengan pemerintah, tapi dia lebih mengemban misi modernisasi umat Islam. Di masa perekonomian Indonesia sedang subur, umat Islam, sebagai masyarakat mayoritas, dianggap perlu lebih digarap agar tidak menjadi *penghalang*, tetapi

sebaliknya menjadi pendukung utama program pembangunan. Sehubungan dengan maraknya oposisi terhadap pemerintah dari pihak Islam karena stereotip yang beredar di kalangan pemerintah (kelompok militer nasionalis, dan Kristen), diperlukan program yang bisa lebih memberdayakan umat Islam.

Proyek modernisasi Munawir tidak lain merupakan pengangkatan citra umat Islam ke pentas bernegara secara nasional. Beberapa strategi yang dia lakukan termasuk pengembangan sistem pendidikan Islam, program pembangunan madrasah-madrasah Aliyah Khusus, dan pengembangan kurikulum pendidikan di perguruan tinggi IAIN dengan, antara lain, mengirimkan dosen-dosen agama ke Eropa dan Amerika. Munawir, bagi banyak kalangan, bisa disebut sebagai menteri *modernisasi* Islam. Meski program Munawir sangat berarti positif bagi sebagian masyarakat Muslim, tetapi dalam kebijakan kerukunan umat beragama kita dapat melihat bahwa dia ikut mengembangkan kebijakan Orde Baru sebagaimana diuraikan di atas.

Di akhir pemerintahan Orba, dua Menteri Agama, Tarmizi Taher dan Quraish Shihab, lebih mempunyai posisi meneruskan capaian Munawir. Tarmizi Taher, yang menjabat sebagai Menteri Agama pada periode 1993-1998, sangat aktif dalam mempromosikan kerukunan umat beragama di Indonesia ke berbagai penjuru dunia. Dia menerbitkan buku dalam bahasa Inggris berjudul *Aspiring for the Middle Path: Religious Harmony in Indonesia*.[42] Di samping mengundang tokoh-tokoh agama dunia ke Indonesia, Tarmizi melakukan banyak lawatan ke luar negeri untuk memperkenalkan dan mempromosikan kedamaian dan kerukunan yang telah dibangun Orde Baru berdasar-

kan Pancasila. Tarmizi yakin bahwa apa yang dicapai di Indonesia bisa dijadikan contoh tentang kerukunan di dunia internasional. Namun, upaya-upaya tersebut dapat dianggap lebih sebagai respons atas berbagai insiden dan konflik yang terjadi di Indonesia pada awal 1990-an, ketimbang usaha yang murni bagi keberlangsungan dialog antarumat beragama di Indonesia.

Pada masa Tarmizi Taher juga didirikan Lembaga Pengkajian untuk Kerukunan Umat Beragama (LPKUB) di Yogyakarta. LPKUB didirikan pada 1993 untuk membangkitkan kembali aktivitas dialog yang dilakukan sebelumnya oleh Kementerian Agama. Namun, LPKUB didirikan bukan sebagai lembaga *fungsional* yang mengurusi hubungan lintas agama, melainkan sebatas penelitian mengenai hubungan antaragama yang tidak berhubungan langsung dengan lembaga keagamaan dan kemasyarakatan. LPKUB melakukan berbagai aktivitas dialog dan menerbitkan jurnal berbahasa Inggris *Religiosa*. Di penghujung 1990-an LPKUB terlibat dalam beberapa konflik internal dan menghentikan aktivitasnya sejalan dengan berhentinya dana dari Kementerian Agama untuk membiayai kegiatan-kegiatannya.

Uraian di atas menegaskan bahwa pada masa Orde Baru, berbagai kebijakan bertujuan untuk dapat mengontrol kehidupan umat beragama agar tidak terlibat secara politis dan tidak terlibat konflik yang dapat merongrong kekuasaan Orde Baru, serta untuk mendapatkan dukungan dari para pemuka agama. Dengan demikian, pemerintah tampak kurang tertarik untuk mengupayakan suasana dialog antarumat beragama yang didasarkan pada penyebaran nilai-nilai keadilan secara serius dan berkesinambungan.

Pasca-Orde Baru, upaya-upaya untuk kerukunan antarumat beragama juga terus berlanjut. Di bawah kementerian Maftuh Basuni beberapa program dialog multikulturalisme dijalankan. Selain itu, bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama mengeluarkan Peraturan Bersama nomor 9/2006 dan nomor 8/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Peraturan Bersama tersebut dikeluarkan untuk membatalkan Surat Keputusan Bersama nomor: 01/BER/MDN-MAG/1969 yang telah dibahas sebelumnya karena, antara lain, masalah pendirian rumah ibadat dianggap menjadi salah satu sebab yang dapat mengganggu hubungan antarumat beragama.[43]

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang menjadi bagian dari Peraturan Bersama di atas merupakan forum yang dibentuk oleh masyarakat lokal dan difasilitasi oleh pemerintah (dalam hal ini pemerintah daerah) dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Forum tersebut bertugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan masyarakat; menampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat; serta melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, salah satu tugas FKUB tingkat kabupaten/kota adalah memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.[44] Beberapa kebijakan di atas dapat dilihat sebagai perkembangan yang cukup signifikan karena orien-

tasi hubungan antarumat beragama saat itu diarahkan pada komunikasi dan kerjasama yang lebih jujur.

Selain itu, pada 2001 didirikan Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), yang merupakan lembaga fungsional sebagai kepanjangan tangan Kementerian Agama (Kemenag) untuk menangani secara langsung kerukunan antarumat beragama. Walaupun lembaga tersebut secara kebetulan berdiri bersamaan dengan berkembangnya berbagai gejolak konflik di Kupang, Sambas, dan Ambon, namun pendirian PKUB tidak didasari oleh konflik tersebut atau karena *euphoria* reformasi, tetapi lebih karena Depag membutuhkan sebuah struktur yang dapat menampung operasionalisasi fungsi Depag yang kurang efektif tentang persoalan kerukunan.[45] Sebelum PKUB berdiri, sejak 1985 Depag sudah memiliki Staf Ahli Bidang Kerukunan, namun masukan-masukannya tidak dapat ditindaklanjuti karena Depag tidak memiliki lembaga fungsional sebagai pelaksana. Untuk menjembatani persoalan tersebut, fungsi Staf Ahli Bidang Kerukunan dialihkan ke Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang Depag) yang dipimpin oleh Prof. Dr. Atho' Mudzhar dengan nama Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan. Hasil-hasil riset yang dilakukan lembaga inilah yang kemudian dijadikan patokan kebijakan untuk merumuskan program dan gerak PKUB.

Selain upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Depag dalam bidang dialog antarumat beragama, ada juga upaya lain yang telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Praktik dialog antaragama pada perkembangannya telah menjadi salah satu agenda kebijakan luar negeri Indonesia yang dikembangkan oleh Deplu. Semen-

jak 2002 Deplu menjalankan Diplomasi Total yang dimaksudkan sebagai cara untuk memandang setiap isu secara komprehensif dan melibatkan seluruh komponen bangsa. Sejak awal 2002 Deplu melakukan *Foreign Policy Breakfast* dengan mengundang berbagai politisi, pemimpin media, tokoh-tokoh lintas agama, intelektual, dan ormas-ormas pemuda. Ada dua hal pokok yang mendasari upaya Deplu tersebut, yaitu maraknya perbincangan tentang terorisme (dan kaitannya dengan Indonesia) di level internasional, dan gambaran tentang Islam yang seringkali bersifat negatif. Untuk itu, sejak Maret 2002 Deplu membentuk Direktorat Diplomasi Publik yang bertugas menjangkau masyarakat umum. Diplomasi Publik itu diharapkan menjalankan kegiatan yang mempromosikan demokrasi, Islam yang moderat, kebijakan pembangunan ekonomi yang progresif, peran aktif Indonesia dalam upaya memelihara perdamaian dunia, dan peran aktif Indonesia dalam membangun kawasan Asia Tenggara yang aman, stabil, dan sejahtera. Dalam upaya memberantas terorisme untuk jangka panjang, Deplu menyadari perlunya memberdayakan kaum moderat (*empowering the moderates*), dan dalam konteks itulah dialog antaragama dan budaya menjadi niscaya.

Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO)

Selain upaya yang resmi dilakukan oleh pemerintah, beberapa lembaga non pemerintah (NGO) berbasis agama (terutama Islam dan Kristen) dan nonagama mengambil inisiatif untuk dialog antarumat beragama. Beberapa upaya dialog yang dilakukan sebenarnya merupakan respons kritis atas keyakinan bahwa upaya yang telah dilakukan peme-

rintah selama ini mengalami kegagalan sehingga diperlukan pendekatan yang berbeda dalam memahami dialog antarumat beragama.

Institusi penting pertama yang harus disebut di sini adalah Interfidei (Institute for Inter-Faith Dialogue in Indonesia) yang didirikan pada 1992 oleh beberapa tokoh, yaitu: Pdt Eka Dharmaputra (Ketua), Djohan Effendi dan Daniel Dakhidae (Wakil Ketua), Th. Sumartana (w. 2003, sebagai Sekretaris Yayasan, dan Zulkifli Lubis (Bendahara). Berbagai tokoh spiritual lain, seperti Bikkhu Sri Pannavaro Mahathera, Ibu Gedong Bagoes Oka, serta Haksu Thjie Tjai Ing, sangat memengaruhi bentuk, isi, visi, dan misi Interfidei.[46]

Jika ditarik ke belakang, sebenarnya gagasan pendirian Interfidei sudah dimulai sejak paruh kedua dasawarsa 1960-an ketika diskursus teologi di level internasional mulai mengembangkan makna baru tentang dialog yang kemudian membawa pengaruhnya sampai ke Indonesia.[47] Dalam konteks Indonesia, Interfidei lahir, salah satunya, sebagai respons terhadap negara (dalam konteks rezim Orde Baru) yang telah mereduksi makna dialog antaragama sebagaimana telah disinggung di atas. Interfidei menggunakan pendekatan *religious dialogue as social critique* yang lebih menekankan pada pentingnya peran agama dalam mengembangkan nilai-nilai keadilan sosial dan demokrasi.[48]

Sikap kritis tersebut tecermin dalam nama yang dipilih untuk lembaga itu. Interfidei dalam bahasa Indonesia adalah DIAN (Dialog Antariman). Hal itu memiliki makna penting karena pilihan kata *iman*, berarti keyakinan (*faith*), lebih menekankan pada kepedulian bersama dari umat be-

ragama dibandingkan kata *agama* (*religion*) yang menekankan pada institusi keagamaan. Selain itu, Sumartana merasa tidak puas atas inisiatif dialog antarumat beragama yang diupayakan oleh pemerintah Orde Baru, yang dalam pandangannya hanya bertujuan untuk menciptakan kerukunan antarumat beragama atau hidup berdampingan secara damai. Baginya, dialog antarumat beragama harus bertujuan untuk mengembangkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang dewasa, komunikatif, dan demokratis.[49]

Interfidei lahir pada momentum yang tepat, karena saat itu berbagai saluran publik dan politik mengalami kebuntuan sehingga organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang demokrasi dan perubahan sosial mengalami kesulitan luar biasa untuk berekspresi. Interfidei dengan demikian menyediakan wadah untuk berdiskusi tentang berbagai persoalan.[50] Sebagai bagian dari respons terhadap kebijakan lima agama *resmi* versi pemerintah, Interfidei sejak awal melibatkan agama-agama *nonresmi* dalam kerangka dialognya, seperti Konghucu dan agama-agama lokal.

Kelompok lain yang mirip dengan Interfidei adalah MADIA (Masyarakat Dialog Antaragama). MADIA didirikan pada November 1995 setelah sebelumnya beberapa aktivis Muslim mengadakan kontak dengan para intelektual Kristen yang terlibat dalam Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI).[51] Anggota utama dari MADIA yaitu termasuk Amanda Suharnoko, Trisno Sutanto, Romo Sandyawan Sumardi, dan Djohan Effendi yang berperan dalam pendirian lembaga tersebut. Latar belakang pendiriannya ialah keprihatinan mereka akan hubungan antara berbagai umat beragama yang seringkali diwarnai dengan kecurigaan, ke-

sombongan, konflik yang bersifat traumatis, dan teologi yang eksklusif. Sejalan dengan Interfidei, MADIA telah memberi inspirasi bagi banyak orang yang ingin mencari kekuatan agama yang membebaskan, terutama pada konteks rezim Orde Baru yang represif.[52]

Anggota MADIA memiliki harapan yang sama bagi terciptanya dialog antarumat beragama yang tulus, jujur, dan terbuka. Bagi mereka, dialog yang demikian adalah sebuah keharusan sehingga tiap pemeluk agama harus siap untuk menganalisis secara kritis, dan jika perlu—sebagai hasil dari dialog dengan berbagai umat beragama yang lain—untuk merumuskan ulang agama mereka. Sejalan dengan Interfidei, ide-ide tentang dialog antarumat beragama yang dipromosikan oleh MADIA dipraktikkan dalam konteks mempromosikan keadilan. Lembaga itu juga beberapa kali membuat pernyataan terbuka untuk menyuarakan pentingnya toleransi dan kerjasama antarumat beragama.

Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) didirikan di Yogyakarta oleh beberapa aktivis mahasiswa berlatar belakang pesantren pada akhir 1980-an. Ia lahir sebagai bagian dari munculnya berbagai lembaga studi yang marak pada masa tersebut, dan sebagai respons atas banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh umat Islam dalam hal ritual keagamaan namun pada saat yang sama kurang memberikan perhatian terhadap tanggungjawab sosial. Gagasan awal yang diusung adalah bagaimana Islam, sebagai agama, memiliki relevansi dengan realitas sosial dan terlibat dalam proses transformasi masyarakat.

LKiS mengakui bahwa persoalan dialog antarumat beragama dan pluralisme tidak menjadi perhatian lembaga tersebut pada awal berdirinya. Namun seiring perjalanan

dan munculnya berbagai masalah dalam hubungan antarumat beragama, LKiS kemudian terlibat aktif dalam menyuarakan ide-ide Islam yang toleran dan membebaskan. Salah satu kegiatan lapangan yang mereka lakukan di awal pendiriannya, masalah Waduk Kedung Ombo, membawa LKiS dalam persoalan pluralisme. Kemudian, sejalan dengan munculnya upaya untuk mengubah kecenderungan dialog yang berorientasi pada kerukunan menjadi dialog untuk demokratisasi (sebagaimana juga dilakukan oleh Interfidei dan MADIA tersebut di atas), LKiS mencari cara bagaimana menggalang kekuatan antarumat beragama untuk demokratisasi dan melawan kecenderungan menggunakan agama untuk menyingkirkan kelompok lain. Hal itu secara nyata juga dapat dipahami sebagai upaya pembalikan paradigma pemerintah Orde Baru tentang dialog antarumat beragama. Saat ini LKiS sudah berkembang cukup pesat dan mempunyai program yang disebut *Belajar Bersama Islam dan Dialog Antaragama*.[53]

Sejak akhir 1980-an, beberapa upaya dialog antarumat beragama yang lain juga muncul, terutama melibatkan kaum Muslim dan Kristiani. Di antara lembaga yang berdiri cukup awal dan diinisiasi oleh intelektual Muslim adalah Yayasan Paramadina yang dibentuk pada 31 Oktober 1986. Figur utama dalam lembaga tersebut adalah (alm.) Nurcholish Madjid, Dawam Rahardjo, Usep Fathuddin, Utomo Dananjaya, Komaruddin Hidayat, dan Budhy Munawar-Rachman. Walaupun Paramadina secara formal tidak menyebutkan diri sebagai institusi dialog antarumat beragama, namun pendekatannya dalam memahami dan mengembangkan Islam yang inklusif telah membantu mempromosikan toleransi antarumat beragama. Parama-

dina memiliki tiga karakter penting, yaitu independensi, keterbukaan, dan orientasi kebudayaan. Selain itu, Paramadina berkeyakinan bahwa masa depan Islam terletak di tangan *liberal Islam* dan karena itu mencoba untuk memperkenalkan interpretasi atas Islam yang menghargai hak-hak asasi manusia, demokrasi, dan pluralisme.[54]

Paramadina pada awalnya didirikan sebagai medium bagi masyarakat Muslim urban dari kalangan menengah ke atas untuk mendiskusikan ajaran-ajaran Islam dalam merespons beberapa permasalahan yang mereka hadapi di dunia modern, seperti etika bisnis dan perbankan. Segmen masyarakat kalangan menengah ke atas dipilih karena mereka dipercaya sebagai agen perubahan sosial dan politik di Indonesia, terutama dalam konteks rezim Orde Baru yang sangat keras terhadap Islam politik.

Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) didirikan pada 2001, memiliki tujuan untuk mengupayakan dialog dan perdamaian antara berbagai penganut agama, terutama Muslim dan Kristiani. Pendirian lembaga tersebut juga dapat dipahami dalam konteks munculnya berbagai konflik yang melibatkan umat Muslim dan Kristiani, terutama sejak akhir 1990-an. Meskipun secara formal berdiri sebagai sebuah yayasan tersendiri, tetapi dalam sepak terjang internasional ICRP memiliki hubungan dengan World Conference on Religion and Peace (WCRP) dan Asian Conference on Religion and Peace (ACRP), sebagaimana telah disebutkan di atas. Beberapa anggota ICRP juga aktif terlibat di MADIA. ICRP diketuai oleh Djohan Effendi, dan mengadakan berbagai aktivitas di beberapa wilayah Indonesia yang difokuskan pada 3 aspek: dialog doktrinal, isu-isu sosial politik, dan bantuan kemanusiaan.

ICRP memiliki visi mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, berkeadilan, setara, persaudaraan dalam pluralisme agama dan kepercayaan, dan penghormatan kepada martabat manusia. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, ICRP merasa penting untuk membantu penanganan berbagai masalah dalam hubungan antaragama, serta membantu pengembangan jaringan kerjasama antarlembaga maupun individu untuk penguatan pluralisme dan perdamaian.

Selain berbagai organisasi pada level nasional tersebut di atas, salah satu organisasi lokal yang tumbuh sebagai respons terhadap konflik di masyarakat adalah Lembaga Antar-Iman Maluku untuk Kemanusiaan (eLaIeM). Secara formal, lembaga tersebut diresmikan oleh Gubernur Propinsi Maluku pada akhir 2003, namun secara teknis operasional, lembaga baru mulai berjalan pada November 2004. Melihat realitas konflik di Maluku pada saat itu, eLaIeM berupaya untuk mencapai peningkatan kapasitas umat beragama dalam mengelola konflik dan dampaknya. Sebenarnya, inspirasi dasar eLaIeM adalah kemarahan terhadap kenyataan terpuruknya masyarakat dalam konflik yang menghancurkan kemanusiaan dan lingkungan di Maluku selama 4 tahun. Sekian banyak kalangan melakukan penelitian konflik di Maluku, namun hasil penelitiannya dirumuskan di luar Maluku. Bahkan hasil-hasil penelitian tersebut menginisiasi banyak kalangan untuk membangun pusat studi perdamaian di luar Maluku. Karena itu eLaIeM merasa penting untuk membangun citra Maluku, tidak saja sebagai pusat konflik, tetapi juga pusat perdamaian. Dari Maluku eLaIeM ingin menawarkan model-model manejemen pluralitas yang berbasis muatan dan kebijakan lokal.[55]

Selain berbagai lembaga di atas, penggiat utama dari dialog antarumat beragama yang dilakukan oleh lembaga nonpemerintah adalah oleh komunitas Kristiani. Bahkan sejak 1967 dan 1968, sebagai respons atas Konsili Vatikan II, seorang pastor Katolik bernama Cletus Groenen menulis sejumlah artikel dalam majalah mingguan *Penabur* untuk menekankan pentingnya konsili tersebut bagi konteks Indonesia. Selain itu, pada 1968, sebuah pertemuan antarumat beragama yang dihadiri oleh umat Muslim, Katolik, Protestan, dan Buddha diadakan di Sukabumi, Jawa Barat. Sekitar dua tahun kemudian, pada 1970, tokoh-tokoh agama yang menghadiri pertemuan tersebut menemui Kardinal Darmojuwono di Semarang dan menegaskan komitmen mereka untuk menegakkan kerukunan antarumat beragama.[56] Selain itu, penting untuk dicatat bahwa beberapa tokoh agama Indonesia juga terlibat aktif dalam organisasi dialog tingkat dunia, termasuk T.B Simatupang yang pernah menjadi salah satu anggota *Central Executive Committee* dari WCC.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa NGO tersebut di atas dapat dikatakan cukup berhasil dalam berbagai level. Aktivitas yang mereka upayakan lebih menunjukkan kejujuran untuk terciptanya hubungan yang lebih baik antarumat beragama. Dialog antarumat beragama tidak hanya difokuskan pada pemahaman bersama atas doktrin-doktrin keagamaan, melainkan pada kerjasama umat beragama dalam mengembangkan keadilan. Dari uraian di atas juga tampak bahwa filosofi yang mendasari upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai LSM dalam dialog antarumat beragama sangat berbeda dari filosofi pemerintah, terutama pada masa Orde Baru. Jika pemerin-

tah Orde Baru lebih bertujuan untuk menciptakan hidup berdampingan antar pemeluk agama secara damai terutama setelah terjadi konflik, berbagai NGO tersebut lebih menekankan pentingnya pengembangan masyarakat Indonesia yang demokratis dengan cara antisipatif dan preventif.

Lingkup Akademik

Sebelum masuk dalam pembahasan lingkup akademik yang mendasari munculnya isu dialog dalam kampus, perlu kita lihat ke belakang sejenak suasana politik pada dekade terakhir kepemimpinan Orde Baru. Di awal 1990-an Soeharto melihat adanya kemungkinan dukungan dari kelompok Muslim lewat dibentuknya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Walaupun di satu sisi pendirian ICMI dapat dianggap sebagai gerbang dari tahap baru bagi hubungan antara pemerintah dan umat Islam, hal tersebut dapat pula dilihat sebagai dimulainya sekterianisme di Indonesia. Sebagai dampak dari lahirnya ICMI, berdiri pula Forum Cendekiawan Hindu Indonesia (FCHI), dan Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia (KCBI), serta kemunculan kembali dua organisasi Kristen yang sudah lama ada yaitu Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) dan Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA). Hal tersebut mencemaskan sebagian intelektual Indonesia, termasuk Deliar Noer, Djohan Effendi, dan Abdurrahman Wahid, yang menolak untuk bergabung dengan ICMI. Hal itu pulalah yang menjadi dasar bagi munculnya sebuah forum yang menjadikan demokrasi sebagai fokus utamanya, yaitu Forum Demokrasi.

Wacana agama dan sektarianisme yang menguat akibat represi oleh pemerintah Orde Baru terhadap Islam ideologis sedikit banyak memberikan pengaruh bagi muncul dan berkembangnya kelompok-kelompok studi Islam di dalam kampus. Kelompok yang dikenal sebagai aktivis masjid kampus ini marak muncul di berbagai kampus besar di Indonesia, seperti Jama'ah Shalahuddin (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta) dan Salman (Institut Teknologi Bandung). Hal itu dibarengi dengan maraknya pemakaian jilbab di perguruan tinggi umum dan berkembangnya kajian intensif terhadap karya-karya intelektual Muslim seperti Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, dan Abu al-A'la Maududi. Pemahaman mereka atas karya-karya tersebut menuntun mereka untuk mempraktikkan perilaku dan penampilan Rasulullah dan sahabat semaksimal mungkin. Melalui para kader kampus inilah Islam diharapkan dapat kembali mewarnai kehidupan bangsa Indonesia.[57]

Di sisi lain kita melihat munculnya berbagai studi agama di beberapa kampus. Untuk kurun waktu yang cukup lama studi agama disebut dengan nama *comparative study of religion*, *comparative religion*, atau *history of religion*. Dalam konteks Indonesia, Prof. Dr. H. A. Mukti Ali telah memulai studi Perbandingan Agama di Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga sejak 1961. Mukti Ali sendiri tidak merisaukan perbedaan antara istilah *science of religion, history of religion,* atau *comparative study of religion*. Menurut Steenbrink, istilah *comparative religion* memang telah umum dipakai di Indonesia dan oleh sebab itu dipakai oleh Mukti Ali. Namun, jelas bahwa Mukti Ali ingin menghubungkan antara studi agama dengan upaya untuk mempromosikan dialog antarumat beragama, bahkan, dialog antarumat be-

ragama merupakan tujuan akhir dari studi perbandingan agama.[58] Sampai saat ini Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta masih memiliki jurusan Perbandingan Agama.

Upaya lain yang dilakukan oleh UIN Sunan Kalijaga adalah mendirikan Dialogue Centre (DC) pada Oktober 2004. Pendirian lembaga itu diawali oleh keprihatinan yang didapat dari hasil survei bahwa belum ada satu pun lembaga di lingkungan PTAIN yang memberikan perhatian khusus pada wacana dialog antarumat beragama. Lembaga tersebut diharapkan menjadi pusat dialog kalangan umat beragama sekaligus mengembangkan wawasan dialog kepada *kaum muda* beragama (melalui jalur pendidikan).

Nama Ilmu Perbandingan Agama (*Comparative Religious Studies*) juga pernah dipakai dalam berbagai program studi, termasuk oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta saat berdiri pada 2000. Namun, sejak 2002, program studi tersebut diubah menjadi Studi Agama dan Lintas Budaya (Religious and Cross-cultural Studies/CRCS) setelah melalui berbagai pertimbangan, termasuk untuk memperluas cakupan dari program tersebut. Pendirian CRCS juga diawali dengan keprihatinan bahwa Indonesia, yang dapat disebut sebagai negara yang cukup religius, belum memiliki banyak alternatif untuk studi agama.

Memang benar bahwa program-program studi yang mengkaji agama sebelumnya telah ada, termasuk di Universitas Islam Negeri, Institut Agama Islam Negeri, Universitas Kristen Satya Wacana, Universitas Sanata Dharma, dan Universitas Kristen Duta Wacana, namun Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia yang tidak berafiliasi pada keagamaan tertentu belum memiliki program kajian agama.

CRCS ingin mengisi kekosongan tersebut dan menawarkan alternatif bagi kajian agama di Indonesia. Mahasiswa CRCS memiliki berbagai latar belakang agama, sosial, budaya, dan etnik, sehingga sebenarnya atmosfer dialog sudah dimulai sejak mereka duduk bersama di kelas, juga dalam interaksi keseharian mereka. Tidak jarang di antara mahasiswa terdapat tokoh masyarakat atau tokoh agama tertentu, sehingga pengalaman dan ilmu yang mereka timba di CRCS diharapkan bisa memperluas cakrawala berpikir mereka mengenai toleransi umat beragama, dan pada gilirannya dapat mereka sebarkan dalam komunitas masing-masing.

Selain CRCS, Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS-Yogya), yang merupakan konsorsium dari tiga universitas ternama di Yogyakarta yaitu Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, dan Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), didirikan pada 2007. ICRS-Yogya merupakan sebuah program doktoral dalam bidang studi agama yang bersifat lintas universitas dan integral, yang bertujuan untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin agama dan masyarakat yang berakar kuat pada tradisi agama mereka serta menghargai tradisi agama lain melalui penelitian mendalam dan pengalaman belajar bersama penganut agama lain.

Dari uraian di atas, kita melihat bahwa dialog antarumat beragama di tingkat internasional maupun nasional bermula di penghujung 1960-an. Pada 1967 bibit-bibit dialog di Indonesia sudah mulai muncul, meski sebenarnya saat itu lebih merupakan respons terhadap konflik. Dalam lingkup dunia internasional, baik komunitas Katolik maupun Kristen hampir secara bersamaan melakukan berbagai

upaya sistematis untuk mengembangkan dialog antarumat beragama, untuk alasan berbeda-beda, pada akhir 1960-an.

Setelah lebih dari tiga dasawarsa, di awal abad ke-21 ini, dialog antarumat beragama mulai menunjukkan motivasi baru. Peristiwa pemboman gedung *World Trade Center* pada 11 September 2001 memunculkan urgensi baru untuk membangun kesalingpahaman yang lebih baik di antara komunitas-komunitas agama. Di Indonesia, Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri mengembangkan dialog regional dan internasional yang, antara lain, merupakan respons terhadap isu terorisme atau memburuknya citra Islam di mata internasional. Selain itu, muncul pula inisiatif Alliance of Civilizations yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 2005. Perkembangan dialog di Arab Saudi pun kiranya tidak bisa terlepas dari tekanan dunia internasional, terutama setelah peristiwa 11 September tersebut.

Walaupun di satu pihak munculnya dialog instrumental yang makin mengemuka dalam rangka keamanan dunia atau memberantas terorisme tetap merupakan hal penting untuk dilakukan, namun perlu dicatat bahwa dialog tidak akan menyelesaikan masalah jika akar masalahnya adalah ketidakadilan struktural, baik yang berskala nasional maupun internasional. Oleh sebab itu, penting untuk menyadari akar masalah yang dihadapi untuk menghasilkan sebuah upaya dialog antarumat beragama yang jujur.[]

Bagian II:
Ragam Dialog di Indonesia

3
Jejak-jejak Kemenag di Jalan Dialog Antaragama

Tulisan berikut menjelaskan program-program yang dijalankan oleh pemerintah terkait praktik dialog antarumat beragama. Salah satu Kementerian yang dianggap sangat berperan dalam mengembangkan ide dan praktik dialog umat beragama adalah Kementerian Agama (dulu Departemen Agama [Kemenag]). Bagian ini akan menjelaskan program apa saja yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama.

Pada Bab 2 telah dibahas secara singkat sejarah kebijakan praktik dialog antarumat beragama di Kemenag yang disebut sebagai program Kerukunan Umat Beragama (KUB). Telah diterangkan pula pasang surut kebijakan KUB dari masa ke masa dan dari satu periode pemerintahan ke pemerintahan lain. Bagian ini akan menerangkan capaian yang sangat terkait dengan program-program KUB

oleh organisasi-organisasi yang berinduk pada Kementerian Agama.

Kementerian Agama dan Program KUB

Bila merujuk sejarah perjalanan Kementerian Agama, sesungguhnya KUB tidak menjadi landasan utama pendirian Kemenag. Kerukunan antarumat beragama belum menjadi isu utama yang mewarnai dinamika *state-building* pada tahun-tahun awal setelah masa revolusi 1945. Fokus terpenting setelah proklamasi adalah integrasi tanah air Indonesia dan mempertahankan diri dari upaya perebutan kembali oleh penjajah Belanda dan sekutunya. Ketetapan Pemerintah pada 2 Januari 1946, No. 1/SD/1946 tentang pendirian Kementerian Agama, oleh banyak sumber disepakati sebagai *imbalan* pemerintah RI terhadap umat Islam atas kesediaan mereka menghilangkan tujuh kata dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu: "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.[1]

Pendirian Kementerian Agama beberapa bulan setelah proklamasi 1945 tidak lepas dari tekanan beberapa aktivis Muslim yang tergabung dalam PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) kepada pemerintah. Sebelumnya, masalah yang berkaitan dengan keagamaan masih ditangani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena hasrat dari sebagian umat Islam yang begitu kuat, Presiden Sukarno dan Hatta mengeluarkan ketetapan tersebut.[2]

Dari kenyataan sejarah tersebut dapat diketahui bahwa pada awal berdirinya, Kementerian Agama dimaksudkan untuk mengatur kehidupan beragama, terutama umat Islam. Apa yang tersurat dalam UU Program Pembangunan

Nasional Nomor 25 Tahun 2000 memang mengindikasikan bahwa pelayanan terhadap umat Islam akan tetap menjadi urusan terbesar dari departemen tersebut.[3] Taufik Abdullah dkk. misalnya, memaparkan bahwa 70% aktivitas Departemen Agama, yang merupakan departemen terbesar ketiga setelah Diknas dan Depdagri, berputar pada pengelolaan lembaga pendidikan Islam mulai dari tingkat dasar (*ibtidaiyah*) hingga perguruan tinggi (*jami'ah*), termasuk juga pesantren.[4]

Kentalnya kepentingan umat Islam di Kemenag tecermin dari dinamika politik masyarakat Muslim pada masa awal pascarevolusi dan setelah pemilu pertama pada 1955. Perdebatan yang panjang di Badan Konstituante tentang UUD, serta perbedaan sikap terhadap Dekrit Presiden Sukarno tahun 1959, dapat dilihat dari naik turunnya para menteri yang mewakili kelompok tertentu dalam masyarakat Muslim Indonesia. Tokoh-tokoh Masyumi dan NU silih berganti menjabat sebagai menteri di Kemenag yang, secara langsung atau tidak langsung, berpengaruh dalam struktural organisasi Kemenag secara umum. Dalam konteks itu Departemen Agama disebut sebagai departemen paling buruk akibat sarat dengan kepentingan golongan. Hingga masa K. H. M. Dachlan pada era akhir 1960-an, Kemenag masih menjadi lembaga pemerintah yang sangat kental dengan kepentingan politik NU. Akibatnya Kemenag dianggap sebagai departemen yang paling tidak bisa mengintegrasikan diri dengan arah kebijakan pembangunan Orde Baru.[5]

Hubungan antarumat beragama baru mendapatkan perhatian Kemenag setelah muncul ketegangan-ketegangan antarumat beragama pascapembubaran Partai Komunis In-

donesia (PKI). Seperti diterangkan pada Bab 2, kebijakan pembubaran PKI dan kewajiban rakyat Indonesia untuk memeluk satu agama tertentu yang diakui pemerintah membuat jutaan mantan anggota PKI berbondong-bondong memeluk agama *baru*. Umat Kristen berkembang sedemikian pesat. Gereja baru didirikan di mana-mana sehingga ketegangan antarumat terjadi di beberapa tempat. Kenyataan ini disadari oleh para pemimpin negara, termasuk Pejabat Presiden Suharto dan Menteri Agama K. H. M. Dachlan. Secara resmi keprihatinan tersebut dibicarakan dengan perwakilan kelompok-kelompok umat beragama pada 1967 dengan diadakannya Musyawarah Antarumat Beragama.

Sejak saat itu, terutama sejak masa Menteri Agama Mukti Ali, KUB menjadi salah satu isu yang banyak mendapat porsi dalam kegiatan-kegiatan Kemenag. Kemenag lalu mendirikan beberapa lembaga penting yang mempunyai tugas khusus menjalankan program-program soal kerukunan. Badan-badan penting tersebut di antaranya adalah: Badan Kontak Antaragama yang dibentuk setelah peristiwa Musyawarah Antarumat Beragama pada 1967, Wadah Musyawarah Antar-Umat Beragama (WMAUB) pada 1980, Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPKUB) pada 1993, Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) pada 2001, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) pada 2006.

Masa Orde Baru: WMAUB dan LPKUB

Di masa Orde Baru, ada dua lembaga kerukunan yang berdiri atas inisiasi pemerintah (Kemenag), yaitu Wadah

Musyawarah Antar-Umat Beragama (WMAUB) dan Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPKUB). WMAUB berdiri pada 1980 pada masa Menteri Alamsyah Prawiranegara, sedangkan LPKUB berdiri pada 1993 ketika Tarmizi Taher menjabat sebagai menteri. Di bab sebelumnya sudah disebutkan konteks sejarah pendirian WMAUB dan LPKUB yang sangat terkait dengan isu-isu ketegangan antaragama di berbagai daerah. Dalam bagian ini akan lebih difokuskan bagaimana WMAUB dan LPKUB bekerja dan menjalankan programnya. Meski keduanya mempunyai fungsi berbeda, tapi dua lembaga yang berdiri di masa yang berbeda cukup memberi gambaran agresivitas pemerintah dalam menangani program kerukunan beragama di masyarakat.

Secara resmi WMAUB berdiri pada 30 Juni 1980 di Jakarta, didahului serangkaian pertemuan-pertemuan pendahuluan yang diselenggarakan oleh Kemenag. Pada hari pertemuan puncak yang melahirkan WMAUB, Alamsyah mengeluarkan Keputusan Menteri yang sekaligus mendeklarasikan berdirinya sebuah badan kerukunan yang dibentuk oleh Majelis-majelis Agama.[6] Fungsi utama WMAUB adalah menjadi forum konsultasi dan komunikasi antarpetinggi atau pemimpin agama. Bentuk kegiatan badan tersebut adalah pertemuan-pertemuan yang digagas baik oleh pemerintah maupun salah satu majelis agama,[7] dengan kegiatan utama bermusyawarah membahas berbagai hal terkait tanggungjawab bersama dan kerjasama antarwarga negara yang menganut berbagai agama berbeda.[8] Pertemuan-pertemuan badan itu menghasilkan beragam rekomendasi, pernyataaan sikap, dan keputusan bersama yang berkaitan dengan isu-isu keragaman agama di Indo-

nesia. Dalam bukunya, Sudjangi mencatat terdapat sekitar sepuluh keputusan yang sudah dihasilkan WMAUB, mulai dari keputusan menteri, hingga rekomendasi dan seruan untuk umat tentang masalah-masalah keagamaan di Indonesia. Sebagai salah satu contohnya adalah seruan WMAUB berkenaan dengan berbagai krisis yang melanda Indonesia pada 1998.

WMAUB menjadi wadah yang kurang mandiri. Hal itu disebabkan, antara lain, akibat fasilitas operasional yang disediakan Kemenag, dan keberadaan wakil-wakil pemerintah (Kemenag) dalam Badan atau Panitia Kerja WMAUB yang disebut Badan Konsultasi Antar-Umat Beragama (BKAUB). Badan yang disebutkan terakhir diketuai oleh Sekretaris Jenderal Kemenag (wakil menteri) dan Kepala Badan Litbang Kemenag, serta beranggotakan perwakilan dari majelis-majelis agama dan para sekretaris Ditjen Bimbingan Masyarakat dari masing-masing agama di Kemenag. Kondisi tersebut seringkali membuat program kerukunan umat beragama yang digagas oleh Kemenag mendapat kritik dari berbagai kalangan sebagai program yang tidak membumi, karena hanya melibatkan elite agamawan.[9]

Berbeda dengan WMAUB yang menjadi forum kegiatan elite pemimpin agama, LPKUB menjadi lembaga pertemuan kaum intelektual dari berbagai agama. Tujuannya bukan untuk menghasilkan keputusan praktis bagi pemerintah atau umat beragama seperti WMAUB, tapi untuk memperkuat basis pertimbangan akademik, terutama ilmu-ilmu sosial, dalam pemecahan masalah-masalah antarumat beragama.[10]

LPKUB, yang sekarang sudah tidak aktif lagi, berdiri pada masa Tarmizi Taher, tepatnya pada Kongres ke-1 Aga-

ma-agama di Yogyakarta 11-12 Oktober 1993. Lembaga itu pertama kali dipimpin oleh Prof. Dr. Burhanuddin Daya, guru besar IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tujuan LPKUB antara lain: *pertama*, mengkaji dan mengembangkan pemikiran keagamaan tentang hubungan yang harmonis antarpemeluk agama yang berbeda; dan *kedua*, menyumbangkan pemikiran keagamaan kepada pemerintah tentang hubungan antaragama yang harmonis. LPKUB membuat kajian-kajian yang diharapkan dapat memperkaya kultur kerukunan dalam masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional. Sesuai dengan politik citra kerukunan Tarmizi Taher, LPKUB juga diharapkan menjadi lembaga kajian serius tentang kerukunan beragama di Indonesia bagi masyarakat regional maupun internasional.[11] Untuk tujuan tersebut, salah satu langkah yang diambil LPKUB yaitu menerbitkan jurnal internasional *Religiosa* yang ditulis dalam bahasa Inggris, Arab, dan Perancis.[12]

Jika WMAUB pada masa kepemimpinan Alamsyah Prawiranegara didirikan untuk kepentingan *menundukkan* majelis-majelis agamawan berumat banyak, LPKUB pada masa Tarmizi Taher dibuat agar kerukunan berdasarkan Pancasila bisa menjadi bahan kajian akademis dan populer bagi masyarakat internasional. Berbagai seminar dan kajian tentang ketegangan antarumat beragama dilakukan pada masa tersebut.

Masa Reformasi

Jika pada Bab 2 telah disinggung bahwa orientasi program kerukunan umat beragama pada masa Orde Baru

lebih bernuansa *top-down* (dari elite ke masyarakat), kita akan mempertanyakan kembali *masih berlanjutkah paradigma Kemenag dalam masa Orde Reformasi, yaitu bahwa kerukunan di tingkat elite menunjukkan kerukunan di tingkat akar rumput*?. Salah satu semangat reformasi yang paling kuat adalah kebebasan berpendapat bagi semua pihak. Perangkat-perangkat sosial-politik dibuat sedemikian rupa untuk mengubah situasi totalitarian di masa Orde Baru ke kondisi yang lebih egaliter. Kesadaran akan perbedaan dan masyarakat yang multikultural bergaung dengan kuat. Contoh terbaik dalam bidang kerukunan agama yang dicapai pada masa ini adalah dicabutnya Inpres 14/1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina yang bernuansa diskriminatif. Presiden Abdurrahman Wahid memotori gerakan ini dengan memasukkan kembali Konghucu sebagai salah satu agama yang diakui di Indonesia. Selain itu, Kemenag diposisikan kembali sebagai penjaga kerukunan umat beragama di tengah masyarakat Indonesia. Paradigma baru akan kerukunan umat beragama tecermin dari kebijakan tentang kerukunan umat beragama dan program-program yang dilakukan oleh Kemenag.

Seiring dengan lahirnya periode Reformasi yang diwarnai konflik antaretnis dan agama di beberapa wilayah Indonesia, ditambah kompleksitas permasalahan kerukunan, maka fokus yang dikembangkan oleh Kemenag kemudian adalah *teologi* kerukunan multikultural.[13] Hal itu dimulai oleh Menteri Tolchah Hasan dan dilanjutkan oleh Menteri Said Agil Hussein al-Munawar. Dalam konteks tersebut, kerjasama antaragama lebih diarahkan pada perwujudan rasa kemanusiaan antarpemeluk agama. Mulai periode tersebut hingga sekarang, dilaksanakan kebijakan *pengem-*

bangan wawasan multikultural dengan pendekatan *bottom-up* (bukan seperti masa Orde Baru yang *top-down*).

Jika konsep *agree in disagreement* (yang dicanangkan oleh Mukti Ali) lebih berorientasi kepada pengakuan akan perbedaan (toleransi), maka periode pasca-Reformasi idealnya berorientasi pada komunikasi dan kerjasama yang tulus antarpemeluk agama, atau penganut tradisi yang berbeda-beda (melampaui toleransi). Di samping menghilangkan sikap curiga, tujuannya adalah menumbuhkembangkan sikap tolong-menolong sebagai perwujudan rasa kemanusiaan yang terkandung dalam ajaran setiap agama.[14] Paradigma dialog multikultural yang terus dikembangkan hingga saat ini nampaknya dipengaruhi oleh kesadaran akan semakin intensifnya komunikasi dan pergerakan masyarakat nasional dan global akibat kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh teknologi informasi. Hubungan yang mengglobal dan intensif menyadarkan akan pentingnya sebuah wawasan tentang bagaimana hidup berdampingan dalam masyarakat yang beragam, dengan tidak saja bersikap toleran akan perbedaan, tetapi juga bisa berbagi kesadaran yang tulus dan bekerjasama dalam suasana saling memperkuat iman masing-masing.[15]

Mantan Menteri Agama Said Agil Hussein al-Munawar dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat, baik vertikal maupun horizontal, pada satu sisi merupakan tantangan atas kesatuan bangsa. Namun, di sisi lain, hal tersebut merupakan aset kekayaan yang dapat mempermudah kemajuan suatu bangsa. Apakah perbedaan itu akan menjadi beban atau aset terletak pada bagaimana cara kita mengelola perbedaan-perbedaan tersebut.[16] Perhatian Kemenag saat

periode Reformasi pada praktik dialog antaragama yang lebih membumi (dibandingkan pada masa Orde Baru) ditunjukkan dalam upayanya menangani kerawanan konflik agama dengan lebih melibatkan masyarakat. Sesuai dengan semangat otonomisasi pada masa kepemimpinan Menteri Maftuh Basyuni tahun 2006, ditetapkan Peraturan Bersama (Perber) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9, masing-masing tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, serta tentang Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Perber Menag dan Mendagri ini adalah adalah revisi dari SKB Menag dan Mendagri No. 01/BER/MDN-MAG/1969. Beberapa hal yang telah diperbaharui yaitu termasuk lebih diperjelasnya pasal-pasal yang bersifat multitafsir dan terlalu umum dari SKB (dari 6 pasal menjadi 30).[17] Di antara pasal-pasal terpenting adalah tentang keterlibatan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam mengontrol kerukunan umat beragama setempat, serta pendirian rumah ibadat yang diatur secara rinci dan detail. Penyempurnaan SKB tahun 1969 sangat terkait pula dengan semangat keharusan partisipasi pemerintah daerah yang diwujudkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.[18] Dalam perspektif yang lebih multikultural, pemberian porsi yang lebih besar kepada pemerintah dan masyarakat daerah dalam menangani program kerukunan umat beragama sangatlah relevan untuk membedakan Orde Reformasi dari Orde Baru.

Litbang Kemenag dan PKUB

Untuk melihat lebih jauh bagaimana kerukunan multikultural digalakkan oleh Kemenag, kita perlu meneropong Kemenag dengan lebih mendalam dalam mengolah program-program kerukunan umat beragama. Di Kemenag sejak periode Reformasi, program-program kerukunan tersebut ditangani dan dikelola oleh dua institusi.[19] Institusi pertama adalah Badan Litbang dan Diklat Kemenag yang mengurusi perencanaan kebijakan-kebijakan kerukunan umat beragama, termasuk di dalamnya penelitian-penelitian dan sosialisasi regulasi tentang KUB. Institusi kedua adalah Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) di bawah Sekretariat Jendral. Institusi terakhir adalah salah satu badan Kemenag yang melaksanakan program-program operasional KUB. Apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan Kemenag tentang KUB sangat terkait dengan dua divisi Kemenag tersebut.[20]

Keberadaan Litbang dan Diklat Kemenag RI dapat dilacak sejarahnya mulai 1974, atau 28 tahun setelah berdirinya Kemenag. Merujuk pada Keputusan Presiden No. 45 Tahun 1974, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama mempunyai tugas pokok membantu pimpinan dalam hal merumuskan kebijakan, pengambilan keputusan, dan perencanaan jangka panjang, di samping melaksanakan tugas-tugas instansi departemen.[21] Keputusan Presiden tersebut lahir berdasar pada kondisi objektif kemajuan pembangunan yang dicapai bangsa Indonesia, serta perubahan sosial yang terjadi sebagai akibat hasil pembangunan. Searah dengan pencapaian program pembangunan, dirasakan perlu sebuah lembaga khusus di Kemenag yang menjadi sumber data

dan analisis yang valid terhadap masalah-masalah sosial keagamaan.

Atas dasar Keputusan Presiden tersebut, Menteri Agama selanjutnya menerbitkan Kep. Menag. No. 18 Tahun 1975 yang mengatur unsur pimpinan, unsur tugas bantu, dan unsur pelaksana lembaga Litbang tersebut. Unsur pelaksana, terdiri atas tiga Pusat, yaitu: Puslitbang Perikehidupan Beragama dan Perikehidupan Kepercayaan terhadap Tuhan YME (Puslitbang I), Puslitbang Lektur Agama (Puslitbang II), dan Puslitbang Pendidikan Agama (Puslitbang III). Pada 1980, berdasarkan Kep. Menag. Nomor 51 Tahun 1980, Puslitbang I diubah menjadi Puslitbang Kehidupan Beragama karena Aliran Kepercayaan dianggap bukan merupakan agama (TAP- MPR NO. IV/1978).[22]

Mulai 2001, yaitu sejak dikeluarkannya Keputusan Menag No. 01 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Agama, Badan Litbang Agama berubah menjadi Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan (sebelumnya pusdiklat berada di bawah menteri). Perubahan itu dilakukan sebagai upaya meningkatkan mutu dan relevansi kinerja Kementerian Agama untuk terus menyesuaikan dengan nuansa kekinian; bahwa kegiatan penelitian dan pengembangan tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan lain-lain menyangkut pemberdayaan SDM.[23] Sesuai dengan semangat integrasi tersebut, tugas pokok Litbang dan Diklat sedikit berubah, yaitu menyelenggarakan sebagian tugas pokok Kementerian Agama di bidang penelitian dan pengembangan agama, serta Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan berdasarkan kebijakan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.[24]

Struktur organisasi Litbang dan Diklat Kemenag sendiri kemudian dijabarkan melalui lima Puslitbang yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Litbang. Kelima Puslitbang tersebut yaitu: Puslitbang Kehidupan Beragama, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Puslitbang Lektur Keagamaan, Pusdiklat Administrasi, dan Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan. Isu-isu berkenaan dialog dan kerukunan umat beragama menjadi program kerja penting Puslitbang Kehidupan Beragama.

Berkaitan dengan KUB, Litbang mempunyai program utama kegiatan *pengembangan wawasan multikultural* yang memfasilitasi pemuka agama tingkat pusat dari MUI, KWI, PGI, Walubi, dan Matakin untuk pergi ke daerah dan berdialog dengan pemuka agama di daerah, propinsi, dan kabupaten. Setelah kembali ke Jakarta, para pemuka tadi diundang rapat, berdiskusi, dan merumuskan bersama potensi-potensi konflik dan integrasi yang ada di daerah. Di samping dapat melakukan sosialisasi ide-ide wawasan multikultural, melalui kunjungan ke daerah, para pemuka agama dapat menyerap pengetahuan tentang potensi-potensi konflik di daerah yang dapat menimbulkan ketegangan antarumat beragama. Melalui program tersebut juga telah dihimpun warisan kearifan lokal di daerah, yang mempunyai peran dalam pelestarian kerukunan umat beragama.

Hingga awal 2008, kegiatan tersebut telah menggapai 20 propinsi[25], termasuk: Sumatera Utara, Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur, Bali, Jambi, Riau, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan (2002-2003).[26] Setelah dievalusi lalu mendapat respons positif dari banyak pihak (di antaranya dari Komisi VI DPR), pada 2004 program serupa diteruskan ke Kaliman-

tan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, NTB, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Pada tahun-tahun berikutnya, program tersebut diteruskan ke Jambi, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Timur, dan Gorontalo (2005); Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kepulauan Riau, dan Banten (2006).

Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB)

Jika Litbang dan Diklat Kemenag adalah lembaga *think tank* Kemenag dengan bentuk aktivitas riset dan pelatihan yang, salah satunya, diperuntukkan bagi pengembangan KUB, maka Pusat Kerukunan Umat Beragama atau PKUB adalah lembaga fungsional yang mengoperasikan program-program KUB Kemenag di lapangan. Secara kelembagaan, PKUB yang berada di bawah Sekretaris Jendral Kemenag berbeda dengan Litbang, tetapi dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program KUB, keduanya tidak dapat dipisahkan.

Benih kelahiran PKUB (2001) sendiri sebenarnya sudah mulai ditanam sejak masa kepemimpinan Menteri Tarmizi Taher yang membidani kelahiran Lembaga Pengkajian untuk Kerukunan Umat Beragama (LPKUB) di Yogyakarta pada masa akhir kejayaan Orde Baru. Karena LPKUB didirikan bukan sebagai lembaga *fungsional* dalam aktivitas hubungan lintas agama, namun lebih sebagai lembaga riset untuk mencari faktor-faktor penyebab konflik dan perekat pascakonflik yang tidak berhubungan langsung dengan lembaga keagamaan dan kemasyarakatan,[27]

maka misi dasar Kemenag yang ingin mendorong praktik kerukunan lintas agama di tingkat lokal dan akar rumput tidak begitu terasa implikasinya.

Belum menguatnya implementasi program dialog antaragama yang membumi di masa Tarmizi Taher, ditandai dengan program kerukunan antaragama yang sebagian besar masih menjadi kajian yang ditangani hanya oleh staf ahli kerukunan antaragama (sejak 1985). Lalu, sejak Atho Mudzhar menjabat sebagai Kepala Balitbang, program kerja staf ahli kerukunan dimasukkan ke dalam program kerja Balitbang Kemenag di bawah lembaga sejenis LPKUB bernama Pusat Penelitian Kehidupan Beragama (PPKB). Penelitian-penelitian PPKB inilah yang di masa mendatang menjadi patokan program kerja lembaga fungsional Kemenag yang menangani bidang kerukunan antaragama, yaitu PKUB.[28]

Dengan didirikannya PKUB, peran fungsional Kemenag dalam menangani konflik antaragama dan program-program pencegahannya menjadi semakin eksplisit. PKUB menjadi tulang punggung Kemenag dalam melaksanakan program rekonsiliasi di berbagai daerah, pemetaan konflik, lokakarya, orientasi, dan dialog tentang kerukunan, juga yang terpenting adalah memfasilitasi kelahiran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang mendiseminasikan ide-ide kerukunan antarumat beragama di tingkat masyarakat. Berdasarkan Rekap Kegiatan PKUB pada 2002–2007 dan wawancara dengan Ketua PKUB Abdul Fatah, diketahui banyak sekali program yang telah dan sedang dilaksanakan oleh PKUB.[29] Secara garis besar program-program tersebut dapat dibagi menjadi tiga yaitu: 1) kegiatan pencegahan konflik antaragama, 2) kegiatan

rekonsiliasi dan pemulihan pascakonflik, dan 3) program penguatan kerjasama antaragama.

Program pencegahan konflik antaragama meliputi kegiatan-kegiatan yang bertujuan mencegah terjadinya konflik antaragama melalui identifikasi sumber dan potensi konflik di masyarakat. Di antara kegiatan yang telah dilaksanakan misalnya:

1. Peta Kerukunan. Program ini dilaksanakan selama lima tahun (2002-2006) di semua propinsi di Indonesia, kecuali Sulawesi Barat dan Kepulauan Riau. Pemetaan tersebut dilakukan untuk mengetahui potensi konflik dan potensi kerjasama antaragama di semua wilayah Indonesia.
2. Tinjauan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 84/1996. Program itu dimaksudkan untuk mereview dan menyempurnakan KMA No. 84/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerawanan Kerukunan Hidup Umat Beragama. Penyempurnaan tersebut menghasilkan KMA baru: Keputusan Menteri Agama No. 473/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerawanan Kerukunan Hidup Umat Beragama.
3. Diskusi Aliran Bermasalah. Program itu bertujuan untuk membantu menyelesaikan persoalan aliran-aliran bermasalah di daerah. Program ini sudah dilaksanakan pada 2004 di empat propinsi (Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Bali).
4. Kongres PKUB. Hingga akhir 2008 PKUB sudah dua kali diselenggarakan, yaitu pada 2006 di Jakarta dan pada 2007 di Cipanas.[30]

5. Kongres Tokoh Agama. Maksud kongres tersebut adalah untuk menginventarisasi seluruh persoalan hubungan antaragama (termasuk konflik yang sering terjadi), kemudian mencari alternatif solusi yang dapat dikerjakan bersama. Program ini dilaksanakan pada 2006 di Jakarta.[31]

Menyangkut rekonsiliasi dan pemulihan pascakonflik, PKUB telah melaksanakan beberapa program, antara lain:

1. Program Rekonsiliasi. Telah dilaksanakan di 25 propinsi yang rawan konflik antaragama. Sejak 2002-2007, tercatat konflik antaragama belum menyentuh hanya sembilan propinsi, di antaranya yaitu Aceh, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Papua, Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, dan Bangka Belitung.
2. Penyembuhan trauma (dua kali dilaksanakan). Program tersebut khusus bagi korban bencana alam dan konflik dan memiliki dua fokus. Pertama, fokus pada seluruh korban bencana alam dengan tidak memandang usia korban (misalnya korban bencana alam Tsunami Aceh yang dilaksanakan pada 2007). Kedua, program itu difokuskan pada anak-anak terlantar korban konflik Ambon.
3. Silaturahmi PKUB dengan tokoh-tokoh agama di daerah konflik. Program ini adalah program awal PKUB (tahun 2002) sebagai respons terhadap konflik yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu. PKUB melakukan silaturahmi ke Kalimantan Barat (konflik Madura-Dayak) dengan mengumpulkan be-

berapa tokoh agama dan adat untuk membahas konflik yang terjadi di wilayah mereka. Demikian juga PKUB melakukan silaturrahmi ke Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Maluku.

4. Pembinaan Umat Pengungsi. Sebagai akibat dari konflik yang terjadi di beberapa daerah, pada 2003 PKUB membuat program pembinaan umat pengungsi dalam bentuk penyediaan penampungan serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan pengungsi (korban konflik Madura-Dayak). Pada 2003 program diawali dengan mengurus pengungsi Madura yang menjadi korban konflik Sambas. Lalu kegiatan serupa dilanjutkan pula di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara.

Menyangkut program penguatan kerjasama antaragama, PKUB telah melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

1. Pembentukan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB). Program itu juga sudah terlaksana di semua propinsi kecuali Sulawesi Barat dan Kepulauan Riau.
2. Lokakarya wacana multikulturalisme untuk generasi muda lintas agama, mahasiswa, dan kalangan LSM. Lokakarya dimaksudkan untuk berbagi pengalaman, mencari solusi alternatif dalam mewacanakan kesadaran pluralitas dan multikulturalisme di masyarakat, sekaligus membuat kesepakatan bersama untuk mewacanakan kesadaran tersebut di lem-

baga masing-masing dan di masyarakat. Kegiatan ini sudah dilaksanakan di Propinsi Riau (2005), DKI Jakarta (2002-2006), Bali (2006), dan Nusa Tenggara Timur (2007).

3. Orientasi wacana multikultural untuk pemimpin-pemimpin agama. Program ini baru dilaksanakan selama setahun di DKI Jakarta (2003). Sebagian besar isi dari orientasi tersebut adalah mengulang materi yang sudah disampaikan di lokakarya.
4. Dialog. Program tersebut lebih diarahkan untuk para tokoh agama tingkat nasional. Tokoh-tokoh agama mendialogkan permasalahan kerukunan umat beragama. Program ini sudah dilaksanakan dua kali (2003 dan 2005) di Jakarta.
5. Bantuan. Bantuan yang dimaksud adalah bantuan dana yang diberikan PKUB kepada Forum Komunikasi Umat Beragama maupun Forum Kerukunan Umat Beragama di daerah yang mengusulkan kegiatan kepada PKUB. Bantuan sudah diberikan untuk daerah Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua (2005), dan Sulawesi Utara (2006).
6. Pengembangan wawasan multikultural. Bentuk dari program tersebut adalah pelatihan orientasi, dengan peserta terdiri dari para aktivis muda dari seluruh majelis agama. Di antara program-program lain, program itulah yang dijadikan salah satu program unggulan PKUB. Program tersebut telah dilaksanakan 18 kali selama empat tahun (2004-2007).
7. Kemah pemuda lintas agama. Tujuan program itu adalah untuk mengumpulkan pemuda lintas

agama dalam sebuah lokasi di mana mereka dapat berkumpul bersama dan melakukan sesuatu secara bersama-sama tanpa memandang latar agama. Dalam kegiatan kemah tersebut, setiap tenda harus diisi oleh beberapa pemuda yang menganut agama berbeda.

8. Pelatihan Penyiar Agama. Setelah melakukan perjalanan studi banding ke luar negeri, pada 2005 PKUB mulai menyelenggarakan pelatihan penyiar agama dari seluruh agama yang diakui di Indonesia. Pada 2005-2007, pelatihan telah dilaksanakan di Sumatera Utara, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Riau, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Aceh, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan.
9. Temu karya pemuda (mulai 2006). Program itu dimaksudkan untuk mengumpulkan pemuda lintas agama dan memamerkan karya mereka sebagai tindak lanjut dari program kemah pemuda lintas agama, sekaligus memberi wadah kepada pemuda lintas agama. Sejak 2006-2007 program tersebut baru dilaksanakan lima kali, yaitu di DKI Jakarta, Bali, dan Sulawesi Utara (2006); Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan (2007).

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Jika Litbang dan Diklat menjadi konseptor dalam program KUB sedangkan PKUB menjadi pelaksana, maka FKUB menjadi rekan utama keduanya di tiap daerah di Indonesia. Dikatakan menjadi rekan karena FKUB bukan lemba-

ga birokrasi yang tunduk terhadap lembaga yang berada di atasnya, tetapi lebih merupakan lembaga yang dibentuk oleh wakil-wakil umat yang mempunyai kewenangan tersendiri untuk memutuskan kebijaksanaan dan program KUB di daerahnya masing masing. Pasal-pasal pendirian FKUB di tiap daerah (pasal FKUB) menyebutkan bahwa pengurus FKUB memiliki kriteria yang jelas di mana setiap kelompok agama mempunyai perwakilan, ditambah beberapa perwakilan dari pemerintah (Gubernur/ Bupati, KanKemenag atau yang mewakilinya) sebagai dewan penasihat. Semangat pemberdayaan FKUB tak lepas dari era otonomisasi, di mana daerah-daerah didorong untuk lebih mempunyai peran dalam berbagai program pembangunan.

Dasar pembentukan FKUB adalah Perber Menag dan Mendagri No. 8 dan 9 Tahun 2006 tentang pemberdayaan FKUB. Menurut Perber tersebut, FKUB didirikan oleh masyarakat di tiap propinsi dan daerah masing-masing yang difasilitasi oleh Pemda. Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka agama setempat (pasal 10/1) yang berjumlah 21 orang di tingkat propinsi dan 17 orang di tingkat kabupaten (10/2). Komposisi jumlah keanggotaan dihitung berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal satu orang dari setiap agama yang ada di propinsi atau kabupaten tersebut. Menurut Perber, tujuan utama FKUB adalah menjadi lembaga referensi dan pengembang wacana serta praktik-praktik kerukunan antarumat beragama di daerah setempat. Di wilayah propinsi, kabupaten/kota FKUB bertugas:[32]

a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas ke-

agamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur, bupati/ walikota.

b. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

Hingga saat ini FKUB sudah terbentuk hampir di seluruh propinsi dan kebanyakan kabupaten di Indonesia.[33] Dari sudut jumlah, bila merujuk pada pasal peralihan Perber tersebut, program KUB bisa dikatakan telah mencapai target. Menag dan Mendagri menargetkan pada 21 Maret 2007 FKUB sudah terbentuk di semua propinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia. Dalam perspektif Kemenag, periode Reformasi yang lebih sadar akan masyarakat multikultural dan terbentuknya FKUB di berbagai daerah telah membuka tradisi baru dalam program pembangunan yang langsung melibatkan masyarakat, tidak seperti pada masa Orde Baru yang membuat masyarakat menunggu program dari pemerintah, sebaliknya, masyarakat didorong dan difasilitasi untuk bertemu dan berdialog membicarakan berbagai hal. Pertanyaannya adalah, sejauh mana eksistensi FKUB di berbagai daerah dalam mengemban misi dialog multikulturalis Kemenag saat ini?

Pendirian FKUB : Kasus Yogyakarta dan Bantul

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang FKUB, berikut kami paparkan proses pendirian dan dina-

mika sosial FKUB di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. FKUB di DIY dan Bantul masing-masing mewakili propinsi dan kabupaten yang memiliki pengalaman yang berbeda antara satu dengan lainnya.

Yogyakarta

Kronologi pendirian FKUB di Propinsi D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut:[34]

1. Pada 21 Maret 2006, Perber ditandatangani oleh Menteri.
2. Pada 12 Juni 2007 Peraturan Gubernur, Pergub DIY ditandatangani atau dikeluarkan: memerintahkan pembentukan FKUB di kabupaten/ kota serta Propinsi D.I. Yogyakarta.
3. Pada Juli 2007 - Oktober 2008, pertemuan-pertemuan tentang pembentukan FKUB berlangsung.
4. Akhir 2008 terbentuk susunan pengurus FKUB DIY (terdiri dari 21 orang).

Namun hingga sekarang (saat wawancara dilakukan), belum ada Surat Keputusan pengesahan pengurus FKUB dari Gubernur, sehingga, meski pengurus sudah tersusun, namun belum definitif dan belum bisa melaksanakan program-program FKUB.

Proses pendirian FKUB yang memakan waktu cukup lama mengindikasikan bahwa keberadaan FKUB di Propinsi DIY menemui banyak kendala. Di propinsi lain, FKUB berdiri dalam waktu yang relatif singkat, melalui dua sampai tiga kali pertemuan.[35] Memang benar bahwa di Yogya-

karta ada beberapa perdebatan yang intensif di kalangan calon pengurus FKUB yang menghambat terbentuknya FKUB. Di antara kendala-kendala tersebut yaitu:[36]

1. Adanya perbedaan persepsi tentang urgensi forum. Pada awalnya perwakilan beberapa organisasi masyarakat berpendapat forum ini tidak diperlukan, mengingat di Yogyakarta sudah ada forum-forum sejenis, misalnya Forum Komunikasi Antar-Umat Beragama (FKAUB). Namun setelah mempertimbangkan bahwa FKUB sudah berdiri di hampir semua kabupaten (kecuali Gunung Kidul), akhirnya mereka sepakat untuk membentuk FKUB tingkat propinsi.
2. Adanya perbedaan persepsi tentang formasi kepengurusan. Sebagian perwakilan Muslim menghendaki agar posisi-posisi pucuk pimpinan/ pengurus harian (ketua, wakil ketua, dan sekretaris) diisi oleh perwakilan umat Islam. Umat Islam, sesuai dengan jumlah populasi pemeluknya di Yogyakarta, merasa berhak mendapatkan semua posisi pengurus harian. Sebaliknya, kalangan non-Muslim berpendapat bahwa mereka juga harus dapat dimasukkan dalam kepengurusan tersebut.
3. Adanya perdebatan internal umat. Terjadi perdebatan siapa yang harus mewakili umat dari masing-masing kelompok agama.

Perdebatan-perdebatan di atas juga terjadi di Gunung Kidul. Bahkan hingga penelitian ini dilakukan (Juni 2009), FKUB di sana belum juga terbentuk. Sedangkan kepengu-

rusan FKUB DIY sekarang merupakan hasil kompromi dari perdebatan-perdebatan yang berlangsung dalam 10 kali pertemuan selama satu tahun lebih. Tiga dari pengurus hariannya adalah perwakilan Islam, termasuk sekretaris yang dipilih bersama dari kalangan Islam moderat.[37]

Bantul

Berbeda dengan yang terjadi di tingkat propinsi di DIY, FKUB Kabupaten Bantul sudah terbentuk sejak 5 September 2007. Bantul juga termasuk kabupaten di Yogyakarta yang paling awal merespons terbentuknya FKUB. Diskusi-diskusi yang diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti Perber Menag dan Mendagri no 8 dan 9 berjalan cukup lancar dan dinamis. Hanya dalam dua kali pertemuan tokoh-tokoh agama yang diundang oleh Kantor Kemenag Bantul bisa menerima pendirian Forum tersebut.[38]

Setelah keluar Pergub No. 10/2007 tanggal 12 Juni, Bupati Bantul mengeluarkan Peraturan Bupati, Perbup No. 58, pada 20 Agustus 2007 tentang pendirian FKUB di tingkat kabupaten. Pada 1 September 2007, Kantor Kemenag mengundang Majelis-majelis Agama di Bantul untuk mensosialisasikan PBM. Mereka yang diundang adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), dan Perwakilan Umat Buddha (Walubi). Empat hari kemudian Bupati Bantul menandatangani SK Kepengurusan FKUB, serta melantik 17 pengurus pada 12 September 2007.[39]

Tidak banyak terjadi silang pendapat perihal pendirian FKUB dalam forum tersebut. Masing-masing perwakilan

majelis agama sudah sering bekerjasama sebelumnya dalam FKAUB yang sudah terbentuk hingga tingkat kecamatan. Pihak mayoritas (Islam) juga tidak terlalu berkeinginan untuk menguasai formasi kepengurusan. Dari wawancara dengan ketua FKUB yang sekarang, H. Munawir, diketahui bahwa perwakilan Islam sendiri meminta perwakilan nonmuslim duduk dalam pengurus harian. Dalam susunan pengurus yang dilantik pertama kali, di samping dua perwakilan Muslim yang menjadi ketua dan wakil ketua, tiga perwakilan masing-masing dari Katolik, Kristen, dan Buddha menjadi wakil ketua II, sekretaris, dan anggota 1. Model kepengurusan seperti ini masih berlangsung hingga sekarang.[40]

Semenjak dilantik pertama kali (yaitu periode kepengurusan K.H. Zahid Ridwan) hingga sekarang (periode H. Munawir), terdapat beberapa program kerja yang telah dilaksanakan, di antaranya :

1. Sosialisasi program kerukunan dan pengenalan FKUB di seluruh kecamatan di Bantul. Dalam program ini, para pengurus FKUB memberikan keterangan tentang tugas-tugas FKUB serta isu-isu kerukunan seperti pendirian rumah ibadat dll. Sejak 2007 program tersebut sudah dilaksanakan dua kali.[41]
2. Rapat bersama tentang konflik dan kerukunan dengan FKUB Kabupaten Banyumas. Para pengurus FKUB dari dua wilayah bertukar pikiran tentang penanggulangan konflik dan ketegangan antarumat beragama.
3. Pertemuan rutin bulanan dengan perwakilan majelis-majelis agama setiap Rabu pada awal bulan

untuk merespons isu-isu sosial keagamaan yang berkembang di masyarakat.

4. Penyelesaian permasalahan tempat ibadah dengan memberikan surat rekomendasi terhadap bupati untuk beberapa kasus pendirian rumah ibadat. Program itu menunjukan peran aktif masyarakat, yang diwakili oleh pengurus FKUB, dalam memecahkan problem ketegangan antarumat beragama. Perilaku pimpinan FKUB Bantul yang selalu membentuk tim investigasi yang dipimpin oleh perwakilan dari masing-masing agama sesuai dengan objek permasalahan merupakan hal yang patut diapresiasi.

FKUB Bantul mempunyai sekretariat di Kantor Kesbanglinmas (Departemen Dalam Negeri di Kabupaten) untuk menjalankan aktivitas kesehariannya. Tenaga kesekretariatan dan biaya kegiatan rutin juga dicukupi dari kantor tersebut. Setiap tahun Kantor Kesbanglinmas mengeluarkan dana sebesar Rp. 56.000.000 hingga Rp. 68.000.000 untuk biaya operasional kegiatan. FKUB Bantul juga mendapatkan anggaran sekitar Rp. 25.000.000 per tahun dari Kemenag Kanwil Yogyakarta.[42]

Penutup

Mengingat kembali dua pertanyaan yang dikemukakan pada awal diskusi, yaitu *sejauh mana proram KUB didorong dan diselenggarakan Kemenag*, dan *apakah yang sudah dan belum atau tidak dilaksanakan dalam pencapaian program tersebut*, tulisan ini telah menegaskan bahwa dinamika sosial politik masyarakat berperan besar dalam memengaruhi

orientasi kebijakan pemerintah Orde Reformasi, termasuk Kemenag. Kesadaran akan kebebasan berekspresi, termasuk ekspresi beragama, yang menguat pasca-Reformasi 1998, memengaruhi pemikiran dan orientasi kebijakan-kebijakan selanjutnya yang dikeluarkan Kemenag. Transformasi gerakan reformasi memaksa Kemenag untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih memperhatikan kemajemukan masyarakat.

Secara umum, Kementerian Agama Orde Reformasi berbeda dari Orde Baru dalam hal orientasi mereka berkenaan dengan kebijakan KUB. Berbagai program dijalankan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dan kesadaran akan potensi kearifan lokal dalam memecahkan persoalan-persoalan antar kelompok di masyarakat. Secara konseptual, apa yang dicanangkan Kementerian Agama masa kini melalui PKUB, FKUB, dll. dalam hal dialog antarumat agama lebih mengakomodasi masukan dari masyarakat.

Akan tetapi, dalam praktiknya, sikap Kementerian Agama yang lebih membumi sering menimbulkan masalah baru. *Kehati-hatian* Kementerian Agama dalam memutuskan suatu kebijakan menimbulkan kesan kurang tegas. Pada beberapa kasus, seperti Ahmadiyah, terlihat keputusan Kementerian Agama yang mendua, di satu sisi ingin melindungi Ahmadiyah sebagai kaum minoritas dari amukan massa penentang yang menginginkan pembubaran; di sisi lain Kementerian Agama juga membiarkan peluang kepada masyarakat untuk melakukan tindak kekerasan. Kementerian Agama dalam kasus Ahmadiyah tidak menentukan secara tegas sikapnya dalam hal kebebasan beragama. Contoh lain ialah sikap diam Kementerian Agama

terhadap pelarangan hadirnya Nasr Hamid Abu Zayd pada forum *Indonesian Conference for Islamic Studies* di Jakarta oleh kelompok suatu Muslim. Hal itu semakin memperlihatkan ketidakberdayaan Kementerian Agama di hadapan kelompok tertentu.

Di sisi lain, semangat demokratisasi dan otonomisasi Orde Reformasi, yang diterjemahkan Kementerian Agama sebagai keterlibatan masyarakat dalam mengurusi bidang kerukunan umat beragama (misalnya lewat FKUB), perlu diikuti dengan pengetahuan dan kesadaran akan kekayaan potensi kearifan lokal. Dalam hal itu, pengertian keterwakilan di lembaga-lembaga keagamaan seperti FKUB tidak boleh dibatasi secara sempit dengan aturan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah perlu terus menggali nilai-nilai lokal yang menjadi modal kerukunan bagi masyarakat setempat. Sesungguhnya, tradisi lokal di berbagai daerah mampu menjembatani perselisihan antarkelompok masyarakat.

Penekanan FKUB pada keterwakilan secara kuantitas dan formalitas (yang mengacu pada data BPS) merupakan bentuk pemaksaan, hal itu juga berarti melupakan potensi-potensi kerukunan yang sudah ada dalam masyarakat dan bisa menjadi alat bagi kelompok dominan untuk meminggirkan kelompok lain.

Kita harus mengakui bahwa di negara berkembang yang multikultural, seperti di Indonesia, konflik kepentingan golongan tidak mungkin dihindari. Kondisi tersebut membuat lembaga seperti Kementerian Agama masih memiliki tempat untuk mengatur lalu lintas antarmasyarakat berbeda agama, meski banyak resistensi yang terjadi sebagai akibat dari anggapan bahwa peran tersebut merupakan ben-

tuk campur tangan pemerintah dalam urusan privat masyarakat. Pengakuan itu perlu diungkapkan, namun dengan sikap tetap mendorong Kementerian Agama untuk lebih memahami diversitas masyarakat dan budayanya, serta menghindari hegemoni terhadap masyarakat lokal di daerah-daerah.

Akhirnya, dilihat dari program kerukunan yang sudah dilaksanakan Kementerian Agama, dapat diketahui bahwa praktek dialog lewat Kementerian Agama masuk ke dalam kategori dataran 2, 3, dan 6. Melalui WMAUB, para pemimpin keagamaan diajak untuk saling berjumpa untuk membicarakan masalah-masalah bersama dan memecahkannya sesuai dengan tradisi atau keyakinan masing-masing umat. Mereka yang aktif terlibat dalam forum tersebut adalah para pemimpin umat beragama yang diyakini mempunyai pemahaman keagamaan memadai untuk dapat memecahkan persoalan kemasyarakatan.

LPKUB, Litbang, dan PKUB memiliki program berbeda-beda namun saling mengisi pada dataran ketiga (lihat Bab 1). Program dialog perihal kerukunan yang dilahirkan lembaga-lembaga tersebut digali dari masing-masing sumber keagamaan, dan dilaksanakan dalam rangka memenuhi ajaran masing masing agama.

FKUB adalah lembaga yang direkayasa Kementerian Agama untuk mendorong praktek dialog di semua dataran. FKUB sesungguhnya didesain untuk mempertemukan umat beragama, menggiatkan pemahaman tentang agama lain, dan menyelesaikan permasalahan bersama oleh semua umat. Setiap kegiatan dialog sebenarnya memungkinkan terjadinya pengalaman pada dataran 1 hingga 7, akan tetapi, harus diakui bahwa FKUB sekarang lebih banyak ber-

fungsi hanya sebagai penengah antara umat yang berselisih dalam hal pembangunan tempat ibadah dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Dari kenyataaan tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan dialog yang dilaksanakan FKUB menekankan pengalamannya pada dataran keenam (dialog aksi).[]

4
Wajah Dialog Agama dalam Diplomasi Indonesia

Perkembangan yang terjadi, baik di lingkungan domestik maupun internasional, mendorong kegiatan dialog antaragama (*interfaith dialogue*)[1] menjadi perhatian tidak hanya pihak yang berhubungan langsung dengan komunitas agama, melainkan juga dengan pihak atau lembaga yang secara sepintas tampak tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan dialog antaragama. Terkait hal itu, sejak 2002 pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), menaruh perhatian khusus pada kegiatan dialog antaragama. Hal itu terbukti dengan beragamnya kegiatan dialog antaragama yang berasal dari inisiatif Kemenlu, baik dalam skala nasional, regional, bahkan internasional. Kegiatan dialog antaragama kemudian menjadi salah satu prioritas program dalam diplomasi publik dan juga menjadi bagian dari Diplomasi Total yang sedang dijalankan oleh Kemenlu.

Seperti dikatakan oleh Umar Hadi, Direktur Direktorat Diplomasi Publik ketika penelitian ini dilakukan, beberapa kegiatan yang menjadi prioritas Kemenlu dalam menjalankan Diplomasi Publik antara lain:[2] *Pertama,* kegiatan yang mendukung pelaksanaan demokrasi, misalnya menggelar *Global Intermedia Dialogue* bekerjasama dengan pemerintah Norwegia. *Kedua***,** dialog antaragama dan pemberdayaan kelompok moderat. *Ketiga***,** upaya perbaikan ekonomi. Kemenlu memberikan perhatian khusus untuk kegiatan dialog antaragama, misalnya dengan berinisiatif mengadakan beragam kegiatan dan kerjasama di bidang dialog antaragama dengan organisasi nonpemerintah maupun dengan pemerintah negara lain, baik secara bilateral, regional, maupun internasional.

Berkaitan dengan fakta tersebut maka bagian ini akan membahas: a) kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan oleh Kemenlu dalam bidang dialog antaragama, b) faktor apa saja yang melatarbelakangi kegiatan dialog antaragama, c) kendala apa saja yang dihadapi Kemenlu dalam menjalankan kegiatan dialog antaragama dalam diplomasi, dan d) bagaimana prospek kegiatan dialog antaragama tersebut di masa depan. Sumber data yang digunakan antara lain adalah hasil wawancara dengan pejabat Kemenlu, makalah seminar dan konferensi terkait kegiatan dialog antaragama yang dijalankan Kemenlu, publikasi resmi kegiatan dialog antaragama yang dikeluarkan Kemenlu, situs internet, dan sumber lainnya.

Hubungan Antaragama dan Diplomasi

Sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia, Kemenlu mempraktikkan apa yang disebut sebagai Diplomasi Total sejak 2002. Diplomasi Total adalah diplomasi yang memandang setiap isu secara komprehensif dan melibatkan seluruh komponen bangsa, sehingga keberhasilan diplomasi menjadi capaian semua komponen bangsa.[3] Diplomasi Total juga dianalogikan seperti *total football*, di mana sebuah gol yang tercipta merupakan hasil kerjasama semua pemain. Jadi, semua pemain mempunyai kontribusi dalam mewujudkan satu tujuan.[4] Diplomasi Total pun berarti melibatkan semua komponen masyarakat dalam pelaksanaan diplomasi sehingga perlu bagi Kemenlu untuk, misalnya, berkolaborasi dengan berbagai universitas dalam melakukan kuliah berkala. Contoh lain adalah kerjasama dengan media, misalnya dengan menjalin hubungan antara Menlu dengan para pemimpin redaksi media yang ada di Indonesia, atau menjalin hubungan baik dengan para pemimpin dan tokoh agama. Jadi, Total Diplomasi bersifat komprehensif dan timbal balik (dua arah). Kemenlu dalam hal ini berusaha untuk menampung ide, gagasan, dan aspirasi dari semua pihak.

Untuk menunjang pelaksanaan Diplomasi Total, sejak Maret 2002 Kemenlu membentuk Direktorat Diplomasi Publik yang bertugas menjangkau masyarakat umum.[5] Berbeda dengan upaya diplomasi konvensional dimana pemerintah harus mampu berhadapan dengan pemerintah negara lain, maka dalam diplomasi publik pemerintah suatu negara harus siap berhadapan dengan aktor-aktor nonpemerintah atau publik di dalam negeri dan di negara lain. Ada

dua hal yang mendasari hal tersebut: *pertama,* nilai penting kemitraan antara Kemenlu dengan berbagai kalangan masyarakat untuk menjalankan peran dalam upaya menjangkau aktor-aktor nonpemerintah dan publik di luar negeri; dan *kedua***,** terdapat keperluan untuk membangun konstituen politik luar negeri yang mendapat cukup informasi melalui berbagai skema edukasi publik. Dengan adanya komunikasi tersebut, maka, di satu sisi, Kemenlu bisa menyerap aspirasi masyarakat yang sangat berarti dalam proses perumusan dan operasionalisasi kebijakan, dan, di sisi lain, Kemenlu bisa membentuk konstituen politik luar negeri yang mengerti atau bahkan mendukung kebijakan yang diambil.[6]

Sebagai sebuah kegiatan, diplomasi publik bukan barang baru bagi Kemenlu dan secara fungsional telah sejak lama dijalankan oleh kantor-kantor perwakilan RI di luar negeri, namun, perkembangan dunia diplomasi dewasa ini menuntut agar diplomasi publik dilaksanakan dengan lebih aktif dan terarah.[7] Hal itu dikuatkan oleh pendapat Umar Hadi bahwa sebenarnya diplomasi publik telah sejak dulu dilakukan para diplomat Indonesia, misalnya dengan datang ke berbagai universitas untuk mengadakan kuliah tahunan. Namun, dengan adanya Direktorat Diplomasi Publik, semua kegiatan yang berkaitan dengan diplomasi publik menjadi lebih terintegrasi dan terarah, termasuk kegiatan dialog antaragama, karena terdapat agenda yang telah ditentukan setiap tahun dengan metode tertentu.[8] Diplomasi publik juga diharapkan menjadi alat pendukung diplomasi yang efektif, membumi, dan tepat sasaran serta mampu menjalankan kegiatan yang mempromosikan demokrasi, Islam moderat, kebijakan pembangunan ekonomi progresif,

peran aktif Indonesia dalam upaya memelihara perdamaian dunia, dan peran aktif Indonesia dalam membangun kawasan Asia Tenggara yang aman, stabil, dan sejahtera.[9]

Salah satu misi dalam diplomasi publik adalah untuk mendukung usaha Indonesia yang secara tegas menolak pengaitan terorisme dengan agama atau budaya tertentu. Dalam upaya memberantas terorisme, peningkatan kerjasama internasional untuk pengembangan kapasitas merupakan suatu keniscayaan. Untuk itu, keberhasilan memberantas terorisme dalam jangka panjang akan sangat bergantung pada keberhasilan memberdayakan kelompok moderat. Dalam upaya memberdayakan kelompok moderat tersebut, pemerintah Indonesia memprakarsai berbagai kegiatan dialog antaragama yang diusahakan menjadi fitur tetap diplomasi Indonesia di masa depan. Beberapa kegiatan yang telah diadakan Direktorat Diplomasi Publik dalam bidang dialog antaragama, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional, antara lain melibatkan organisasi agama nonpemerintah, media, pemuda, dan sebagainya. Kegiatan yang melibatkan organisasi agama nonpemerintah antara lain *International Conference of Islamic Scholars (ICIS)*. Kegiatan itu merupakan kerjasama Kemenlu dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang melibatkan tokoh-tokoh Islam, baik dari kalangan akademisi, praktisi, maupun politisi dari berbagai negara. Kegiatan yang mengangkat tema besar *Islam as Rahmatan lil `Alamin* ini telah diadakan sebanyak tiga kali.

ICIS pertama kali diadakan di Jakarta pada Februari 2004 dengan mengusung tema *Upholding Islam as Rahmatan lil Alamin.*[10] Mengikuti suksesnya pelaksanaan ICIS I, maka diadakan ICIS II di Jakarta pada Juni 2006 dengan

tema *Upholding Islam as Rahmatan lil Alamin towards Justice and Peace*. ICIS II dibuka secara resmi oleh Presiden RI dan diisi paparan kunci oleh PM Malaysia, Pangeran Ghozi (mewakili Kerajaan Jordan), dan Mgr. Khalid al-Akasheh (mewakili Tahta Suci Vatikan). Konferensi yang dihadiri oleh 209 peserta dari 54 negara tersebut membahas masalah-masalah keumatan yang menonjol, antara lain bagaimana mengatasi *Islamophobia,* dari dalam umat Islam sendiri maupun dalam konteks membangun jembatan pemahaman global. Para pemimpin juga mengajak para cendekiawan untuk mengatasi ketertinggalan dalam menjawab persoalan keadilan dan kemajuan. Sebagai tindak lanjut dan sosialisasi hasil-hasil ICIS II, Menlu RI dan Ketua Umum PBNU, yang juga merupakan Sekjen ICIS, K.H. Hasyim Muzadi, telah menyepakati beberapa hal, antara lain kunjungan ke Jeddah pada Agustus 2006 untuk bertemu dengan Presiden Islamic Development Bank, Deputi Bidang Iptek Organisasi Konferensi Islam, dan Sekjen Liga Muslim Dunia; juga kunjungan ke New York pada September 2006 untuk menyampaikan presentasi dalam *Tripartite Forum on High Level Conference on Interfaith Cooperation for Peace* di PBB; serta pertemuan dengan Sekjen WCRP dan kunjungan ke Brussels, London, Vatikan, dan Abu Dhabi.

Selanjutnya, ICIS III mengangkat tema *Upholding Islam as Rahmatan lil Alamin: Peace Building and Conflict Prevention in the Muslim World,* diadakan di Jakarta pada 29 Juli hingga 1 Agustus 2008. ICIS III dihadiri oleh 360 partisipan dari 64 negara dengan tujuan menciptakan kerjasama dan solidaritas untuk membangun perdamaian dan mencegah konflik, terutama di dunia muslim, melalui trans-

formasi nilai Islam sebagai *Rahmatan lil `Alamin* dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seluruh hasil kesepakatan ICIS III menjadi rekomendasi bagi upaya rekonsiliasi konflik di sejumlah negara Islam. Rekomendasi yang dimaksud dapat digunakan PBB, lembaga-lembaga dunia lainnya, atau pihak-pihak di sejumlah negara Islam yang sedang berkonflik. Hasil penting dari ICIS III adalah *Pesan Jakarta* (*Jakarta Message*), di dalamnya tertuang hasil-hasil konferensi seperti terbentuknya istilah *ulama sans frontieres, atau* ulama *cross-borders* (lintas batas), yaitu ulama yang dapat melewati batas wilayah negara dan masyarakat untuk membawa misi perdamaian dunia. Ulama *sans frontieres* diharapkan dapat mengemban misi perdamaian dengan kemampuan menyelesaikan konflik di berbagai wilayah dunia, khususnya di dunia Muslim.

ICIS diharapkan dapat menjadi lembaga tetap dengan pertemuan pada tingkat internasional empat tahun sekali, dan pada tingkat regional setiap dua tahun. Selain itu, ICIS akan membentuk perwakilan di lima kawasan, yaitu Asia Timur dan Pasifik, Asia Selatan dan Tengah, Timur Tengah, Afrika, serta kawasan Amerika dan Eropa.[11] Menurut Menlu RI, Dr. Nur Hassan Wirajuda, ICIS juga berfungsi sebagai bagian dari jalur diplomasi informal bagi pemerintah Indonesia untuk turut menciptakan perdamaian dunia, karena pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan jalur diplomasi formal. Seluruh komponen bangsa, dalam hal itu organisasi kemasyarakatan Islam seperti NU dan Muhammadiyah, juga harus dilibatkan. ICIS dalam konteks tersebut bisa menjadi diplomasi jalur kedua (diplomasi melalui jalur nonpemerintah), sebagai alternatif dari diplomasi jalur pertama (diplomasi melalui jalur pemerintah).[12]

Selain dengan Nahdlatul Ulama, Kemenlu juga bekerjasama dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah untuk mengadakan *World Peace Forum. World Peace Forum* yang pertama diadakan di Jakarta pada Agustus 2006. Sebagai hasil kerjasama dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah dan Multi Culture Society, forum tersebut menjadi tempat bagi tokoh-tokoh kunci dunia untuk menyuarakan pesan perdamaian dunia dengan meninggalkan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan. Selain itu, sesuai dengan tema *One Humanity, One Destiny, One Responsibility,* ada harapan untuk menghasilkan *platform* bersama untuk mendorong dan menjamin terciptanya perdamaian dunia. *World Peace Forum* diikuti sekitar 200 tokoh perdamaian dunia, tokoh politik, tokoh lintas agama, dan *think tank* dari dalam dan luar negeri. Dalam kegiatan tersebut Kemenlu memberikan bantuan dalam bentuk substansi serta identifikasi dan penyampaian undangan melalui perwakilan-perwakilan RI di luar negeri.[13]

Menyusul keberhasilan *World Peace Forum* pertama, pada Juni 2008 Muhammadiyah, Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations, dan The Cheng Ho Multi Culture Trust, mengadakan *World Peace Forum* kedua di Jakarta. Dengan tetap mengusung tema *One Humanity, One Destiny, One Responsibility* sebagai kerangka dialog, *World Peace Forum* kedua fokus pada permasalahan konflik dan kekerasan, serta cara untuk mengatasinya. Beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam *World Peace Forum* II antara lain: *pertama***,** menyediakan forum dialog perdamaian di antara para tokoh kunci dari peradaban dunia; *kedua***,** menggali nilai-nilai kemanusiaan, tujuan bersama, dan tanggungjawab bersama umat manusia yang dapat digunakan seba-

gai kekuatan pemersatu dalam usaha menghapus masalah kekerasan dan menegakkan perdamaian dunia; *ketiga*, mempererat jaringan dialog di antara peradaban yang berbeda untuk meningkatkan toleransi dan rasa saling menghormati; dan *keempat,* mengupayakan supaya peradaban yang berbeda dapat bekerjasama dengan lebih baik untuk menyebarkan suara perdamaian.[14]

Kegiatan dialog antaragama yang dilakukan Kemenlu juga melibatkan kerjasama antar-beberapa negara di kawasan Asia Pasifik, utamanya negara-negara ASEAN. Salah satu kegiatan yang cukup penting adalah *Regional Interfaith Dialogue and Cooperation,* sebuah forum sebagai tempat bertemunya negara-negara di kawasan regional Asia Pasifik dalam bidang dialog antaragama. Kegiatan yang melibatkan empat negara sebagai sponsor utama, yaitu Indonesia, Filipina, Australia, dan Selandia Baru ini, hingga 2008 telah mengadakan empat kali pertemuan. *Regional Interfaith Dialogue* yang pertama merupakan hasil kolaborasi antara Kemenlu, Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia, dan Pengurus Pusat Muhammadiyah. Pertemuan pertama diadakan di Yogyakarta pada 2004 dengan tema *Dialogue on Interfaith Cooperation: Community Building and Harmony.* Pertemuan itu menghasilkan rekomendasi untuk mendirikan International Center for Religious and Cultural Cooperation di Yogyakarta, yang diharapkan dapat menyediakan pendekatan unik untuk memajukan perdamaian dan stabilitas dunia. International Center for Religious and Cultural Cooperation juga menjadi sarana untuk, antara lain: meningkatkan kerjasama dam rekonsiliasi antarkomunitas agama, pendidikan dan penelitian antaragama dan dialog lintas budaya, memperkuat su-

ara kaum moderat dan kapasitas institusional, pelatihan di bidang dialog lintas budaya dan pembangunan perdamaian lintas agama, serta menyediakan publikasi program secara regular.[15]

Pertemuan kedua mengambil tema *Cebu Dialogue on Regional Interfaith Cooperation for Peace, Development and Human Dignity* yang diadakan di Cebu, Filipina, pada 2006, dan dihadiri oleh 15 negara, yaitu seluruh negara ASEAN, beserta Australia, Selandia Baru, Papua New Guinea, Timor Leste, dan Fiji. Total peserta berjumlah 175 orang. Delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut terdiri dari tokoh lintas agama, akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Hasil penting dalam *Regional Interfaith Dialog* kedua yaitu *Declaration of the Cebu Dialogue on Regional Interfaith Cooperation for Peace, Development and Human Dignity.* Deklarasi Cebu menghasilkan kesepakatan perlunya perbaikan sistem dan kurikulum pendidikan; peningkatan dialog dan kerjasama/jejaring antara dunia pendidikan dan pemerintah, tokoh agama dan media.[16]

Pertemuan ketiga dengan tema *Building Bridges* diadakan di Waitangi, Selandia Baru, pada 2007 dan menghasilkan *Waitangi Declaration and Plan of Action.* Beberapa bidang yang termasuk dalam Rencana Aksi antara lain bidang pendidikan, media, pembangunan hubungan, dan Aliansi Peradaban.[17] Selanjutnya, pertemuan keempat yaitu *Phnom Penh Dialogue 2008 on Interfaith Cooperation for Peace and Harmony* diadakan di Phnom Penh, Kamboja, pada 2008 dan menghasilkan *Deklarasi Phnom Penh*. Dalam Deklarasi Phnom Penh dihasilkan komitmen untuk menjalankan kerjasama dialog antariman; perdamaian sebagai prioritas utama; meningkatkan partisipasi dari kalangan pemuda dan

perempuan; membagi contoh pengalaman sukses dalam bidang dialog dan kerjasama antaragama kepada masyarakat, serta mendorong pihak lain untuk berpartisipasi; dan kerjasama antariman dalam isu-isu penting di masyarakat seperti kemiskinan, HIV dan AIDS, Hak Asasi Manusia, isu lingkungan dan bencana alam.[18] Deklarasi Phnom Penh juga memasukkan 17 Rencana Aksi dengan 17 rekomendasi yang berkaitan dengan bidang kerjasama/hubungan, pendidikan dan pengembangan kapasitas, resolusi konflik dan pembangunan perdamaian, inisiatif akar rumput serta media, dan peningkatan kesalingpengertian antar agama.[19] Dalam pertemuan *Regional Interfaith Dialogue*, Indonesia hampir selalu mengirimkan delegasi dengan jumlah terbanyak, dan pada pertemuan keempat di Phnom Penh delegasi Indonesia mengikutsertakan perwakilan dari mahasiswa dan pemuda serta perempuan sebagai upaya untuk melibatkan mereka dalam kegiatan dialog antaragama.

Selain *Regional Interfaith Dialogue,* Indonesia, melalui Kemenlu, juga berinisiatif untuk mengadakan kegiatan dialog antaragama melalui beberapa forum regional, seperti melalui ASEM *(Asia-European Meeting)* dan APEC *(Asia Pacific Economic Cooperation).* Melalui ASEM, Indonesia mendorong diadakannya *ASEM Interfaith Dialogue,* sebuah kerjasama dialog antaragama yang diadakan oleh negara-negara Asia dan Eropa. Kegiatan *ASEM Interfaith dialogue* telah diadakan empat kali. Pada *ASEM Interfaith Dialogue* pertama di Bali pada 2005, tema yang diangkat adalah *Building Interfaith Harmony within the International Community* dengan tujuan meningkatkan rasa saling mengerti dan saling menghormati di antara semua kepercayaan dan agama, khususnya di Asia dan Eropa, serta mengajukan re-

komendasi untuk mengaktualisasikan harmoni antarkepercayan di dalam masyarakat international. Dalam kegiatan ini, *co-sponsorship* Indonesia adalah Inggris dan Komisi Eropa.[20]

ASEM Interfaith Dialogue kedua, *Larnaca Dialogue,* diadakan di Larnaca, Cyprus, pada 2006; pertemuan ketiga, *Nanjing Dialogue*, diadakan di Nanjing, Cina, pada 2007; pertemuan keempat, *The Hague Dialogue,* diadakan di Belanda pada 2008. Jumlah negara yang menjadi *cosponsorship* dalam kegiatan ini akan terus diperbanyak.[21]

Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kemenlu, melalui sekretariat APEC memfasilitasi penyelenggaraan *Interfaith Dialogue* dalam kerangka APEC dalam format *APEC Intercultural and Faith Symposium: Building Mutual Trust and Acceptance for the Stability and Prosperity of the APEC Region* di Yogyakarta, pada Oktober 2006. Hasil dari kegiatan tersebut disampaikan dalam pertemuan para pemimpin APEC, pada akhir Oktober 2006 di Hanoi Vietnam.

Selain dalam skala regional, pemerintah Indonesia juga memfasilitasi beberapa rangkaian pertemuan bilateral dengan beberapa negara dibidang dialog antaragama, antara lain:[22]

1. Indonesia-Australia. Pertemuan diselenggarakan di Melbourne dan Sydney pada September 2005, hasil kerjasama antara Kemenlu Indonesia dan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia.
2. Indonesia-Vatican. Pertemuan diadakan di Vatican pada September 2005 dan November 2007, hasil kerjasama Kemenlu Indonesia dengan Kemlu Vatican.
3. Indonesia-Belanda. Pertemuan diadakan di Hague,

28 Februari - 1 Maret 2006 dengan mengangkat tema *The Indonesia-Netherlands Interfaith Dialogue Peaceful Coexistence and Interfaith Cooperation.* Kemenlu dalam kegiatan tersebut bekerjasama dengan Kemlu Belanda dan beberapa LSM di Belanda.

4. Indonesia-Canada. Pertemuan diselenggarakan di Ottawa, Oktober 2007, hasil kerjasama antara Kemenlu dengan Kemlu Canada. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan *The Interfaith Messages,* lalu ditindaklanjuti dengan *ASEAN-Canada Bilateral Interfaith Dialogue* pada November 2008 di Indonesia.
5. Indonesia-Inggris. Khusus dengan Inggris, pemerintah Indonesia melalui Kemenlu meluncurkan Indonesia-UK Islamic Advisory Group (IUIAG). Kegiatan itu dilaksanakan di London pada Januari 2007. Pembentukan kelompok tersebut merupakan realisasi dari pertemuan antara PM Blair dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Maret 2006 di Jakarta. Kelompok yang terdiri dari 7 orang tokoh agama Islam Indonesia dan 7 orang tokoh agama Inggris akan membuat suatu rekomendasi untuk pemerintah kedua negara agar melakukan kontra ekstremisme agama, mempromosikan Islam sebagai agama *rahmatan lil `alamin*, serta mempromosikan kesalingpengertian antara Islam dan Barat. Pertemuan kedua IUIAG diadakan di Jakarta pada Juni 2007. Selanjutnya dilakukan *Interfaith Exchange* antara tokoh lintas agama kedua negara yang dilaksanakan di Inggris pada November 2007 dan di Indonesia pada Februari 2008.

Kemenlu juga melihat peran penting media dalam kegiatan dialog antaragama. Hal itu berawal dari maraknya kontroversi seputar kemunculan kartun yang dianggap melecehkan Nabi Muhammad dan umat Islam oleh harian *Der Spiegel* di Jerman. Kemenlu kemudian berinisiatif mengadakan *Global Intermedia Dialogue* (GIMD) sebagai respons atas peristiwa tersebut. Pertemuan pertama berlangsung di Bali pada September 2006 bekerjasama dengan Kemlu Norwegia sebagai *co-sponsor* dan dihadiri oleh 73 tokoh media/jurnalis dari 44 negara. Kegiatan itu antara lain bertujuan untuk membicarakan peran pers dalam masalah sensitivitas dan toleransi antarbudaya dan antaragama.[23]

GMID I kemudian diikuti oleh GIMD II yang dilaksanakan di Oslo, Norwegia, pada Juni 2007. GIMD II diliput oleh 77 wartawan nasional dan 20 wartawan dari kantor berita asing di Jakarta. GIMD lebih ditujukan sebagai ajang saling tukar pengalaman para tokoh media tersebut. Dari hasil diskusi, para peserta umumnya sepakat menolak pengaturan kode etis global. Namun para peserta merasa terinspirasi dan menyadari pentingnya peran mereka dalam peningkatan toleransi dan sensitivitas antarbudaya antaragama. Selanjutnya GIMD III diadakan di Bali pada Mei 2008 dengan tema *Ethical Journalism in Extreme Conditions: the Challenge of Diversity*, dihadiri oleh 125 jurnalis dan editor dari 61 negara. Jumlah negara yang menjadi *co-sponsor* dalam kegiatan ini juga terus ditambah.[24]

Kemenlu juga memfasilitasi pihak perseorangan atau perwakilan dari organisasi keagamaan dalam kegiatan dialog antaragama, seperti *Tripartite Forum on Interfaith Cooperation for Peace,* yang dilaksanakan di Markas Besar PBB di New York, pada Juni 2005. Forum yang merekomen-

dasikan pembentukan *open-ended consultative group* ini dihadiri oleh para perwakilan negara anggota PBB, organisasi dalam sistem PBB, serta tokoh-tokoh/pemuka agama dan masyarakat madani (*civil society).* Dalam forum tersebut, ketua PBNU saat itu, K.H. Hasyim Muzadi, menyampaikan presentasi *Moderation as the Pillar of a Peaceful and Harmonious Multi-Cultural and Multi-Faith Society: the Indonesian Experience.* Dengan posisinya sebagai co-President World Conference of Religions for Peace *(WCRP),* Indonesia juga telah mengadakan kunjungan kehormatan kepada Sekjen WCRP, Dr. William F. Vendley, di New York pada September 2006.

Pertemuan *Regional Interfaith Dialogue and Cooperation* mengamanatkan, salah satunya, peningkatan keterlibatan kaum muda dalam kegiatan dialog antaragama. Hal itu tampaknya mendorong Kemenlu untuk berinisiatif mengadakan kegiatan seperti *Interfaith Youth Camp* yang melibatkan partisipasi aktif kaum muda. Kegiatan tersebut merupakan program baru pemerintah Indonesia yang melibatkan partisipan dari berbagai negara berusia 18-28 tahun. *Interfaith Youth Camp* I diadakan di Surabaya, Indonesia, pada Juli 2008. Dalam kegiatan itu peserta tinggal bersama dalam perkemahan dan rumah penduduk yang memiliki latar belakang agama dan budaya yang berbeda. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan terjadi perubahan dalam cara pandang, cara pikir, dan cara bersikap menjadi lebih positif terhadap pihak yang berbeda keyakinan. [25]

Tantangan Internasional dan Domestik

Diplomasi yang dijalankan pada masa sekarang berbeda dengan diplomasi yang dijalankan pada masa sebelumnya. Diplomasi abad 21 lebih menekankan pada hubungan antarmasyarakat atau hubungan antarmanusia. Diplomasi publik yang dilakukan Kemenlu juga mengusung tema tersebut. Dahulu negara adalah segalanya, dalam arti memegang peran paling penting dan paling menentukan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, sedangkan manusia atau individu tidak mendapat porsi perhatian yang cukup. Diplomasi masa dahulu adalah diplomasi antara penguasa dengan penguasa. Diplomat adalah utusan negara yang dipilih karena kedekatan kekerabatan. Namun, sejak Perang Dunia II berakhir, ketika demokrasi menjadi penting, peran manusia juga menjadi lebih diperhatikan. Saat ini pemerintah mau tidak mau harus mengadopsi keinginan rakyatnya.

Keputusan negara merupakan suatu diskusi atau interaksi yang matang sehingga merupakan sebuah pilihan rasional. Tujuannya ialah agar keputusan negara menjadi dapat diprediksi. Hal itu menjadi penting mengingat para pembuat kebijakan akan menemui kesulitan dalam proses pembuatan kebijakan jika keputusan negara tidak dapat diprediksi. Diplomasi masa sekarang tidak hanya menjadi ujung tombak dalam mencapai kepentingan nasional, tapi juga mendekatkan faktor-faktor di luar negeri, atau faktor internasional, dengan faktor-faktor yang ada di dalam negeri, seringkali disebut sebagai *intermestik*.[26] Terma intermestik berarti bahwa, dalam politik internasional setiap kebijakan yang diambil oleh suatu negara akan sangat

dipengaruhi oleh faktor internasional dan faktor domestik. Dalam perkembangan hubungan internasional dewasa ini, isu agama menjadi sebuah isu kebijakan intermestik,[27] artinya ialah jika terkait isu agama, maka sebuah kebijakan yang diambil suatu negara harus memperhatikan beragam faktor yang berasal dari lingkungan internasional dan lingkungan domestik, tidak bisa hanya mempertimbangkan salah satunya saja.

Dari paparan di atas, tampak terjadi perkembangan yang cukup menarik dalam diplomasi pemerintah RI, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan dialog antaragama. Beberapa hal yang menjadi latar belakang isu dialog antaragama masuk ke dalam diplomasi Indonesia, antara lain, adalah kenyataan bahwa unit politik tertinggi masih berada di pihak pemerintah. Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia, yang berpedoman pada filosofi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Dasar Negara dan Konstitusi, mempunyai mandat untuk menyelamatkan kelangsungan hidup negara. Jadi, hal tersebut berkaitan dengan masalah kelangsungan hidup negara yang juga berhadapan dengan potensi ancaman ideologi dan serangan nonfisik, terutama tantangan dalam pembangunan negara bangsa. Karena yang menjadi garis depan adalah diplomasi, maka kewajiban dari diplomasi, selama ia masih menjadi alat negara, adalah untuk menyelamatkan negara.[28]

Dasar pemikiran yang mendorong inisiatif Kemenlu untuk memasukkan isu dialog antaragama dalam diplomasi adalah seperti yang dinyatakan Dr. Nur Hasan Wirayuda pada pidato pembukaan *Yogyakarta Dialogue* pada Desember 2004, "Our success in the fight against terrorism, in the medium and long term, will depend on the success of

our efforts in empowering the moderates -both within our respective societies and among the moderate countries" (kesuksesan kita dalam perang melawan terorisme, dalam jangka menengah dan panjang, akan bergantung pada kesuksesan usaha kita dalam memberdayakan kaum moderatbaik di dalam masyarakat maupun di antara negara-negara moderat).

Masuknya dialog antaragama ke dalam agenda penting diplomasi Indonesia merupakan respons terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan domestik dan internasional. Beberapa faktor dari lingkungan internasional yang mendorong dimasukkannya dialog antaragama ke dalam pelaksanaan diplomasi publik yang dilakukan Indonesia antara lain: *pertama,* terorisme sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional; *kedua,* adanya label *Islamic terrorism;* dan *ketiga,* menguatnya unilateralisme Amerika. Sedangkan dari lingkungan domestik, beberapa faktor pendorongnya antara lain: *pertama,* adanya kendala legal infrastruktur dan kapasitas institusional dalam menghadapi ancaman terorisme; *kedua,* adanya krisis persepsi Barat lawan Islam; *ketiga,* keperluan untuk menyeimbangkan kebutuhan keamanan dengan demokratisasi dan perlindungan HAM; dan *keempat,* keperluan untuk memproyeksikan citra Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.[29]

Faktor internasional pertama, terorisme sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional, sangat terkait dengan perubahan besar yang terjadi dalam politik internasional, yaitu berakhirnya Perang Dingin dan, terutama, serangan 11 September 2001. Berakhirnya Perang Dingin selain mendorong perubahan konstelasi politik internasional yang semula menganut struktur bipolar—

dengan Amerika Serikat dan (dahulu) Uni Soviet—juga memunculkan isu-isu baru dalam hubungan internasional. Hubungan internasional tidak lagi berkutat pada isu *hard power* seperti militer, melainkan pada isu-isu *soft power* seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, berakhirnya Perang Dingin juga menjadikan peran agama semakin mengemuka. Bahkan menurut Scott M. Thomas, saat ini merupakan momen terjadinya *the global resurgence of religion* (kebangkitan global agama). Kebangkitan global agama menggambarkan bagaimana (kepentingan) politik dan agama saling memengaruhi.[30] Fenomena ini juga turut mewarnai pola hubungan dan konflik antarnegara. Menurut Pavlos Hatzopoulos and Fabio Petito, konflik dan perang tidak lagi disebabkan oleh sistem ideologi politik atau motif ekonomi, atau bahkan perebutan teritori dan kekuasaan. Akar dari konflik, secara meningkat, berkaitan dengan budaya dan identitas, di mana agama menjadi salah satu faktor yang sangat berperan dalam menentukan identitas seseorang atau kelompok tertentu.[31]

Peristiwa lain yang sangat berpengaruh dalam hubungan internasional pasca-Perang Dingin adalah serangan 11 September 2001. Sebagian ahli hubungan internasional menganggap hal itu mengakhiri periode pasca-Perang Dingin, sekaligus membuat fenomena kebangkitan global agama menemukan momentum, namun dalam nuansa yang negatif. Serangan terhadap menara kembar *World Trade Center* dan Pentagon mendorong munculnya diskursus mengenai kekerasan, konflik dan terorisme yang bermotifkan agama. Ketika para pembajak yang menabrakkan pesawat Boeing 767 United Airline ke menara kembar dan Pentagon membawa nama Allah dalam aksi mereka, argu-

men tentang keterkaitan antara agama dan kekerasan, atau khususnya terorisme yang bermotifkan agama, semakin mengemuka. Jawaban Presiden Amerika Serikat, George W. Bush, untuk mengobarkan Perang Salib baru sebagai respons spontan atas serangan tersebut seakan menguatkan keterkaitan antara agama dan kekerasan.

Penudingan terhadap jaringan Al Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap terjadinya peristiwa 11 September, diikuti dengan serangan AS ke Afganistan pada Oktober 2002 dan invasi ke AS Irak, lantas tampak seperti konfrontasi terbuka yang memojokkan Islam sebagai pendukung terorisme.[32] Label *Islamic terrorism* kemudian sangat mewarnai situasi politik internasional pascaserangan 11 September. Hal itu jelas berpengaruh besar terhadap Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Peristiwa 11 September 2001 juga bagaikan sebuah titik balik bagi digelarnya sebuah babak baru dalam politik internasional, di mana isu terorisme menjadi sebuah jargon utama. Jargon *War on Terrorism* yang didengungkan Amerika memperlihatkan menguatnya unilateralisme AS, karena, dengan membawa slogan ini, AS menyerang Afganistan sebagai tindak lanjut atas tuduhan terhadap Afganistan sebagai markas Al Qaeda. Persepsi yang dikedepankan dalam *War on Terrorism* jelas memaksa dunia untuk memilih untuk bersama AS atau bersama teroris, seperti yang dinyatakan George W. Bush, *either you are with us or you are with the terrorist*. Beberapa fakta tersebut membuat beberapa pihak, termasuk pemerintah Indonesia, yakin bahwa struktur unipolar yang ditandai dengan unilateralisme Amerika menjadi sebuah arus utama dalam politik

internasional.[33]

Dalam lingkup Indonesia, tragedi 11 September 2001, yang disusul retaliasi AS ke Afganistan dan invasi ke Irak, membuat pemerintahan Megawati saat itu menjadi fokus perhatian publik, baik publik domestik maupun publik internasional. Indonesia terlihat mencoba menempatkan dirinya di antara dua kepentingan secara seimbang, yaitu kepentingan untuk bergabung dengan AS dalam memerangi terorisme, dan kepentingan serta keharusan untuk menjaga momentum demokrasi tanpa memunculkan kesan menekan kelompok-kelompok militan domestik.[34] Sayangnya, peristiwa bom Bali II pada 2002 membuat keadaan dan citra Indonesia semakin buruk di mata internasional. Citra Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbanyak yang damai dan toleran mendadak berubah menjadi negara dengan penduduk Islam yang radikal dan pro kekerasan. Pelaksanaan Perda-perda syariah di beberapa daerah, seperti di Aceh dan Tangerang, juga dianggap menguatkan citra negatif tersebut.[35]

Di lingkungan domestik, ide dialog antaragama dalam diplomasi Indonesia muncul terkait erat dengan kendala yang dihadapi dalam penanganan masalah terorisme.[36] Ada beberapa kendala yang dihadapi Indonesia, *pertama,* berkaitan dengan kondisi *legal infrastruktur.* Kendala itu berkaitan dengan sistem perundang-undangan di Indonesia yang kurang mendukung pencegahan aksi terorisme. Dengan dicabutnya *Undang-undang Anti Subversi,* negara tidak bisa serta merta melakukan penangkapan terhadap seseorang yang dicurigai namun belum terbukti melakukan kesalahan. Yang bisa digunakan adalah pasal-pasal dalam Kitab Undang–undang Hukum Pidana (KUHP), di mana

aparat negara baru bisa menangkap seseorang yang dicurigai setelah ada bukti-bukti yang mendukung. *Kedua,* kapasitas aparat keamanan yang minim. Dilihat dari kondisi yang ada pada waktu itu, TNI memiliki keterbatasan dalam menghadapi kasus terorisme, sedangkan fungsi kelembagaan kepolisian belum mantap karena baru dipisahkan dari TNI. Jalan keluarnya adalah melakukan kerjasama dengan negara lain atau kerjasama internasional, misalnya kerjasama kepolisian Indonesia dengan kepolisian Australia.

Kendala berikutnya muncul dari kapasitas institusional Kemenlu. Dalam menjalankan kebijakan dialog antaragama dalam diplomasi publik, Kemenlu merasa tidak memiliki kecakapan dan kecukupan sumberdaya manusia dalam hal menjalin hubungan dengan institusi atau organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan. Hal tersebut merupakan warisan dari era sebelumnya, terutama pada masa Orde Baru, di mana pemerintah mempunyai hubungan yang kurang bersahabat dengan Ormas atau LSM. Sebelum era Reformasi, sikap pemerintah terhadap organisasi nonpemerintah terkesan mengambil jarak, yang tentu berbeda dengan era Reformasi di mana pemerintah terlihat berusaha mendekati, bahkan merangkul, beragam organisasi nonpemerintah. Hal itu memerlukan sebuah penyesuaian karena masih terdapat sikap ragu-ragu, bahkan curiga, di kalangan Ormas atau LSM. Menyikapi kenyataan tersebut, birokrasi Kemenlu merasa perlu menyiapkan dan membiasakan diri untuk membangun tradisi bermitra dengan elemen masyarakat seperti LSM dan organisasi keagamaan.[37]

Selain itu, pada kenyataannya, terdapat keprihatinan yang sama di antara para pemuka agama dalam kelompok-

kelompok Islam di Indonesia perihal memburuknya citra Islam akibat peristiwa 11 September dan Bom Bali II pada 2002, meski sebenarnya terorisme tidak ada dalam ajaran agama mana pun, termasuk Islam. Karena pada saat itu media masaa banyak memberitakan mengenai Islam radikal, Kemenlu lalu menginginkan agar suara dari Islam moderat, yang sebenarnya merupakan suara mayoritas, menjadi lebih didengar di dunia internasional. Kemenlu melalui Direktorat Diplomasi Publik kemudian berusaha mendorong, mengawal, dan mengedepankan forum bagi kelompok moderat agar suaranya lebih didengar. Kolaborasi antara Kemenlu dengan para tokoh agama dari berbagai kelompok keagamaan besar, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, menjadi sebuah kesempatan yang baik karena Kemenlu tidak mempunyai keahlian di bidang agama. Selain itu, dalam jangka panjang, pemerintah, khususnya Kemenlu, berupaya untuk memberdayakan kelompok-kelompok agam yang moderat. Didorong oleh kenyataan itu maka Kemenlu mulai mengadakan *Foreign Policy Breakfast* dengan menggandeng tokoh-tokoh agama terkemuka yang memiliki banyak pengikut di Indonesia.

Sejak awal 2002, *Foreign Policy Breakfast* dijalankan dengan mengundang berbagai kalangan masyarakat, mulai dari politisi, pemimpin media massa, tokoh-tokoh lintas agama, intelektual, hingga ormas-ormas pemuda. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung kemitraan antara Kemenlu dengan semua komponen masyarakat Indonesia. Ada dua kepentingan yang ingin dicapai oleh Kemenlu melalui kegiatan tersebut. Di satu sisi, Kemenlu dapat menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran dari kebijakan yang diambil; disisi lain, Kemenlu dapat menampung ber-

bagai masukan yang sangat bermanfaat bagi pelaksanaan diplomasi.[38]

Selain itu, Kemenlu juga berusaha secara aktif melibatkan komponen masyarakat selain pemerintah, seperti kelompok pemuda, juga mempertimbangkan arti penting media dalam kegiatan dialog antaragama. Salah satu kegiatan yang diinisiasi oleh Kemenlu yang melibatkan kelompok pemuda adalah *Interfaith Youth Camp* di Surabaya pada Juli 2008. Sedangkan khusus berkaitan dengan media, Indonesia telah tiga kali mengadakan *Global Inter Media Dialogue*, yaitu di Bali pada 2006; di Oslo, Norwegia, pada 2007; dan di Bali pada 2008.

Seperti yang dinyatakan Kemenlu, pelaksanaan kegiatan dialog antaragama merupakan sebuah kontribusi bagi diplomasi Indonesia karena kegiatan itu menyediakan forum bagi para pemimpin agama untuk menyuarakan pandangan dan seruan toleransi serta perdamaian. Hal tersebut juga memberi kontribusi pada upaya pengarusutamaan isu-isu akar rumput seperti pendidikan, kepemudaan, gender, pemberdayaan ekonomi rakyat, dalam diskursus kontra terorisme. Kegiatan dialog antaragama juga terbukti mampu membangun jejaring baik di tingkat nasional maupun lintas negara. Dengan adanya jejaring yang semakin luas maka akan mendorong kerjasama nyata antarkelompok agama, baik nasional maupun internasional. Hal positif lain adalah bertambahnya saluran komunikasi efektif antara Pemerintah (Kemenlu) dan kalangan masyarakat madani. Hal terakhir yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah akan terjalin kerjasama dan bantuan dari luar negeri langsung ke berbagai komponen masyarakat.[39]

Terkait target yang ingin dicapai melalui pelaksanaan dialog antaragama dalam diplomasi publik yang dilakukan, Umar Hadi berpendapat bahwa Kemenlu pada dasarnya ingin berusaha memperlihatkan Indonesia seperti apa adanya. Bahwa Indonesia selain memiliki kekurangan juga mempunyai kelebihan. Pihak lain dipersilahkan melihat dan menilai sendiri bagaimana sebenarnya Indonesia. Hal itu juga dapat menjadi sarana bagi pemerintah Indonesia untuk belajar memperbaiki diri.[40] Untuk menilai sejauh mana sebenarnya keberhasilan upaya yang dilakukan Kemenlu, atau, dengan kata lain, keberhasilan apa saja yang telah dicapai dalam diplomasi publik yang dilakukan Kemenlu, dapat dilihat dari beberapa hambatan dalam pelaksanaan dialog antaragama yang telah dapat diatasi atau telah didapatkan cara penyelesaiannya.

Kendala pertama, yaitu kendala institusional, dapat diatasi dengan mengadakan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam mengadakan kegiatan seperti *International Conference of Islamic Scholars* dan *World Peace Forum*. Kerjasama itu menghasilkan jalinan hubungan baik di antara kedua pihak. Begitu pula cara pendekatan dengan merangkul ormas pemuda, kecurigaan yang ada menjadi semakin berkurang dan perlahan tapi pasti membuat hubungan semakin baik. Keterbatasan sumberdaya manusia dari Kemenlu akhirnya dapat diatasi dengan mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga nonpemerintah atau ormas kepemudaaan yang ada.

Kendala kedua berkaitan dengan masalah keuangan/anggaran yang berhasil dicari jalan keluarnya dengan cara mengadakan sponsor bersama (*co-sponsorship)* dan tuan ru-

mah bersama *(co-hosting)* dengan negara lain dalam pelaksanaan kegiatan dialog antaragama. Pihak Kemenlu mengungkapkan bahwa sebenarnya tidak ada anggaran khusus untuk kegiatan dialog antaragama. Karena itu, anggaran untuk kegiatan dialog antaragama diambil dari keseluruhan anggaran untuk Kemenlu yang besarannya adalah sekitar 1% dari APBN. Dengan besaran dana tersebut maka dapat dipastikan bahwa sebenarnya dana untuk kegiatan dialog antaragama sangat minim karena tidak disediakan anggaran khusus untuk kegiatan itu. Namun, justru dengan keterbatasan dana maka pemerintah Indonesia mampu berinisiatif dengan melakukan *co-sponshorship* dan *co-hosting* dengan pemerintah negara lain.

Hal tersebut juga merupakan sebuah inovasi dari Kemenlu dalam kegiatan dialog antarumat beragama. *Co-sponshorship* dan *co-hosting* merupakan kerjasama beberapa negara dalam penyelenggaraan kegiatan dialog antaragama, baik dalam hal tempat maupun pembiayaan. Dalam forum *Regional Interfaith Dialog,* beberapa negara yang menjadi *co-sponsor* dan *co-hosting* antara lain Indonesia, Australia, Selandia Baru, dan Filipina. Melalui metode *co-sponshorship* dan *co-hosting* beban pembiayaan bisa ditanggung bersama sehingga keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah Indonesia dapat diatasi. Pengembangan model *co-sponsorship* dan *co-hosting* selain mampu menghemat keuangan negara juga diharapkan dapat mentransformasi potensi konflik menjadi kerjasama yang saling menguntungkan, serta memperluas rasa memiliki untuk keberlanjutan dan institusionalisasi.[41]

Banyak pihak menilai bahwa kegiatan dialog antaragama yang dilakukan pemerintah masih berkutat pada

tataran normatif dan hanya sedikit yang bersifat praktis. Menanggapi hal tersebut, pihak Kemenlu mengakui kebenaran tuduhan yang dilontarkan padanya, namun demikian, beberapa kegiatan yang bersifat praktis akan terus diupayakan, misalnya dengan kegiatan *Interfaith Youth Camp* yang dilakukan di Surabaya. Kegiatan itu berusaha langsung mempraktikkan apa yang menjadi salah satu hasil dari *Regional Interfaith Dialogue* yaitu mendorong keterlibatan yang lebih intensif para pemuda dalam kegiatan dialog antaragama.

Berdasarkan pengalaman yang ada, salah satu hasil dari kegiatan tersebut adalah terjadi perubahan cara pandang peserta terhadap pihak lain yang berbeda agama atau keyakinan. Sebuah bukti dipaparkan oleh panitia *Interfaith Youth Camp* tentang seorang ibu beragama Islam yang menjadi tuan rumah dari peserta dari New Zealand yang beragama Nasrani. Pada awalnya, pihak tuan rumah menginginkan peserta yang seagama dengannya (yaitu Islam), namun panitia sengaja menempatkan peserta dengan keyakinan berbeda. Akhirnya, dari interaksi yang berlangsung selama kegiatan, terjadi perubahan cara pandang tuan rumah terhadap sang tamu. Si tuan rumah yang mempunyai julukan Ummu Hamas merasa pandangannya terhadap peserta yang berbeda keyakinan menjadi berubah, dia merasa bahwa seorang Nasrani tidak sejelek yang disangka sebelumnya. Begitu juga yang terjadi pada pemuda dari New Zealand sebagai tamu, pandangannya terhadap kaum Muslim mengalami perubahan. Penganut agama atau keyakinan yang berbeda ternyata menyadari bahwa nilai-nilai agamanya memiliki beberapa kesamaan dengan nilai-nilai agama yang dianut orang lain. Jadi, bisa dika-

takan kegiatan tersebut mampu mengubah cara pandang orang yang memiliki keyakinan berbeda.

Ide dialog antaragama dalam diplomasi publik sebuah negara sebenarnya tidak hanya dijalankan oleh Indonesia, melainkan juga oleh negara lain, seperti Amerika Serikat, yang dianggap sebagai negara yang intensif memasukkan ide dialog antarbudaya dan dialog antaragama dalam diplomasi publik. Sebagai negara yang multikultural, pemerintah Amerika Serikat bahkan selalu menganggap bahwa dialog antar budaya dan dialog antaragama sebagai bagian penting dari diplomasi publik.[42] Seperti yang diungkapkan oleh Umar Hadi, pelaksanaan dialog antaragama di Indonesia juga mendapat pengaruh dari dijalankannya kegiatan dialog antaragama dalam diplomasi publik yang dijalankan oleh negara lain seperti Amerika Serikat dan Inggris. Dikatakan bahwa meskipun di dalam negerinya terjadi banyak friksi, namun ketika berhadapan dengan pihak luar pemerintah Amerika Serikat (tampak) bersatu atau mempunyai satu kesepakatan atau pemahaman. Hal itu pula yang dicoba untuk diterapkan oleh pemerintah Indonesia terutama ketika harus berhadapan dengan pihak luar.[43] Dalam perkembangannya, diplomasi publik Indonesia juga memperhatikan kemajuan pelaksanaan diplomasi publik yang dilakukan oleh negara lain, misalnya Belanda yang gencar melakukan diplomasi publik demi mengubah citra negatifnya menjadi lebih positif.

Kegiatan dialog antaragama dalam diplomasi publik berhubungan erat dengan peran Direktorat Diplomasi Publik Kemenlu RI. Direktorat Diplomasi Publik merupakan direktorat yang relatif baru dalam struktur Kemenlu karena baru dibentuk pada Maret 2002, sebagai hasil dari

restrukturisasi organisasi Kemenlu dalam rangka menyikapi berbagai perkembangan di tingkat nasional dan internasional. Peran yang dijalankan Direktorat Diplomasi Publik dalam mendukung politik luar negeri antara lain: pemberdayaan kaum moderat Indonesia, memajukan *people to people contact,* diseminasi informasi mengenai politik luar negeri, merangkul dan memengaruhi publik dalam dan luar negeri, dan mengumpulkan saran dan masukan bagi pelaksanaan politik luar negeri.

Sejalan dengan peran tersebut, pelaksanaan diplomasi publik Indonesia terutama diarahkan pada upaya untuk menampilkan wajah Indonesia yang baru, yaitu moderat, demokratis, dan progresif, serta membangun konstituen diplomasi dengan bekerjasama dan merangkul semua pemangku kepentingan hubungan luar negeri. Dalam perkembangannya, cara-cara dialog yang telah dikembangkan dalam dialog antaragama, baik bilateral maupun regional dan lintas kawasan, kini telah menjadi arus utama dalam dunia diplomasi. Karena itu, perlu dibangun momentum dialog lintas agama sehingga pemberdayaan kelompok-kelompok moderat maupun kelompok negara moderat dapat diperkuat. Menurut pihak Kemenlu, tema memberdayakan kaum moderat sebagai tanggapan terhadap isu terorisme kini mulai diakui oleh para akademisi, bahkan di Amerika Serikat, sebagai negara asal ide diplomasi publik. Mereka mengakui bahwa keberhasilan melawan terorisme untuk jangka panjang akan sangat tergantung dari keberhasilan memberdayakan kaum moderat.[44]

Jika dilihat dari apa yang telah dilakukan oleh Kemenlu, maka aktivitas yang dilakukannya sebagian besar dapat dikategorikan dalam upaya memfasilitasi dataran keenam

dari dataran dialog, yakni dialog aksi yang mengkaji masalah-masalah sosial dan mengarah pada keterlibatan masyarakat. Upaya Kemenlu untuk merangkul sejumlah organisasi keagamaan dan masyarakat dalam membahas masalah-masalah perdamaian, pendidikan, dll. dapat menjadi salah satu indikasi dari hal tersebut. Selain itu, dalam kegiatan *Interfaith Youth Camp*, Kemenlu tampaknya juga memfasilitasi terjadinya dialog pada dataran dialog keempat, yaitu dialog dengan berbagi pengalaman iman dalam komunitas lintas iman. Berpangkal pada tradisi iman dan agama masing-masing, para peserta dalam *Interfaith Youth Camp* berbagi pengalaman iman dan kekayaan spiritual mereka sehingga dapat saling memperkaya satu sama lain. Orang beriman terlibat dalam imannya sendiri dalam keterbukaan terhadap tradisi-tradisi religius lain (*commitment and openness*). Melalui momen tersebut, umat beragama menghindari cara-cara manipulatif dan agresif, sekaligus menimba kekayaan tradisi agama lain.

Kegiatan dialog antaragama dalam diplomasi Indonesia di masa depan tampaknya akan tetap mendapat prioritas dari pemerintah Indonesia. Dikatakan oleh pihak Kemenlu bahwa kegiatan itu telah menjadi agenda utama dalam diplomasi Indonesia. Bahkan, dalam anggaran belanja Kemenlu 2009, Direktorat Diplomasi Publik menempatkan kegiatan dialog antaragama sebagai prioritas utama.[45] Pendekatan dan cara yang inovatif dan kreatif seperti dialog antaragama dan dialog lintas media ternyata sangat dihargai oleh masyarakat internasional dan telah menambah predikat Indonesia sebagai *the force of dialogue and moderation.*[46]

Perlukah Paradigma Baru?

Situasi dunia internasional dan domestik kontemporer yang semakin dinamis menjadikan dialog antaragama sebagai satu hal penting. Pada level nasional, Indonesia harus selalu memperhatikan faktor heterogenitas dan pluralitas masyarakatnya yang rentan akan perpecahan mengingat bahwa terkadang agama sering diidentikkan dengan masyarakat dari kelompok tertentu. Meskipun dalam kenyataannya konflik yang terjadi antara kelompok bangsa semata-mata disebabkan oleh berkelindannya beragam faktor seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang seringkali dikaitkan dengan identitas keagamaan kelompok yang bertikai. Hal itu disebabkan agama lebih dipahami sebagai identitas, bukan sebagai nilai-nilai kebenaran, akibatnya, agama sering diikutsertakan ke wilayah konflik sehingga yang muncul dipermukaan adalah konflik agama.[47]

Di level regional dan internasional, intensitas globalisasi memengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat, salah satunya ide dan praktik agama. Gagasan atau ide dan praktek agama di satu belahan dunia dapat dengan mudah dan cepat ditransfer serta bertransformasi di belahan dunia lain. Di satu sisi, hal itu akan mendatangkan keuntungan karena banyak ide, gagasan, dan praktik positif komunitas agama yang dapat menyebar dengan cepat ke seluruh belahan dunia. Namun, di sisi lain, ide, gagasan atau praktik yang negatif pun dapat dengan cepat "menular" ke belahan dunia yang berbeda. Untuk mengatasinya, hal yang perlu diperkuat adalah upaya untuk mengoptimalkan sisi positif globalisasi. Hal yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia adalah terus memperluas dan memperkuat jejaring di bidang dialog antaragama, baik di level regional maupun in-

ternasional, untuk membuka peluang dan hubungan yang lebih luas dengan banyak pihak di seluruh wilayah dunia. Kekuatan Kemenlu salah satunya adalah dalam hal membuka, memperluas, dan memperkuat jejaring di bidang dialog antaragama. Dengan dukungan sumberdaya manusia dan finansial yang sudah mapan, adalah hal yang wajar bagi Kemenlu untuk mampu mengoptimalkan tugas tersebut sehingga dapat menunjang kegiatan dialog antaragama dalam diplomasi yang dijalankannya.

Seperti telah dipaparkan sebelumnya, masuknya dialog antaragama dalam diplomasi publik indonesia merupakan respons terhadap perubahan di lingkungan internasional dan domestik, namun, sebuah fakta yang jelas terlihat yaitu faktor utama masuknya dialog antaragama dalam diplomasi publik Indonesia ialah respons dari maraknya isu terorisme paska serangan 11 September 2001 di mana sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia jelas terkena imbas langsung. Hal itu juga terlihat jelas dari dasar pemikiran dimasukkannya dialog antaragama dalam diplomasi publik Indonesia, yaitu bahwa keberhasilan untuk menangkal terorisme dalam jangka panjang adalah dengan memberdayakan kaum moderat. Meski demikian, dalam menghadapi masalah terorisme, yang sebenarnya perlu lebih diperhatikan adalah bagaimana mengatasi akar masalah dari terorisme itu sendiri yang pada akhirnya sering bermuara pada masalah seperti kemiskinan, kesenjangan, dan ketidakadilan yang terjadi di dunia. Karena itu, untuk menghentikan aksi terorisme adalah dengan menghilangkan sumber dari kemiskinan, kesenjangan, dan ketidakadilan itu sendiri.

Jika masalahnya seperti yang telah diuraikan di atas,

maka hal yang perlu dilakukan oleh Kemenlu adalah memasukkan atau menambahkan paradigma baru dalam menjalankan dialog antaragama dalam diplomasi publiknya, yaitu dengan memberi perhatian (jika belum dapat dikatakan berkonsentrasi) pada masalah yang berkaitan erat dengan kemiskinan, kesenjangan, dan ketidakadilan. Jadi, persoalan mengatasi masalah terorisme tidak hanya dilakukan dengan memberdayakan kaum moderat, melainkan juga dengan mengatasi masalah kemanusiaan seperti memberi perhatian pada kaum miskin, kelompok marginal atau minoritas, perempuan, masalah hak asasi manusia, dan sebagainya. Karena itu, perlu untuk menjalin kerjasama dengan semua pihak terkait untuk berkolaborasi mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Kolaborasi Kemenlu dengan organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan terkait menjadi langkah awal yang perlu dilanjutkan.

Pendekatan yang memberikan perhatian pada persoalan kemanusiaan sebenarnya terkait erat dengan pemikiran mengenai *human security,* yang juga menjadi bahan kajian dalam studi strategis pada awal 1990-an. Pada 1994, United Nations Development Program (UNDP) mengenalkan konsep *human security* yang terdiri dari enam komponen, yaitu: *economic security, food security, health security, personal security, community security,* dan *political security*.[48] Karena hal itu merupakan salah satu persoalan yang juga menjadi perhatian PBB, maka telah terdapat sebuah peluang untuk mengangkatnya menjadi sebuah perhatian bersama masyarakat dunia. Sebenarnya forum dialog antaragama yang digagas PBB seperti *Tripartite Forum on Interfaith Cooperation for Peace* dapat menjadi langkah awal untuk membahas persoalan tersebut.

Hal penting lain yang perlu diperhatikan adalah urgensi kegiatan-kegiatan dialog antaragama yang lebih praktis dan lebih menyentuh level akar rumput, tidak hanya terperangkap pada pembicaraan yang bersifat normatif, dalam artian hanya sebatas mengeluarkan deklarasi tanpa ada tindak lanjut yang bersifat konkret dan menyentuh persoalan nyata seperti kemiskinan, ketidakadilan, penyakit menular, HIV dan AIDS, ketimpangan gender, dan sebagainya. Dengan kata lain, dengan dukungan jejaring yang lebih kuat dan luas, Kemenlu bisa mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata di bidang tersebut. Selain itu, dalam kerangka menyentuh level akar rumput, perlu juga ditingkatkan partisipasi dan keterlibatan peran perempuan dan kaum muda sebagai bagian penting dalam pelaksanaan dialog antaragama. Hal tersebut disebabkan karena dalam banyak konflik, perempuan merupakan pihak yang paling banyak menderita atau dirugikan. Sementara peran kaum muda akan sangat krusial mengingat merekalah pihak yang akan memegang peranan penting di masa depan.[]

5
Menggerakkan Dialog dari Bawah

Bagian ini akan membahas praktik-praktik dialog antarumat beragama di tingkat masyarakat, khususnya yang diinisiasikan lembaga keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Ada tiga permasalahan pokok yang ingin dikaji di sini, yakni: (a) apa latar dan konteks berdirinya lembaga-lembaga tersebut, dan, pada tingkat tertentu, apa latar dan konteks pentingnya kegiatan antarumat beragama di dalamnya; (b) apa saja kegiatan yang telah dilakukan lembaga-lembaga tersebut; dan (c) kegiatan penting apa yang akan dilakukan di masa depan. Selain akan menarasikan profil kegiatan tiap lembaga yang dikelompokkan ke dalam empat karakter kelembagaan, di bawah ini akan disajikan analisis sejauh mana praktik-praktik dialog telah diselenggarakan di masyarakat, dengan menggunakan pisau analisis dataran-dataran atau momen-momen dialog yang telah dieksplorasi di Bab 1. Untuk menelusuri kecenderu-

ngan yang terjadi secara umum, analisis tidak dilakukan berdasarkan tiap kegiatan masing-masing lembaga.

Kami tidak memungkiri bahwa perkembangan praktik dialog antarumat beragama yang terjadi di masyarakat jauh lebih kaya dibanding lembaga-lembaga yang dipaparkan di sini. Karena itu, pemaparan dari beberapa lembaga, pada umumnya berada di pulau Jawa, tidak bertendensi untuk menjadi representasi dari seluruh pengalaman yang ada di masyarakat. Secara umum, lembaga-lembaga yang ditampilkan di sini dapat dipilah menjadi empat kelompok: (a) lembaga yang pusat perhatiannya pada dialog antarumat beragama, yakni Interfidei, ICRP, dan eLaIeM; (b) lembaga yang pusat perhatiannya tidak spesifik pada dialog antarumat beragama, tapi dialog tersebut menjadi bagian dari perspektif lembaga, dan atau lembaga yang memasukkan dialog antarumat beragama sebagai bagian dari kegiatan mereka, seperti LKiS, Percik, PSAP, Wahid Institute; (c) lembaga yang perhatian utamanya adalah isu feminisme, namun menjadikan dialog antarumat beragama sebagai bagian dari perspektif, kegiatan, atau bahkan strategi kegiatannya, semisal Fahmina Institute, Mitra Wacana, dan Kapal Perempuan; (d) lembaga keagamaan di lingkungan Muslim dan Kristiani yang memiliki perhatian pada masalah dialog, yaitu PGI, KWI, dan MUI.

Sebagaimana akan dipaparkan di bawah, secara terminologis, sebagian lembaga yang disebut di sini tidak memakai istilah dialog. PGI dan MUI menggunakan istilah *kerukunan* dan KWI memakai terma *hubungan*. Karena itu, istilah dialog di sini tidak dipakai dalam pengertian yang ketat. Sumber data berasal dari perwakilan lembaga-lembaga dalam dua kali FGD pada 28 Januari 2008 dan

17 November 2008, dari profil masing-masing lembaga, dan dari wawancara atau korespondensi tambahan dengan pengurus lembaga-lembaga tersebut. Rujukan sumber data tidak disajikan secara detail, namun di awal pembahasan setiap lembaga akan disebutkan sumber informasi atau datanya.

Dialog dalam Lembaga *Interfaith*

Di antara lembaga-lembaga yang karakter kelembagaannya sejak awal dimaksudkan menjadi lembaga *interfaith* adalah DIAN (Institut Dialog Antar-Iman)/Interfidei (Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia), yang didirikan pada 1991 di Yogyakarta.[1] Istilah *dian* yang menjadi akronim namanya sengaja dipilih dengan sebuah filosofi. *Dian* merupakan istilah Jawa untuk menyebut lampu kecil. Semua orang adalah *dian—yang memberi terang bagi dirinya sendiri, bagi orang lain, dan bagi lingkungan di sekitarnya*—yang menerima cahaya dari satu sumber, yaitu Tuhan. Istilah iman, sebagai esensi agama, dipilih karena sifatnya yang otentik dalam menghubungkan antara keyakinan dan realitas kehidupan, yang berkaitan erat dengan pengalaman konkret kehidupan sehari-hari, sebab itu, bisa dibicarakan bersama dalam suasana bebas dan terbuka. Sementara itu, *dialog* dihayati sebagai langkah menjalin komunikasi dan sebagai ungkapan kesediaan untuk saling mendengar, menghormati, dan bersikap terbuka; bukan untuk menghapus perbedaan. Menurut konsep Interfidei, dialog mengandung konflik inheren pada hubungan antarmanusia, sekaligus menjanjikan sebuah akhir yang lebih dewasa untuk menghadapi dan menyelesaikan konflik. Interfidei menganggap

penting posisi individu sebagai umat beriman sehingga keterlibatan setiap individu dalam Interfidei dipandang tidak mewakili golongan tertentu secara struktural, melainkan sebagai individu-individu yang memiliki minat terhadap dialog antaragama.

Jika di Yogyakarta terdapat Interfidei, di Jakarta juga ada lembaga sejenis, yaitu Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)[2] yang dideklarasikan di Jakarta pada 2000. Meskipun di Indonesia ICRP secara formal berdiri sebagai sebuah yayasan tersendiri, tapi dalam sepak terjang internasional ICRP memiliki hubungan dengan World Conference on Religion and Peace (WCRP) dan Asian Conference on Religion and Peace (ACRP). Didirikan oleh para tokoh dialog di Indonesia, ICRP memiliki visi mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, berkeadilan, setara, bersaudara dalam pluralisme agama dan kepercayaan, dan menghormati martabat manusia. Mereka memandang ICRP penting untuk menumbuhkembangkan pluralisme dalam masyarakat Indonesia; membangun kesadaran dan mengembangkan budaya religiusitas yang sehat; saling menghormati dan bebas dari rasa saling curiga bersama seluruh elemen bangsa, khususnya lembaga-lembaga antaragama (iman); mendukung dan mendorong usaha-usaha dialog, pengkajian dan pemecahan sosial keagamaan baik dalam skala daerah, nasional, regional, maupun internasional; dan mengajak semua pihak untuk menghormati dan mensyukuri keanekaragaman dan kekayaan tradisi keagamaan masing-masing.

Satu contoh lagi dari lembaga dialog adalah Lembaga Antar-Iman Maluku untuk Kemanusiaan (eLaIeM)[3] yang lahir dalam konteks masyarakat Maluku pascakonflik. Ka-

rena itu, kehadiran eLaIeM diharapkan bisa memperkuat kapasitas masyarakat Maluku dalam mengelola konflik dan dampaknya. Inspirasi dasar eLaIeM adalah kemarahan, maksudnya kemarahan terhadap kenyataan terpuruknya masyarakat dalam konflik yang menghancurkan kemanusiaan dan lingkungan di Maluku selama empat tahun di awal era Reformasi. Para penggagas lembaga itu merasa malu secara moral dan *marah* melihat kondisi Maluku, yang kemudian dikenal sebagai wilayah *hot spot* konflik sosial keagamaan. Gagasan untuk mendirikan eLaIeM muncul sejak akhir 2000 dan baru secara resmi berdiri pada 2003. Keprihatinan mereka diejawantahkan dengan mendirikan eLaIeM yang membawa cita-cita menjadi lembaga bersama antarumat beragama sebagai pusat pembelajaran pluralitas. Di samping itu, dengan hadirnya lembaga antarumat beragama di Maluku ini, ia diharapkan menjadi wadah terciptanya interaksi yang berkesinambungan antarpemeluk agama pada setiap segmen masyarakat, sehingga tercapai sikap saling memahami, percaya, dan menerima, demi proses pemulihan masyarakat setelah mengalami konflik yang memilukan.

Sampai di sini faktanya eLaIeM memang dilahirkan oleh konteks dan situasi konflik simbolik keagamaan yang memilukan dan memporak-porandakan relasi antarumat beragama di Ambon. Berbeda dengan eLaIeM, Interfidei memang tidak dilahirkan secara langsung oleh situasi konflik, tapi lahir atas keprihatinan struktur hegemoni negara terhadap relasi antarumat beragama yang rapuh. Interfidei lahir, salah satunya, sebagai respons terhadap rezim Orde Baru yang saat itu melakukan politisasi agama yang mengkhawatirkan. Sebagai bagian dari respons terhadap

kebijakan lima agama *resmi* versi pemerintah, Interfidei sejak awal melibatkan agama-agama *nonresmi* dalam bingkai dialog-nya, seperti Konghucu dan agama-agama lokal. Di samping itu, Interfidei memberanikan diri melakukan kajian terhadap agama Yahudi yang diikuti oleh banyak kaum muda di Yogyakarta. Pada lima tahun pertama, lembaga tersebut lebih banyak berkutat di seputar wacana dan konsep teoretis tentang dialog agama-agama. Meski wacana masih menjadi perhatiannya, namun Interfidei kemudian mengembangkan kegiatan-kegiatan yang lebih emansipatif secara langsung di masyarakat melalui program-program yang tersebar luas di daerah-daerah lain. Pada tingkat tertentu, kegiatan Interfidei di beberapa daerah di luar pulau Jawa menginspirasi para pegiat dialog antarumat beragama untuk membangun lembaga sejenis.

Hancurnya tata sosial dan relasi antarumat beragama pascakonflik di Ambon tampak jelas di depan mata, oleh sebab itu eLaIeM memiliki tantangan yang sangat nyata. eLaIeM merasa penting membangun citra Maluku, tidak saja sebagai pusat konflik, tetapi juga pusat perdamaian. Dari Maluku eLaIeM ingin menawarkan model-model pengelolaan pluralitas yang berbasis kebijakan lokal. Darinya, orang datang dan belajar tidak saja konflik, tetapi juga perdamaian. Harapan eLaIeM bagi masyarakat lokal Maluku sendiri ialah menemukan kembali kebanggaan sosialnya sebagai orang Maluku, yang dapat memberikan kontribusi bagi perumusan pola-pola perdamaian. Para penggagas eLaIeM mengangankan dialektika pengalaman konflik dan perdamaian dalam konteks ke*maluku*an menjadi referensi model bagi pusat perdamaian seperti daerah-daerah tertentu di India, Afrika Selatan, Perancis, dll. Gagasan-gagasan

ideal tersebut awalnya disosialisasikan oleh para panggagas eLaIeM dengan sangat hati-hati, mengingat sensitivitas konflik yang belum memberi ruang bagi proses-proses seperti itu di awal 2000-an. Beberapa pertemuan dengan tokoh-tokoh agama dilakukan secara tertutup. Oleh karena itu, proses pematangan gagasan memakan waktu cukup lama.

Gerakan sebuah lembaga *interfaith* ikut dipengaruhi oleh paradigma yang dianut, konteks tantangan yang dihadapi, dan sejarah kelembagaannya. Karena kelembagaan institusi-institusi yang disebut di sini sudah berusia cukup lama, paparan berikut mungkin tidak mencakup semua kegiatan atau program yang telah dilakukan. Apa yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga *interfaith* bisa dipastikan jauh lebih besar, luas, dan mendalam dari apa yang diungkapkan di sini. Sebagai ilustrasi bagaimana mereka merumuskan kegiatannya, sebagai contoh Interfidei, kegiatan mereka dibagi ke dalam beberapa bidang.

Pertama, bidang pendidikan yang menggunakan metode semiloka dan lokakarya tentang studi agama-agama serta studi agama dan masyarakat. Studi agama-agama lebih menonjolkan kajian (teologis) relasi antaragama, sedangkan studi agama dan masyarakat lebih menekankan peran agama-agama di dalam hubungannya dengan problem kontekstual di masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut diselenggarakan sejak 1997 yang tersebar di berbagai daerah seperti Yogyakarta, Kupang, Makassar, Manado, Pontianak, Banjarmasin, Medan, Ende, Palangkaraya, Samarinda, Pematang Siantar, Bengkulu, Lampung, Jayapura, Sorong, Gorontalo, Padang, Bali, dan daerah-daerah lain. Pada saat bersamaan, Interfidei memiliki peran penting dalam lokus jaringan kelompok antariman di Indonesia.

Kedua, bidang penelitian yang belakangan ini memfokuskan pada penelitian partisipatif pendidikan agama di sekolah-sekolah umum di Yogyakarta, dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah lanjutan. Karena bersifat partisipatif, kegiatan itu mengantarkan Interfidei menjadi motor bagi forum guru-guru agama di Yogyakarta dalam proses belajar mengenai bagaimana mengelola praktik pendidikan bervisi pluralis di tingkat sekolah.

Ketiga, selain kedua bidang kegiatan di atas, Interfidei mengembangkan kegiatan di seputar diskusi rutin dan seminar sebagai bagian dari usaha untuk mendiseminasi wacana kemajemukan. Di antara contoh tema dalam diskusi di Interfidei misalnya tentang *The Beauty of Religion, The Religion of Beauty*, *pemikiran Th. Sumartana tentang pluralisme agama*, dan lain-lain.

Keempat, bidang penerbitan, dengan menerbitkan secara rutin *newsletter* dan buku-buku, Interfidei bertujuan untuk membangun opini publik bahwa pluralitas merupakan potensi dan kekayaan bangsa yang dapat membawa bangsa ini pada kemajuan yang bermartabat, serta melakukan sosialisasi wacana dan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat, yang relevan bagi pembentukan masyarakat sipil yang lebih baik.

Di sisi lain, dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, ICRP merasa penting untuk mengembangkan pemahaman pluralisme; membantu penanganan berbagai masalah dalam hubungan antarumat beragama; membantu pengembangan jaringan kerjasama antarlembaga maupun individu untuk penguatan pluralisme dan perdamaian; dan meningkatkan kapasitas organisasi dalam memberikan pelayanan terbaik untuk memperkuat pluralisme agama dan

perdamaian. Oleh karena itu, ICRP memfokuskan kegiatan-kegiatannya dalam tiga aras. *Pertama,* pengembangan dokumentasi dan informasi seputar wacana pluralisme dan dialog antarumat beragama. *Kedua,* pengembangan dan penyebarluasan wacana *interfaith* dan pluralisme kepada aktor-aktor kunci di masyarakat. *Ketiga,* kajian dan penelitian untuk memahami dinamika pluralisme iman atau agama di Indonesia.

Secara lebih rinci, ICRP membagi kegiatannya dalam beberapa bidang gerakan. *Pertama,* bidang informasi, komunikasi, dan publikasi, seperti menerbitkan majalah antariman *Majemuk*, menerbitkan buku, serta *website* sebagai media publikasi dan komunikasi seputar perkembangan dan dinamika pluralisme dan perdamaian di Indonesia. *Kedua,* bidang pendidikan dan pelatihan, antara lain menyelenggarakan pelatihan mengenai pengembangan wacana *interfaith*, rekonsiliasi, pluralisme, dan perdamaian; menyelenggarakan pendidikan kuliah agama-agama bekerja sama dengan perguruan tinggi maupun lembaga lain, serta menyelenggarakan pendidikan perdamaian untuk kalangan akademisi, praktisi, dan pegiat pendidikan di tiap tingkatan. *Ketiga,* bidang advokasi dan jaringan, seperti memediasi dialog antar tokoh-tokoh agama dan kepercayaan, dan antara pemuka agama dan kepercayaan dengan pemerintah dalam kerangka perjuangan hak-hak kebebasan berkeyakinan; studi perdamaian di Indonesia; dan melakukan advokasi atas kasus-kasus kekerasan atas nama agama.

Keempat, bidang pemuda, berupa membangun kesadaran pluralisme di kalangan generasi muda melalui berbagai aktivitas. *Kelima,* bidang perempuan dan agama, yang mengampanyekan prinsip kesadaran dan kesetaraan

gender pada lini lintas iman. *Keenam,* bidang penelitian dan pengembangan, dengan melakukan pengembangan jaringan penelitian bertema *interfaith*, membangun basis data bertemakan pluralisme, serta merumuskan rekomendasi bagi perubahan kebijakan (*policy reform*) dalam memperkuat pluralisme di Indonesia. Pada awalnya ICRP memberikan tekanan utama pada kegiatan-kegiatan yang secara tidak langsung menyentuh komunitas-komunitas keagamaan, namun, belakangan ini lembaga tersebut merasa penting untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan yang secara langsung melibatkan komunitas-komunitas keagamaan. ICRP mensinyalir adanya jurang pemisah yang cukup dalam di bidang pengetahuan, kesadaran politik, kesadaran pluralisme, dan toleransi di antara tokoh-tokoh agama dengan kaum penganut agama di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, upaya kampanye toleransi dan pluralisme dipandang harus mengakar ke tingkat bawah.

Sementara itu, meski merasa sebagai institusi yang relatif baru, eLaIeM telah cukup banyak melakukan kegiatan-kegitan terkait dialog antarumat beragama, antara lain: (a) dialog publik dengan mengundang narasumber dan peserta dari berbagai kalangan dan tokoh lintas agama tentang isu-isu kontemporer konflik, kekerasan dan perdamaian, seni dan budaya, media dan jurnalisme damai, politik, pendidikan, serta pluralisme; (b) dakwah perdamaian, untuk menyebarkan gagasan perdamaian dan mengurai konflik yang dilakukan dengan cara berkeliling ke pelosok-pelosok Maluku. eLaIeM bekerjasama dengan MUI Maluku menyelenggarakan program ini dari 2005 hingga akhir 2007; (c) bimbingan konseling dan penyembuhan trauma bekerjasama dengan *Crisis Center* Gereja Kristen Maluku dan

Yayasan Kasih Mandiri (Katolik), dengan melibatkan tidak kurang dari 800 orang partisipan yang diharapkan dapat menjadi pendamping di kalangan masyarakat akar rumput; (d) kajian keagamaan lintas agama bekerjasama dengan DIAN/Interfidei yang membahas dua hal sekaligus, yakni kajian literatur keagamaan tentang kemajemukan agama, dan kajian tentang hubungan agama-agama dan budaya lokal; (e) membangun dan memperkuat koalisi untuk pengungsi Maluku pada 2005 sampai 2006. eLaIeM bekerja sama dengan banyak pihak melakukan advokasi terhadap hak-hak para korban konflik Maluku; (f) bersama dengan jaringan gerakan perempuan, eLaIeM membentuk *Forum Perjuangan Perempuan dan Perdamaian* (FP3). Forum itu dibentuk sebagai respons terhadap fenomena kekerasan terhadap perempuan, khususnya di area konflik,; dan (g) membangun sistem media dan informasi seperti jurnal tiga bulanan *Kanjoli,* pembuatan poster, stiker, T-shirt, *footage* film, program di radio dan televisi.

Saat ini, dan di masa depan, lembaga-lembaga *interfaith* menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin berbeda serta baru. Rezim otoriter Orde Baru telah lama hancur, demikian pula konflik simbolik keagamaan yang aktual relatif tidak terjadi lagi. Apa yang dicita-citakan oleh lembaga-lembaga *interfaith* di masa depan? Interfidei masih akan melanjutkan semua kegiatan-kegiatan di atas, meski dengan mengevaluasinya, kemudian menentukan arah yang lebih strategis dan sesuai dengan kebutuhan *stakeholder*-nya dan masyarakat pada umumnya. Di samping itu, Interfidei akan mendorong dan menjadi salah satu simpul utama gerakan bersama dan kerjasama antarlembaga dialog dengan tanpa menghilangkan atau mengaburkan kekhasan

masing-masing institusi. Meskipun telah lama digagas dan sampai sekarang belum terealisasi, gagasan Pusat Dialog (*Dialog Center*) akan tetap dicita-citakan sebagai transformasi yang paling ideal dari keberadaan Interfidei sekarang.

Setelah belajar dari pengalamannya selama ini, ICRP merasa penting untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan lain di waktu yang akan datang. Kegiatan-kegiatan yang dicita-citakan tersebut adalah: *Pertama,* advokasi isu kebebasan beragama dan hak-hak sipil kelompok minoritas. *Kedua,* memperluas dan menstimulasi kesadaran di kalangan tokoh dan komunitas agama akan problem-problem kemanusiaan mutakhir, seperti pemanasan global, gizi buruk, kemiskinan, kesehatan, ketidakadilan terhadap perempuan, dan lain-lain. *Ketiga,* merumuskan dan berkampanye tentang pendidikan berbasis pluralisme dan multikulturalisme di sekolah-sekolah. *Keempat,* mengembangkan isu gender ke tingkat akar rumput; dan *kelima,* memperluas promosi toleransi dan pluralisme.

Salah satu cita-cita besar eLaIeM untuk masa depan adalah membangun sebuah pusat pembelajaran pluralitas bagi Indonesia bagian timur di Maluku. Dalam pusat pembelajaran tersebut, eLaIeM ingin mengkaji, membongkar, dan merevitalisasi kearifan lokal Maluku, baik yang bernuansa positif maupun negatif, seperti *siwalima, orang basudara,* dan lain sebagainya. Di pusat pembelajaran tersebut masyarakat diharapkan bisa saling belajar untuk menghargai realitas plural sebagai kekuatan konstruktif dalam membangun kolektivitas. Di situ mereka dapat mengeksplorasi potensi-potensi konflik, juga belajar mengeliminasinya dengan membesarkan potensi-potensi rekonsiliasi dan reintegrasi yang bertolak dari kearifan lokal. Ruang

pembelajaran yang sesungguhnya memang ada di tengah masyarakat, namun dinamika dan arahnya perlu distimulasi dan terus digerakkan agar dinamis. Secara fisik pusat pembelajaran tersebut akan berupa area lahan seluas empat atau lima hektar dengan beberapa unit bangunan di dalamnya, seperti rumah *baileo,* musala, kapel, perpustakaan, teater, ruang pertemuan, situs-situs *out door*, serta kamar-kamar yang dapat menampung lebih kurang 150 orang. eLaIeM menjadi semakin bersemangat ketika masyarakat Maluku kini mulai sadar bahwa dalam konflik sebenarnya tidak ada pihak yang menang.

Dialog di LSM: Kajian Agama, Sosial, dan Demokrasi

Di Indonesia terdapat banyak sekali lembaga di tingkat masyarakat yang bukan merupakan lembaga antaragama, namun dialog antaragama menjadi bagian dari perspektif, dan atau memasukkan dialog antaragama menjadi sebagian dari kegiatannya. Di sini hanya akan dipaparkan empat lembaga sebagai contoh bagaimana dialog antaragama dipraktikkan oleh lembaga-lembaga dengan karakter seperti itu. Untuk kepentingan penyebutan di sini, sebagaimana judul subbab di atas, lembaga-lembaga di bawah ini dikelompokkan sebagai LSM kajian agama, sosial, dan demokrasi karena pada umumnya konsentrasi mereka berada di seputar tiga hal itu.

Lembaga yang penting disebut dalam kelompok ini salah satunya adalah Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS)[4] yang muncul dari kelompok kajian di Yogyakarta pada 1990-an. Aktivis yang berkumpul dalam lingkaran itu pada umumnya memiliki latar pendidikan pesantren.

Bagi mereka, pesantren dipahami sebuah sub-kultur yang kemudian memengaruhi model gerakan mereka. Ketika itu, kelompok tersebut merasa lahir dari perkembangan pemikiran dan gerakan Islam, di satu pihak, dan kekuasaan Orde Baru, di pihak lain. Di pihak gerakan Islam, muncul kecenderungan stagnasi dan konservatisme yang berlebihan. Di pihak kekuasaan Orde Baru, muncul kesadaran dan usaha nyata untuk memanfaatkan Islam sebagai alat pendukung dan pelestari kekuasaan represif. Dari sanalah muncul kesadaran dari kelompok kecil ini untuk meretas pengenalan wacana Islam kritis dan sekaligus mendorong pentingnya gerakan keterbukaan dan demokratisasi bersama masyarakat. Ada beberapa kegiatan yang bisa dicatat di awal berdirinya lembaga tersebut, antara lain publikasi beberapa buku bahan diskusi yang kemudian diterbitkan, seperti buku suntingan dengan judul *Agama, Demokrasi, dan Keadilan;*[5] buku terjemahan tulisan Kazuo Shimogaki mengenai pemikiran teologi kiri Hassan Hanafi;[6] dan buku terjemahan karya Asghar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan.*[7] Selain itu, LKiS di awal berdirinya aktif terlibat dalam berbagai gerakan sosial dan demonstrasi—bersama komponen mahasiswa dan masyarakat luas—misalnya dalam kasus pertanahan, tenaga kerja migran, dan dampak negatif pembangunan terhadap rakyat. Hingga saat ini, kelompok kajian itu tetap mempertahankan dua arah kecenderungannya yang cukup kuat dari awal, yaitu terlibat gerakan sosial keislaman pada satu sisi, dan memproduksi wacana keislaman kritis melalui berbagai kegiatan, termasuk bidang penerbitan yang dikelola dengan manajemen profesional.

Tidak jauh dari Yogyakarta, sebuah lingkaran gerakan

yang diberi nama Percik[8] lahir di kota kecil Salatiga, Jawa Tengah. Kelahiran Percik dipelopori oleh para akademisi dan aktivis yang sebagian besar memiliki latar agama Kristen di Salatiga pada awal 1996. Kelahirannya menandai, antara lain, tuntutan yang tersebar luas dalam masyarakat Indonesia akan perlunya pelaksanaan demokratisasi dengan segera di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tuntutan tersebut muncul sebagai bagian dari keprihatinan yang meluas di masyarakat terhadap sistem politik Orde Baru yang saat itu semakin sentralistik, hegemonik, opresif, dan tidak toleran. Sistem politik yang tidak sehat tersebut berakibat pada minimnya *ruang publik* yang memungkinkan terjadinya pertukaran wacana publik secara bebas, serta tidak berkembangnya lembaga-lembaga demokrasi dan birokrasi pemerintahan yang korup. Para aktivis di lembaga itu berpendapat bahwa, bagi masa depan Indonesia, arena politik pada aras lokal justru semakin penting dan menentukan. Dari situ lahirlah Percik yang merupakan perwujudan dari keinginan untuk ikut menggulirkan proses demokratisasi politik pada aras lokal.

Di pihak lain, perkembangan masyarakat menunjukkan kecenderungan ke arah masyarakat plural yang tersekat-sekat yang di dalamnya mengandung potensi konflik besar horisontal. Konflik tersebut tidak lama kemudian terjadi di beberapa daerah. Oleh sebab itu, selain berkonsentrasi pada aras dinamika politik lokal, Percik kemudian juga merumuskan kegiatan-kegiatan di seputar dialog antaragama. Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi salah satu turunan dari visi dan misinya yang secara kuat melihat nilai penting toleransi dan pluralisme. Secara lebih lengkap, Percik merumuskan visinya untuk:

> mendukung penciptaan masyarakat sipil melalui pemberdayaan lembaga-lembaga demokrasi dan pengembangan nilai-nilai demokrasi; mendorong masyarakat pada penyadaran akan dasar-dasar kehidupan masyarakat plural dan toleransi dalam seluruh kehidupan sosial; dan memberikan perhatian pada dasar-dasar masyarakat sipil, khususnya HAM, bagi orang-orang yang telah dilemahkan dan dipinggirkan dari pelayanan pemerintah dan sistem hukum.

Visi tersebut, dalam kurun waktu yang lebih pendek, khususnya mengacu kepada tuntutan perkembangan yang ada dalam masyarakat saat ini, mendorong Percik untuk mengutamakan beberapa hal berikut: peningkatan kinerja pemerintah lokal menuju ke arah yang sehat dan baik; meningkatkan kesadaran politik masyarakat ke arah perwujudan prinsip-prinsip bernegara dan bermasyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi penegakan hukum, dan menghormati HAM; serta memperkuat *civil society* yang berbasis pada nilai-nilai pluralisme dan toleransi.

Jika LKiS banyak dipelopori para aktivis Muslim dari kelompok Nahdatul Ulama, di lingkungan Muhammadiyah juga lahir gerakan serupa yakni PSAP (Pusat Studi Agama dan Peradaban).[9] Lembaga itu pada awalnya diinisiasi oleh beberapa eksponen Angkatan Muda Muhammadiyah, terutama sayap IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) dan IRM (Ikatan Remaja Muhammadiyah), yang memiliki kegelisahan mengenai lemahnya sayap kultural di lingkungan Muhammadiyah sejak masa Reformasi. Kegelisahan internal tersebut juga dipicu oleh banyaknya kader Muhammadiyah yang tertarik masuk ke dunia politik praktis. Kegelisahan itu hampir tidak memperoleh penyaluran

lewat wadah organisasi otonom yang cenderung birokratis dan memiliki cakupan aktivitas yang sangat luas. Di sisi lain, perkembangan mutakhir, yaitu meningkatnya gerakan Islam *radikal*—istilah yang dipakai PSAP—juga memberi pengaruh yang tidak kecil. Peningkatan aliran garis keras itu menandai bangkitnya radikalisme *baru* Islam di negeri ini. Indikator dari tren tersebut adalah kemunculan kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi yang cenderung lebih keras, termasuk dalam tindakan kekerasan fisik, untuk mencapai agenda-agendanya. Kelompok-kelompok itu menganggap Islam beserta seluruh perangkatnya sebagai alternatif solusi terbaik tanpa kompromi dan dialog. Kegelisahan tersebut kemudian menjadi perbincangan intensif di lingkungan anak-anak muda Muhammadiyah dan terus dicari jalan keluarnya. Maka, sejak akhir 2000, anak-anak muda Muhammadiyah mulai rutin melakukan diskusi mingguan setiap Rabu dengan beragam tema. Inisiatif tersebut semakin memperoleh momentum pada awal 2001. Saat itulah muncul gagasan mengenai perlunya membuat sebuah lembaga yang dapat mewadahi keprihatinan anak-anak muda Muhammadiyah tersebut, tepatnya pada Februari 2001.

Sementara itu, belakangan lahir pula institusi yang disebut the Wahid Institute (WI)[10] di Jakarta. Lembaga yang dipelopori kelompok Muslim ini sangat peduli dengan dialog antaragama. Berdiri pada 2004, WI secara khusus dimaksudkan untuk mengeksplorasi pikiran dan gagasan pluralisme dan kebangsaan Abdurrahman Wahid, minus politik. Melalui WI diharapkan gagasan pluralisme dan kebangsaan Wahid tidak saja disebarluaskan, tapi juga diuji oleh kenyataan-kenyataan keindonesiaan kontempo-

rer. WI memiliki semboyan *seeding plural and peaceful Islam,* dan memiliki visi mewujudkan prinsip-prinsip dan cita-cita intelektual Abdurrahman Wahid dengan membangun pemikiran Islam moderat yang mendorong terciptanya demokrasi, pluralisme agama, multikulturalisme, dan toleransi di kalangan kaum Muslim di Indonesia dan seluruh dunia. Sejarah pendirian WI dimulai dari mundurnya Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Beberapa kalangan khawatir, kemunduran Wahid akan berakibat pada kalahnya gagasan kebangsaan dan pluralisme yang telah secara konsisten dia suarakan.

Meski tidak secara langsung fokus pada kegiatan dialog antaragama, LKiS merupakan kantong pergerakan keislaman yang sangat kuat dalam mengusung wacana dan transformasi paham Islam dan pluralisme. Dalam kancah wacana pluralisme, LKiS berupaya menggeser wacana dialog dalam bingkai *kerukunan* ke dialog dalam bingkai *demokratisasi*. Lembaga itu merumuskan visinya berupa terwujudnya tatanan Islam transformatif yang berpihak pada keadilan dan kemajemukan, serta berbasis keindonesiaan. Visi ini diyakini akan terealisasi melalui tiga misi: (a) menyebarluaskan gagasan Islam yang transformatif, toleran, dan bersifat keindonesiaan; (b) mengembangkan pembelajaran Islam yang lebih menghargai kemajemukan dan kritis terhadap ketidakadilan; dan (c) memperkuat dan meningkatkan kapasitas sumberdaya, kelembagaan, dan jaringan.

PSAP sendiri meletakkan visinya sebagai lembaga studi yang meneguhkan komitmen untuk mewujudkan masyarakat berkeadaban (*civic culture*) yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan, sedangkan misi PSAP ialah untuk mengartikulasi gagasan-gagasan perada-

ban dengan sudut pandang baru. Verbalisasi gagasannya, selain diarahkan untuk mengembangkan gagasan alternatif yang kritis dan solutif yang berkaitan dengan persoalan keislaman, kemuhammadiyahan, dan keindonesiaan, juga diarahkan untuk melakukan proses penguatan *civil society* di Indonesia. Nilai-nilai yang ingin dikembangkan meliputi kemandirian, keadilan, dan kebebasan. Prinsip kerja yang dibangun PSAP adalah akuntabilitas, netralitas, kesetaraan gender, visioner, kebersamaan, profesionalitas, inovatif, dan integritas. Sedangkan isu strategis yang digeluti oleh lembaga yang bertempat di Jakarta itu meliputi partisipasi dalam menciptakan sistem politik demokratis; mendorong terciptanya budaya keberagamaan yang ramah, berkemajuan, toleran, dan inklusif; dan mendorong terciptanya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pemerintahan dan kekuatan masyarakat sipil, memperkuat jaringan untuk memberdayakan *civil society* dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, dan melakukan kajian-kajian peradaban alternatif. Tujuan PSAP adalah menyemaikan gagasan alternatif yang kritis dan solutif yang berkaitan dengan keislaman, kemuhammadiyahan, dan keindonesiaan, serta sebagai elemen penguat *civil society*.

Di antara salah satu ujung tombak kegiatan Percik dalam bidang penelitian lokal adalah pengembangan Pusat Studi dan Penelitian Transformasi Praktik-Praktik Keagamaan Lokal. Pengembangan pusat studi dan penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa kajian praktik-praktik keagamaan lokal sangat diperlukan untuk memahami sifat perubahan politik pada aras lokal. Kajian praktik-praktik keagamaan lokal dapat membantu mencermati berbagai bentuk *keagenan* lokal dalam arti luas: *akar dan rute*

perubahan yang bermula sebagai proses lokal. Studi agama lokal seringkali diabaikan karena dianggap kurang relevan bagi pemahaman terhadap perubahan politik dan ekonomi. Padahal, menurut Percik, praktik-praktik keagamaan membantu mengungkapkan cara-cara pemegang peran lokal memahami situasi setempat dan berupaya mengatasi hambatan yang mereka hadapi. Dalam praktik keagamaan, masyarakat setempat merenungkan dan menanggapi isu-isu penting serta hambatan yang mereka hadapi. Praktik keagamaan dapat dipandang sebagai cara-cara mengatasi isu-isu serta hambatan konkret yang menantang para pemegang peran lokal. Pemahaman tentang agama-agama setempat dapat menjadi kunci untuk memahami transformasi politik dalam arti yang lebih luas. Tema-tema penelitian yang dikembangkan dalam bidang tersebut misalnya, *Pelaksanaan Hak-Hak Sipil Para Penganut Khong Hu Cu di Beberapa Kota di Jawa Tengah* (1996); *Gejala Kekerasan Massal di Pekalongan* (1998); *Penelitian Sejarah Agama Lokal di Dusun Nalen, Desa Watu Agung, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang* (2001-2005); *Penelitian Jejak Langkah Kiai Sadrach di Desa Karangjoso, Kecamatan Langenrejo, Kabupaten Purworejo* (2003); dan *Penelitian Peran Politik Tokoh-tokoh Keagamaan Lokal di Daerah Muria* (2004).

Sementara itu, perhatian LKiS pada isu dialog antaragama bermula ketika kelompok tersebut menghadapi stigmatisasi Islam dalam memandang agama lain. Pada 1990-an, ketika LKiS terlibat dalam advokasi kasus Kedungombo, para aktivis LKiS menghadapi tantangan dari dalam sebagian umat Muslim sendiri. Mereka mempertanyakan mengapa LKiS terlibat dalam gerakan Kedungombo yang dipelopori, salah satunya, oleh seorang pastor

Katolik, Y.B. Mangunwijaya. Sejak saat itu LKiS melakukan kajian yang sangat intensif tentang relasi antara Islam dan agama-agama lain. Pada tingkat tertentu, kajian-kajian yang diadakan mengarah pada proses kritik diri atas tradisi Islam. Selain melakukan kajian, LkiS, sejak 1997, kemudian membuka kelas kursus tentang Islam dan Dialog Antaragama. Modul kelas itu terdiri dari materi-materi seperti membongkar *prasangka* atas agama lain, analisis wacana agama, relasi agama dan negara, multikulturalisme, dan advokasi kebijakan keagamaan. Peserta dari kelas Islam dan Dialog Antaragama adalah para mahasiswa, santri, dan aktivis gerakan dialog. Perspektif dialog antaragama juga dikembangkan secara kuat, misalnya dalam pembuatan film dokumenter oleh para pelajar dengan konsep *experiencing diversity,* di mana pelajar dari suatu agama tertentu membuat film dokumenter tentang agama dan tradisi yang berbeda dengannya. Dalam konsep itu pelajar sama sekali tidak diajak untuk mendiskusikan konsep pluralisme, tapi didorong untuk *mengalami* pluralisme itu sendiri.

LKiS melakukan berbagai kegiatan yang diwadahi secara institusional ke dalam empat divisi, yakni media dan kebudayaan, Islam dan gender, desentralisasi, serta pendidikan dan pesantren. Di divisi media dan kebudayaan, LKiS melakukan riset, penerbitan jurnal, buku, buletin Jum'at *al-Ikhtilaf*, mengorganisasi komunitas sastra pelajar Coret, dan memproduksi film dokumenter. Sedangkan divisi Islam dan Gender menyelenggarakan riset, kajian, advokasi, dan pengembangan komunitas sensitif gender. Divisi Desentralisasi menjalankan riset, advokasi Peraturan Daerah, serta eksplorasi politik lokal dan Islam *lokal*. Sementara divisi Pendidikan dan Pesantren menjalankan riset, pen-

didikan kewarganegaraan, pengembangan pesantren, dan belajar bersama Islam Transformatif dan Toleran.

Di luar bidang penelitian, Percik juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat. Dari riset-riset dan kajian-kajian yang diselenggarakan dalam bidang hubungan antaragama, Percik memandang di banyak tempat di Indonesia, relasi antarkelompok umat beragama acap kali menegang, bahkan diwarnai dengan konflik dan kekerasan. Relasi lintas agama sering diwarnai dengan ketidakpercayaan dan prasangka yang berkepanjangan. Karena itu Percik membentuk apa yang disebut Forum Sobat (Forum Sarasehan Lintasiman) yang, antara lain, diposisikan untuk ikut mengurai prasangka dan potensi konflik keagamaan. Gerakan dialog lintas iman tersebut dimulai sejak pertengahan 1999. Bersama dengan Gereja Kristen Jawa (GKJ) di Salatiga dan Pesantren Edi Mancoro, Gedangan, Percik memprakarsai pertemuan tiga hari antara 15 pendeta GKJ dengan 15 kiai dari beberapa pesantren di Jawa Tengah. Keberhasilan pertemuan tersebut dalam menciptakan suasana akrab dan terbuka, melahirkan ide untuk mengembangkan program dialog lintas iman di tingkat lokal. Selama periode 1999-2004, kegiatan dialog lintas iman ini telah melahirkan 32 simpul lokal di Jawa Tengah yang pesertanya tidak terbatas hanya para tokoh agama. Para peserta berasal dari berbagai latar agama, tidak lagi hanya Islam dan Kristen. Sementara itu, pada pertengahan 2004, Percik mulai memprakarsai forum lokal dialog lintas iman di Lampung dan Sumba Barat. Di Propinsi Lampung, forum lokal dialog lintas iman tersebut berkembang secara cepat di lima kabupaten dan di Kota Bandar Lampung.

Program-program PSAP selama ini yang dilakukan adalah di seputar isu Islam, pluralisme, dan multikulturalisme; *good governance*; gerakan perdamaian; penguatan kapasitas pemimpin muda; pendidikan; dan publikasi. Program-program tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk program alternatif berupa penguatan proses demokratisasi di Indonesia dengan mengambil dua tema. *Pertama,* tema meningkatkan kemampuan diri dalam mendorong budaya keberagamaan yang toleran dan inklusif. Kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam tema itu adalah riset pemetaan pemikiran dan gerakan Islam; penerbitan jurnal dan buletin keagamaan; serta menerbitkan buku-buku yang menampilkan wajah Islam Kritis dan Transformatif; diskusi rutin kajian pemikiran Islam; *roundtable discussion* isu-isu strategis terkait agama dan politik; dan melakukan pelatihan dai inklusif. *Kedua,* tema meningkatkan keterlibatan institusi dalam mendorong terciptanya sistem politik demokratis. Kegiatannya berupa kajian isu politik kontemporer, pendidikan publik, pendidikan pemilih, pendidikan politik perempuan, dan membuat *policy paper* tentang berbagai kebijakan publik.

Pogram *kedua* adalah melakukan penguatan organisasi *civil society* dengan tema memperkuat jaringan kerjasama dengan organisasi masyarakat yang menjadi bagian dari gerakan *civil society*. Tema itu diimplementasikan dengan membuat konsorsium atau koalisi isu-isu strategis dan memperluas jaringan di kalangan Angkatan Muda Muhammadiyah se-Indonesia. Program *ketiga* adalah memperkuat kapasitas diri sebagai sebuah institusi, dengan melaksanakan pelatihan manajemen lembaga swadaya masyarakat, pelatihan pengembangan kapasitas bidang analisa

sosial, pusat data dan informasi, serta perpustakaan. Di antara penelitian yang pernah dilakukan misalnya: *Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Muhammadiyah* (2003); *Toleransi dan Pluralisme dalam Perspektif Muhammadiyah* (2003); dan *Islam dan Hak Asasi Manusia* (2003). Diskusi-diskusi yang pernah diadakan semisal: *Perempuan dan Partisipasi Demokrasi* (2002); *Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Muhammadiyah* (2003); *Toleransi dan Pluralisme dalam Perspektif Muhammadiyah* (2002), *Radikalisme dan Masa Depan Civil Islam di Indonesia* (2003); *Islam dan Demokratisasi: Perbandingan Indonesia dan Timur Tengah* (2003). Selain itu, PSAP juga menyelenggarakan berbagai lokakarya dan pelatihan seperti *Pelatihan Kader Ulama Inklusif* di Banjarmasin (2003) dan *Workshop Penguatan Partisipasi Ormas dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup* di Jakarta (2004).

Ada cukup banyak program yang telah dilakukan oleh WI terkait dialog antaragama. *Pertama,* kampanye pemikiran Islam progresif dan pluralisme. Sebagian besar program dalam bidang itu dilakukan dengan metode publikasi atau media, seperti mengisi sisipan di majalah tempo tentang *menyemai Islam damai,* penerbitan buletin, mengisi sisipan di surat kabar lokal, dialog di televisi dan radio, menerbitkan laporan berkala bulanan tentang isu-isu keagamaan, dan penerbitan buku. Selain program di bidang media, WI juga menyelenggarakan survey tentang pelanggaran kebebasan beragama, membangun komunitas informal di Café 8, promosi kebudayaan di pesantren, seminar, dan diskusi. *Kedua,* program-program dalam kelompok pengembangan kapasitas untuk gerakan Muslim progresif di Indonesia, seperti halaqah pelatihan HAM untuk pak kiai dan bu

nyai, kunjungan informal kepada para ulama dan kiai di berbagai daerah, workshop penyusunan modul Islam dan pluralisme, pembentukan tim advokasi hukum, dan lokakarya partisipasi masyarakat untuk Pilkada.

Ketiga, bidang pendidikan, seperti pembukaan kelas Islam dan pluralisme, *live in* kelas Islam dan pluralisme, dan pelatihan penulisan kreatif. Di antara kelas Islam dan pluralisme tersebut adalah pendidikan Islamologi untuk para pastor atau pendeta. Sebagian program WI diselenggarakan tidak secara terstruktur rapi, seperti berbagai dialog tentang Islam dan Barat. Selain itu, WI melihat keberhasilan programnya tidak saja terletak pada program-program tersebut *an sich,* tapi juga pada dampak dari program tersebut kepada masyarakat, seperti pemanfaatan beberapa survey WI serta dokumen program dan risetnya secara luas oleh lembaga lain, para peneliti, dan kalangan media.

Belajar dari pengalaman di Indonesia, Percik bekerjasama dengan gereja-gereja di Belanda pada Februari 2003 memfasilitasi dan mendukung dimulainya program lintas iman di Belanda. Program belajar bersama lintas iman yang diberi nama Sobat berusaha mempertemukan para pendeta dan imam masjid Turki dari lima propinsi di negeri Belanda. Pada pertengahan 2004, serombongan peserta Sobat berkunjung selama tiga minggu ke Jawa Tengah untuk melakukan studi banding ke lima simpul Sobat yaitu Salatiga, Pekalongan, Purwodadi, Wonogiri, dan Klaten. Kunjungan balik yang sama dilakukan oleh rombongan dari Indonesia ke Belanda pada 2006. Kesepuluh delegasi tersebut terdiri dari para pendeta, ulama, dan staf Sobat Percik.

Sebagai upaya untuk mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan publik lintas iman, selain memben-

tuk Forum Sobat, Percik sejak awal 2004 juga membangun *Forum Kata Hawa* di Banyu Biru dan Wonogiri. Forum perempuan lintas iman tersebut beranggotakan perempuan dengan berbagai latar agama. Dalam awal kegiatannya, Forum itu memfokuskan diri pada upaya pengembangan wacana gender dan meminimalisasi terjadinya kekerasan domestik terhadap perempuan. Forum itu menyelenggarakan pertemuan rutin bulanan dengan tempat yang berpindah-pindah. Khusus pada 2006, Forum Kata Hawa mengadakan Diskusi Nasional dengan tema *Poligami dan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Tinjauan Teologi, Yuridis dan HAM*. Sementara itu, khusus menyangkut pengembangan internal umat Kristiani yang terbuka dan dialogis, Percik menginisiasi Desk Pengembangan Kehidupan Bergereja (DPKB). Institusi tersebut merupakan wadah yang diluncurkan pada 9 Desember 2003 oleh dua lembaga, yaitu Christian Reformed World Relief Committee (CRWRC) dan PERCIK. Wilayah gerak DPKB adalah pembangunan masyarakat sipil dalam bergereja. Perhatian itu pada satu pihak bertujuan membangun kehidupan bergereja ke dalam, yaitu kehidupan bergereja dari anggota gereja dengan menampakkan nilai-nilai Kristen dalam interaksi sehari-hari, dan, pada pihak lain, sekaligus menjadi kehidupan dan interaksi yang membangun masyarakat sipil dengan mengacu pada nilai-nilai kesetaraan, partisipasi, transformasi, demokratisasi, pluralitas, kesinambungan, dan pemberdayaan. Nilai-nilai yang diangkat adalah nilai-nilai Kristen yang perlu dikembangkan dalam kehidupan publik (dalam masyarakat sipil), sehingga ruang publik menjadi ajang yang di dalamnya semua anggota masyarakat dapat berinteraksi secara terus menerus dengan setara, partisipatif, demokra-

tis, dan mengakui kemajemukan, menuju masyarakat yang mampu menentukan bagi diri sendiri apa yang mereka inginkan dan ke mana mereka akan mengarah.

Setelah berhenti cukup lama di pertengahan 2000-an, LKiS mulai aktif kembali pada 2009, dan untuk tahun-tahun ke depan akan membuka kembali kelas Dialog Antaragama yang diberi nama Sekolah Pluralisme. Selain itu, LKiS juga akan meneruskan dua kelas lain, yakni Sekolah Gender dan Sekolah Politik. Dalam dua kelas yang disebut terakhir, penekanan tentang perspektif pluralisme tetap akan cukup kuat dilakukan. Posisi media untuk menjangkau pendengar yang lebih luas juga tetap akan diutamakan. Selain kalangan mahasiswa, santri pondok pesantren, dan jaringan Islam tradisional, yang selama ini telah menjadi partisipan dalam berbagai kegiatan, LKiS juga akan memperluas konstituen program-progamnya, terutama kelompok pelajar dan remaja. Kelompok pelajar dan remaja dipilih sebagai bagian dari sasaran program LkiS, karena lembaga itu mengamati kecenderungan konservatisme agama saat ini meluas ke tingkat pelajar dan remaja. Di antara cita-cita besar LKiS untuk masa depan ialah membangun institut kajian yang berbasiskan pesantren dengan mereproduksi tradisi teks keislaman tradisional yang progresif untuk menjawab isu-isu etis kemanusiaan.

Di masa yang akan datang PSAP ingin telibat lebih mendalam dalam arus perubahan yang selama ini masih sedikit dilakukan di tubuh gerakan Muhammadiyah. Tema perdamaian yang melibatkan banyak lembaga, termasuk lembaga lintas agama dan generasi muda, masih belum muncul secara eksplisit dalam gerakan Muhammadiyah. Oleh karena itu, PSAP ingin *mengambil* isu itu ke dalam

rencana strategisnya melalui program generasi damai (*peace generation*). Program tersebut meliputi lokakarya, pelatihan, penerbitan, dan program aksi yang melibatkan beberapa organisasi yang menjadi partner PSAP. Sasaran yang dituju program itu adalah beberapa lembaga yang ada dalam lingkup Muhammadiyah (baik struktural maupun kultural), dan beberapa lembaga yang berada di luar Muhammadiyah (misalnya, lembaga perempuan, media, dan lembaga lintas agama baik di level LSM maupun akademik).

Di masa depan, setelah mengevaluasi program-programnya, WI ingin melakukan hal-hal penting dalam tiga tingkat. *Pertama,* advokasi kebijakan negara, bukan hanya mengenai Perda (Peraturan Daerah) Syariat atau bernuansa agama, tetapi juga melihat lebih cermat terhadap kebijakan agama yang mencantumkan soal agama di dalam pasal-pasal peraturan tersebut. *Kedua,* menekankan perjuangan pada level masyarakat bawah/akar rumput agar masyarakat dapat lebih menerima kemajemukan. Pada level ini, WI akan memperkuat kelompok-kelompok elite lokal seperti kiai, ustadz, pendeta, pastor, dan sebagainya melalui program-program yang melibatkan elite-elite lokal tersebut. *Ketiga,* memperkuat wacana kemajemukan ke pesantren. Sebenarnya, WI sudah sering melibatkan pesantren meski hanya sebatas jaringan, belum pada level kerjasama program. Di masa depan, WI berharap bisa menyusun program bersama pesantren-pesantren.

Dialog di Lembaga Gerakan Perempuan

Permasalahan diskriminasi gender tak jarang berjalinkelindan dengan diskriminasi agama. Lebih dari itu, diskrimi-

nasi gender dan kekerasan terhadap perempuan seringkali juga dipicu oleh tafsir agama yang acapkali masih menomorduakan perempuan. Oleh sebab itu, banyak institusi gerakan perempuan di Indonesia yang pada saat bersamaan mengeksplorasi dialog antaragama dalam kegiatan-kegiatannya. Di sini kita mengambil contoh tiga institusi gerakan perempuan yang menjadikan dialog antaragama sebagai salah satu wilayah kerja utamanya, yaitu Fahmina Institute, Mitra Wacana, dan Kapal Perempuan.

Fahmina Institute,[11] selanjutnya disebut Fahmina, lahir pada 2000. Kehadirannya berawal dari pergumulan anak-anak muda pesantren, sebagiannya anak para kiai, di Cirebon. Tidak mengherankan kalau kemudian perhatian utama lembaga tersebut adalah untuk mengembangkan tradisi intelektual dan etos sosial pesantren. Para penggagas lembaga tersebut menempatkan nama Fahmina dalam dua level pengertian yang menjadi spirit geraknya, *pertama,* kata *fahmina* berasal dari bahasa Arab, terdiri dari dua subkata, *fahm* yang berarti pemahaman, nalar, atau perspektif; dan kata *na (nahnu)* yang berarti kita. Fahmina diartikan sebagai pemahaman kita, nalar kita, atau perspektif kita, baik tentang teks keagamaan maupun tentang realitas sosial. *Kedua,* kata *fahmina* diartikan dari kata *fahm* yang berarti cara pandang, dan kata *ina* yang merupakan singkatan dari kata Indonesia, sehingga pada level itu Fahmina bisa berarti perspektif atau cara pandang keindonesiaan. Melalui hal tersebut, kiranya para penggagas Fahmina ingin menawarkan cara pandang keislaman tentang realitas sosial yang berakar pada konteks keindonesiaan.

Di Yogyakarta terdapat Mitra Wacana[12] yang, dilihat dari sisi usianya, tergolong cukup matang, karena telah

berdiri sejak 1996. *Pusat Layanan Informasi Perempuan* (PLIP) Mitra Wacana didirikan oleh sejumlah aktivis LSM di Yogyakarta yang memerhatikan isu perempuan dan kesetaraan gender. Secara spesifik pendirian Mitra Wacana dimaksudkan untuk mengisi ruang kosong lembaga yang menangani pusat informasi tentang persoalan perempuan dan anak. Pendirian lembaga tersebut diharapkan mampu memudahkan para aktivis perempuan, masyarakat umum, dan lembaga lain untuk mengakses berbagai informasi mengenai persoalan perempuan dan anak. Meski pada gilirannya banyak berdiri lembaga yang bergiat pada isu perempuan dan kesetaraan gender, Mitra Wacana semakin memapankan perannya sebagai lembaga penyedia data dan informasi tentang persoalan perempuan dan anak, memfasilitasi LSM Perempuan, organisasi massa perempuan, pemerintah, akademisi, dan masyarakat umum untuk dapat mengakses informasi tentang keadilan berperspektif gender. Lembaga itu memandang advokasi melalui jalur informasi tetap tidak bisa ditinggalkan, demi tegaknya keadilan bagi kelompok-kelompok marginal, utamanya perempuan.

Sedangkan Kapal Perempuan (Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk Perempuan),[13] berdiri pada 2000 di Jakarta. Kapal Perempuan lahir dari keprihatinan dan kegelisahan terhadap perubahan politik, situasi konflik dan kekerasan yang bernuansa agama, etnis, kelas, maupun kelompok tertentu yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Lembaga itu merupakan organisasi yang terdiri dari kumpulan individu yang mengorganisasikan diri dan bekerja untuk mengembangkan pendidikan alternatif perempuan. Kapal Perempuan berupaya meningkatkan keadilan gender, nilai-nilai pluralistik, dan kepemimpinan perem-

puan, serta memfasilitasi tumbuhnya kelompok-kelompok belajar perempuan di Indonesia. Individu-individu yang tergabung dalam organisasi tersebut memiliki kepedulian pada isu pendidikan alternatif perempuan dan kelompok masyarakat miskin, feminisme, dan multikulturalisme, serta selalu mengembangkan pemikiran kritis dan pluralis.

Konteks sosial pendirian Fahmina adalah peristiwa konfik yang mengikuti Reformasi 1998, secara lebih khusus ledakan di Gereja Katedral pada 2000. Fahmina segera berinisiasi mempertemukan semua tokoh-tokoh agama di kota Cirebon dan kemudian membentuk *Forum Sabtuan*—dari kata Sabtu, menunjuk waktu di mana biasanya forum tersebut bertemu. Forum itu melakukan pertemuan-pertemuan reguler yang membahas isu-isu umum seperti demokrasi, HAM, gender, dan pluralisme. Di antara media yang dipakai adalah dialog di radio untuk memberi ruang bagi kelompok-kelompok masyarakat di Kabupaten Cirebon untuk menyampaikan pandangan masing-masing. Di samping itu, forum tersebut kemudian juga menerbitkan buletin bulanan *Kretek* (jembatan) yang difasilitasi oleh Fahmina untuk menyampaikan pandangan keagamaan mengenai problem-problem sosial yang terjadi di masyarakat.

Visi Fahmina Institute adalah terwujudnya masyarakat sipil yang kritis dalam berpikir, terbuka dalam bersikap, berdaya dalam martabat, dan berkeadilan dalam tatanan kehidupannya. Visi tersebut dipandang dapat terejawantahkan melalui tiga misi: *Pertama,* melalui pengembangan dan penyebarluasan wacana keagamaan kritis yang mengarah pada perubahan sosial yang berkeadilan. *Kedua,* mendorong terciptanya masyarakat yang demokratis dan tole-

ran terhadap perbedaan-perbedaan etnis, ideologi, gender dan agama. *Ketiga,* memfasilitasi keberdayaan masyarakat yang tertindas melalui pendidikan dan penguatan partisipasi mereka dalam pemanfaatan sumberdaya. Lebih spesifik lagi, misi Fahmina difokuskan untuk menyasar tiga isu utama, yakni Islam dan Demokrasi, Islam dan Gender, serta Islam dan Otonomi Komunitas. Bagi para aktivis Fahmina, ketiga hal relasional tersebut masih menjadi masalah besar di kalangan masyarakat santri.

Mungkin bisa dikatakan bahwa Kapal Perempuan merupakan lembaga gerakan perempuan yang memiliki perhatian sangat besar terhadap isu pluralisme dan menjadikan pluralisme sebagai misi integratif dalam gerakannya. Secara lebih rinci misi Kapal Perempuan adalah sebagai berikut: (a) mengembangkan pendidikan alternatif perempuan yang meningkatkan keadilan gender, nilai-nilai pluralistik, otonomi, dan kepemimpinan perempuan; (b) mengembangkan *resource center* untuk memfasilitasi dan memperkuat kapasitas komunitas-komunitas belajar di Indonesia yang dapat diakses oleh publik; (c) membangun gerakan bersama untuk mendorong dan menciptakan kebijakan-kebijakan pendidikan yang pro rakyat miskin, kelompok marginal, dan perempuan. Misi tersebut dijalankan oleh Kapal Perempuan dengan tiga strategi, yaitu pengorganisasian dan pendidikan melalui kegiatan pendidikan pluralisme dan pendidikan komunitas; strategi advokasi dengan melakukan advokasi budget dan penguatan kapasitas bagi jaringan; dan strategi riset dan publikasi, yang menjadi strategi utama Kapal Perempuan. Saat ini Kapal Perempuan melakukan beragam kegiatan di seputar pendidikan, penelitian, dan advokasi yang melibatkan pihak-pihak se-

perti kelompok/ organisasi perempuan, pemerintah, dan organisasi masyarakat lainnya, untuk mengembangkan pemikiran dan aksi bersama yang kritis, sensitif gender, dan pluralis.

Jika Fahmina sejak awal menjadikan perspektif lintas agama sebagai fokus utamanya, maka Mitra Wacana semula tidak masuk dalam isu lintas agama, meski memiliki visi *terwujudnya masyarakat yang adil gender, egaliter, demokratis, dan pluralis—perhatikan terma pluralis.* Mitra Wacana baru merasa penting untuk mengagendakan perspektif lintas agama setelah bergelut langsung di masyarakat akar rumput, khususnya ketika melakukan kegiatan-kegiatan di Banjarnegara, Jawa Tengah. Pada 2006, sebagai konsekuensi melakukan kegiatan sosialisasi PKDRT (Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga), Mitra Wacana harus menentukan *stakeholder* untuk menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut. Akhirnya dipilihlah tokoh agama-agama sebagai mitra. Bersamaan dengan itu, mulai muncul pula klaim internal antartokoh agama. Sejak saat itu Mitra Wacana mulai terlibat dengan dialog antaragama untuk mencari solusi ketegangan yang muncul. Selama satu tahun, secara bertahap prasangka keagamaan yang awalnya muncul di antara para mitra lembaga tersebut mulai mencair bersamaan dengan pertemuan bulanan yang rutin diselenggarakan. Misalnya, dalam kegiatan kunjungan ke pusat-pusat komunitas keagamaan, seorang Muslim mengatakan baru pertama kali mengunjungi gereja bersama Mitra Wacana padahal sudah dia tinggal puluhan tahun di depan gereja tersebut.

Berbeda dengan para aktivis Mitra Wacana, latar pengalaman aktivis Fahmina yang umumnya dari kalangan pesantren membuat mereka memandang tokoh-tokoh Mus-

lim dan para kiai di pesantren-pesantren sebagai pusat-pusat perubahan kultural di masyarakat lokal Cirebon. Dengan melakukan transformasi di tingkat pusat perubahan kultural tersebut, proses perubahan di masyarakat dipandang menjadi lebih efektif. Strategi yang disusun oleh Fahmina menyesuaikan dengan area kerja yang telah disebutkan, termasuk perihal pilihan bahasa dan konsep program. Misalnya ketika Fahmina menghadapi kesulitan mengundang para kiai dalam sebuah acara formal, Fahmina sering menggunakan istilah *ngobrol* dan *lesehan* daripada diskusi, karena para kiai pada umumnya senang berbicara atau memiliki tradisi lisan yang kuat. Nama forumnya juga disesuaikan dengan tradisi para kiai, yakni *mujalasatul ulama,* dibanding seminar atau lokakarya. Dari awal lembaga tersebut memang tidak merumuskan diri sebagai lembaga *interfaith* atau lembaga yang berkonsentrasi pada dialog antaragama sehingga kegiatannya tidak secara langsung berkaitan dengan hubungan antaragama. Meski demikian, dalam kegiatan-kegiatannya, Fahmina memiliki sensitivitas yang kuat dalam mengelola perspektif antaragama, termasuk visi tentang kebebasan beragama. Selain visi lintas agama, salah satu nilai yang dipegang kuat oleh Fahmina adalah keragaman dan kebersamaan.

Kegiatan keseharian Fahmina terhitung sangat padat. Dalam klaster program Islam dan Gender, Fahmina melakukan kampanye *anti-trafficking* melalui media publik, seperti buletin *al-Basyar*, iklan layanan *anti trafficking* di radio, advokasi kebijakan (litigasi) Peraturan Daerah *anti trafficking*, dan *talkshow* di radio komunitas. Dengan oplah sekitar 13.000 eksemplar, buletin bulanan *al-Basyar* tersebar cukup luas di masjid, majelis taklim, instansi pemerin-

tahan, dan jaringan program Islam dan Gender Fahmina. Sementara dalam program Islam dan Otonomi Komunitas, Fahmina menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya kader penggerak warga, pengembangan jurnalisme kemanusiaan Islam berbasis komunitas, lokakarya kurikulum kader ulama humanis, dan kursus ulama humanis. Rumusan kurikulum ulama humanis berupaya mendorong lahirnya ulama yang peka terhadap problematika sosial dan mampu melakukan pendidikan kepada masyarakat ke arah yang lebih baik. Materi yang disampaikan yaitu: p*ertama*, pengembangan dasar tradisi keislaman yang mumpuni, baik secara tekstual maupun metodologis. Materi tahap itu didominasi oleh pembahasan metodologi *ushul fiqh* (metodologi hukum Islam); *kedua,* teori dan analisis sosial; *ketiga,* kemampuan teknik operasional yang dapat menjembatani transformasi di masyarakat, seperti teknik-teknik pengelolaan radio komunitas.

Sementara itu, Kapal Perempuan mengembangkan sistem pendidikan melalui pelatihan dalam empat level. Level pertama adalah pelatihan-pelatihan yang memfokuskan peserta pada upaya membangun sensitivitas keadilan gender. Pada level kedua, peserta diajak untuk melakukan analisis sosial berperspektif feminisme. Berikutnya, di level ketiga, peserta dilatih dalam hal pengorganisasian dan advokasi berperspektif feminisme. Di level keempat, diadakan *Training of Trainers* (TOT) mengenai pendidikan feminisme, otonomi, dan pluralisme. Secara lebih konkret Kapal Perempuan bersama tiga mitra utamanya di Bali, Kalimantan Tengah, dan Gorontalo, mencoba memperkuat gerakan advokasi kebijakan pluralisme melalui pengembangan program *kartu penilaian masyarakat sipil.* Di dalam program

itu dicermati situasi pluralisme dan kecenderungan politik identitas di masing-masing daerah tersebut. Hasil penilaian kemudian dijadikan dasar untuk melakukan advokasi kebijakan kepada pemerintah lokal, sekaligus dapat digunakan sebagai *early warning system* terhadap kemungkinan konflik di masa mendatang.

Di masa depan, setidaknya untuk beberapa tahun yang akan datang, Fahmina masih akan meneruskan beberapa kegiatannya yang perlu ditindaklanjuti, seperti upaya untuk menggolkan Perda *anti-trafficking* melalui lobi-lobi di tingkat dewan dan eksekutif; memperluas pengembangan jurnalisme kemanusiaan Islam berbasis komunitas di wilayah III Cirebon, meliputi daerah Kota dan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan; pembangunan radio-radio komunitas; eksplorasi kritik wacana keagamaan; serta pembangunan epistemologi dan metodologi teks-teks keagamaan. Eksplorasi wacana keislaman tersebut didasari penggunaan prinsip *taqdimul aql 'ala naql* (mendahulukan akal dibandingkan dengan teks). Fahmina mengadaptasi pemikiran Fakhruddin ar-Razi (filsuf Muslim) yang berpendapat bahwa mendahulukan teks daripada akal adalah tidak mungkin, karena akal adalah dasar untuk memahami teks. Lembaga itu meyakini bahwa tradisi literatur Islam sangat kaya untuk menjawab persoalan-persoalan sosial yang ada saat ini dan di masa depan.

Dialog di Lembaga Keagamaan

Jika dibandingkan dengan tahun berdirinya, kegiatan-kegiatan dialog antaragama di lembaga-lembaga keagamaan

muncul belakangan. Dorongan untuk melakukan dialog pun beragam dari satu lembaga keagamaan dengan lainnya, ada yang menganggap agama lain sebagai tantangan maupun ancaman. Menariknya, karena Indonesia merupakan negara yang menjamin kebebasan dan kemerdekaan beragama, setiap lembaga keagamaan didorong untuk berdialog dalam menyelesaikan masalah yang mungkin muncul sebagai konsekuensi dari relasi dan komunikasi antaragama. Di bawah ini kita berusaha mengkaji tiga lembaga keagamaan yang kurang lebih mencerminkan perkumpulan atau majelis keagamaan di lingkungan Islam dan Kristen.

Pertama, PGI[14] yang berdiri pada 1950 dengan nama Dewan Gereja-gereja di Indonesia (DGI). Sebelumnya, telah ada lembaga sejenis yang bersifat kedaerahan dengan pusat di Medan (wilayah Barat), Yogyakarta (wilayah Tengah), dan Makasar (wilayah Timur). Di dalam sebuah Sidang Raya di Ambon pada 1984, DGI diganti menjadi PGI. Terma *persekutuan* diambil dari istilah Alkitab yang menyentuh segi eksistensial, internal, dan spiritual kebersamaan umat Kristiani. Kata itu dianggap lebih mengedepankan keterikatan lahir dan batin antargereja yang berafiliasi. PGI mengadopsi lambang tertua dalam gereja, yakni *kapal oikoumene* yang tengah berlayar di seluruh perairan dunia dengan muatan iman, persekutuan, dan pengharapan dengan sebuah Salib ditengahnya. *Oikoumene* berasal dari bahasa Yunani, *oikos* dan *menos*. Dalam ajaran Kristen, *oikoumene* berarti dunia yang termasuk ke dalam Kerajaan Kristus. Bagian terpenting yang ditampilkan dalam pekerjaan oikoumenis ialah persatuan dan persekutuan gereja-gereja, sekalipun ada perbedaan di antara mereka.

Di lingkungan Katolik, terdapat Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)[15] yang merupakan lembaga federasi para Waligereja (baca: Uskup) di Indonesia. Seorang Uskup disebut Waligereja karena dia adalah pimpinan gereja. Masing-masing uskup bersifat otonom sehingga KWI tidak berada di atas ataupun membawahi para uskup, serta tidak mempunyai cabang di daerah. Anggota KWI adalah para uskup di Indonesia yang masih aktif. Meski demikian, keuskupan tidak sama dengan KWI daerah. Sebagai lembaga hierarki gereja Katolik, saat ini KWI beranggotakan 38 uskup. Nama KWI sendiri baru dipakai pada 1987, sebelumnya, sejak 1955, menggunakan nama MAWI (Majelis Agung Waligereja Indonesia). Cikal bakal MAWI sendiri telah ada jauh sebelumnya, yakni sejak 1924, ketika diadakan sidang para Waligereja se-Nusantara yang pertama di Pastoran Katedral Jakarta. KWI bekerja melalui komisi-komisi yang diketuai oleh uskup-uskup.

Sedangkan di kalangan Muslim, terdapat Majelis Ulama Indonesia yang lahir pada 1975 bersamaan dengan Munas Alim Ulama. Meski merupakan organisasi nonpemerintah, namun pemerintah ikut membidani kelahirannya. Kini organisasi keislaman tersebut memiliki cabang yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia, pada umumnya mengikuti persebaran sistem administratif pemerintah di tingkat propinsi, kota, dan kabupaten. Memasukkan MUI ke dalam lembaga yang melakukan praktik dialog antaragama di masyarakat mungkin mengundang pertanyaan pembaca, sebab institusi itu belakangan banyak mendapat sorotan akibat dituding melakukan hal-hal yang kontraproduktif dengan gagasan dialog dan pluralisme. Meski begitu, pada kenyataannya MUI memiliki sebuah Komisi

Kerukunan Umat Beragama di dalam tubuh organisasinya. Memasukkan MUI di buku ini kemudian menjadi penting, termasuk untuk memeriksa gambaran hubungan antaragama yang seperti apa yang dibayangkan oleh MUI. Istilah *kerukunan* yang dipilih MUI juga menarik untuk dicermati, setidaknya jika dibandingkan istilah *dialog* yang lebih akrab di banyak kelompok masyarakat sipil yang lain.

Pendirian PGI mencerminkan keinginan untuk mempersatukan gereja-gereja di lingkungan Protestan ke dalam sebuah *oikoumene*. Karena itu, misi utama PGI, selain sebagai proses pemersatuan gereja-gereja, adalah pengembangan internal masyarakat Kristiani. Hal tersebut memengaruhi semua aktivitas lembaga itu, termasuk model aktivitas antaragama yang menjadi pilihan utamanya. PGI tidak memiliki bidang/divisi dialog antaragama secara khusus. Kegiatan-kegiatan dialog tersebar di beberapa bidang seperti bidang pemuda dan remaja, bidang diakonia, dan bidang marturia. Kegiatan-kegiatan dialog antaragama yang berada di bawah payung program *kerukunan dan kebebasan beragama* tersebut antara lain adalah: (a) diskusi tentang *Kaum Muda Mencermati Peraturan Agama dalam Ruang Publik* yang tidak saja membahas kebijakan keagamaan, tapi juga peristiwa pembakaran dan pengerusakan gereja dan kekerasan yang dilakukan kelompok tertentu; (b) advokasi dan pemantauan HAM, khususnya menyangkut terhadap kurang lebih 108 rumah ibadat yang ditutup selama 2004-2007 atas desakan kelompok agama lain. Selain itu, PGI juga berkontribusi dalam proses legislasi UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik; (c) seminar agama-agama di Bali (wilayah Tengah), Ambon (wilayah Timur), dan Cipayung (wilayah Barat) yang menghadirkan

pembicara dari tokoh-tokoh berbeda agama dan membahas permasalahan hubungan antaragama; (d) dialog lintas agama yang menjadi kegiatan rutin tiap periode kepengurusan PGI; (e) konsultasi Regional Pekabaran Injil untuk menyatukan persepsi pemahaman Pekabaran Injil dalam masyarakat majemuk di Indonesia.

Sementara itu, di antara 14 komisi yang ada, KWI memiliki satu komisi yang berhubungan dengan umat beragama dan kepercayaan lain, yaitu Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan (Komisi HAK) atau *Commission for Ecumenical and Interreligious Affairs*. Hal yang menarik untuk dicatat di sini ialah bahwa istilah *hubungan* lebih dipilih daripada *dialog*. Sebagai organisasi yang kuat dari sisi hierarki, gereja Katolik selalu membuat pedoman yang jelas dan tegas mengenai kegiatannya, tidak terkecuali menyangkut relasinya dengan agama lain. Dalam surat gembala pra-Paskah pada 1997, KWI mengeluarkan seruan tentang harapan kepada umat Katolik untuk tidak kenal lelah mengusahakan dialog antarumat beragama di semua tingkat. Para tokoh umat Katolik diharapkan untuk berkenalan dengan tokoh-tokoh umat agama lain. Jika umat Katolik merupakan umat terbesar, maka hendaknya diupayakan agar umat semua agama lain merasa aman dan diterima sepenuhnya. Sedangkan bila umat Katolik menjadi minoritas, hendaknya ia tetap terbuka, bahkan memprakarsai untuk bergaul dan bekerjasama dengan umat dan tokoh-tokoh agama lain. Sementara itu, salah satu poin surat gembala Paskah 2001 menyebutkan bahwa penghayatan dan pelaksanaan iman umat Katolik mencakup kesediaan membina persaudaraan sejati dalam membangun kehidupan bertetangga yang baik; saling mendukung dan peduli

terhadap siapa pun, dengan kelompok mana pun, termasuk dengan umat beragama lain. Dalam masalah hukum agama (seperti Syariat Islam) di ruang publik, sidang KWI pada 2001 menunjukkan sikap ketidaksepakatannya. Di situ disebutkan bahwa pemberlakuan Syariat Islam, dengan argumentasi bahwa hal tersebut hanya berlaku bagi kaum Muslim, kiranya tidak bisa dipertahankan, karena kaum Muslim hidup bersama dengan kaum beragama lain dan terjadi persinggungan di antara wilayah kehidupan mereka.

Meskipun secara teologis relatif terbuka, komisi HAK di KWI menetapkan prinsip-prinsip dialog yang tidak bertentangan dengan iman Katolik. Komisi HAK membagi partner dialog agamanya ke dalam tiga kelompok: umat Kristen (di luar Katolik); umat agama lain non-Kristen seperti Islam, Hindu, Buddha, dan lain-lain; dan umat kepercayaan. Empat level dialog yang dicanangkan meliputi: (a) dialog kehidupan, (b) dialog pengalaman religius, (c) dialog teologis/ilmiah, dan (c) dialog aksi nyata atau kerjasama.

Konteks politik Orde Baru sangat memengaruhi posisi sejarah MUI. Di masa awal kekuasaan Orde Baru, gerakan agama, khususnya Islam, seringkali dicurigai. Sebab itu pula pemerintahan Suharto sejak awal ingin *menundukkan* Islam dengan, antara lain, membidani lahirnya MUI, meskipun saat itu pemerintah masih menyimpan kecurigaan yang kuat terhadap politik Islam. Bersamaan dengan berjalannya waktu, akhirnya MUI malah bekerjasama dengan pemerintahan Orde Baru. Di masa Orde Baru, tak jarang umat Muslim sendiri berhadap-hadapan dengan pemerintah dan MUI menjadi jembatan antara keduanya, misalnya dalam hal tuntutan pemerintah agar setiap pengajian keislaman mengajukan izin kepada aparat keamanan. Di antara

fatwa MUI yang mendukung dan banyak menguntungkan pemerintah misalnya fatwa pada 1983 tentang bolehnya menggunakan sebagian besar alat kontrasepsi Keluarga Berencana (KB). Terlepas dari itu semua, sepanjang sejarah Orde Baru ada tiga hal yang selalu dibahas dalam Munas MUI, yang terdiri dari: (a) Masalah Agama dan Ketahanan Nasional; (b) Agama dan Pembangunan; (c) Dakwah dan Kerukunan Antarumat Beragama. Dari sini kita bisa membaca bahwa konsep *kerukunan* yang dipahami MUI memiliki relasi kuat dengan imbas dari proses dakwah Islam dan penyebaran agama-agama lain di luar Islam.

Secara normatif, Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama MUI menjabarkan panduan kerjanya sebagai berikut: (a) meningkatkan kepekaan dan sikap proaktif terhadap masalah-masalah yang terjadi antarumat beragama, khususnya yang timbul akibat pertentangan antarpemeluk agama yang dapat mengganggu kerukunan dan integrasi nasional; (b) mengupayakan terwujudnya pemahaman yang sama atas toleransi antarumat beragama, khususnya di kalangan pemimpin umat beragama dan para pemimpin bangsa; (c) meningkatkan kerjasama dan konsultasi dengan majelis-majelis agama dan pemerintah; (d) melakukan studi yang seksama dan kontinu tentang kehidupan internal umat beragama dan antarumat beragama di Indonesia; (e) bekerja sama dengan lembaga-lembaga keagamaan regional dan internasional; (f) menyusun buku kode etik hubungan antarumat beragama.

Setidaknya terdapat dua hal yang mendasari PGI untuk menyelenggarakan kegiatan dialog antaragama. *Pertama*, di tengah arus bangsa yang semakin bebas, PGI memandang umat Kristen tidak boleh diam melihat fenomena

yang terjadi di sekitarnya. Umat harus melakukan sesuatu untuk gereja dan bangsa. *Kedua,* keharmonisan hubungan antaragama kadang mengalami kendala, tetapi sering juga sangat memberi angin positif. Oleh karena itu, PGI perlu senantiasa menjalin hubungan dan memelihara jaringan dengan tokoh atau kelompok agama lain. Sejauh ini, konteks ancaman terhadap keberadaan gereja-gereja berupa perusakan, kekerasan, dan penutupan bangunan gereja mendorong PGI untuk memfokuskan pembelaannya terhadap kebebasan beragama bagi umat Kristiani. Meskipun demikian, PGI tetap melakukan usaha-usaha membangun kesepahaman antaragama yang melibatkan tokoh dari agama lain. Kondisi kemajemukan bangsa Indonesia yang semakin kompleks juga mendorong PGI untuk mempertimbangkan konteks plural masyarakat dalam usaha-usaha misinya.

Program atau kegiatan apa yang dilakukan oleh Komisi HAK KWI? Kegiatan-kegiatan Komisi HAK bisa dilihat dalam dua tingkat: *Pertama,* kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pengurus Komisi HAK di KWI. *Kedua,* kegiatan-kegiatan Komisi HAK yang menyangkut hubungan antaragama dan kepercayaan yang mengejawantah di tingkat kuuskupan, kevikepan, dan paroki yang tersebar luas di mana-mana. Untuk menyebut sebagian kecil saja, kegiatan dalam kategori pertama antara lain: Diskusi dan Lokakarya *Mencermati Pemahaman dan Praktis Relasi Antar Kelompok Agama di Indonesia yang Plural* pada 2003; Diskusi *Gerakan Fundamentalis dan Politik Aliran di Indonesia* pada 2003; acara *live show* Suara Anda di Metro-TV tentang *Isu Adopsi 300 anak Aceh oleh Wold Help* pada 2005; menjadi pendamping rekoleksi pada *Keprihatinan dan Tantangan*

Iman untuk Membangun Keadaban Publik dalam Pluralitas Agama & Budaya pada 2005; mengikuti acara silaturahmi di Kemenag untuk membicarakan masalah yang berkembang seputar tempat ibadat pada 2005; dan kunjungan ke DPR RI yang membahas kasus-kasus penutupan rumah ibadat pada 2006.

Sedangkan di antara contoh kegiatan Komisi HAK di tingkat keuskupan, kevikepan, atau paroki ada yang mengambil bentuk kegiatan seminar nasional bertajuk *Mencari Alternatif Pemimpin Baru yang Mampu Menjaga Pluralitas Bangsa* se-Regio Jawa pada November 2008. Kegiatan lain berbentuk rencana pengarusutamaan persaudaraan lintas agama di Keuskupan Agung Makassar pada 2008. Contoh lain misalnya rangkaian kegiatan bertema *Kesatuan dalam Perbedaan* yang dilakukan muda-mudi Katolik se-Kevikepan Luwuk-Banggai di Paroki Kristus Raja Sulubombong pada 29 September sampai 2 Oktober 2008.

Kegiatan-kegiatan dialog di lingkungan MUI tidak bisa dipisahkan dari posisi MUI sebagai lembaga fatwa, sebab salah satu peran MUI yang sangat menonjol adalah memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat. Di MUI, fatwa diartikan sebagai *jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum*. Sepanjang sejarahnya, ada beberapa fatwa MUI yang bersinggungan dengan agama lain yang penting untuk dicatat. *Pertama,* fatwa haram perkawinan beda agama, tahun 1980. Di sini MUI memfatwakan bahwa perkawinan wanita Muslimah dengan laki-laki nonmuslim hukumnya haram. Lebih lanjut, seorang laki-laki Muslim juga diharamkan mengawini wanita bukan Muslim. *Kedua,* fatwa

tentang keharaman ikut merayakan Natal bagi umat Islam, tahun 1981. Disebutkan dalam fatwa itu bahwa diharamkan bagi umat Islam untuk mengikuti upacara Natal bersama. Kemudian agar umat Islam tidak terjerumus kepada *syubhat* dan larangan Allah, MUI menganjurkan umat Islam untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan Natal. *Ketiga,* fatwa keharaman doa bersama, tahun 2005. Doa bersama yang diharamkan di sini berada dalam tiga kategori: (a) doa bersama dalam bentuk setiap pemuka agama berdoa secara bergiliran, maka orang Islam haram mengikuti dan mengamini doa yang dipimpin oleh nonmuslim; (b) doa bersama dalam bentuk Muslim dan nonmuslim berdoa secara serentak, misalnya membaca teks doa bersama-sama, hukumnya haram; (c) doa bersama dalam bentuk seorang non-Islam memimpin doa makan, orang Islam haram mengikuti dan mengamininya.

Keempat, fatwa perihal warisan beda agama, pada 2005. Di situ dijelaskan bahwa hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antarorang yang berbeda agama (Muslim dan nonmuslim). Sementara itu, pemberian harta antarorang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah. *Kelima,* fatwa keharaman dalam mengikuti pluralisme, pada 2005. MUI menganjurkan dalam masalah aqidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif, dalam arti haram mencampuradukkan aqidah dan ibadah umat Islam dengan aqidah dan ibadah pemeluk agama lain. Di sisi lain, bagi masyarakat Muslim yang tinggal bersama umat agama lain, dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan aqidah dan ibadah umat Islam dianjurkan bersikap inklusif, dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk aga-

ma lain. Sampai di sini secara umum dapat disimpulkan bahwa fatwa-fatwa MUI sepanjang sejarahnya memiliki nalar untuk memproteksi bangunan teologis, dan mungkin juga kepentingan umat Islam. Di sisi lain, kesan yang kuat dari fatwa-fatwa tersebut ialah kecurigaan terhadap adanya kemungkinan di mana keberagaman agama dapat merusak bangunan teologis dan kepentingan umat Islam.

Selama rentang waktu 2008 itu, PGI bersama gereja-gereja di Indonesia akan menjalankan pelayanannya dalam napas pikiran *menjadi gereja yang esa, utuh dan kukuh demi pemantaban peran dalam masyarakat majemuk Indonesia*. Terkait dengan masalah antaragama dan problem sosial lainnya, PGI akan mempertimbangkan masalah kemiskinan, kepedulian sosial, penguatan kehidupan bergereja dan berjemaat, sikap kritis terhadap berbagai kebijakan yang diskriminatif, perhatian terhadap isu lingkungan, HAM, pemanasan global, dan pemberantasan KKN. Setelah pemerintah mengeluarkan PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang berpengaruh terhadap pelayanan gereja di bidang pendidikan, PGI lalu melakukan studi dan kajian terhadap hal tersebut. Untuk masa depan, PGI juga merencanakan kerjasama dengan anggota DPR beragama Kristen dalam menyikapi kecenderungan yang cukup kuat ke arah penegakan syariat Islam melalui berbagai produk hukum. Secara lebih konkret PGI mengagendakan program-program seperti: a) pelatihan jurnalistik tingkat remaja dan pembuatan film pendek tentang HIV/AIDS; b) pendidikan HAM; c) seminar tentang isu-isu pluralisme; d) dialog lintas agama; e) konsultasi internasional jaringan kerja perempuan lintas agama; dan f) perkemahan ceria anak lintas agama (PERCALA).

Terakhir, di masa depan, KWI masih ingin meneruskan dan memperdalam kegiatan-kegiatan yang selama ini telah dirintis dalam Komisi HAK-nya. Di antara proyeksi yang direncanakan misalnya: (a) mengaktifkan kembali jaringan komunikasi komisi HAK seluruh Indonesia yang berfungsi untuk saling menukar informasi agar terjadi komunikasi timbal balik; (b) menggerakkan gereja basis untuk lebih peka terhadap lingkungan, dalam hal itu bagaimana gereja mampu berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat setempat; (c) menggerakkan spiritualitas dialog pada umat basis lewat pelatihan-pelatihan.

Pembacaan terhadap Praktik-praktik Dialog Antaragama di Masyarakat

Dari paparan deskriptif di atas, praktik dialog antaragama di tingkat masyarakat—dalam artian dialog sebagaimana dijelaskan pada Bab 1—lahir dalam spektrum waktu yang relatif belum belum terlalu lama. Lembaga-lembaga yang secara spesifik memusatkan perhatian atau memiliki perspektif dialog antaragama baru lahir di awal atau pertengahan 1990-an, seperti Interfidei (1991), LKiS (1993), dan Percik (1996). Untuk memberikan gambaran secara lebih detail tentang spektrum waktu lembaga-lembaga yang telah dibahas sebelumnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 1:
Sebagian lembaga yang mempraktikkan dialog antaragama yang lahir di akhir era Orde Baru dan awal era Reformasi

No	Nama lembaga	Tahun Berdiri	Keterangan
1	Interfidei	1991	Mengkhususkan pada dialog antaragama
2	LkiS	1993	Konsentrasi pada kajian dan advokasi agama, sosial, dan demokrasi, serta menjadikan dialog antaragama sebagai perspektif dan salah satu fokus kegiatan
3	Percik	1996	Konsentrasi pada kajian dan advokasi agama, sosial, dan demokrasi, serta menjadikan dialog antaragama sebagai perspektif dan salah satu fokus kegiatan
4	Mitra Wacana	1996	Mengkhususkan pada feminisme dan menjadikan dialog antaragama sebagai perspektif dan salah satu fokus kegiatan
5	ICRP	2000	Mengkhususkan pada dialog antaragama
6	eLaleM	2000	Mengkhususkan pada dialog antaragama
7	Fahmina Instute	2000	Mengkhususkan pada feminisme dan menjadikan dialog antaragama sebagai perspektif dan salah satu kegiatan utama

8	Kapal Perempuan	2000	Mengkhususkan pada feminisme dan menjadikan dialog antaragama sebagai perspektif dan salah satu fokus kegiatan
9	PSAP	2001	Konsentrasi pada kajian dan advokasi agama, sosial, dan demokrasi, serta menjadikan dialog antaragama sebagai perspektif dan salah satu fokus kegiatan
10	Wahid Institute	2004	Konsentrasi pada kajian dan advokasi agama, sosial, dan demokrasi, serta menjadikan dialog antaragama sebagai perspektif dan salah satu fokus kegiatan

Awal 1990-an adalah waktu di mana Orde Baru sedang berada di puncak represifnya. Di sisi lain, gerakan perlawanan muncul di tingkat masyarakat untuk mendobrak otoritas kekuasaan Orde Baru yang kian menguat, termasuk karena mendapatkan sokongan dan legitimasi dari kelompok keagamaan. Menariknya, kelahiran gerakan dialog antaragama dalam konteks seperti itu menjadi bagian dari proses demokratisasi. Di tengah semakin kuatnya segregasi keagamaan yang antara lain dipicu kebijakan negara, beberapa LSM mendobrak kemandekan pola relasi antaragama. Interfidei, misalnya, memproduksi pengetahuan baru yang termuat dalam istilah *dialog antariman* yang diperhadapkan dengan pengetahuan yang terkandung dalam istilah *kerukunan antarumat beragama* yang diproduksi oleh negara. Dalam level yang berbeda, pendobrakan pengetahuan dilakukan oleh LKiS dalam mengkiritk bangunan

pengetahuan keislaman, dan oleh Percik dalam bangunan pengetahuan kekristenan. Meskipun menyasar komunitas yang terbatas, LSM yang bergerak dalam praktik dialog antaragama mampu masuk ke jantung komunitas keagamaan, misalnya LKiS dan Wahid Institute ke masyarakat Muslim, khususnya ke jaringan pesantren yang memiliki basis kultural NU; dan PSAP ke masyarakat Muslim berbasiskan Muhammadiyah. Sementara itu, Percik masuk ke dalam gereja-gereja Protestan. Interfidei dan ICRP bergerak di level lokalitas yang beragam dan terus bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Sementara itu eLaIeM memfokuskan ke lingkup lokalnya di Maluku. Fahmina dan Mitra Wacana bekerja keras menarik keterkaitan antara diskriminasi berbasiskan agama dan gender, serta berupaya mentransformasikan secara sekaligus visi kesetaraan gender dan kebebasan beragama.

Berbeda dari LSM, meskipun berdiri jauh lebih awal, lembaga-lembaga keagamaan cenderung bergerak belakangan dalam upaya dialog antaragama. Pada tingkat tertentu, tidak dapat dipungkiri bahwa gerakan di tingkat lembaga keagamaan muncul karena problem atau tantangan yang dihadapi oleh kelompok keagamaannya. Beberapa kegiatan di lingkungan PGI lahir dari konteks urusan internal gereja dan peristiwa pembakaran gereja-gereja, di KWI didorong oleh keterbukaan hierarki gereja setelah Konsili Vatikan II, dan di MUI akibat dari tantangan dakwah yang kian kompleks di masyarakat yang majemuk. Tentu itu semua merupakan kewajaran yang tidak dapat dihindari oleh lembaga-lembaga keagamaan. Nalar lembaga keagamaan dalam menyikapi kemajemukan juga tecermin dari istilah institusional yang dipakai dalam menyebut terma yang

kurang lebih mirip dengan dialog—*tentu perbedaan istilah mencerminkan juga perbedaan perspektif.*

Tabel 2:
Istilah institusional yang dipakai PGI, KWI, dan MUI dalam menyebut terma dialog antaragama

No	Lembaga keagamaan	Tahun berdiri	Istilah institusional yang dipakai untuk menyebut dialog antaragama
1	PGI	1950 (DGI)	Kerukunan dan kebebasan beragama
2	KWI	1955 (MAWI)	Hubungan antaragama dan kepercayaan
3	MUI	1975	Kerukunan antarumat beragama

Terlepas dari kekurangan yang ada, keberadaan ruang institusional terkait relasi lembaga keagamaan membuat peluang dialog masalah-masalah antaragama dalam lembaga keagamaan dapat dilakukan secara lebih mendalam di masa depan. Bila kita membandingkan antara LSM dan lembaga keagamaan, tentu saja wacana dan praktik kegiatan dialog antaragama di lingkungan LSM jauh lebih berkembang dan maju. Tapi ketika lembaga keagamaan telah membentuk ruang institusional sebagai tempat membahas hubungan dengan kelompok agama lain *(outgroup),* keberhasilan yang dicapai akan memiliki pengaruh masif karena melibatkan struktur lembaga keagamaan dengan jaringan sangat luas. Upaya-upaya kerjasama antara LSM dan lembaga-lembaga keagamaan di luar tiga lembaga keagamaan

tersebut juga telah dicoba, seperti antara LKiS dengan NU, PSAP dengan Muhammadiyah, dan Percik dengan Gereja Kristen Jawa.

Dalam kacamata tujuh dataran atau momen dialog yang dibahas di Bab 1, sejauh mana praktik dialog antaragama terjadi di masyarakat? Sebelum membahas persoalan itu, penting untuk dipaparkan di sini keterbatasan cakupan bab ini. Karena bab ini memfokuskan diri terhadap kajian institusional, maka analisis juga dilakukan dalam ruang lingkup institusi dan tidak menjangkau pergulatan individual. Karena itu bab ini tidak menyinggung masalah dialog kehidupan.

Analisis sosial dan refleksi etis kontekstual. Dialog pada tataran ini berlangsung di hampir semua komunitas lembaga yang ada, terutama di lingkungan LSM. Mereka membuat analisis sosial dan merumuskan pilihan etis sesuai dengan konteksnya. Situasi pengotak-ngotakan agama oleh Orde Baru disinyalir menjadi faktor dari potensi konflik serta penyebab kuatnya prasangka antarumat beragama. Analisis semacam itu terdapat sangat kuat, misalnya, dalam pandangan Interfidei dan LKiS. Sementara itu, Fahmina Institute memandang budaya patriarkal dalam ajaran agama dan praktik komunitas agama sebagai situasi yang perlu ditransformasikan. Nilai-nilai keadilan sosial, keadilan gender, dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi nilai bersama yang diperjuangkan kelompok LSM. Perdamaian, misalnya, menjadi nilai dan cita-cita yang sangat berharga bagi eLaIeM yang lingkungannya sempat porak-poranda akibat konflik Ambon, juga bagi ICRP yang memegang perdamaian sebagai nilai universal. Analisis sosial dalam masalah tersebut bahkan berkembang

sedemikian rupa sampai-sampai Kapal Perempuan membangun sistem *kartu penilaian masyarakat sipil* yang dapat digunakan sebagai *early warning system* untuk mengantisipasi kemungkinan konflik di masa depan.

Studi tradisi-tradisi agama saya sendiri dalam komunitas agama saya sendiri. Pada dataran tersebut, para anggota kelompok menggali tradisi iman masing-masing sehingga pandangan etis pada dataran sebelumnya berakar kuat bersamaan dengan proses penggalian tradisi agama masing-masing; *saya memahami kenyataan hidup dan panggilan etis itu dari mata iman saya*. Praktik momen seperti itu bisa dilihat dalam proses pembelajaran di PSAP dalam program pelatihan dai inklusif dan di PGI dengan kegiatan seminar agama-agama yang masif dilakukan di berbagai daerah. Eksplorasi yang kaya tentang studi tradisi-tradisi agama sendiri juga terjadi dengan pembukaan kelas kajian intensif Belajar Bersama dalam tema *Islam dan Dialog Antaragama* di LKiS atau kelas *Islam dan Pluralisme* di Wahid Institute yang diikuti oleh mahasiswa Muslim, santri dari pesantren-pesantren NU, dan para aktivis Muslim.

Dialog antarumat beragama, berbagi iman dalam level pengalaman. Pada momen ini umat beriman terlibat dengan imannya sendiri dalam keterbukaan terhadap tradisi-tradisi religius lain. Kegiatan-kegiatan di lingkungan ICRP dan Interfidei banyak berkisar dalam momen semacam itu karena pada umumnya diikuti secara bersamaan oleh partisipan dari berbagai latar agama dan keyakinan yang berbeda. Kegiatan Interfidei dalam program studi agama-agama merupakan eksplorasi yang sangat kaya seputar dialog teologis yang tidak saja diikuti oleh para pemimpin umat, tapi juga kaum muda di berbagai daerah di Indonesia yang telah

diselenggarakan bertahun-tahun. Forum Sobat (Forum Sarasehan Lintas Iman) yang dikembangkan oleh Percik menjadi contoh bagaimana momen berbagi iman dalam level pengalaman sangat kuat terjadi antara umat Muslim dari Pesantren Adimancoro Salatiga dan umat Kristen dari Gereja Kristen Jawa (GKJ) Salatiga.

Dialog aksi. Karena umat beragama adalah bagian dari masyarakat luas, pada momen ini dialog antaragama mengkaji dan mengarahkan keterlibatannya pada kepedulian sosial. Program eLaIeM tentang bimbingan konseling dan *trauma healing* yang melibatkan sekitar 800 relawan menjadi contoh bagaimana dialog aksi dipraktikkan dalam konteks pascakonflik Ambon. Selain itu, eLaIeM juga mempraktikkan dialog aksi yang lebih luas untuk membantu pengungsi Maluku dan korban kekerasan, terutama perempuan, di area konflik. Kegiatan Mitra Wacana membangun Aliansi Peduli Korban kekerasan yang menimpa perempuan di Banjarnegara yang melibatkan komunitas Muslim dan Katolik dalam praktik dialog aksi.

Sampai di sini kami berharap bagian ini bisa memberikan gambaran tentang apa yang telah disebutkan di awal bab ini: menggambarkan latar dan konteks berdirinya lembaga-lembaga di masyarakat yang memusatkan perhatian pada persoalan dialog antaragama, kegiatan lembaga apa saja yang telah dilakukan, dan pembacaan terhadap praktik dialog di masyarakat. Sebagaimana telah disampaikan di muka, gambaran tersebut tidak berpretensi untuk menjadi representasi dari praktik di masyarakat secara umum, tapi sekadar memberikan gambaran dari sebagian lembaga lantaran kenyatannya di masyarakat pasti lebih kaya dan kompleks. Analisis atau pembacaan terhadap praktik-praktik

dialog juga tidak dilakukan dengan sangat komprehensif, namun demikian semoga bisa memberikan gambaran pada momen-momen apa saja praktik dialog di antaranya telah dilakukan. Harapan dari bab ini adalah bisa memberikan gambaran proporsional tentang praktik dialog di masyarakat sehingga bisa menjadi bahan refleksi pembaca maupun refleksi di akhir bab buku ini. Terlepas dari kekurangan penyajian tersebut, kita mungkin sepakat dari paparan yang terbatas ini bahwa praktik dialog antaragama di masyarakat Indonesia pada kenyataannya sangat dinamis dan kaya.[]

6

Mengkaji Agama secara Dialogis di Perguruan Tinggi

Memahami dialog antaragama secara luas sebagaimana diungkapkan di Bab 1, ada beberapa isyarat yang menunjukkan bahwa dalam bentuknya yang berbeda, dialog pun bisa berlangsung di dunia akademik perguruan tinggi. Sebuah contoh yang amat baru dan menonjol adalah terbentuknya Indonesian Consortium of Religious Studies (ICRS), yang merupakan konsorsium tiga universitas di Yogyakarta yang berbeda afiliasi keagamaannya: Universitas Gadjah Mada, sebuah universitas umum negeri yang tidak memiliki afiliasi keagamaan, Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), dan Universitas Negeri Islam (UIN) Sunan Kalijaga. Sebagaimana diungkapkan direkturnya, Bernard Adeney-Risakotta, konsorsium tersebut bersifat *antaragama* setidaknya dalam dua hal. Pertama, ia terbentuk berdasarkan kerjasama yang dilandasi dialog antara tiga universitas tersebut; dalam hal ini, terbentuknya ICRS merupakan hasil dari melaku-

kan dialog itu sendiri, dan bisa berhasil karena telah ada kepercayaan yang terbangun sebelumnya di antara mereka. Di samping itu, meskipun ICRS adalah konsorsium untuk studi agama, arah pengkajian di program akademik tingkat doktoral itu disebut sebagai studi antaragama (*interreligious studies*). Ia dibedakan dari *monoreligious studies*, yang merupakan studi dari perspektif satu agama saja, atau *multireligious studies*, yang mencoba mencari hal yang sama dalam agama-agama.[1]

Ketika mencirikan arah pengembangan kajian tentang agama, J. B. Banawiratma menggunakan istilah yang sama, *interreligious studies*, namun mengontraskannya secara berbeda, yaitu dengan perbandingan agama (*comparative religion)* dan studi agama (*religious studies*).[2] Bisa dikatakan bahwa pernyataan di atas adalah pernyataan normatif sekaligus deskriptif: Banawiratma menyarankan pentingnya studi agama bergerak ke arah studi antaragama, sekaligus mendeskripsikan bahwa orientasi itu akan merupakan kelanjutan historis dari perkembangan yang telah terjadi sebelumnya, yang bergerak dari perbandingan agama ke studi agama. Hal tersebut akan dibahas belakangan di bab ini.

Dengan ilustrasi awal tersebut, bab ini dimulai dengan melihat akar historis studi agama di Indonesia dan perkembangannya hingga kini dalam konteks dialog sebagaimana dipahami di atas. Dalam artian tersebut, dialog antaragama dalam dunia akademik (pada tingkat perguruan tinggi) di Indonesia bisa dikatakan telah berumur setua sejarah dialog itu sendiri. Hal tersebut akan disusul dengan pembahasan mengenai landasan studi agama, karakter, dan kandungannya hingga metode pengajarannya, semua dalam kaitannya dengan dialog antaragama dalam pengertian yang luas.

Bab ini akan diakhiri dengan refleksi mengenai arah studi agama di Indonesia sejauh ia menjadi bagian dari dialog antaragama.

Dari sisi lain, perbincangan mengenai dialog dalam dunia akademik bisa mencakup beberapa wilayah. Pertama, seperti telah disinggung sepintas di atas, hal itu bisa berarti pembentukan program studi yang, meskipun tidak menargetkan dialog secara eksplisit, secara substansial berkaitan dengan dialog. Kedua, secara lebih sempit, berarti pengajaran mengenai dialog dalam bentuk matakuliah perguruan tinggi, baik disebut secara eksplisit dengan istilah itu atau tidak. Di samping itu, sebetulnya kita dapat pula berbicara mengenai penelitian tentang dialog. Karena pembatasan cakupan riset ini, penekanan akan diberikan terutama pada wilayah pertama dan kedua.

Keterbatasan lain di sini, sebagaimana halnya pada bab-bab sebelumnya, tidak ada tendensi untuk menampilkan penjabaran lengkap dialog dalam dunia akademik, namun terbatas pada pemaparan beberapa ilustrasi untuk melihat ragam dan karakteristiknya. Karena itu, pemilihan beberapa program studi dilakukan terutama untuk membantu mengungkap ragam-ragam dan karakter dialog antaragama di dunia akademik. Untuk keperluan itu, karena buku ini bisa dibilang baru merupakan riset awal,[3] pembatasan pada wilayah Yogyakarta dan sekitarnya memiliki alasan kuat karena pengalaman pendidikan di kota pelajar ini cukup khas. Di Yogya ada beberapa perguruan tinggi tertua dan ternama di Indonesia. Perguruan tinggi Islam negeri pertama di Indonesia didirikan di kota ini, yaitu IAIN Sunan Kalijaga. Di sana juga ada salah satu perguruan tinggi Katolik ternama yang dibangun kaum Yesuit, Universitas

Sanata Dharma; dan perguruan tinggi Protestan ternama, Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), yang menjadi sekretariat wilayah Indonesia untuk Studi Pascarjana Teologi Asia Tenggara (South East Asian Graduate School of Theology atau SEAGST). Di samping itu, universitas umum di Yogya, Universitas Gadjah Mada, juga dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi (PT) tertua dan terbesar di Indonesia. Seperti akan ditunjukkan di bawah, beberapa perguruan tinggi terkemuka yang berbeda orientasi tersebut belakangan saling bekerjasama dalam apa yang di sini dideskripsikan sebagai dialog antaragama dalam beberapa aspeknya.

Tentu dengan begitu tidak mengatakan bahwa pengalaman seperti itu tidak ada di tempat lain. Namun sebagai pembatasan untuk riset awal, kiranya Yogya, selain secara historis memang menjadi awal dari studi agama di Indoneia yang dibahas di sini, dapat sekaligus menunjukkan beberapa model dari dialog dalam dunia akademik. Untuk tujuan tersebut, ada satu universitas ternama lain di Salatiga yang juga dibahas di bab ini, yaitu Universitas Kristen Satya Wacana.

Program Studi Agama dan Dialog: Sejarah dan Gagasan

Dalam pengertian di atas, pembicaraan mengenai dialog antaragama di dunia akademik tidak bisa dipisahkan dari perkembangan disiplin kajian agama dalam artian luasnya. Disiplin studi agama dalam bentuknya saat ini bermula di dunia Barat sejak setidaknya setelah Perang Dunia II pada 1960-an. Meski begitu, baru pada 1970-an disiplin

tersebut bisa dikatakan telah berkembang cukup matang, dan terus berkembang melalui serangkaian kritik maupun otokritik para sarjananya.[4] Setelah melalui sejarah panjang, studi agama di Indonesia kini telah berkembang di perguruan tinggi Islam, Kristen, Katolik, maupun perguruan tinggi umum, dengan orientasi dan penekanan pada dimensi-dimensi yang berbeda.

Dalam bentuknya yang amat berbeda dari apa yang kini dikembangkan, sejarah studi agama di Indonesia kontemporer bisa dikatakan mulai berkembang setidaknya pada 1960-an, dimulai dari masa ketika Mukti Ali menjadi Ketua Jurusan Perbandingan Agama di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 1961, kemudian diikuti IAIN lain. Seperti disampaikan Karel Steenbrink, Mukti Ali tampaknya tidak merasa penting membuat pembedaan antara *science of religion*, *sejarah agama*, atau *perbandingan agama*. Lalu ada juga pertanyaan apakah dia dapat disebut sebagai ilmuwan (*scholar*) dalam disiplin studi agama, karena dalam pembahasannya mengenai agama, dia acapkali menampilkan dirinya sebagai Muslim dan terkadang memberikan penilaian atas agama-agama lain berdasarkan perspektifnya sebagai Muslim. Lebih jauh, dia secara langsung mengaitkan studi perbandingan agamanya dengan upaya untuk mempromosikan dialog antaragama—sebuah proyek yang berkembang menjadi kebijakan pemerintah ketika belakangan dia menjadi Menteri Agama (1971-1978). Sejarawan B. J. Bolland, misalnya, mengkritik kualitas kesarjanaan Ali karena upayanya mempromosikan dialog antaragama berada di luar wilayah akademis.[5] Bagi Bolland, Mukti Ali bukanlah seorang sarjana perbandingan agama, tapi perancang Teologi Agama Muslim. Seperti akan kita simak,

secara umum, ketegangan antara studi agama dan teologi tersebut telah terlihat di sepanjang sejarah studi agama, termasuk di Indonesia. Sisi lain dari ketegangan itu terkait dengan proyek Mukti Ali, sebagai Menteri Agama, untuk *kerukunan beragama* di Indonesia; judul tulisan Beck[6] mengaitkan keduanya: ilmu perbandingan agama menjadi pilar kerukunan umat beragama.

Secara umum, khususnya terkait dengan bias teologis di atas, memang ada kritik atas Perbandingan Agama di Perguruan Tinggi Islam lantaran bias perspektif keislamannya. Untuk waktu yang lama, pengajaran yang dilakukan maupun buku-buku teks yang ditulis oleh beberapa dosen mengenai agama lain cenderung melihatnya dari sudut pandang Islam, yang berakibat bias dan tidak berimbang. Debat mengenai apakah IAIN adalah lembaga akademis atau dakwah merupakan debat yang telah berlangsung lama, bahkan hingga saat ini.[7] Bisa jadi hal itu tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa IAIN berada di bawah Kementerian Agama, yang oleh beberapa menterinya dipersepsi sebagai *Departemennya orang Islam* dan memiliki fungsi dakwah (hal itu tampak sebelum 1970-an, khususnya ketika Kementerian Agama dipimpin Menteri K. H. M. Dahlan).

Meski kecenderungan tersebut tampaknya masih ada, namun, mulai terjadi pergeseran belakangan ini. Karena beberapa sebab (sebagian mungkin karena pengiriman banyak dosen IAIN ke program studi agama di negeri-negeri Barat) terdapat kecenderungan ke arah perkembangan studi agama mutakhir yang menekankan pada pendekatan *non-confessional*. Amin Abdullah, Rektor UIN Yogyakarta, misalnya, berbicara mengenai perlunya perubahan orientasi metodologis dalam studi agama yang dia ungkapkan

sebagai pergeseran dari normativitas ke historisitas, dari studi agama (dalam hal itu Islam) yang bersifat normatif ke studi historis atau sosial-empiris.[8]

Baru-baru ini terjadi satu perkembangan baru yang penting, yang terkait dengan transformasi beberapa IAIN menjadi UIN sejak 2000. Hal itu berarti bahwa UIN menawarkan ilmu-ilmu umum (nonkeagamaan), seperti sosiologi, psikologi, juga kedokteran dan sains.[9] Di antara sekian banyak argumen untuk perubahan tersebut, yang utama ialah mengenai perlunya integrasi ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum, khususnya pengembangan kajian agama dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Transformasi dari IAIN ke UIN itu tampaknya sedikit banyak memengaruhi Jurusan Perbandingan Agama (PA) pula. Jurusan PA di UIN Yogyakarta, misalnya, kini sedang mempertimbangkan untuk mengubah orientasi studi agamanya, bahkan mengubah namanya, untuk mencerminkan perkembangan-perkembangan baru dalam bidang studi agama yang akan memperlakukan agama-agama non-Islam secara lebih empatik, tidak menghakimi dari perspektif sendiri, dan lebih mengembangkan topik-topik menyangkut agama dan isu-isu kontemporer. Dalam arah tersebut—sesungguhnya hal itu sudah mulai terjadi bahkan sebelum transformasi—IAIN/UIN sampai tingkat tertentu bisa dikatakan telah membantu pencapaian kesalingpahaman yang lebih baik antarkomunitas agama.[10] Pada 2007, Jurusan PA UIN Yogyakarta mengadakan Semiloka Studi Agama-agama, di antaranya, untuk mempertimbangkan perubahan tersebut. Namun tampak jelas pula bahwa masih ada resistensi kuat untuk mempertahankan *perbandingan agama* sehingga usulan perubahan nama itu tidak disetujui.

Saat ini ada 52 perguruan tinggi Islam negeri (UIN/IAIN/STAIN) yang tersebar di seluruh Indonesia. Hampir semua UIN/IAIN memiliki jurusan atau program studi Perbandingan Agama; adapun STAIN yang tidak memiliki jurusan atau program studi tersebut hanya bisa memasukkan mata kuliah perbandingan agama, sosiologi agama, atau antropologi agama ke dalam Jurusan Ushuluddin. Menarik untuk disimak bahwa, kecuali UIN Malang, semua UIN lain memiliki program studi Perbandingan Agama dan Sosiologi Agama. Bahkan ada pula Studi Agama-agama di UIN Pekanbaru (sebagai konsentrasi di bawah PA) dan UIN Makassar (sebagai jurusan). Sementara beberapa pernyataan di atas tampaknya secara umum berlaku untuk PTAI di Indonesia, diperlukan penelitian tersendiri untuk memastikan karakteristik spesifik perbandingan agama, atau studi agama-agama di puluhan perguruan tinggi tersebut.

Selain di program studi, perkembangan menyangkut dialog dapat dilihat di pusat-pusat studi. Sebagai contoh, di UIN Yogyakarta saat ini terdapat Dialogue Centre (DC), yang berdiri pada Oktober 2004. DC terutama menaruh perhatian pada pengembangan wawasan dialog di kalangan kaum muda, untuk mengimbangi fokus dialog yang selama ini lebih diarahkan pada tokoh-tokoh (atau elite) agama. Atas dasar keyakinan bahwa dialog adalah proses belajar, ada dua bidang garap utama yang menjadi program DC: *live-in* agamawan muda dan riset. Program yang pertama merupakan pendidikan multikulturalisme yang diikuti siswa SMU berlatar agama dan umum di 3 kota (Yogya, Palangkaraya, dan Banjarmasin), diakhiri dengan pembentukan forum lintas agama untuk pelajar yang didukung

kantor-kantor wilayah Kementerian Agama. Riset yang pernah diadakan adalah tentang kurikulum multikulturalisme di PTAIN.

Lembaga lainnya, Centre for Study of Religious and Socio-cultural Diversity (CRSD), memiliki visi menjadi pusat kajian agama dan keragaman sosial-budaya melalui penelitian-penelitian, seminar, dan publikasi. Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan CRSD yang dianggap paling sukses adalah lokakarya dan forum publik dengan tema *New Direction in Islamic Thought and Practice : Exploring Issues of Equality and Plurality*. Pada 2005 CRSD mengadakan lokakarya tentang pembuatan *Modul Pelatihan Kebebasan Beragama untuk Guru-guru*. Selain itu, CRSD juga telah mengadakan kursus intensif bertema *Religion or Belief and Human Rights.* Keberadaan kedua pusat studi itu kiranya melengkapi upaya pengembangan studi keagamaan yang dialogis dan kontekstual di UIN Yogyakarta.

Di luar UIN/IAIN/STAIN, terjadi perkembangan mutakhir serupa. Mungkin bukan suatu kebetulan jika pada dasawarsa 1990-an, kesadaran kuat akan pentingnya suatu kajian keagamaan yang sifatnya lebih objektif—dalam artian tidak menghakimi agama lain dari perspektif agamanya sendiri, tidak *confessional* atau doktrinal, dan dengan demikian memungkinkan pemahaman antaragama yang lebih baik—muncul pada waktu yang hampir bersamaan di beberapa tempat. Pada 1991, di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW, Salatiga, Jawa Tengah) didirikan program studi pascasarjana Agama dan Masyarakat (belakangan nama resminya menjadi Sosiologi Agama). Pada tahun-tahun itu pula, di Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW, Yogyakarta) muncul Program Studi Agama-agama (PSAA),

yang sebetulnya bukan suatu program akademik formal (tidak menawarkan gelar), tapi lebih merupakan upaya pembinaan terhadap warga gereja mengenai Islam. Pada 2000 di Universitas Sanata Dharma (Yogyakarta), yang merupakan universitas Katolik, didirikan program Ilmu Religi dan Budaya (IRB) untuk tingkat S-1. Penting dicatat bahwa semua universitas tersebut telah memiliki sendiri Fakultas Teologi yang cukup kuat.

Mengapa pendekatan *non-confessional* penting? Bagi John Titaley (UKSW),[11] salah satu syarat berlangsungnya dialog dalam pengertian *interaksi yang saling membuka diri bagi transformasi* tidak akan terjadi dalam pendekatan *confessional*; jika demikian, yang terjadi adalah multimonolog. Hal itu disebabkan pendekatan tersebut, yang sejak awal telah mengambil keputusan mengenai kebenaran (agama), cenderung memberi tempat hanya pada satu cara pandang, yaitu miliknya sendiri. Kalaupun agama lain dikaji, hal itu dilakukan sejauh dapat diakomodasi ke dalam agama sendiri. Untuk suatu dialog jelas hal tersebut tidak memadai.

Alternatif dari pendekatan tersebut adalah pemahaman agama secara historis: yaitu sebagai hasil interpretasi manusia terhadap sesuatu yang diyakini sebagai kebenaran mutlak, yang terlibat dalam sejarah kehidupan manusia. Dengan begitu, agama dipandang sebagai suatu institusi sosial, sama halnya seperti berbagai institusi sosial lainnya seperti keluarga, masyarakat, pendidikan, ekonomi, hukum, politik dan sebagainya—sekalipun ia jelas berhubungan dengan sesuatu yang supernatural. Pandangan seperti itu memiliki konsekuensi dalam hal metode maupun objek (material) kajian agama.

Menurut Titaley, pendekatan itulah yang dicoba dite-

rapkan dalam Program Pascasarjana Agama dan Masyarakat (atau Sosiologi Agama) di UKSW. Model yang dilakukan bukanlah mengajar berdasarkan pendekatan doktrinal, namun dengan melakukan analisis-analisis sosial dan filosofis, mengkaji kitab suci secara historis, untuk melihat fenomena keagamaan. Dalam perjumpaan sehari-hari, wajar jika orang berbicara dengan bahasa *confessional*. Namun di perguruan tinggi, khususnya jika ingin membuka perjumpaan dengan yang lain, pendekatan tersebut tidak dapat dipakai. Meskipun yang dikaji adalah Yang Absolut, namun karena pengkajinya adalah subjek yang menyejarah, maka tafsiran kultural pun menjadi tak terhindarkan. Melalui pendekatan itu, beberapa bangunan dokrinal dapat dipertanyakan, lalu membuka peluang untuk telanjang, sehingga terbuka kemungkinan mengembangkan suatu pemahaman keagamaan yang baru dan sejati.

Ketelanjangan tersebut juga membuka peluang interaksi yang lebih luas. Hal itu terlihat dari mahasiswa-mahasiswa non-Kristen di program tersebut. Ketika terjadi ketelanjangan, semua akan berhadapan sebagai sesama umat manusia yang berhubungan satu dengan yang lain dalam tradisi yang berbeda, seperti Allah Tritunggal, Allah SWT, dan sebagainya. Jika tidak demikian, maka setiap orang akan sibuk dengan logosnya sendiri-sendiri, dan tidak terjadi interaksi. Interaksi selanjutnya merupakan modal transformasi. Dalam konteks Kristen, hal itu disebut sebagai sesuatu yang sifatnya kontekstual. Dengan kata lain, orang Kristen berteologi secara kontekstual sebagai orang Indonesia. Bagi John Titaley, ada sesuatu yang salah jika komunitas-komunitas agama keluar dari satu rahim, yaitu Indonesia, namun kemudian tidak lagi menjadi saudara.

Dalam pengalaman program Ilmu Religi dan Budaya (IRB) di Sanata Dharma, seperti disampaikan Sunardi, perpindahan dari berbicara tentang agama secara teologis ke nonteologis tidak mudah dilakukan. Universitas Sanarta Dharma (USD) sendiri telah memiliki Fakultas Teologi yang cukup mapan, baik pada tingkat S1 maupun S2. Didirikan pada 1961, Program Studi Ilmu Teologi pada fakultas tersebut diakui sebagai Fakultas Teologi Kepausan, dan kini, pada tingkat S2, juga menawarkan program pendidikan profesi Imamat.

Dalam konteks perkembangan tersebut, kepentingan dan tantangan IRB di antaranya adalah untuk berbicara tentang agama dalam konteks nonteologis. IRB sendiri sebetulnya tidak dapat sepenuhnya dikatakan sebagai suatu program studi agama. Perspektif kajian budaya tampak lebih menonjol di situ. Perhatian utama IRB terarah pada pengembangan ilmu-ilmu sosial kemanusiaan secara interdisipliner dengan mengambil pengalaman budaya dan religi sebagai bidang kajiannya. Selain komunikasi antardisiplin, yang turut diupayakan ialah antara dunia akademik dan kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Proses produksi budaya (termasuk di dalamnya agama) dipelajari dalam tiga dimensi: basis sosial pendukung suatu budaya, nilai ekspresi budaya dalam kaitannya dengan pembentukan identitas kelompok, dan interaksi antar kelompok sosial-budaya dalam mempertahankan dan mengembangkan budaya dan identitasnya. Terkait agama, yang ingin dilihat adalah tempat agama dalam proses produksi budaya. Pada akhirnya pertanyaannya adalah sejauh mana agama dapat menjadi kekuatan yang menghidupkan, bukan mematikan, dalam pertumbuhan budaya?

IRB lebih membekali mahasiswa supaya memiliki sikap yang empiris dalam menanggapi fenomena keagamaan. Hal yang perlu dilakukan mahasiswa adalah meneliti dan menganalisis secara kritis—inilah sumbangan utama yang dapat diberikan Perguruan Tinggi—tetapi tidak mengambil keputusan mengenai boleh atau tidak boleh, atau benar atau salahnya suatu fenomena. Memberi contoh dari konteks Islam, Sunardi memandang bahwa fenomena-fenomena keagamaan seperti apa yang disebut *aliran sesat*, pernikahan antaragama, atau fenomena lainnya, bisa saja dinilai dari sudut pandang *fiqhiyyah*, boleh atau tidak boleh. Namun kategori boleh tidak boleh hanya merupakan satu sudut pandang; dipandang dari segi kultural, isunya akan berbeda. Perspektif yang lebih kaya bernilai penting agar dimensi hidup diperluas, bukan disempitkan.

Sunardi membahasakan contoh-contohnya dengan mengatakan perlunya penegasan objek formal dan objek material kajian agama, juga keberanian untuk lintas disiplin. Gerakan buruh atau gerakan perempuan awalnya meminjam perspektif dari berbagai disiplin, kemudian berhasil menjadi disiplin keilmuan. Dialog antaragama sebagai gerakan, mestinya dapat melakukan hal serupa.

Sejauh menyangkut dialog, salah satu materi yang dapat dijadikan kajian yang jelas cukup kaya adalah pengalaman (dialog) sehari-hari, yang bisa diangkat, misalnya, melalui penelitian etnografis. Di IRB, salah satu objek material lain yang dicoba diangkat adalah simbol, karena selain melahirkan bahasa, manusia juga dibentuk oleh bahasa. Dialog bisa dilihat dari simbolisasi atau bahasa-bahasa baru yang dimunculkan dalam prosesnya. Dialog antaragama bukanlah isu teologis semata, tapi juga meru-

pakan pengalaman masyarakat Indonesia yang benar-benar mengakar. Karena alasan itulah, mata kuliah dialog yang sebetulnya ada dalam kurikulum IRB selama tiga tahun ini belum ditawarkan kembali, karena mata kuliah itu dianggap belum berhasil merumuskan objek formal dan material yang memadai, dan masih sulit meninggalkan pendekatan teologis-normatif. "Kejelasan objek formal dan material itu lebih diperlukan daripada terus menerus menyatakan bahwa dialog itu diperlukan," kata Sunardi.

Dengan menjadikan dialog antaragama sebagai mata kuliah berarti menjadikan dialog sebagai bagian dari proses pendidikan. Sebagai isu, dialog antaragama sudah berumur puluhan tahun, dahulu ia muncul untuk meminimalisasi konflik, kini ia bisa ditempatkan pada konteks yang lebih luas: sebuah proses panjang pembentukan masyarakat. Menurut Sunardi, "di Indonesia ada kepentingan mendesak untuk berbicara tentang agama dengan cara-cara yang berbeda, karena makin banyaknya pengalaman keagamaan yang dicirikan oleh perjumpaan religius yang intens dan kaya."[12]

Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), Yogyakarta, memiliki pengalaman yang agak berbeda, meskipun ada kemiripan dengan UKSW dan Sanata Dharma. Program Studi Agama dan Masyarakat UKSW dan IRB di Sanata Dharma secara tegas dibedakan (dan secara struktural terpisah) dari Fakultas Teologi yang telah berkembang amat lama dan telah mapan. Karena itu penggeseran perhatian utama kepada pendekatan nonteologis tersebut diakui sebagai hal yang tidak mudah dilakukan. UKDW termasuk dalam perguruan tinggi Kristen paling terkemuka di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Pada tingkat pascasarjana,

UKDW hanya menawarkan gelar dalam teologi Kristen—dalam hal itu Fakultas Teologinya termasuk yang amat terkemuka di Asia Tenggara karena, sebagaimana disebut di atas, ia dipercaya menjadi sekretariat wilayah Indonesia untuk Studi Pascarjana Teologi di Asia Tenggara (South East Asian Graduate School of Theology atau SEAGST).

Sebelum menjadi universitas (dengan banyak fakultas, di mana Teologi hanyalah salah satunya), UKDW awalnya adalah sebuah Sekolah Tinggi Teologia (STTh), yang berdiri pada 1962. Yayasan yang menyelenggarakan UKDW didukung oleh 12 sinode gereja Protestan. Pada 1989, ketika berubah menjadi universitas, STTh menjadi Fakultas Teologia. Program Pascasarjananya sendiri baru dimulai pada 1991. Ciri khas yang menonjol di UKDW adalah penekanannya pada teologi kontekstual di Indonesia; mungkin karena itu, keragaman agama sebagai salah satu konteks Indonesia tampak menempati posisi penting, dan mendorong UKDW melakukan kerjasama dengan beberapa universitas lain, khususnya UIN Sunan Kalijaga. Ada beberapa pilihan studi teologi Kristiani di UKDW. Pertama, ada Master of Theology (gelarnya M.Th.), sejak 1991, yang lulusannya diharapkan mampu mengembangkan konsep-konsep teologis Kristiani secara akademis dalam merespons persoalan masa kini. Kemudian ada pula Master of Divinity (M.Div.), yang membuka peluang bagi lulusan S1 nonteologi, sebagai persiapan menjadi calon pendeta dan pemimpin gerejawi. Di luar keduanya, sejak 2003 ada program Master of Ministry (M.Min.) yang diperuntukan bagi pendeta dan aktivitas gerejawi aktif yang ingin menyegarkan pengetahuan dan meningkatkan profesionalitasnya. Sementara M.Th. menekankan pada pendalaman konsep

teologis, M.Min. adalah program profesional yang lebih berorientasi praktis (refleksi dan penerapan konsep-konsep teologis dalam profesi pelayan gerejawi).

Seperti akan ditunjukkan di bagian berikutnya dari bab ini, dalam program-program tersebut ada pengajaran tentang agama-agama lain dan dialog dengan mereka. Namun jelas juga bahwa Teologi UKDW memang diperuntukkan bagi pelajar Kristen, dan berpusat sepenuhnya pada teologi Kristen. Meski demikian, di luar teologi, terdapat kajian yang bisa dicirikan bersifat *interreligious*, dan lebih leluasa membuka pintu dialog, seperti tampak pada Pusat Studi Agama-agama dan Pusat Studi dan Pengembangan Perdamaian. Yang pertama telah cukup lama menawarkan pendidikan ekstrakurikuler mengenai agama-agama, sedangkan yang kedua sejak 2007 menawarkan pendidikan pada tingkat S2, dengan peserta dari beragam latar agama. Dalam program yang telah diakui Departemen Pendidikan Nasional itu, pendeta Kristen dan peserta Muslim dari pesantren bersama-sama mempelajari masalah konflik dan perdamaian. Mau tak mau, posisinya pada sebuah universitas Kristen menjadikannya memiliki perhatian besar pada isu-isu terkait komunitas agama dan terlibat dalam dialog antaragama. Sebagai contoh, dalam penanganan pascabencana gempa Yogya Mei 2006, Pusat Studi tersebut melibatkan kelompok-kelompok Muslim yang dianggap konservatif, yang relatif jarang terlibat dalam dialog-dialog antaragama, untuk bersama-sama menangani komunitas korban gempa berlatar belakang Muslim. Dengan melibatkan peserta pendidikan maupun aktivitasnya dari kelompok non-Kristen, UKDW seperti mengambil jalan pintas dari kerumitan pembedaan studi teologis dan nonteologis:

ketika memusatkan perhatian pada suatu isu sosial bersama, dalam hal itu konflik dan perdamaian, dialog seakan-akan terjadi secara otomatis.

Dari keempat jenis universitas yang telah dibahas di atas: UIN/IAIN, UKSW, Sanata Dharma, dan UKDW, tampak bahwa semua universitas yang berafiliasi pada agama tertentu tersebut memang mau tidak mau, sampai pada tingkat tertentu, bersifat eksklusif—hal itu tak dimaksudkan berkonotasi negatif, tapi sekadar deskriptif. Pintu dialog dibuka melalui dua jalur. Pertama, dengan memasukkan mata kuliah tentang agama-agama lain atau tentang dialog dalam kurikulum pendidikan yang bersifat teologis (hal itu akan dibahas lebih lanjut belakangan). Kedua, dengan pendirian pusat atau program studi yang sifatnya lebih terbuka. Khusus menyangkut UIN Yogyakarta, sejauh ini belum ada program studi yang *ekumenis* atau dialogis, meskipun telah ada setidaknya dua pusat studi berkarakter demikian.[13]

Pengalaman berbeda tampak dalam aspirasi pengembangan studi agama di Universitas Gadjah Mada. Di universitas umum (tidak berafiliasi keagamaan) itu, pada pertengahan 2000, Program Studi Agama dan Lintas Budaya (juga dikenal sebagai Center for Religious and Cross-cultural Studies, atau CRCS) mulai menerima mahasiswa untuk tingkat S2. Program tersebut didirikan atas dasar dua keprihatinan utama. Pertama, meskipun Indonesia dikenal sebagai *negara yang relijius*, namun studi agama-agama secara akademik, dengan pendekatan nondoktrinal, dipandang belum cukup berkembang. Sebuah program agama yang didirikan di universitas umum seperti UGM memiliki nilai strategisnya sendiri, karena lokasi itu dipandang relatif

lebih netral dan dengan demikian diharapkan membuka peluang besar bagi keragaman. Dalam hal itu—dan mungkin bukan merupakan perkembangan yang positif—CRCS masih merupakan satu-satunya program studi agama di universitas yang tidak berbasis agama.

Keprihatinan lain terkait dengan situasi tahun 2000: dua tahun setelah Reformasi, era tersebut membuka kran kebebasan dan demokratisasi seluas-luasnya namun sekaligus membuka pintu lebih lebar bagi penegasan identitas kelompok (termasuk kelompok agama) secara tajam, yang sebelumnya direpresi oleh pemerintah Orba. Konflik komunal antarumat beragama yang menunjukkan kecenderungan meningkat sejak 1995 kini memasuki babak yang lebih mengkhawatirkan. Dalam situasi sosial-politik itulah CRCS—dalam lingkup kecilnya—diharapkan menjadi ruang pertemuan orang-orang dari beragam latar agama maupun budaya, termasuk dari luar Indonesia. Dalam kenyataannya, setelah delapan tahun berjalan (ketika penelitian ini dilakukan), program studi tersebut memang menerima mahasiswa dari hampir seluruh propinsi di Indonesia, dan dari latar agama yang berbeda, termasuk agama lokal, maupun dari luar negeri (yang dimungkinkan karena bahasa pengantar program itu adalah bahasa Inggris). Dengan demikian, program tersebut mau tidak mau menjadi semacam dialog dan melakukan pendekatan yang dialogis. Sejauh ini semua agama besar di Indonesia terwakili dalam komposisi mahasiswanya setiap tahun, termasuk beberapa tradisi yang mewakili minoritas kecil di Indonesia dan agama lokal.

Selain pada mata kuliah yang khusus membahas dialog, dalam pembahasan tentang agama dan isu-isu kontemporer pun, ada upaya untuk sedapat mungkin mengangkat per-

spektif beberapa agama secara bersamaan. Dalam matakuliah-matakuliah tersebut (misalnya agama dan gender, konflik dan perdamaian, atau agama dan lingkungan), suatu isu kontemporer diangkat dan dianalisis untuk kemudian dibahas tanggapan dari berbagai tradisi agama. Mirip dengan program Konflik dan Perdamaian di UKDW, dialog di situ terjadi dalam praktik komunitas beragama yang berhadap-hadapan bukan dengan komunitas lain, tapi pada suatu masalah yang konkret.

Pada awalnya, program tersebut memiliki kerjasama berbentuk afiliasi dengan Jurusan Agama di Temple University, Philadelphia, AS, yang merupakan salah satu program tertua untuk bidang kajian itu di AS. Pengembangan kurikulum awalnya banyak mengambil dari pengalaman Temple. Bahkan beberapa dosen senior di Temple, Seperti John Raines dan Mahmud Ayoub, pada tahun-tahun awalnya secara teratur mengajar di program itu. Sebagian untuk memperluas wilayah cakupannya—atas pertimbangan konteks khas Indonesia—dan sebagian lagi karena menyadari beberapa keberatan atas nama *perbandingan agama*, pada 2002 program tersebut berganti nama menjadi Program Studi Agama dan Lintas-Budaya. Perubahan itu secara bertahap tecermin dalam beberapa revisi kurikulumnya. Sebagai bagian dari proses menemukan arahnya sendiri, sejak 2003 dirumuskan tiga gugus studi utama CRCS sejak 2003, yaitu *Dialog Antaragama*, *Agama dan Isu-isu Kontemporer*, serta *Agama dan Budaya Lokal*, yang dipahami bukan sebagai semacam *minat kajian*, namun lebih merupakan arahan pengembangannya, yang diterjemahkan ke dalam mata kuliah maupun topik penelitian mahasiswanya.

Dari segi komposisi pengajar, mau tak mau terdapat keragaman pula. Sesungguhnya, salah satu kesulitan terbesar CRCS di masa awal sebagai suatu program studi S2 yang tidak memiliki induk fakultas (tapi berada langsung di bawah Sekolah Pascasarjana) adalah dari segi pengajar. Lantaran kajian agama sebelumnya tidak ada di UGM, maka pengajarnya pun, selain dari UGM sendiri, diundang dari berbagai perguruan tinggi, khususnya di sekitar Yogyakarta, seperti UIN Sunan Kalijaga, Sanata Dharma, UKDW, dan UKSW.

Latar keragaman pengajar dan mahasiswa tersebut kiranya merupakan aset terbesar CRCS. Di program itu juga tidak tampak kebutuhan mendesak untuk mengajukan suatu pengajaran yang sifatnya nonteologis, karena di universitas tersebut memang tidak ada program studi teologi. Justru karena itulah, sebagian pengajar dari dalam UGM sendiri yang berasal dari disiplin antropologi, sosiologi, ilmu politik, dan filsafat mau tidak mau mewarnai program tersebut, pembahasan teologis juga tidak sepenuhnya dihindari.

Kesulitan mendapatkan pengajar dari dalam UGM mungkin justru membawa berkah tersendiri, karena hal itu justru memaksa CRCS untuk melakukan kerjasama dan perjumpaan dengan pengajar-pengajar dari tradisi agama maupun disiplin yang amat berbeda. Hal tersebut tampaknya menjadi salah satu faktor yang beberapa tahun kemudian mempermudah pembentukan suatu konsorsium yang melibatkan beberapa universitas.

Konsorsium yang resmi terbentuk pada 2006 itu, setelah sekitar setahun diskusi intensif, dinamai Indonesian Consortium of Religious Studies (ICRS)-Yogya, yang me-

rupakan hasil kerja sama tiga universitas: Sekolah Pascasarjana UGM, Program Pascasarjana Teologi UKDW, dan Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, dan berlokasi di Sekolah Pascasarjana UGM. Nota kesepahaman (MoU) ketiga universitas tersebut ditandatangani oleh rektor masing-masing universitas, disaksikan oleh Sultan Hamengku Buwono X di Kraton Yogyakarta pada Oktober 2006. Pada Januari 2007 diadakan konferensi internasional tentang tantangan dan peluang studi agama-agama di Indonesia, sebelum kemudian pada tahun yang sama mulai menerima mahasiswa tingkat doktoral (S3). Pada tahun pertamanya, ICRS-Yogya menerima sekitar 30 orang pendaftar dari beberapa negara, 14 orang di antaranya diterima sebagai mahasiswa angkatan pertama.

Kelebihan format konsorsium tersebut adalah mahasiswa ICRS dapat mengakses sumberdaya dan mendapat bimbingan dari ketiga universitas, di samping universitas luar negeri yang menjadi mitranya. Seperti dikatakan oleh direkturnya yang pertama, Bernard Adeney-Risakotta,[14] ICRS unik karena ia satu-satunya program studi di Indonesia (bahkan mungkin di dunia) yang merupakan konsorsium dari tiga PT dengan karakter amat berbeda: PT umum, Islam, dan Kristen. Bahwa konsorsium seperti itu bisa dibentuk, sudah menunjukkan adanya tingkat kesalingpercayaan cukup tinggi di antara ketiga lembaga pendidikan dengan karakter berbeda. Konsorsium tersebut, dengan demikian, bisa dikatakan merupakan suatu bentuk dialog tersendiri.

Ada tiga minat studi yang dikembangkan di ICRS: kajian historis dan kultural atas agama-agama, kajian interpretasi teks keagamaan, serta agama dan isu kontemporer.

ICRS adalah program internasional dan setiap mahasiswa harus melakukan studi *sandwich* di luar negeri selama paling sedikit satu semester di universitas mitra ICRS. Saat ini beberapa mahasiswa angkatan pertama itu telah berangkat ke AS, Turki, Singapura dan Afrika Selatan.

Adeney-Risakotta mengidentifikasi ciri khas ICRS sebagai program *interreligious studies,* bukan *monoreligious studies,* karena tidak mewakili hanya satu pandangan keagamaan; tapi juga bukan *multireligious,* yang mencoba mencari hal yang sama dalam agama-agama. Setelah menyatakan hal itu, perlu pula ditambahkan bahwa, sebagai lembaga akademik, ICRS tidak memiliki *ideologi* atau teologi tertentu, misalnya teologi pluralisme. Kalaupun ada yang bisa disebut sebagai ideologi, hal itu tecermin dalam harapan bahwa sebanyak mungkin dan seberagam mungkin orang dapat bergabung—sebagai mahasiswa atau pengajar—demi membangun dialog. ICRS memang tidak diposisikan hanya sebagai *sekadar* program akademik yang netral dan objektif dengan pendekatan positivis dari disiplin yang berkembang di Barat, tetapi menekankan dialog dalam proses studi agama.

Menarik untuk ditengok bahwa, sementara di sejarah awalnya sebagian sarjana studi agama mengkritik kualitas kesarjanaan Mukti Ali, karena dianggap mencampurkan aspirasi dialog (yang *nonakademis*) dengan pengkajian akademis, di ujung sejarah yang lain dialog dengan sadar menjadi bagian dalam pengkajian akademis. Hal itu akan dibahas lagi lebih jauh di bawah.

Di luar program akademik, CRCS dan ICRS juga mengembangkan program-program lain yang langsung mengarah pada dialog. CRCS memiliki Divisi Riset dan Pendidi-

kan Publik yang terlibat aktif dalam mengangkat dialog sebagai wacana akademik, maupun memfasilitasi dialog-dialog pada lingkup terbatas. Sebagai contoh untuk yang pertama, sejak akhir 2008 CRCS terlibat dalam rangkaian riset mengenai praktik *civic pluralism* di Indonesia. Sebagai bagian dari kegiatan itu, pada pertengahan 2009 dan 2010 diadakan sekolah intensif selama sebulan penuh dengan tema *Pluralism and Development* yang sasarannya terutama aktivis organisasi masyarakat sipil dari empat negara (Indonesia, India, Belanda, dan Uganda). Menyangkut dialog itu sendiri, pada 2008 CRCS bersama-sama dengan ICRS-Yogya mengadakan rangkaian tiga lokakarya dan satu konferensi internasional mengenai agama dan globalisasi yang menghadirkan beragam kelompok antar dan intraagama, khususnya kelompok-kelompok yang biasanya jarang terlibat dalam dialog antaragama. Aktivitas semacam itu dapat dianggap sebagai dharma pengabdian masyarakat dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, sekaligus sebagai bahan refleksi akademik mengenai dialog seperti apa yang dapat dilakukan, juga mengenai kemungkinan dan keterbatasan kerjasama agama-agama dalam menghadapi tantangan bersama, dalam hal itu globalisasi.

Matakuliah Mengenai Dialog

Pembentukan program studi tentu merupakan hal yang tidak mudah dan karena itu menjadi penanda penting bagi perkembangan dialog dalam dunia akademik. Meski demikian, kalau kita bicara dalam konteks yang lebih sempit, *matakuliah* mengenai dialog memiliki jenis tantangan lain yang juga cukup kompleks. IRB di Universitas Sana-

ta Dharma, misalnya, sejak awal dalam kurikulumnya menampilkan satu matakuliah (pilihan) yang secara eksplisit disebut sebagai dialog, *Dialog: Religi dalam Konteks Pluralitas*. Namun, seperti disampaikan Sunardi sebagai ketua program, selama tiga tahun terakhir diputuskan bahwa mata kuliah itu dimoratorium karena ternyata belum mampu menemukan pendekatan baru yang bisa dibedakan dengan arah Fakultas Teologi Sanata Dharma yang berkaitan dengan teologi dan pastoral—mungkin karena itu juga tidak menarik minat calon mahasiswa.[15]

Di Program Magister Teologi Fakultas Teologi USD sendiri, setidaknya ada dua mata kuliah terkait dialog. Pertama adalah mata kuliah wajib berjudul *Misi dan Dialog*, dan mata kuliah pilihan *Pluralisme Agama*. Kedua mata kuliah tersebut mengambil titik berangkatnya dari Gereja Katolik atau perspektif Kristiani. Sedangkan pada tingkat S1, ada mata kuliah khusus tentang Islam, Hindu dan Buddha, dan agama suku.

Dari kesulitan yang ada untuk menggeser pendekatan teologis ke nonteologis, Sunardi menyarankan pentingnya studi agama untuk secara lebih tajam dan sistematis menegaskan objek formal dan objek materialnya, agar seseorang tidak hanya menghasilkan wacana *moralistik,* melainkan wacana ilmiah. Ada tiga kemungkinan terhadap hal itu. *Pertama*, untuk memenuhi kebutuhan mendesak atas model pendekatan, bisa saja meminjam pendekatan-pendekatan keilmuan yang ada, misalnya sosiologi atau antropologi, agar kajian mengenai dialog dapat lebih empiris, diarahkan pada praktiknya. *Kedua*, berkaca dari gerakan perempuan atau gerakan buruh yang, setelah periode meminjam pisau analisis disiplin-disiplin lain, kemudian

berhasil merumuskan kerangka berpikirnya sendiri, gerakan dialog antaragama juga penting diarahkan ke pembentukan suatu kerangka berpikir yang khas. *Ketiga*, mungkin pula merumuskan objek formal dengan belajar dari disiplin teologi, karena lingkungan teologi barangkali merupakan wilayah paling awal yang mengajarkan dialog antaragama.

Mengenai objek material, Sunardi menyarankan untuk mengangkat pengalaman Indonesia sendiri. Pertama, p*engalaman sehari-hari,* karena pada kenyataannya dialog sudah terjadi dalam kehidupan sehari-hari. *Kedua*, kajian lembaga-lembaga yang tidak hanya tertuju pada lembaga-lembaga dialog, melainkan apakah lembaga-lembaga lainnya juga sudah mengalami pencerahan lewat dialog. *Ketiga*, simbol adalah objek material lain. Asumsinya ialah bahwa pengalaman manusia, bahkan hidup manusia, tidak hanya melahirkan bahasa melainkan juga dibentuk oleh bahasa. Bahasa menentukan kualitas dan cakupan imajinasi masyarakat atas dirinya. *Sejauh mana dialog antaragama sudah melahirkan bahasa atau kosa kata (simbolisasi) baru? Bahasa apa yang muncul setelah sekian lama kita mengadakan dialog? Bagaimana melihat sastra keagamaan, bahasa media (cetak maupun elektronik), dan bahasa politik?* Terakhir, ajaran agama adalah sumber lain. Materi tersebut dapat membantu para penafsir dengan wawasan *pre-text* dalam kegiatan tafsirnya atas ajaran-ajaran dasar suatu agama.

Penjernihan yang diharapkan Sunardi di atas tentu memerlukan proses. Meskipun proses tersebut akan membutuhkan waktu, sejauh ditunjukkan penelitian ini, proses itu telah mulai berjalan. Penajaman objek formal dan objek material telah mulai tampak dalam beberapa program ataupun mata kuliah.

Di UKDW, mata kuliah yang eksplisit disebut dialog antaragama telah diajarkan pada tingkat S1 sejak 1980-an yang memfokuskan pada dialog Islam-Kristen. Tujuan penyajian mata kuliah itu adalah memberikan bekal pada mahasiswa agar dalam tugas-tugasnya mereka—cukup banyak di antaranya adalah calon pendeta—mampu melakukan dialog dengan penganut agama lain. Mata kuliah itu telah dimulai sejak Duta Wacana masih berbentuk Sekolah Tinggi Teologi, di antaranya membahas apa yang disebut dialog, syarat-syarat melakukan dialog, hubungan antara dialog dengan misi, tema-tema dialog, dan sebagainya. Sebagaimana diungkapkan Djoko Soetopo, di sini pun ada kesulitan cukup besar untuk membentuk suatu mata kuliah tentang dialog yang berakar dalam konteks pengalaman Indonesia, salah satu faktornya karena penelitian itu di Indonesia juga belum cukup.

Pada program M.Min, ada mata kuliah *Iman Kristen dan Pluralitas Keagamaan*, yang lebih menekankan pada perspektif Kristiani mengenai agama-agama. Dalam program M.Th. dan M.Div., ada mata kuliah yang tidak beranjak dari perspektif Kristen secara spesifik, yaitu *Studi Agama-agama* yang melihat agama-agama di Indonesia dengan memakai pendekatan ilmu-ilmu sosial, dan *Teori dan Praktik Dialog Antar Iman*. Kedua mata kuliah tersebut telah melangkah lebih jauh, dengan ikut mengundang pengajar non-Kristen untuk berbicara tentang agama mereka.

Di luar aktivitas akademik reguler, Pusat Studi Agama-agama UKDW menyelenggarakan salah satu programnya yang terpenting, yaitu Studi Intensif Tentang Islam (SITI), yang diselenggarakan bersama beberapa Gereja Kristen. Pesertanya berasal dari luar UKDW, dari beragam wilayah

Indonesia, yaitu para pendeta dan pastor parokhi muda berusia di bawah 35 tahun. Peserta program tersebut sekitar 30-40 orang per tahunnya—sejauh ini sudah ada sekitar 200 alumni.

Program tersebut diampu oleh dosen-dosen yang hampir semuanya Muslim, dari UIN/IAIN/STAIN di Yogya, Semarang, Bandung, maupun kiai-kiai dari pesantren. Program yang dimulai pada 2001 itu berlangsung selama 2 minggu setiap tahun pada Juli di Kaliurang. Di samping pengajaran di ruang kelas, SITI juga membawa pesertanya ke lembaga-lembaga pendidikan Islam, termasuk pesantren, untuk memberikan mereka pengetahuan tangan pertama tentang realitas kalangan Muslim—bukan hanya aspek normatif ajarannya.

Setelah sekian tahun, SITI kini akan dikembangkan dengan mengubah rancangannya. Direncanakan program tersebut nantinya akan melibatkan 15 peserta pendeta dan 15 peserta Muslim. Selama dua minggu mereka akan tinggal bersama dan menerima kuliah pokok-pokok ihwal Islam maupun Kristen. Dengan demikian, hal itu tidak lagi menjadi program untuk kalangan Kristen, tapi merupakan program bersama, dan diharapkan akan lebih efektif sebagai dialog karena selain memperkenalkan agama lain, ia juga memfasilitasi pertemuan langsung antar pemeluk agama.

Satu perkembangan amat baru (dimulai pada 2008) yang sangat menarik adalah kerjasama yang dilakukan Djoko Soetopo dari Teologi UKDW dengan Syafa'atun Almirzanah dari Fakultas Ushuluddin UIN Yogyakarta. Mahasiswa kedua dosen itu bertemu dalam aktivitas bersama yang disebut *intertextual reading*. Pada setiap perte-

muan, satu topik tertentu dipilih oleh seorang dosen dan kemudian masing-masing kelompok mahasiswa yang berjumlah sekitar 30 orang melihat bagaimana topik itu diangkat dalam kitab suci masing-masing, hingga bagaimana ia ditafsirkan. Salah satu dampak penting dari pertemuan yang berlangsung sebulan dua kali dalam satu semester itu ialah hal yang sederhana: kedua kelompok mahasiswa tidak alergi untuk memegang kitab suci masing-masing temannya. Aktivitas tersebut dilandasi oleh keyakinan bahwa dialog akan dapat masuk ke wilayah yang cukup fundamental ketika teks masing-masing agama dipahami, dan bahkan, seperti dialami kelompok mahasiswa tersebut, ditemukan kesamaan-kesamaannya. Saat ini program tersebut masih bersifat ekstrakurikuler, namun jika dianggap berhasil dan mendapatkan peserta yang cukup banyak, akan dijadikan bagian dari kurikulum baik di UIN Yogyakarta maupun UKDW.

Pernah ada rencana untuk membuat program serupa, namun lebih luas, dengan nama Sekolah Antar Iman, yang direncanakan akan menjalin kerjasama antara UIN, UKDW, dan LSM antariman Interfidei. Dalam rancangan itu, dialog antaragama bagi mahasiswa kedua universitas akan berjalan sebagai praktikum (atau semacam KKN). Namun, di antaranya karena kendala administratif, gagasan menarik tersebut belum terlaksana.

Di UIN/IAIN sendiri, dipelopori oleh UIN Yogyakarta ketika masih disebut IAIN, ada satu matakuliah yang telah mengarah pada dialog yang menjadi bagian dari kurikulum seluruh fakultas, yaitu *Sejarah Agama-agama*. Pengajarnya sendiri adalah dosen-dosen dari dalam UIN, khususnya Fakultas Ushuluddin.[16] Sebuah kritik yang dia-

jukan di sini mirip dengan kritik yang diajukan di masa awal Mukti Ali, yaitu bahwa buku-buku mengenai agama lain ditulis oleh penulis Muslim, dan tidak jarang dengan cara menghakimi kebenaran agama lain itu. Bersama dengan pergeseran orientasi UIN setelah bertransformasi dari IAIN, pada saat yang sama ada pergeseran orientasi kajian agama yang didukung rektornya sebagaimana disebutkan di atas. Sementara itu, dalam kurikulum Ushuluddin UIN Yogyakarta sendiri, hingga kini masih ada satu mata kuliah wajib tentang dialog, yaitu *Hubungan Antaragama*. Sebagaimana disampaikan di atas, selain UIN Yogyakarta, hampir semua UIN/IAIN memiliki jurusan atau program studi Perbandingan Agama (PA). PTAIN yang tidak memilikinya, misalnya STAIN, menawarkan mata kuliah perbandingan agama, sosiologi agama, atau antropologi agama di Jurusan Ushuluddin mereka.

Dibandingkan UIN atau UKDW (dengan perkecualian program S2 Studi Perdamaian), perbedaan penting di CRCS adalah bahwa komposisi mahasiswanya telah cukup beragam menyangkut latar keagamaan mereka. Di satu sisi hal itu merupakan suatu kelebihan karena upaya kolaborasi *intertextual reading* seperti yang dilakukan UIN dan UKDW dapat segera dilakukan; di sisi lain, kelemahannya adalah bahwa mahasiswa-mahasiswanya mau tidak mau memiliki kesempatan lebih kecil untuk memperdalam tradisinya sendiri.

Dalam kurikulum CRCS saat ini, selain mempelajari teori dan metodologi kajian agama, mahasiswa wajib mengambil mata kuliah umum tentang ajaran dan sejarah agama-agama (*World Religions*), dan satu mata kuliah tingkat lanjut mengenai agama yang berbeda dari latar belakang-

nya sendiri. Sebagai bagian dari kurikulum, ada pula mata kuliah wajib tentang agama-agama ulayat (*Indigenuous Religions)*. Mata kuliah pilihannya banyak yang mengangkat isu-isu kontemporer seperti gender, konflik dan perdamaian, krisis lingkungan, bencana alam, dan sebagainya, berbarengan dengan respons agama-agama terhadap isu-isu tersebut. Sebagai contoh, di CRCS pernah ditawarkan mata kuliah mengenai perbandingan respons teologi pembebasan dalam Kristen dan Islam atas penyebaran HIV/AIDS yang dipandang sebagai fenomena sosial-politik-ekonomi. Hal yang juga penting dicatat adalah bahwa sejak awal, CRCS telah menawarkan mata kuliah *Dialog Antaragama* sebagai mata kuliah wajib (lihat Apendiks buku ini tentang pengembangan matakuliah dan gugus studi *dialog antaragama*). Dengan begitu mahasiswa diharapkan mampu memahami dialog dengan baik, termasuk melakukan penelitian mengenai dialog. Seperti tecermin dalam tesis mahasiswa, dialog—baik pada tataran tekstual, tradisi, maupun praksis keberagamaan komunitas—menjadi subjek yang banyak diteliti.[17]

Dalam program S3 di ICRS, sejauh ini semua mata kuliah selalu diajar sedikitnya oleh dua orang dari dua agama dan latar disiplin yang berbeda (dan diusahakan diajar oleh perempuan dan laki-laki). Misalnya, mata kuliah tentang agama dan ekonomi, atau pembacaan (tafsir, hermeneutika) atas kitab suci, diajarkan oleh ahli berlatar belakang Islam dan Kristen. Hal itu adalah cerminan dari upaya program tersebut untuk mencari bentuk kurikulum dan pendekatan kajian agama yang berbeda dari yang banyak dilakukan di tempat lain. Di luar aspek komposisi pengajar, ICRS juga dengan berani mencoba menginisiasi beberapa

mata kuliah baru, seperti sebuah mata kuliah komprehensif tentang sejarah agama-agama di Indonesia, yang mencakup seluruh masa sejarah Indonesia, ditawarkan dalam dua mata kuliah wajib secara berurutan dalam dua semester. Di sini sejarah agama-agama tidak diajarkan secara terpisah, tapi secara bersamaan, dengan memperlihatkan interaksi di antara mereka. Mata kuliah lain yang pernah ditawarkan adalah mengenai dialog antariman dan globalisasi.

Sejauh ini setidaknya kita bisa mencatat beberapa aspek yang mungkin berpengaruh: komposisi mahasiswa, pengajar, dan cara pengajaran. Pertama, keragaman mahasiswa dari segi latar agama tentu secara signifikan memengaruhi jalannya pengajaran di kelas. Dengan demikian, situasi keragaman agama telah terjadi dengan sendirinya dan dialog terjadi secara alamiah. Kalaupun matakuliah yang diajarkan hanya terkait satu agama tertentu, diskusi dari perspektif berbagai latar belakang keagamaan yang diwakili mahasiswa akan dengan segera memfasilitasi terjadinya dialog—pemahaman dan kesalahpahaman bisa segera mendapatkan umpan balik, misalnya. Di situ, perkembangan program SITI yang dilaksanakan UKDW menarik untuk dilihat. Selama beberapa tahun belakangan program itu hanya diikuti sekitar 30 peserta Kristiani; namun dalam perkembangannya, kini direncanakan untuk mengundang 15 peserta Kristiani dan 15 peserta Muslim, sehingga yang terjadi bukan hanya peserta Kristiani belajar tentang Islam dari pengajar Muslim, tapi juga dari sesama peserta.

Komposisi pengajar juga bisa menjadi faktor penting bagi dialog. Di ICRS, misalnya, seperti telah disebutkan di atas, mata kuliah mengenai hermeneutika atau etika ekonomi yang diajarkan oleh pengajar dengan latar agama

Islam dan Kristen menjadi suatu dialog terus-menerus—baik untuk pengajarnya sendiri maupun untuk mahasiswanya. Namun terdapat pula perkembangan lain. Di CRCS, pada awalnya banyak mata kuliah yang diajarkan oleh dua atau lebih dosen berbeda latar agama. Namun karena kesulitan teknis dan nonteknis, terkait menjadikan mata kuliah itu sebagai kesatuan yang utuh, belakangan ini banyak mata kuliah yang diampu oleh satu dosen. Jika dibatasi pada Islam dan Kristen, misalnya, upaya itu masih bisa dilakukan. Namun pada titik tertentu, mustahil menghadirkan semua representasi agama dalam satu ruang kelas.[18] Sebagai contoh, di CRCS kini matakuliah mengenai agama-agama dunia diajarkan oleh seorang yang berlatar Kristen (sebelumnya selama dua tahun diajar pengajar berlatar Islam), namun kemudian dilengkapi dengan dosen-dosen tamu untuk tema-tema tertentu. Dalam matakuliah tersebut biasanya juga dilakukan satu-dua kali kunjungan lapangan untuk melihat realitas agama-agama tertentu dalam komunitas khasnya.[19] Kalaupun representasi agama secara lengkap dapat dilakukan (ketika agama yang dibahas jumlahnya terbatas, misalnya hanya Islam dan Kristen), kenyataannya dalam satu agama tertentu pun ada banyak perspektif yang berbeda-beda—dan hal itu benar untuk semua agama. Kiranya yang tidak kalah penting adalah sikap memperlakukan agama-agama lain (yang berbeda dari latar belakang pengajarnya, dan ini juga berlaku untuk sikap terhadap aliran lain dalam agama yang sama sekali pun) secara empatik. Di situ, sekali lagi keragaman latar agama mahasiswa dapat menjadi sumber penting untuk membentuk sikap terhadap agama lain.

Dari segi cara pengajaran, tidak ada yang dapat meng-

gantikan pengajaran suatu agama dengan perjumpaan langsung dengan pemeluk atau komunitas umat beragama itu. Untuk itu, kuliah lapangan, seperti yang pernah dilakukan dalam mata kuliah *Dialog Antaragama* di CRCS, menjadi amat penting. Perjumpaan semacam itu akan selalu mengingatkan mahasiswa bahwa agama bukanlah suatu kategori statis, tapi merupakan kenyataan empiris yang hidup dan terus berkembang. Kembali ke diskusi di awal bab ini, sikap historis amat penting sebagai prasyarat dialog.

Tantangan Dialog dalam Dunia Akademik di Masa Depan

Studi akademis tidak pernah tumbuh dalam ruang hampa. Diakui atau tidak, ada konteks sosial-politik-ekonomi yang memengaruhi pertumbuhannya. Demikian juga pada studi agama, mustahil membangun suatu studi agama yang *murni akademis* di Indonesia—yaitu suatu negara yang mewadahi agama-agama dunia maupun agama-agama lokal yang jumlahnya amat banyak dengan segala problematikanya. Studi agama di negara seperti Indonesia sudah selayaknya, secara langsung atau tidak langsung, memperbaiki kualitas kehidupan beragama di Indonesia—tanpa mengorbankan kualitas akademis dan sikap kritisnya. Pengembangan dialog yang baik dan konstruktif di antara umat beragama adalah salah satu tujuan yang layak dipancangkan.

Di awal bab ini disampaikan keberatan atas upaya mengaitkan studi agama dengan kemungkinan dialog. Contohnya, kualitas akademis Mukti Ali, yang berada di awal sejarah studi agama di Indonesia, dipertanyakan karena dia sekaligus mempromosikan sebuah aktivitas yang dianggap

di luar wilayah akademis, yaitu dialog antaragama. Namun, di penghujung perkembangan mutakhir studi agama di Indonesia, kita melihat munculnya program-program studi agama yang terang-terangan memasukkan dialog sebagai bagian dari upayanya. Dapatkah dialog dijustifikasi sebagai bagian dari pengkajian akademis?

Tentu dalam sejarah panjang itu, baik studi agama maupun pengertian mengenai dialog berkembang, demikian pula konteks sosial-politiknya. Pertama, tampaknya kritik di atas, yang disuarakan di awal 1970-an, masih dipengaruhi cara pandang yang menuntut seorang ilmuwan atau pengkaji harus sepenuhnya mengambil jarak dari objek kajiannya. Bagi Bolland, mempertahankan kualitas *ilmiah* dalam studi agama berarti keberagamaan seorang peneliti harus dihindari sebisa mungkin dalam menilai suatu agama.[20] Dalam epistemologi yang masih diwarnai positivisme, memang ada persyaratan bahwa peneliti harus sepenuhnya bersikap objektif, melepaskan subjektivitasnya, dalam melakukan kajian ilmiahnya. Namun kini makin disadari bahwa persyaratan itu sebetulnya naif, karena bagaimana pun peneliti tidak bisa melenyapkan subjektivitasnya secara utuh. Karena itu, sebaliknya pengakuan akan subjektivitas diajukan.

Sementara prasangka subjektif jelas mesti dihindari, di sisi lain perlu ada empati kepada objek studi. Dalam salah satu tulisannya yang mengajukan pembelaan kontemporer atas perbandingan agama, Diana Eck menyarankan gerakan mendekati *the others* melalui empati, sembari menginterogasi lokasi dan suara kita sendiri.[21] Dengan hal itu, Eck justru menyarankan perlunya melengkapi perspektif pengkaji agama dengan apa yang disebutnya sebagai perspektif

dialog, yang memperhitungkan suara kita sendiri maupun suara yang lain. Pemahaman tidak bisa diperoleh tanpa upaya dialog terus-menerus antara suara kita dengan suara yang lain itu—tanpa perlu mengandaikan adanya suatu kesepakatan. Dari sisi tersebut, Mukti Ali memang masih bisa dikritik, namun hal itu tidak berarti dialog harus dihindari dalam dunia akademis studi agama.

Terlepas dari itu, mesti diakui bahwa peringatan akan pentingnya menjaga studi agama untuk tidak jatuh menjadi teologi memang masih diperlukan—apalagi jika itu dilakukan dalam lingkungan pendidikan yang unsur teologisnya cukup kuat. Di atas kita telah melihat John Titaley (UKSW) dan Sunardi (IRB, Universitas Sanata Dharma) berusaha keras menunjukkan kontras antara model pengkajian agama yang bersifat normatif (doktrinal, atau *confessional*) dengan yang historis-empiris. Hal yang sama dilakukan oleh Amin Abdullah, melalui istilah normativitas dan historisitas. Pengkajian agama-agama yang dialogis mensyaratkan cara pengkajian yang, paling sedikit, tidak melulu normatif, karena pengkajian normatif akan cenderung memberikan titik berat atau bahkan keistimewaan pada suatu agama tertentu. Hal itu berpeluang besar mendistorsi pengkajian atas agama lain dan menutup pintu dialog.

Di sisi lain, teologi, sebagai salah satu cara pengkajian agama, tidak berarti harus ditolak sepenuhnya. Bagaimana pun, dalam suatu fakultas teologi universitas Kristen atau universitas Islam, ada keperluan spesifik untuk memusatkan diri pada pengkajian suatu agama. Paling sedikit, hal itu bisa dipandang sebagai semacam kebutuhan untuk spesialisasi. Hal yang juga tampak makin jelas dalam beberapa ilustrasi yang dibahas di situ adalah menguatnya dorongan

untuk memperhatikan konteks keberagaman agama, bahkan dalam fakultas-fakultas teologi sekalipun.

Melanjutkan analisis tersebut, cara pengkajian yang tidak melulu normatif bisa dikatakan adalah syarat perlu, belum syarat cukup untuk berdialog. Pengkajian agama secara historis-empiris tidak serta merta menjadi suatu dialog, kecuali jika ia juga secara sadar mengupayakan komunikasi di antara agama-agama dalam beberapa aspeknya. Hal itulah yang di awal bab ini disebut sebagai *interreligious studies*. Lepas dari aspek semantiknya, yang dituju di sini adalah pencapaian lebih lanjut yang melampaui perbandingan agama maupun studi agama, seperti diamati J. B. Banawiratma. Baginya, hal yang baru dalam *interreligious studies*, dan membedakannya dari perbandingan agama maupun studi agama, adalah penegasan *kenyataan yang makin lama makin disadari bahwa studi agama-agama merupakan komunikasi berbagai subjek yang terlibat dan yang bertemu dalam pengalaman maupun interpretasi atau pemahaman religius*.[22] Dengan begitu, suatu studi agama yang bermaksud mencapai dialog perlu memfasilitasi pertemuan beragam subjek tersebut.

Salah satu penerjemahan konkret dari ide itu adalah pentingnya menciptakan forum (program studi atau suatu matakuliah) yang mempertemukan mahasiswa dari beragam latar agama. Latar forum yang beragam tersebut dapat segera membantu terciptanya pengkajian agama yang lebih empatik, yang pada gilirannya memungkinkan dialog. Sampai tingkat tertentu, kesulitan metodologis untuk memisahkan yang teologis dan nonteologis—yang dikhawatirkan akan terjatuh pada pembicaraan mengenai klaim kebenaran dan dengan demikian memberikan penghaki-

man negatif mengenai agama lain—bisa *dikontrol* dalam keadaan keragaman itu. Dalam konteks yang lebih luas, hal tersebut bisa dipandang sebagai satu ilustrasi mengenai pentingnya perjumpaan dengan realitas yang aktual, empiris, dan hidup, untuk selalu mengingatkan bahwa agama bukanlah sekadar ajaran atau teks yang statis.

Sebagai ilustrasi, menarik untuk mendengar kisah seorang lulusan Jurusan Perbandingan Agama IAIN Yogyakarta pada 1990-an yang kini aktif di sebuah LSM di Yogyakarta. Ketika menjalani kuliah, sementara di ruang kelas pengajaran agama-agama lain diajarkan oleh pengajar Muslim, dan tidak ada satu pun non-Muslim, praktik dialog antaragama yang sesungguhnya terjadi adalah ketika mahasiswa melakukan praktik lapangan dan secara langsung berjumpa dengan pemeluk-pemeluk agama lain dalam lingkup keagamaan mereka sendiri, seperti dalam perayaan hari-hari besar Kristen, Hindu, dan Buddha. Dia melihat bahwa para lulusan Perbandingan Agama melakukan praktik dialog antaragama tanpa menyebutnya demikian, ketika, misalnya, mereka aktif di LSM-LSM, memperjuangkan isu-isu yang lebih luas seperti keadilan gender atau buruh, dan bertemu dengan aktivis dari latar agama lain. Di situ tampaknya pendidikan mereka telah sedikit banyak mempersiapkan mereka untuk melakukan dialog aksi.[23]

Dari tujuh dataran dialog yang dikemukakan di Bab I, sebagian besar sesungguhnya telah terjadi di dunia akademik dalam intensitas yang berbeda-beda, sejauh yang diamati secara terbatas di beberapa perguruan tinggi yang menjadi perhatian penelitian ini. Kekhasan komunitas akademis juga berarti bahwa beberapa dataran dialog tersebut hanya dapat terwujud secara terbatas. Sebagaimana diung-

kapkan di atas, dalam komunitas akademis yang beragam dari segi latar agama, dialog kehidupan (dataran satu) terjadi secara alamiah meskipun terbatas lingkupnya, dan hal itu berperan amat besar dalam mengatasi kesulitan pembedaan antara yang teologis dan nonteologis. Hal yang sama tampak pada *dataran empat* di mana peserta dialog berbagi pengalaman iman dalam komunitas lintas iman.

Sementara pada kedua dataran tersebut tampak ada keuntungan besar pada komunitas akademis yang beragam, *dataran tiga* (studi tradisi iman masing-masing) tampaknya dapat lebih intens dilakukan dalam komunitas yang relatif lebih homogen (misalnya studi agama di universitas Kristen atau Islam). Dari sisi itu, kreativitas seperti yang muncul dari hasil kerjasama UKDW dan UIN dalam program *intertextual reading* memiliki kelebihan karena dapat sekaligus berada dalam kedua situasi tersebut (yang homogen dan heterogen), dan dengan demikian mengambil keuntungan yang ditawarkan masing-masing situasi.

Dalam lingkup akademis, hal yang jelas paling dimungkinkan adalah *dataran kelima* (pergumulan teologis lintas iman dan agama). Karena pentingnya dataran tersebut, seharusnya ia juga dapat menjadi pengingat bahwa meskipun pendekatan historis, nonteologis amat diperlukan, pendekatan teologis tidak harus sepenuhnya dihindari, karena ia membuka jalan menuju ke salah satu kedalaman agama. Maka kita mungkin perlu mempertimbangkan hal ini: bahwa yang bermasalah bisa jadi bukanlah pendekatan teologis itu sendiri, namun jenis teologi tertentu yang amat tertutup. Seperti diingatkan di Bab 1 ketika berbicara mengenai dataran itu, kontekstualisasi teologi dalam kenyataan historis akan menghasilkan teologi yang lebih terbuka.

Dari pembahasan beberapa program studi di bab ini, tampak bahwa perhatian pembedaan yang teologis dengan nonteologis tampil amat nyata dalam program di universitas-universitas yang berafiliasi keagamaan, yang memang telah memiliki tradisi teologis yang mapan dan berakar dalam, seperti di perguruan tinggi Kristen, Katolik, dan Islam. Hal tersebut bisa dipahami, tanpa menutup kemungkinan pembicaraan teologis yang tidak semata-mata normatif dan tertutup, namun kontekstual dan terbuka. Dalam dialog pun, sementara anjuran untuk dialog nonteologis memang amat penting (apalagi karena di masa lalu yang teologis terlalu mendominasi), dialog teologis mesti diakui memiliki tempatnya sendiri dan bisa dilakukan dengan baik.

Di universitas-universitas yang tidak berafiliasi keagamaan, kepentingan pembedaan itu tidak terasa semendesak di universitas-universitas yang memiliki afiliasi keagamaan. Teologi pun diterima sebagai salah satu cara mengkaji agama, meskipun justru pergumulan teologis mungkin tidak terlalu leluasa dilakukan di sana, karena memang tidak ada tradisi teologis di universitas-universitas tersebut. Idealnya tentu adalah jika kelebihan-kelebihan masing-masing universitas bisa digabungkan. Kita masih perlu menunggu apakah konsorsium tiga universitas yang bergabung di ICRS, yang masih berusia di bawah lima tahun, akan menampilkan kelebihan-kelebihan dari ketiga universitas itu dan mampu menutupi kekurangan masing-masing.

Sebagai catatan akhir, ada dua hal penting terkait dialog di dunia akademik yang tidak dibahas di atas. Tepatnya, *kurangnya dialog*. Sementara dalam bab ini telah dibahas kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam *studi agama* yang

dialogis di beberapa perguruan tinggi, jika kita memperluas pandangan dan memperhatikan dunia akademik tidak terbatas pada wilayah studi agama dan berkonsentrasi pada perguruan tinggi umum, maka akan kita lihat bahwa di sini tidak terdapat banyak kemajuan, meskipun kesempatan perjumpaan sebagai dialog sesungguhnya amat luas. *Pertama*, menyangkut mata kuliah agama yang wajib bagi semua mahasiswa S1 di Indonesia sebagai bagian dari kurikulum nasional. Mata kuliah agama di universitas tersebut pada umumnya mengikuti pola yang sama dengan pelajaran agama yang telah mereka dapatkan selama 12 tahun di tingkat sekolah dasar dan menegah, yaitu sifatnya monoreligius—hanya mengajarkan agama sendiri, di ruang kelas tersendiri, terpisah dari teman-temannya yang beragama lain.[24] Hal itu jelas amat jauh dari ideal pendidikan agama yang multireligius atau bahkan *interreligius*. Jika pada tingkat sekolah saja sudah mulai ada pemikiran mengenai perlunya pendidikan agama yang tidak monoreligius, kiranya pada tingkat perguruan tinggi upaya tersebut lebih mendesak.

Sebetulnya di PT umum, dari segi silabus yang didesain Departemen Pendidikan Nasional, matakuliah pendidikan agama sudah cukup maju dengan menampilkan isu-isu kontekstual—tidak sekadar bersifat normatif atau doktrinal—termasuk, misalnya, isu-isu terkait toleransi antaragama atau demokrasi dan HAM.[25] Kenyataannya, dalam praktiknya, bisa jadi karena faktor pengajar yang dididik dalam pendidikan agama yang monoreligius dan amat doktrinal, mata kuliah itu kerap dikritik karena tinggal menjadi sekadar mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswa. Jika pengajaran agama yang *interreligius* dan dialogis bisa diupayakan untuk tingkat perguruan tinggi,

meskipun sekadar *satu* mata kuliah (biasanya juga hanya berbobot 2 SKS), maka potensinya sungguh luar biasa, karena ia wajib diikuti *seluruh* mahasiswa Indonesia.

Di luar itu, tersimpan potensi besar dalam PT umum dari segi keragaman komunitas keagamaannya. Perjumpaan antarpemeluk agama menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari—dengan sedikit memfasilitasi hal itu, perjumpaan sehari-hari dalam konteks sekular itu dapat segera menjadi dialog kehidupan (dataran pertama) yang baik. Sayangnya, dalam atmosfer nonkeagamaan itu, ketika agama dibicarakan (dalam matakuliah pendidikan agama), keragaman tersebut justru dipangkas dan mahasiswa dieksklusi dari teman-temannya yang berasal dari latar agama berbeda.

Hal itu terkait dengan hal kedua yang juga relevan dengan topik pada bagian ini, yaitu aspek lain dari perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi umum yang di banyak tempat diamati kian memiliki *atmosfer keagamaan* yang makin kental dan polarisasi komunitas-komunitas agama. Di satu sisi, hal itu merupakan realitas sosiologis yang tidak berbeda jauh atau bahkan paralel dengan makin kerasnya penegasan identitas agama-agama di ruang-ruang publik di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks perguruan tinggi, hal itu ditandai dengan makin marak dan aktifnya organisasi-organisasi keagamaan (tampaknya dari semua komunitas beragama) baik yang menjadi bagian dari unit kegiatan mahasiswa maupun yang berbasis di luar kampus. Dalam situasi tersebut, rasanya merupakan hal yang wajar jika kita berpikir bahwa aktivitas lintas agama selayaknya mendapatkan tempat pula. Yang menjadi tantangan di situ adalah bagaimana meningkatnya kesadaran keagamaan tersebut tidak mengarah pada

eksklusivisme, tapi justru membuka peluang bagi interaksi di antara kelompok-kelompok tersebut. Gagasan tersebut menjadi jauh lebih penting jika, sebagaimana kita lihat di atas, dalam kampus-kampus perguruan tinggi umum itu telah ada bahan dialog yang sangat kaya: keragamaan latar belakang sivitas akademikanya yang sangat luas. Jika interaksi antara komunitas beragama dapat terjadi dengan baik dalam lingkup kampus, maka hal itu dapat sedikit banyak mengatasi eksklusivisme pengajaran agama. Catatan ini penting diberikan karena peran strategis mahasiswa di masa depan, ketika mereka memegang peran-peran penting dalam masyarakat.[26]

Kesimpulan

Bab ini menunjukkan bahwa studi agama di Indonesia—khususnya pada tingkat pascasarjana—telah berkembang cukup pesat dalam dasawarsa terakhir ini, ditandai dengan makin banyaknya studi agama yang ditawarkan di perguruan-perguruan tinggi yang beragam, baik perguruan tinggi yang berafiliasi keagamaan (khususnya Islam dan Kristen), perguruan tinggi sekular, maupun kerjasama keduanya. Kemajuan juga bisa dicatat menyangkut perbaikan metodologi studi agama. Dalam hal metodologi, pengkajian agama yang tidak bersifat *confessional* (dan terkadang dicirikan melalui kontras antara pendekatan teologis dengan historis) dianggap sebagai modal utama untuk membuka pintu dialog. Meski demikian, teologi dapat pula bersifat historis. Teologi yang dikontekstualkan tidak menutup pintu dialog, justru akan mengantar pada kedalaman perjumpaan dengan yang lain.

Dalam lingkup yang lebih praktis, khususnya dalam pengajaran, satu hal yang tampaknya amat penting adalah mempersiapkan kondisi pendidikan yang lebih memungkinkan tumbuhnya suasana dan perspektif dialogis dalam studi agama. Hal itu dapat dilakukan dengan *latar* mahasiswa dan pengajar yang telah mencerminkan keragaman yang ada di masyarakat. Di samping itu, selain pengkajian agama secara historis-empiris, penting pula diperkaya dengan perjumpaan langsung dengan keragaman dalam latar khasnya masing-masing, misalnya melalui kuliah lapangan.

Meskipun situasi penelitian mengenai dialog tidak banyak dibahas di sini, mengikuti perkembangan ke arah studi yang lebih historis, kiranya penelitian sekarang mengenai dialog seharusnya lebih banyak berkembang ke arah penelitian empiris-sosiologis, mengamati dialog sebagaimana terjadi dan tidak terbatas pada wacana mengenai dialog. Pemahaman mengenai praktik dialog yang telah terjadi akan memberikan pemahaman baik mengenai ide dialog itu sendiri, kondisi-kondisi yang memungkinkannya, dan pada gilirannya membantu perumusan dialog yang lebih dapat dipertanggungjawabkan dan dekat dengan situasi masyarakat. Indonesia memiliki sejarah panjang dialog antaragama yang terlalu kaya untuk tidak menjadi lahan subur bagi penelitian-penelitian mengenai interaksi agama-agama.

Catatan terakhir yang diberikan di sini, yang lebih berdasar pada pengamatan umum, bukan penelitian khusus mengenainya, adalah menyangkut masih kurangnya suasana dan perspektif dialogis justru di perguruan tinggi umum, di luar lingkup studi agama, yaitu di tempat di mana sebetulnya telah ada bahan dialog yang sangat baik dengan keragaman latar agama, dan perjumpaan di antara

mereka dalam lingkup nonkeagamaan. Perbaikan pendidikan agama yang *mono-religious* dapat berperan penting. Di luar kurikulum, memfasilitasi perjumpaan itu dalam forum-forum lintas agama, misalnya, dapat membantu mahasiswa untuk mengkristalkan pengalamannya menjadi suatu sikap terbuka yang dapat berperan penting menyiapkan generasi yang akan datang untuk masa depan tatamasyarakat yang lebih dialogis.

Bagian III:
Masa Depan Dialog di Indonesia

7
Dari Fakta Menuju Cita-cita

Berpangkal pada kenyataan kita saat ini (Bab 3 dan 4), begitu pula belajar dari pengalaman sejarah (Bab 2), kita perlu memikirkan apa yang selayaknya diperhatikan dalam dialog antarumat beragama di Indonesia untuk masa depan.

Tujuh Dataran Dialog

Dari pemaparan yang kita lihat pada bab-bab sebelumnya, kita tidak menemukan lembaga dan kelompok yang menjalankan tujuh dataran dialog sebagai langkah-langkah atau proses yang berkelanjutan. Hal yang kita temukan adalah pelaksanaan dialog yang dapat kita kategorikan sebagai momen-momen dari dataran tersebut. Kalau kita memperhitungkan apa yang dilakukan dan apa yang dijumpai oleh ketiga pelaku, yakni Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),

Perguruan Tinggi (PT), dan Pemerintah, kita temukan bahwa semua dataran dialog itu terjadi di Indonesia.

(1) Dialog kehidupan terjadi sehari-hari di kampung, desa, kantor, dan pasar. Hal itulah yang paling banyak terjadi di Indonesia. Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, orang berbeda iman dan agama saling bertemu dalam dunia kerja, pendidikan, bisnis, dan dalam pergumulan politis. Berpangkal pada dialog *de facto*, meskipun tidak begitu disadari, kiranya dapat diperkembangkan dialog pada dataran-dataran lain sesuai dengan kebutuhan kelompok.
(2) Tidak semua dialog kehidupan diikuti dengan kepedulian bersama beserta proses untuk secara sadar memperkembangkan kehidupan bersama. Namun, perlu diingat bahwa tidak jarang dijumpai dalam masyarakat Indonesia anggota-anggota berbagai agama itu bersama-sama peduli dan bertindak untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi bersama sehubungan dengan persoalan kesehatan, pendidikan, pertanian, peribadatan, dan infrastruktur. Kita temukan juga kepedulian yang diikuti dengan membuat analisis dan merumuskan pilihan etis dan aksi seperti waktu menanggapi peristiwa bencana alam.
(3) Pada dataran ketiga, para anggota kelompok menggali tradisi iman masing-masing, bahwa kaum beragama mempelajari setiap sumber imannya merupakan sesuatu yang dapat diandaikan. Studi sumber iman sendiri dalam rangka dialog terjadi terkait penulisan tesis atau disertasi. Di luar studi formal masih perlu diperkembangkan studi tradisi agama sendiri dalam rangka

mengembangkan dialog dengan agama lain. Misalnya, yang manakah dari tradisi-tradisi agama yang mendukung sikap tertutup (eksklusif) dan manakah yang menumbuhkan sikap terbuka (inklusif, pluralis) atau memelihara simbiosis yang saling menghidupkan.

(4) Dialog dengan berbagi pengalaman iman dalam komunitas lintas iman terjadi secara mengesankan, misalnya pada program *camping* lintas agama. Dialog dalam level itu lebih banyak terjadi secara personal ketimbang difasilitasi secara formal. Fasilitas semacam itu juga hanya terjadi sesekali dan tidak merupakan program berkelanjutan. Meski demikian, program semacam itu sangat penting bagi pembinaan kaum muda yang pada masa mendatang akan menjadi pelaku-pelaku yang menentukan kehidupan bersama.

(5) Dialog dalam pergumulan teologis lintas iman terjadi dalam usaha-usaha penulisan tesis atau disertasi. Usaha *intertextual reading* seperti yang dijalankan oleh UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Kristen Duta Wacana untuk mengkaji bersama tema-tema yang sama dijumpai dalam Al Qur'an dan Alkitab perlu juga diperkembangkan. Kalangan para teolog perlu juga semakin memperhatikan pengembangan teologi lintas iman dalam penelitian dan juga dalam dialog dengan teolog dari agama lain.

(6) Dataran keenam adalah dialog aksi. Dialog pada dataran itu sangat ditekankan terutama oleh rekan-rekan yang bergerak dalam Lembaga Swadaya Masyarakat. Sebagaimana kita catat sehubungan dengan dataran kedua, dialog aksi banyak terjadi di kalangan rakyat tanpa didahului suatu analisis formal. Dialog aksi

tersebut terjadi juga di kalangan kaum akademis dalam bentuk seminar, demonstrasi bersama, atau penulisan buku bersama yang menyatakan pemahaman dan kepedulian bersama. Hal itu juga masih perlu diperkembangkan misalnya melalui penelitian-penelitian bersama mengenai pemberdayaan kaum miskin dan menderita, kaum perempuan, HAM, dan lingkungan hidup.

(7) Dialog pada dataran ketujuh, yakni *intrareligious dialogue*, dapat terjadi sebagai akibat dari dialog pada dataran mana pun juga, di mana saja dan kapan saja selama orang atau kelompok terbuka untuk melihat kekurangan dan keunggulan sendiri. Otokritik perlu dikembangkan baik secara individual maupun komunal. Komunitas agama akan berkembang kalau bersedia mengritik diri sendiri dan memperbaharui diri. Buku ini tidak terlalu mengungkap dialog pada dataran tersebut.

Berbagai macam usaha dijalankan oleh berbagai pihak. Meski begitu berbagai kasus menyangkut perundang-undangan ataupun peraturan di tingkat nasional maupun daerah memperlihatkan bahwa kepercayaan umat beragama satu dengan yang lain belumlah kuat. Gambar mengenai Indonesia dengan kemajemukan umat beragama yang hidup berdampingan secara rukun dapat dikatakan telah rusak sejak 1995; sekarang ini sedang dilukis lagi. Lukisan itu belum selesai dan membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat Indonesia. Akan jadi macam apakah lukisan itu? Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh usaha-usaha dialog antaragama. Gerakan itu sudah dan sedang terjadi.

Gerakan Bersama

Sejarah Indonesia memperlihatkan bahwa gerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan, gerakan demi keadilan-kebenaran, dan gerakan melawan penjajahan-penindasan, gerakan melawan musuh bersama, merupakan kekuatan yang mempersatukan umat dari berbagai agama. Sebaliknya kosongnya kepedulian dan musuh bersama semacam itu membawa umat beragama untuk cenderung memperjuangkan kepentingan kelompok sendiri dan saling berselisih. Kecuali itu, agama juga mudah digunakan sebagai topeng kekerasan oleh kepentingan ekonomis maupun politis.

Sebagai gejala sosial, sebagai kelompok masyarakat dalam negara Indonesia, umat beragama tidak pernah terlepas dari politik, ekonomi, dan budaya yang bersifat ambivalen. Terhadap ambivalensi politik, ekonomi, dan budaya selayaknya umat beragama berikap kritis berdasarkan sumber-sumber iman yang dianutnya. Dengan demikian agama menjadi agama rakyat, yang bergerak demi nilai-nilai kemerdekaan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Kemungkinan lain hanyalah hanyut dalam kekuasaan dan agama menjadi sarana kekuasaan. Selayaknya sekarang ini agama-agama bersama-sama memusatkan perhatian pada masalah yang mendesak, yakni kemiskinan dan ketidakadilan sosial.

Dari sejarah umat beragama di Indonesia kita belajar bahwa:

(a) Umat beragama bersatu satu sama lain, tatkala mereka menjadi pelaku politik dan ekonomi melawan musuh sesungguhnya, yaitu penjajahan, penindasan, penghisapan, dan segala macam ketidakadilan.

(b) Umat beragama berselisih, berperang satu melawan yang lain, tatkala mereka melegitimasikan atau diperalat oleh kekuasaan politik dan ekonomi.
(c) Umat beragama di Indonesia belum pernah sungguh-sungguh mengolah dinamika kehidupan bersama umat beragama lain dalam jangka waktu yang cukup berarti. Sebab, sekurang-kurangnya selama Orde Baru, setiap kali konflik horisontal tersebut muncul kemudian diselesaikan dengan kekuasaan dari atas.

Dari pengalaman sejarah umat beragama di Indonesia, khususnya umat Islam dan umat Kristen jelas terlihat sebenarnya manakah yang terutama harus dimajukan dalam dialog, yakni ke arah menghadapi musuh bersama, menangani masalah-masalah sosial, ekonomis, dan politis, yang paling tampak dalam kemiskinan dan penderitaan rakyat.

Menentukan musuh bersama tentu saja memerlukan suatu kriteria. Musuh bersama pertama-tama adalah apa yang menyebabkan rakyat miskin dan menderita, dan yang paling utama adalah ketidakadilan sosial. *Jadi yang menjadi lawan adalah apa, dan baru kemudian siapa yang menggerakkan apa (ketidakadilan) itu*. Secara positif kriterianya adalah rakyat yang lebih sejahtera, yang penderitaannya dihapuskan atau setidaknya dikurangi. Secara negatif kriteriumnya adalah menolak ketidakadilan beserta kuasa manapun di balik ketidakadilan itu. Tidak mengherankan jika Ali Syari'ati (1984) dan teolog-teolog pembebasan Kristiani (di Asia misalnya A. Pieris, 1988) mempunyai pernyataan serupa mengenai Tuhan yang bersama dengan orang-orang

miskin dan tertindas.

Dialog mengenai agama tentulah berguna dan banyak maknanya bagi kehidupan iman. Namun dialog umat beragama mengenai masalah-masalah bersama demi mentransformasikan kehidupan bersama yang lebih baik adalah lebih mendesak dan lebih terasa hasilnya. Bahkan tanpa orientasi demi transformasi sosial itu, dialog tetap mengambang.

Tiga Poros Kekuasaan

Dalam medan kehidupan kita bersama terdapat tiga poros kekuasaan yang memainkan peranan menentukan, yakni komunitas, pasar, dan negara. *Komunitas* menunjuk pada hubungan dan kegiatan spontan dari para warga masyarakat tanpa ciri transaksi atau administrasi. Kerekatan antar warga menentukan hidup komunitas. Komunitas dapat terbentuk atas dasar sejarah, daerah, suku, ras, agama, atau bahasa yang sama. Kemudian *pasar* menunjuk transaksi ekonomis antara penjual dan pembeli yang dijalankan secara sukarela sesuai dengan barang dan jasa yang ada. Untung-rugi dan efisiensi ekonomis merupakan motif yang mendorong bergeraknya pasar. Sedangkan *negara* secara konkret berarti tindakan-tindakan melalui badan-badan publik. Ia bertanggungjawab bagi terwujudnya tatanan kehidupan publik demi kesejahteraan bersama. Negara juga mempunyai kuasa untuk mengatur tatanan sosial.

Pada setiap poros terdapat pelaku-pelaku utama seperti bupati, gubernur di poros negara; para investor, para industrialis, para pengusaha di poros pasar; para petani di poros komunitas. Meski demikian kita semua ikut bersentuhan dengan tiga poros kekuasaan itu. Kalau kita berbelanja, kita

berada dalam poros pasar. Kita memasuki poros negara ketika kita mengurus KTP, kartu keluarga, dan dokumen-dokumen lain yang menyangkut pribadi kita. Jika kita berada di desa, bersama-sama mengambil inisiatif untuk mengembangkan pertanian organik, atau di kampung untuk membersihkan kampung menjelang peringatan kemerdekaan 17 Agustus, kita masuk daalm poros komunitas. Hubungan ketiga poros bidang dan kekuasaan itu memengaruhi wujud kehidupan bersama, termasuk memengaruhi kenyataan dialog antaragama. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui peran tiga poros kekuasaan itu dalam ranah publik (*public domain, public realm, public space,* ruang publik), di mana ketiga poros kekuasaan itu memainkan peranan penting. Dialog antar umat beragama merupakan salah satu ciri ranah publik dari masyarakat yang beradab dan manusiawi. Masyarakat yang tidak mampu berdialog merupakan masyarakat yang kurang beradab.

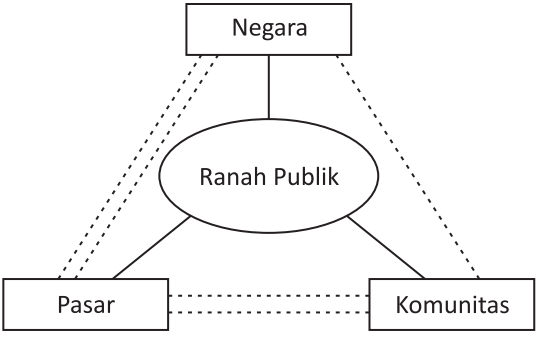

Ilustrasi 1
Hubungan Tiga Poros Kekuasaan dengan Ranah Publik[1]

Ranah publik merupakan aset dan barang-barang kolektif,[2] yang terbuka dan dapat diakses oleh rakyat. Rakyat dapat saling berbagi menggunakan aset itu bersama. Cakupan ranah publik meliputi ruang dan tempat-tempat umum; pelayanan-pelayanan umum seperti kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja. Ranah publik menyangkut juga berbagi kepentingan kultural, sosial, dan politis beserta kesejahteraan komunitas. Semua aset dan barang-barang ranah publik merupakan milik umum dan tidak dapat dijual. Hal yang sentral dalam konsepsi ranah publik adalah nilai-nilai kewargaan, persamaan, pelayanan, dan kepentingan umum, yang dibedakan dari nilai-nilai yang disebut kepentingan pribadi.[3] Nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan kalau ada kesadaran akan kehidupan bersama, kepekaan untuk berbagi kehidupan, dan kepekaan terhadap hak dan kepentingan sesama atas fasilitas-fasilitas umum. Dengan kata lain dituntut adanya penghayatan hidup bersama sebagai *Kami*.

Paradigma *Kami* dapat dikategorikan pada paradigma holistik. Dalam paradigma holistik itu keutamaan dasariah adalah partisipasi dan rasa bagi keseluruhan. Oleh karena itu, bagian dari keseluruhan yang paling menderita akan mendapat perhatian khusus. Rakyat miskin dan lemah akan didahulukan. Banyak diskusi mengenai demokrasi menekankan kuasa pada rakyat dan terasa bernada sosial, akan tetapi seringkali tidak memberi perhatian pada rakyat miskin dan lemah. Akibatnya kaum miskin dan lemah tetap saja terpinggirkan dan ranah publik menjadi ranah bagi yang berkuasa dan yang kaya.

Untuk mencapai ranah publik yang terjangkau oleh kaum miskin diperlukan komunikasi antar ketiga poros itu secara terbuka dengan partisipasi dari kaum miskin dan le-

mah. Idealnya adalah bahwa di antara tiga poros kekuasaan itu terjalin komunikasi yang terbuka dan bersama-sama membangun ranah publik yang semakin baik. Dengan demikian masyarakat demokratis yang deliberatif diwujudkan. Masalahnya muncul ketika kekuasaan tidak berfungsi semestinya, malahan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Ketika perusahaan-perusahaan besar berkolusi dengan badan publik pemerintah dan menggunakan topeng agama, agama ikut melalaikan kemaslahatan masyarakat, terutama yang paling miskin. Satu komunitas (dengan atau tanpa atas nama agama) juga bisa bertindak dengan menggunakan kekerasan terhadap komunitas lain dan dengan demikian mengabaikan poros kuasa badan publik. Negara seharusnya menjaga kepentingan umum dan tidak membiarkan komunitas main kekerasan tanpa kontrol negara. Semakin agama tenggelam dalam urusan konflik dengan agama lain, semakin hilang pula orientasi agama pada kaum miskin dan lemah.

Ketidakadilan yang ditanggung oleh kaum miskin berkaitan erat dengan ketidakadilan gender, ketidakadilan ekologis, dan perendahan martabat serta hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, solidaritas agama-agama terhadap kaum miskin dan terlantar harus sekaligus memperhatikan perspektif perempuan, lingkungan hidup, dan hak-hak asasi manusia. Ada pendapat yang menyatakan bahwa *the most critical religious problem is intra islamic religion*. Sehubungan dengan masalah itu HAM merupakan tuntutan asasi yang harus diperhatikan oleh Negara.

Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri yang menjadi narasumber penelitian ini barangkali juga perlu meninjau lagi orientasi geraknya sebagai bagian dari

pemerintah yang bertanggungjawab atas tata sosial yang memperjuangkan kepentingan umum rakyat. Sejauh kami dengar, Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri sebagai bagian dari Pemerintah tidak mempunyai wacana yang mengedepankan hak asasi manusia, yang merupakan nilai mendasar dalam ranah publik.

Diplomasi publik belum berisi ranah publik yang mendahulukan rakyat yang miskin dan menderita. Kementerian Luar Negeri kiranya juga perlu menekankan kepentingaan kaum miskin di Indonesia dan keadilan bagi semua orang daripada mengikuti bahasa diplomasi Amerika yang melancarkan perang terhadap terorisme. Perlu ditinjau lagi kebijakan luar negeri manakah yang merugikan kaum miskin di Indonesia dan di Dunia Ketiga pada umumnya? Sikap *empowering the poor* kiranya akan lebih membawa kemaslahatan masyarakat Indonesia dibandingkan *empowering the moderates*.

Selayaknya Kementerian Agama sebagai bagian dari Pemerintah juga memfasilitasi hubungan antarumat beragama terkait transformasi ranah publik yang memajukan kaum miskin dan menderita. Depag perlu memfasilitasi dialog antarumat beragama, tidak hanya mengenai agama, melainkan juga mengenai masalah-masalah sosial yang bersama-sama dihadapai kaum beragama. Fungsi Depag bukanlah fungsi ulama, melainkan fungsi pemerintah yang memajukan kesejahteraan umum dengan menjamin hak-hak asasi manusia.

LSM yang baik dapat berfungsi dalam gerakan *civil society*, dalam arti gerakan yang bersikap kritis terhadap tiga poros kekuasaan itu sehingga masing-masing kekuasaan menjalankan fungsinya secara lebih baik. Fungsi kritis itu dapat

dijalankan dalam kerjasama dengan siapa pun yang mempunyai orientasi kritis bersama. Partisipasi dari sebanyak mungkin warga sangatlah penting agar solidaritas demi kemaslahatan hidup bersama itu bergulir semakin luas dan semakin kuat.

Sejalan dengan itu selayaknya inisiatif-inisiatif yang sudah muncul dari bawah tidak digantikan dengan lembaga-lembaga yang dibentuk dari atas demi keseragaman birokrasi Kementerian Agama. Partisipasi kaum muda dan kaum perempuan akan banyak memengaruhi wujud kerukunan umat beragama dan masa depan masyarakat Indonesia umumnya. Kegiatan *camping* lintas agama telah membantu banyak kaum muda untuk belajar berkomunikasi dengan secara lebih mendalam. Komunikasi semacam itu mengantar mereka untuk semakin menyadari makna tradisi agama lain. Dengan demikian kaum muda juga belajar gaya hidup demokratis dengan penghargaan terhadap kewajiban dan hak asasi semua orang dalam partisipasi yang sesungguhnya.

Kaum perempuan melalui banyak aksi lintas agama telah memberi kesaksian mengenai nilai yang menentukan dalam kehidupan bersama, yakni kesetiakawanan sosial terhadap saudara-saudari yang menderita. Kaum perempuan lintas agama menjadi kawan bagi korban perang juga korban gempa. Di tengah bencana alam dan bencana sosial, solidaritas sosial telah berhasil memecah batas-batas agama dan membangun persaudaraan semua orang.[4]

Realitas yang terjadi ialah dialog antarumat beragama dimajukan tidak hanya oleh lembaga-lembaga atau usaha kelompok, melainkan juga oleh para aktor, seperti Mukti Ali, Abdurrahman Wahid, Sumartana, Mangunwijaya, dan

banyak aktor dalam masyarakat. Para aktor itu mempunyai karisma masing-masing dan atas dasar karisma pribadi itu gerakan dialog bergulir dalam berbagai dataran. Tentu ada pula para aktor negatif. Mereka itu adalah kelompok-kelompok anti dialog dan oleh karenanya juga anti demokrasi dan anti HAM. Sebab, inti demokrasi mengandaikan dialog dan HAM mengandaikan penghargaan terhadap martabat pribadi lain yang harus didengarkan melalui dialog.

Selanjutnya *opini public* yang sehat mengenai hubungan antaragama akan sangat dibantu oleh peran media komunikasi yang bertanggung jawab. Sebaliknya, media yang mencari popularitas dengan meninggalkan etika akan sangat merugikan hubungan umat antar agama maupun kesejahteraan masyarakat umumnya.

Pluralisme atau Simbiosis

Dialog antarumat beragama tidaklah mungkin menghindar dari sikap terhadap pluralisme. Entah bagaimana pluralisme itu dimengerti, umat beragama dihadapkan pada realitas religius yang plural. Pluralisme menyangkut pengakuan akan adanya pluralitas tersebut, dan lebih dari itu adalah penerimaan terhadap yang lain—syukurlah kalau bisa menimba nilai-nilai positif dari agama lain dan mengkomunikasikan nilai-nilai positif dari agama sendiri. Pluralisme dalam pengertian itu menolak pandangan bahwa semua agama sama saja. Masing-masing agama mempunyai sejarah dan maknanya sendiri, dan justru karena itu dapat saling memperkaya.

Kenyataan yang plural menyentuh kehidupan bersama dalam berbagai segi, tidak hanya menyentuh kehidupan

agama. Pluralisme tidak hanya menyangkut agama. Diana Eck, misalnya, menyebut setidaknya ada tiga arena wacana pluralisme, yakni (a) arena intelektual untuk riset akademik; (b) arena kewarganegaraan (*civic*) dalam kehidupan publik; dan (c) arena teologis komunitas-komunitas agama. Masing-masing arena memiliki bahasanya sendiri. Kesalahan yang kerap terjadi adalah pengacauan satu arena dengan arena lainnya, khususnya antara arena *civic* dengan arena teologis. Kita dapat bertanya, tidakkah diskusi sekitar kasus Ahmadiyah mengandung pencampuran unsur-unsur *civic* dan teologis?

Para pengkaji agama biasanya bergerak dalam tiga arena itu. Perlu untuk melokalisir dalam arena mana kita berbicara, jika tidak, maka komunikasi dan tindakan dalam kehidupan bersama akan sulit dipahami. Dengan kesadaran akan arena tertentu yang dipercakapkan, komunikasi dan seluruh gerak dalam masyarakat akan lebih mudah dimengerti dan juga mendapat dukungan sepantasnya. Betapapun ketiga arena itu berbeda, namun tetap mengandung kesatuan, yakni bahwa ketiganya mengandaikan penghargaan terhadap yang lain. Penghargaan itu akan nyata dalam keterbukaan untuk mendengarkan dan untuk merespons, dengan kata lain keterbukaan untuk berdialog. Antidialog berarti antidemokrasi dan anti-HAM.

Yang diharapkan berkembang dalam kehidupan umat beragama bukanlah sinkretisme atau *campuran agama, semacam cocktail yang mengubah harumnya masing-masing unsur di bawah pengaruh unsur-unsur lain*, bukan pula sintesis yang merusak jatidiri masing-masing agama. Hal yang diharapkan adalah tumbuhnya simbiosis antar umat beragama. *Setiap agama (ditantang oleh pendekatan khas dari*

agama lain terhadap harapan orang miskin akan pembebasan ...) menemukan dan membarui diri sendiri dalam kekhasannya sebagai jawaban terhadap pendekatan agama-agama lain.[5]

Perkembangan Baru Studi Agama-Agama: *Interreligious Studies*

Perkembangan studi agama sampai sekarang ini sekurang-kurangnya dapat digambarkan dengan tiga model, yakni (1) *comparative studies of religion;* (2) *religious studies;* dan (3) *interreligious studies*.[6] Sebagaimana dalam proses evolusi, perkembangan studi pada tahap berikutnya membawa hal-hal berguna yang sudah ada pada tahap sebelumnya. Begitulah *interreligious studies* sebagai perkembangan akhir dari studi agama-agama membawa unsur dari *religious studies* dalam hal berusaha mengungkap kenyataan agama apa adanya, sebagai sejarah agama tertentu (*history of religion*) atau fenomena agama tertentu (*phenomenology of religion*). Unsur dari *comparative studies of religion* yang dibawa adalah usaha membandingkan dan menilai kenyataan-kenyataan agama. Unsur baru dalam *interreligious studies* menegaskan kenyataan yang makin lama makin disadari, yakni bahwa studi agama-agama merupakan komunikasi berbagai subjek yang terlibat dan yang bertemu dalam pengalaman, interpretasi, maupun pemahaman religius.

Interreligious studies menghadapi masalah-masalah esensialisme dan objektivisme, sekaligus masalah relativisme dan subjektivisme dengan gaya naratif kontekstual. Namun tidak berhenti di situ, langkah tersebut dilanjutkan dengan analisis yang tidak bebas nilai yaitu dalam keterlibatan dan

keterbukaan. Premis nilai yang terkandung dalam *interreligious study* adalah *komitmen* dan *keterbukaan*. Penelitian macam itu menyadari benar apa yang secara epistemologis dikemukakan oleh para feminis, bahwa pengetahuan (*the known*) sangat erat behubungan dengan yang mengetahui (*the knower*) dan proses untuk mencapai pengetahuan itu (*the process of coming to know*).

Cara kerja *interreligious studies* menempuh jalan lintas ilmu, dimana realita sosial, ilmu sosial, filsafat, dan teologi berhubungan satu sama lain sebagai gejala kultural, dan *interreligious studies* merupakan aktivitas penilitian kultural religius yang tidak bebas nilai. Dalam studi yang bercorak komunikatif itu ditemukan nilai-nilai yang *tumpang-tindih* antara agama yang satu dengan agama yang lain. Studi demikian akan menghasilkan buah yang bermanfaat bagi siapa saja yang terbuka untuk memasuki komunikasi itu secara jujur dan membiarkan diri untuk diperbaharui secara ilmiah yang tidak pernah bebas nilai.

Perkembangan epistemologis berjalan bersama dengan perkembangan teologis. Teologi tidak hanya dijalankan sebagai perspektif iman saya terhadap realita yang saya hadapi, melainkan juga perspektif saya yang masuk ke dalam dan diperkaya oleh perspektif iman lain begitu rupa sehingga apa yang biasa disebut iman lain itu ternyata juga merupakan hal yang saya imani dan masuk dalam perspektif iman saya. Itulah *interreligious theology*. Orang tetap berada dalam agama sendiri tetapi telah mengalami pembaruan melalui perjumpaan dengan agama dan iman lain secara mendalam.

Interreligious studies mengandung kesadaran mengenai terbatasnya studi kontekstual yang dijalankan maupun ke-

nyataan yang diteliti. Kesadaran akan konteks termasuk dalam kesadaran akan sejarah dalam setiap studi. Penalaran-penalaran spekulatif yang baik menjadi kurang bermakna kalau tidak dihubungkan dengan kenyataan historis. Perkembangan karya ilmiah religius sekarang ini sangat memperlakukan unsur historis itu secara serius bahkan secara radikal (mengakar). Akar sejarah agama tidak bisa dikesampingkan dalam *interreligious studies*. Ortodoksi suatu ajaran pun perlu dilihat dalam hubungan dengan akar sejarahnya.

Studi agama akan berhubungan dengan kata-kata, gambar-gambar yang partikular. Meski demikian, orang yang terlibat dalam komunikasi yang terbuka dapat saling berjumpa, dan di situ ditemukan analogi-analogi antara pengalaman dan gambarnya sendiri dengan pengalaman dan gambar orang lain. Dengan pengalaman dan pemahaman seperti itu *interreligious studies* harus memasuki kerendahan hati ilmiah. Semua yang dapat dicapai adalah terbatas, dan semua dapat belajar dari semua. Dalam saling belajar itulah orang beragama semakin menghayati agamanya secara lebih mendalam.

Konteks kemajemukan dan intensnya komunikasi melalui pelbagai media komunikasi sekarang ini secara luar biasa memasukkan orang atau kelompok dalam macam-macam relasi. Hal itu menumbuhkan kesadaran baru pula bahwa identitas semakin dilihat tidak terlepas dari relasi. Saya menggambarkan identitas saya dalam relasi dengan yang lain. Gambaran identitas saya sebagai orang Kristiani berhubungan dengan bagaimana saya berelasi dengan saudara-saudari yang beriman dan beragama lain. Relasi dengan yang lain itu termasuk bagian dari identitas saya. Orang

atau komunitas yang terlepas dari relasi menjadi orang atau komunitas yang mengisolasikan dan memarginalkan diri. Suatu klub tertutup dengan label Kristiani tidak dapat disebut sebagai Komunitas Iman Kristiani. Begitu pula untuk iman dan agama lain. Itulah makna *to be religious today is to be interreligious,* yang secara akademis dapat diperkembangkan dalam *interreligious studies*. Studi agama perlu ditinjau kembali dan diperkembangkan. Begitu pula kelompok-kelompok lintas agama perlu terus-menerus diperluas dan diperkembangkan. Menulis mengenai suatu agama tanpa cakrawala perjumpaan dengan agama lain akan menjadi seperti hidup dalam dunia lain yang tidak dihuni manusia.

Selayaknya dalam rangka studi agama-agama, diperkembangkan model penelitian dalam kategori *interreligious studies*. Apa yang sudah dijalankan secara akademis mengenai *Intertextual reading of the sacred texts*, begitu pula kuliah agama di mana para mahasiswa mendapatkan pengantar mengenai semua agama yang disampaikan oleh narasumber primer, telah memperlihatkan bahwa orientasi ilmu agama dalam paradigma baru tersebut sudah bergulir di Indonesia. []

Catatan-Catatan

1 Apa Itu Dialog?

1 *It was only in 1969 that a dialogue between Muslims and Christians has been started. The initiative came from myself, and after discussing the matter with my Christian friends the consultation has taken place. On November 1969 the first meeting was held in a Catholic College, attended by a Muslims (myself), two Catholics and three Protestants. ... At the second meeting in December, I have given a talk – not exactly reading a scholarly paper – on 'My opinion about the Vatican towards non-Christians, e.g. the Jews, the Muslims and others, the position of the pope, etc*. Mukti Ali, "Dialogue Between Muslims and Christians in Indonesia and Its Problems" makalah disampaikan pada Sidang Dewan Gereja Sedunia, Lebanon, 1970, 79.

2 Olaf H. Schumann, *Dialog Antarumat Beragama: Membuka Babak Baru dalam Hubungan Antarumat Beragama, Sebuah Dokumentasi* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 448-458.

3 Mukti Ali, "Dialogue Between Muslims and Christians in Indonesia and Its Problems" dalam *Dialog Antaragama*", 79.

4 *Dialogue begins when people meet. Dialogue depends upon mutual understanding and mutual trust. Dialogue makes it possible to share in service. Dialogue becomes the medium of authentic witness.*

5 Pradjarta DS, Quarles van Ufford, Philip & Singgih Nugroho, 'Orang Kristen dan Islam Hidup Rukun di Sini: Agama dan Politik di Sebuah Desa di Jawa', *Renai* II 3-4, July-October 2002, 115-126.

6 Raimundo Panikkar, *Intrareligious Dialogue* (New York: Paulist Press, 1999); Leonard Swidler dan Paul Mojzes, *The Study of Religion in An Age of Global Dialogue* (Philadelphia: Temple University Press, 2000).

7 HOPE (House of Prayer for Everyone) bekerjasama dengan Forum Lintas Agama Banjarmasin et al, *A Common Word* (Australia: Halal Books, 2008), 28.

2 Dialog dalam Sejarah

1 Gregory A. Schissel, 'The Quest for Common Ground: The Roman Catholic Church and Islam after the Second Vatican Council', *Disertasi Doktor* (Harvard University, 1998), 59-62.

2 '*The plan of salvation also includes those who acknowledge the Creator. In the first place among these are the Mohamedans, who, professing to hold the faith of Abraham, along with us adore the one and merciful God, who on the last day will judge mankind*'. Lihat Konstitusi Dogmatis 'Lumen Gentium' tentang Gereja" dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*, terj. R. Hardawiryana, S.J. (Jakarta: Yayasan Obor, 1993), 87.

3 "Pernyataan 'Nostra Aetate' tentang Hubungan gereja dengan Agama-agama Bukan Kristen" dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*, 311-312. Terjemahan yang diambil dari http://katolisitas.org/dokumen-gereja/vatican-ii/dekrit-tentang-ekumenisme/ (akses 10 Juli 2010), sebagai berikut:

The Church regards with esteem also the Moslems. They adore the one God, living and subsisting in Himself; merciful and all-powerful, the Creator of heaven and earth, who has spoken to men; they take pains to submit wholeheartedly to even His inscrutable decrees, just as Abraham, with whom the faith of Islam takes pleasure in linking itself, submitted to God. Though they do not acknowledge Jesus as God, they revere Him as a prophet. They also honor Mary, His virgin Mother; at times they even call on her with devotion. In addition, they await the day of judgment when God will render their deserts to all those who have been raised up from the dead. Finally, they value the

moral life and worship God especially through prayer, almsgiving and fasting.

4 Ataullah Siddiqui, *Christian-Muslim Dialogue in the Twentieth Century* (London: Macmillan Press Ltd, 1997), 34.

5 G. Anawati, 'Christian-Islamic Dialogue', dalam *The Vatican, Islam, and the Middle East*, ed. Kail C. Ellis (Syracuse: Syracuse University Press, 1987), 51-68. Lihat juga kritik Siddiqui atas keengganan Konsili untuk menerima pewahyuan Al-Qur'an dan kenabian Muhammad dalam Siddiqui, *Christian–Muslim Dialogue*, 37–39.

6 Schissel, 'The Quest for Common Ground', 72. Agama Kristen tidak menganggap dirinya sebagai satu-satunya agama yang ada di dunia ini karena dalam kenyataannya banyak terdapat agama lain. Namun, persoalannya adalah bagaimana agama Kristen menerima agama-agama lain tersebut sebagai agama yang valid dan benar di sisi Tuhan.

7 Dikutip dalam Schissel, 'The Quest for Common Ground', 114. Cetak miring asli dari buku tersebut.

8 John Paul II, *Crossing the Threshold of Hope*, terj. Jenny and Martha McPhee (New York: Alfred A. Knopf Publisher, 1994), 91.

9 John Paul II, *Crossing the Threshold of Hope*, 93.

10 Mengenai organisasi ini secara lengkap dapat dilihat dalam Schissel, 'The Quest for Common Ground', 138-196.

11 Secretariatus Pro Non-Christianis, *Guidelines for a Dialogue between Muslims and Christians* (Rome: Secretariat for Non-Christians, 1969).

12 Leonard Swidler, "Trialogue," in Leonard Swidler, Khalid Duran, and Reuven Firestone, *Trialogue: Jews, Christians, and Muslims in Dialogue* (New London: Twenty-Third Publications, 2007), 39.

13 Pertemuan pertama terjadi pada tahun 1867. Informasi mengenai Anglican Communion dapat diperoleh dalam http://www.anglicancommunion.org (Akses 3 Juli 2010). Sedangkan informasi tentang Konferensi Lambeth dapat diakses di http://www.lambethconference.org/resolutions/1968/ (Akses 3 Juli 2010)

14 Lihat http://nifcon.anglicancommunion.org/digest/index.cfm (Akses 3 Juli 2010).

15 Informasi ini diambil dari buku Siddiqui, *Christian-Muslim Dialogue*, 173-189. Dia telah melakukan studi intensif tentang hal ini sehingga

mampu mendapatkan beberapa informasi yang tidak tersedia dalam bentuk cetakan.

16 '*To be a Muslim is to be a peace maker, one who constantly seeks to mitigate conflicts and nurtures goodwill for peaceful co-existence. God wants us to live in peace and harmony with his creation'.* http://www.foundationforpluralism.com/WorldMuslimCongress/Articles/Mission-Statement.asp (Akses 3 Juli 2010).

17 Lihat http://www.muslimworldleague.org/mwlwbsite_eng/index.htm (Akses 3 Juli 2010).

18 Informasi tentang organisasi ini dapat dilihat di http://www.religionsforpeace.org/about/ (Akses 3 Juli 2010)

19 Lihat juga, Michael H. Taylor, 'The Role of Religion in Society', in *Christians and Muslims in the Commonwealth*, eds. Anthony O'Mahony dan Ataullah Siddiqui (London: Altajir World of Islam Trust, 2001), 51.

20 Lihat Raja Abdullah bin Abdul Aziz, "Sambutan Konferensi Dunia tentang Dialog," http://www.commongroundnews.org/article.php?id=23586&lan=ba&sid=1&sp=0 (Akses 3 Juli 2010).

21 Jude Townend, "Agama 2.0: Dialog Bagi Publik," http://www.commongroundnews.org/article.php?id=23585&lan=ba&sid=1&sp=0 (Akses 3 Juli 2010).

22 Lihat http://www.unaoc.org/content/view/86/122/lang,english/ (Akses 4 Juli 2010)

23 Lihat http://www.interculturaldialogue2008.eu/406.0.html?&redirect_url=my-startpage-eyid.html (Akses 4 Juli 2010)

24 Mujiburrahman, *Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia's New Order* (Leiden: Amsterdam University Press, 2006), 28-29.

25 'The Incident of Makassar on October 1, 1967: Attempts to Repair the Crack in the Indonesian Image of Tolerance?' *Review of Indonesian and Malayan Affairs* 1, no. 4 (Desember 1967): 20. Lihat juga, *Pandji Masjarakat*, Oktober 1967, 25

26 *Djakarta Times*, 16/10/1967 dan 19/10/1967, sebagaimana dikutip dalam *Review of Indonesian and Malayan Affairs* 1, no. 4 (Desember 1967), 25, 29.

27 'The Incident of Makassar on October 1, 1967', 28.

28 Sudjangi, *Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama: 50 Tahun*

Kemerdekaan Republik Indonesia (Jakarta: Departemen Agama RI, 1995/1996), 43-52.

29 Sudjangi, *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan*, 102–105.

30 Sunardi, "The Dead End of Religious Dialogue in Indonesia," *Interface*, No. 4 (May 2001), 56.

31 Mukti Ali, "Dialogue Between Muslims and Christians in Indonesia and Its Problems" dalam *Dialog Antaragama* (Yogyakarta: Jajasan Nida, 1970), 43. Pada tahun 1970, Mukti Ali juga menyampaikan makalah ini di Ajaltoun, Lebanon, dalam Sidang Dewan Gereja Sedunia di mana beliau secara tegas mengatakan bahwa baru pada tahun 1969 lah dialog antarumat Muslim dan Kristiani dimulai atas inisiatif beliau sendiri. Lihat "Dialogue Between Muslims and Christians in Indonesia and Its Problems," makalah disampaikan pada Sidang Dewan Gereja Sedunia, Lebanon, 1970, 79.

32 Ali Munhanif, 'Islam and the Struggle for Religious Pluralism in Indonesia; A Political Reading of the Religious Thought of Mukti Ali', *Studia Islamika* 3, no. 1, 1996, 108.

33 Djohan Effendi, 'Dialog Antar-Agama: Bisakah Melahirkan Teologi Kerukunan?' dalam *Agama dan Tantangan Zaman: Pilihan Artikel Prisma 1975–1984* (Jakarta: LP3ES, 1985), 174. Tentang kegiatan Kementerian Agama yang lain pada periode ini lihat juga halaman 168-174 buku yang sama.

34 Karel Steenbrink, "Patterns of Muslim-Christian Dialogue in Indonesia (1965-1998)" in Jacques Waardenburg (ed.), *Muslim-Christian Perceptions of Dialogue Today: Experiences and Expectations* (Leuven: Peeters, 2000), 89.

35 Mukti Ali, "Dialogue Between Muslims and Christians in Indonesia and Its Problems" makalah disampaikan pada Sidang Dewan Gereja Sedunia, Lebanon, 1970, 79.

36 SK No. 70/1978 adalah tentang pedoman penyiaran agama. Di antara hal penting dari SK ini adalah larangan untuk menyiarkan agama bagi masyarakat yang sudah memeluk agama tertentu. Selain itu, SK No. 70/1978 juga melarang penyiaran agama melalui distribusi pamflet, buletin, majalah dan buku atau dengan cara mendatangi rumah-rumah penduduk di tempat mana masyarakat sudah memeluk suatu agama tertentu. Namun hal ini tidak berarti bahwa penyiaran agama

dilarang sama sekali. SK No. 1/ 1979 tentang pedoman bagi penyiaran agama dan bantuan luar negeri bagi institusi keagamaan hanya merupakan penjelasan lebih rinci atas SK 70/1978 and SK /77/1978.

37 Sudjangi, *Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, 149-154.

38 Program dan aktivitas yang dijalankannya mencakup berbagai pertemuan antara pemimpin agama, kerjasama dalam kehidupan sehari-hari, dan berbagai penerbitan. Isu-isu tentang pengembangan ekonomi dan lingkungan dianggap sebagai isu penting yang dapat menyatukan masyarakat beragama. Karel Steenbrink, 'Muslim–Christian Relations dalam the *Pancasila* State of Indonesia', *Muslim World* 88, no. 3-4 (July-October, 1998), 332.

39 Sudjangi, *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan*, 118-122.

40 Sebagai contoh, dalam menanggapi kasus yang terjadi di Santa Cruz, Dili pada tanggal 12 November 1991 di mana tentara Indonesia menembak sekitar 271 warga, lembaga tersebut mengeluarkan pernyataan keprihatinan dan menyatakan bahwa hal tersebut tidak memiliki kaitan dengan masalah agama. Sudjangi, *Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, 131-133.

41 Mujiburrahman, *Feeling Threatened*, 274.

42 Tarmizi Taher, *Aspiring for the Middle Path: Religious Harmony in Indonesia* (Jakarta: CENSIS, 1997). Pada kementeriannya ia mengeluarkan beberapa aturan tentang hubungan antarumat beragama. Sebagai contoh, SK Menteri Agama No. 84, 1996 tentang petunjuk pelaksanaan penaggulangan kerawanan kerukunan hidup umat beragama, menyebutkan berbagai jenis kegiatan keagamaan yang dapat menimbulkan ketegangan antara umat beragama. Di antara hal penting yang disebutkan termasuk pembangunan rumah ibadat dalam lingkungan masyarakat agama yang berbeda, penyiaran agama kepada masyarakat yang telah memeluk agama tertentu, perkawinan beda agama, dan perayaan keagamaan yang kurang mempertimbangkan masyarakat di sekitarnya. Lihat, Sudjangi, *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan*, 176-190.

43 Maftuh Basuni, "Sambutan Menteri Agama RI," dalam *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006* (Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI, 2006), 2-3.

44 Maftuh Basuni, "Sambutan Menteri Agama RI," 10-11.

45 Wawancara dengan Abdul Fatah (Kepala PKUB) di Jakarta pada 11 Juli 2008.

46 Th. Sumartana, "Sejarah Singkat, Visi dan Misi Institut DIAN/Interfidei, *Interfidei Newsletter*, Edisi Khusus 2001, 5.

47 Th. Sumartana, "Sejarah Singkat, Visi dan Misi Institut DIAN/Interfidei, 3-4.

48 Sunardi, "The Dead End of Religious Dialogue in Indonesia," 57.

49 Th. Sumartana, "Sejarah Singkat, Visi dan Misi Institut DIAN/Interfidei, 3-4.

50 Pada lima tahun pertama, lembaga ini lebih banyak berkutat di seputar wacana dan konsep teoretis tentang dialog agama-agama. Meskipun wacana masih menjadi fokusnya, namun kemudian Interfidei mengembangkan kegiatan-kegiatan yang lebih emansipatif secara langsung di masyarakat melalui program-programnya yang tersebar luas di daerah-daerah lain. Pada tingkat tertentu, kegiatan Interfidei di beberapa daerah di luar Jawa menginspirasi para pegiat dialog antarumat beragama untuk membangun lembaga sejenis. *Focused Group Discussion* CRCS UGM, Yogyakarta, 28 Januari 2008.

51 MADIA terbuka bagi masyarakat dari latar belakang agama atau spiritualitas apa pun. Di antara tokoh Muslim yang terlibat termasuk Budhy Munawar-Rachman, Djohan Effendi, Komaruddin Hidayat, dan Ulil Abshar-Abdalla. Di antara tokoh Katolik yang menjadi anggota adalah Romo Ignatius Ismartono, sedangkan dari Protestan adalah Martin Lukito Sinaga. Satu hal yang menarik untuk dicatat dari MADIA adalah: doa untuk pembukaan dan penutup pertemuan yang mereka adakan akan dilakukan sesuai dengan agama atau keyakinan tuan rumah tempat pertemuan tersebut diadakan. Diskusi tentang MADIA ini diambil dari leaflet yang dipublikasikan oleh MADIA, *An Experiment Named MADIA* (Jakarta: Sekretariat MADIA, tanpa tahun).

52 Sunardi, "The Dead End of Religious Dialogue in Indonesia," 57. Sunardi mengatakan bahwa tokoh-tokoh MADIA, sebagaimana juga Interfidei, pada tahun 1980-an adalah mereka yang tertarik pada ide-ide "Teologi Pembebasan" yang diusung oleh pakar pedagogi seperti Paulo Freire dan Dom Helder Camara.

53 *Focused Group Discussion* (FGD), CRCS UGM, Yogyakarta, 28 Januari 2008.

54 Paramadina mengadakan berbagai kursus (yang dikemas dalam Klub Kajian Agama) termasuk Qur'an, mistisisme Islam, serta Islam dan problema masyarakat modern sehingga para peserta dapat memahami berbagai pendapat dalam Islam dan mengembangkan pemahaman terhadap umat selain Islam. Selain itu Paramadina mengadakan diskusi bulanan, menerbitkan jurnal dan berbagai buku yang sejalan dengan penyebaran visi Islam yang toleran. Paramadina bekerjasama dengan Yayasan Pondok Mulya juga mendirikan universitas pada tahun 1998. Paramadina, *Pandangan Dasar Yayasan Wakaf Paramadina* (Jakarta, tanpa tahun).

55 Wawancara via email dengan Jacky Manuputty, tanggal 17 Mei 2008.

56 J.W.M. Bakker, *Piagam 'Nostra Aetate' Konsili Vatikan II: Tafsiran Zaman Kita, Zaman Dialog Antar-Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1972), 102. Lihat juga Mujiburrahman, *Feeling Threatened*, 252.

57 Saiful Muzani, "Di Balik Polemik 'Anti-Pembaruan' Islam: Memahami Gejala 'Fundamentalisme' Islam di Indonesia," *Islamika*, No. 1 (Juli-September 1993), 135-137.

58 Karel A. Steenbrink, "The Study of Comparative Religion by Indonesian Muslims: A Survey," *Numen*, 37 (1990), 158 dan 154.

3 Praktik Dialog Antarumat Beragama di Kementerian Agama

1 Moch. Qasim Mathar dan Idris Thaha, "Departemen Agama (Kemenag)" dalam Nina M. Armando, et al (ed), *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005, vol. II), 99-104.

2 Moch. Qasim Mathar dan Idris Thaha, "Departemen Agama (Kemenag)," 99.

3 UU PPN No 25. 2000 digariskan program pembangunan bidang keagamaan, antara lain: 1). program peningkatan pelayanan kehidupan beragama; 2). program peningkatan pemahaman dan pengamalan agama dan kerukunan umat beragama; 3). program peningkatan kualitas pendidikan agama; 4). program pembinaan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan (lihat Atho Mudzhar dalam Muhaimain A.G., *Damai di Dunia Damai untuk Semua Perspektif Berbagai Agama* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, Balitbang dan Diklat Kemenag R1, 2006), 21.

4 Bahtiar Effendy dan Ali Munhanif, "Indonesia Pascakemerdekaan",

Taufik Abdullah et al (ed), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2002. vol. V), 431-455.

5 Ali Munhanif, "Prof. Dr. A. Mukti Ali: Modernisasi Politik Keagamaan Order Baru" dalam Azyumardi Azra and Saiful Umam (ed), *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik* (Jakarta: INIS, PPIM and Litbang Kemenag, 1998), 271-319.

6 Majelis-majelis agama yang dimaksud adalah: MUI, PGI, KWI, PARISADA, dan WALUBI (lihat Sudjangi, *Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama: 50 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1995/1996), 89.

7 Sudjangi, *Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama,* 90

8 Sudjangi, *Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama*,91.

9 Misalnya yang diuraikan beberapa peserta *Focussed Group Discussion* CRCS UGM, Yogyakarta, 28 Januari 2008.

10 Wawancara dengan Abdul Fatah (Kepala PKUB) pada 11 Juli 2008. Lihat juga Asep Syaifullah, *Merukunkan Umat Beragama: Studi Pemikiran Tarmizi Taher* (Jakarta: Grafindo, 2007).

11 Usep Fathudin, "H. Tarmizi Taher: Globalisasi Kerukunan" dalam Azyumardi Azra and Saiful Umam (ed), *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik* (Jakarta: INIS, PPIM and Litbang Kemenag, 1998), 422-423.

12 Usep Fathudin, "H. Tarmizi Taher: Globalisasi Kerukunan", 423.

13 M Atho Mudzhar dalam Muhaiman. AG. (ed), *Damai di Dunia Damai untuk Semua Perspektif Berbagai Agama* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, Balitbang dan Diklat Kemenag R1, 2006), 17-18.

14 Atho dalam Muhaiman. AG. (ed), *Damai di Dunia Damai untuk Semua Perspektif Berbagai Agama* ,19.

15 Atho dalam Muhaiman. AG. (ed), *Damai di Dunia Damai untuk Semua Perspektif Berbagai Agama*, 13-23.

16 Pidato menteri Said Agil lihat Atho dalam Muhaiman. AG. (ed), *Damai di Dunia Damai untuk Semua Perspektif Berbagai Agama*, 22.

17 Sambutan Menag Maftuh Basyuni dalam Sosialisasi PBM 17 April 2006 (lihat Perber Menag dan Mendagri No. 8 dan 9 tahun 2006, diterbitkan Kemenag 2007).

18 Sambutan Menag Maftuh Basyuni dalam Sosialisasi PBM 17 April 2006

19 *Focussed Group Discussion* CRCS UGM, Yogyakarta, 28 Januari 2008.

20 *Focussed Group Discussion* CRCS UGM, Yogyakarta, 28 Januari 2008.

21 http://www.balitbangdiklat.Kemenag.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=66, (Akses 31 Mei 2010)

22 http://www.Kemenag.web.id/profil/ (Akses 31 Mei 2010)

23 Atho Mudzhar, "Aktualisasi Nilai Kerukunan dalam Kinerja Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan", *Harmoni*, Vol II No. 6 April-Juni 2003, 22-20.

24 http://www.Kemenag.web.id/profil/ (Akses 31 Mei 2010)

25 *Focussed Group Discussion* CRCS UGM, Yogyakarta, 28 Januari 2008..

26 Atho dalam Muhaiman. AG. (ed), *Damai di Dunia Damai untuk Semua Perspektif Berbagai Agama*, 23

27 Asep Syaefullah. *Merukunkan Umat Beragama: Studi Pemikiran Tarmizi Taher* (Jakarta: Grafindo 2007).175

28 Wawancara dengan Abdul Fatah (Kepala PKUB) pada 11 Juli 2008.

29 Rekap Kegiatan PKUB 2002-2007 oleh dan wawancara dengan Ketua PKUB, Abdul Fatah, 11 Juli 2008.

30 Syafii Mufid dalam *Focussed Group Discussion* CRCS UGM, Yogyakarta, 17 November 2008.

31 Rekap Kegiatan PKUB tahun 2002 – 2007 oleh Abdul Fatah.

32 Teks Perber Menag dan Mendagri no 8/9 tahun 2006.

33 *Focussed Group Discussion* CRCS UGM, Yogyakarta, 28 Januari 2008.

34 Wawancara dengan Sekretaris FKUB DIY, Yogyakarta 10 Juni 2009

35 Misalnya Padang dan Jakarta, Atho' Mudzhar, *Focussed Group Discussion* CRCS UGM, Yogyakarta, 28 Januari 2008.

36 Wawancara dengan sekretaris FKUB DIY, 10 Juni 2009

37 Wawancara dengan Skretaris FKUB DIY, 10 Juni 2009

38 Wawancara dengan ketua FKUB Bantul H. Munawir, 16 Juni 2009

39 Laporan FKUB Kabupaten Bantul 2007-2008, Sekretariat FKUB Bantul Yogyakarta, 2.

40 Wawancara dengan Ketua FKUB Bantul H. Munawir, 16 Juni 2009.

41 Brosur Sosialisasi FKUB Bantul 2007. (Lampiran dalam Laporan FKUB

Kabupaten Bantul 2007-2008).

42 Laporan FKUB Kabupaten Bantul 2007-2008, 3

4 Dialog dalam Diplomasi di Indonesia

1 Meskipun buku ini menggunakan istilah dialog antarumat beragama, namun bagian ini memakai istilah dialog antar/ lintas agama sebagai terjemahan dari kata *interfaith dialogue* seperti yang dipakai oleh Kemenlu RI.

2 Interview dengan Umar Hadi, (mantan) Direktur Direktorat Diplomasi Publik, Departemen Luar Negeri RI, di Hotel Borobudur, 31 Juli 2008.

3 Pidato Nur Hassan Wirayuda pada Lokakarya Nasional Diplomasi Publik "Membangun Citra Indonesia Demokratis, Moderat dan Progresif: Konsolidasi Soft Power dan Aset Politik Luar Negeri RI," yang diadakan oleh Departemen Luar Negeri RI, Bandung 6-7 Desember 2006.

4 Paper presentasi Nur Hassan Wirayuda "Politik Luar Negeri Bebas Aktif" disampaikan pada Rakornas Bidang Hublu dan Hankam DPP Partai Golkar, Jakarta, 21 Mei 2007.

5 Pidato Nur Hassan Wirayuda "Membangun Citra Indonesia Demokratis, Moderat dan Progresif: Konsolidasi Soft Power dan Aset Politik Luar Negeri RI."

6 Pidato Nur Hassan Wirayuda, "Membangun Citra Indonesia Demokratis, Moderat dan Progresif: Konsolidasi Soft Power dan Aset Politik Luar Negeri RI."

7 Pidato Dr. Nur Hassan Wirayuda pada Lokakarya Nasional Diplomasi Publik "Membangun Citra Indonesia Demokratis, Moderat dan Progresif: Konsolidasi Soft Power dan Aset Politik Luar Negeri RI."

8 Interview dengan Umar Hadi, (mantan) Direktur Direktorat Diplomasi Publik, Departemen Luar Negeri RI, di Hotel Borobudur, 31 Juli 2008.

9 Pidato Dr. Nur Hassan Wirayuda pada Lokakarya Nasional Diplomasi Publik "Membangun Citra Indonesia Demokratis, Moderat dan Progresif: Konsolidasi Soft Power dan Aset Politik Luar Negeri RI."

10 "Dialog Antaragama dalam Diplomasi RI: Inisiatif, Inovasi dan Kontribusi," paper presentasi Umar Hadi dalam *Focused Group Discussion* CRCS UGM, Yogyakarta, 28 Januari 2008.

[11] Siaran Pers, Direktorat Informasi dan Media Kemenlu RI tanggal 1 Agustus 2008.

[12] Siaran Pers, Direktorat Informasi dan Media Kemenlu RI tanggal 1 Agustus 2008.

[13] http://worldpeaceforum.net/index.php/about-wpf.html, (8 September 2008)

[14] http://worldpeaceforum.net/index.php/about-wpf.html (8 September 2008)

[15] The Jogja Center, A*n International Center for Religious and Cultural Cooperation*; *Dialogue on Interfaith Cooperation: Community Building and Harmoni*, Yogyakarta, Desember 6-7, 2004, Publikasi International Center for Religious and Cultural Cooperation*,* Volume 1, 2006.

[16] Laporan Pelaksanaan "Cebu Dialogue on Regional Interfaith Cooperation for Peace, Development and Human Dignity", Cebu, Filipina tanggal 14-16 Maret 2006, (Jakarta: Kemenlu RI, 2006)

[17] Paper "Waitangi Declaration; Third Regional Interfaith Dialogue Action Plan," 31 Mei 2007.

[18] Paper "Phnom Penh Dialogue 2008 on Interfaith Cooperation for Peace and Harmony," Cambodia, April 3-6, 2008.

[19] Paper "Phnom Penh Dialogue 2008 on Interfaith Cooperation for Peace and Harmony," Cambodia, April 3-6, 2008.

[20] "Building Interfaith Harmony within the International Community," Publikasi International Center for Religious and Cultural Cooperation*,* Volume 3, 2006, dan Lampiran dalam Laporan Lokakarya Nasional Diplomasi Publik, "Membangun Citra Indonesia Demokratis, Moderat dan Progresif: Konsolidasi Soft Power dan Aset Politik Luar Negeri RI."

[21] "Building Interfaith Harmony within the International Community," Publikasi International Center for Religious and Cultural Cooperation*,* Volume 3, 2006, dan Lampiran dalam Laporan Lokakarya Nasional Diplomasi Publik, "Membangun Citra Indonesia Demokratis, Moderat dan Progresif: Konsolidasi Soft Power dan Aset Politik Luar Negeri RI."

[22] "Building Interfaith Harmony within the International Community," Publikasi International Center for Religious and Cultural Cooperation*,* Volume 3, 2006, dan Lampiran dalam Laporan Lokakarya Nasional Diplomasi Publik, "Membangun Citra Indonesia Demokratis, Moderat dan Progresif: Konsolidasi Soft Power dan Aset Politik Luar Negeri RI."

[23] "Indonesian Interfaith Initiatives and Programs," Direktorat Diplomasi Publik, Departemen Luar Negeri RI, Jakarta, Mei, 2007 dan "Third Global Inter-Media Dialogue a Major Success," http://www.intermediadialogue.org/misc/print.aspx?article={2275ceae-409a-4441-a8c3-5af6f6ef7e5f} (Akses 21 Agustus 2008)

[24] "Third Global Inter-Media Dialogue a Major Success," http://www.intermediadialogue.org/misc/print.aspx?article={2275ceae-409a-4441-a8c3-5af6f6ef7e5f}, (Akses 21 Agustus 2008)

[25] Interview dengan Umar Hadi, (mantan) Direktur Direktorat Diplomasi Publik, Departemen Luar Negeri RI, di Hotel Borobudur, 31 Juli 2008.

[26] Interview dengan Umar Hadi, (mantan) Direktur Direktorat Diplomasi Publik, Departemen Luar Negeri RI, di Hotel Borobudur, 31 Juli 2008.

[27] Charles W. Kegley, Jr and Eugene Wittkopf, *World Politics: Trend and Transformation*, (Boston: Bedford/St. Martins, 2001, edisi delapan), 56-57.

[28] Interview dengan Umar Hadi, (mantan) Direktur Direktorat Diplomasi Publik, Departemen Luar Negeri RI, di Hotel Borobudur, 31 Juli 2008.

[29] "Dialog Antaragama dalam Diplomasi RI: Inisiatif, Inovasi dan Kontribusi," presentasi Umar Hadi dalam *Focused Group Discussion* CRCS UGM, Yogyakarta, 28 Januari 2008.

[30] Lihat lebih lengkap penjelasan tentang hal ini dalam Scott M Thomas, *The Global Resurgence of Religion and the Transformation of International Relations: the Struggle for the Soul of the Twenty-First Century* (New York: Palgrave Macmillan, 2005).

[31] Andreas Hasenclever and Volker Rittberger, "Does Religion Make a Different?; Theoritical Approaches to the Impact of Faith on Political Conflict," dalam Pavlos Hatzopoulos and Fabio Petito (ed), *Religion in International Relations: The Return from Exile,* (New York: Palgrave Macmillan, 2003), 107

[32] Lihat Avyanthi Azis dan Christian Harijanto, "Sebuah Dialog untuk Mengakhiri Rantai Kekerasan: Cara Pandang Baru tentang Terorisme," dalam *Global Jurnal Politik Internasional*, Vol. 5, No. 2. Mei 2003, 14.

[33] Presentasi Umar Hadi dalam *Focus Group Discussion* CRCS UGM, Yogyakarta, 28 Januari 2008. Beliau mengatakan, "… menguatnya unilateralisme Amerika merupakan salah satu faktor internasional yang

mendorong dimasukkannya dialog antaragama dalam diplomasi publik Indonesia." Lihat juga pembahasan tentang unilateralisme AS dalam David M. Malone and Yuen Foong Khong, *Unilateralism and US Foreign Policy; International Perspectives* (Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers, 2003).

34 Bantarto Bandoro, "Politik Luar Negeri Indonesia: Menjaga Keseimbangan antara Demokrasi dan Keharusan Memerangi Teorisme Global," dalam *Global, Jurnal Politik Internasional*, Vol. 5, No. 2, Mei 2003, 79.

35 Interview dengan Umar Hadi, (mantan) Direktur Direktorat Diplomasi Publik, Departemen Luar Negeri RI, di Hotel Borobudur, 31 Juli 2008.

36 Interview dengan Umar Hadi, (mantan) Direktur Direktorat Diplomasi Publik, Departemen Luar Negeri RI, di Hotel Borobudur, 31 Juli 2008.

37 Interview dengan Umar Hadi, (mantan) Direktur Direktorat Diplomasi Publik, Departemen Luar Negeri RI, di Hotel Borobudur, 31 Juli 2008.

38 Pidato Dr. Nur Hassan Wirayuda, "Membangun Citra Indonesia Demokratis, Moderat dan Progresif: Konsolidasi Soft Power dan Aset Politik Luar Negeri RI."

39 Interview dengan Umar Hadi, (mantan) Direktur Direktorat Diplomasi Publik, Departemen Luar Negeri RI, di Hotel Borobudur, 31 Juli 2008.

40 Interview dengan Umar Hadi, (mantan) Direktur Direktorat Diplomasi Publik, Departemen Luar Negeri RI, di Hotel Borobudur, 31 Juli 2008.

41 Umar Hadi, *Focussed Group Discussion* CRCS UGM, Yogyakarta, 28 Januari 2008.

42 Edward P. Djerejian, "Changing Minds Winning Peace: A New Strategic Direction for U.S Public Diplomacy in the Arab and Muslim World," *Report of the Advisory Group on Public Diplomacy for the Arab and Muslim World,* Oktober 1, 2003, 54-55.

43 Interview dengan Umar Hadi, (mantan) Direktur Direktorat Diplomasi Publik, Departemen Luar Negeri RI, di Hotel Borobudur, 31 Juli 2008.

44 Pidato Dr. Nur Hassan Wirayuda pada Lokakarya Nasional Diplomasi Publik "Membangun Citra Indonesia Demokratis, Moderat dan Progresif: Konsolidasi Soft Power dan Aset Politik Luar Negeri RI."

45 Interview dengan Umar Hadi, (mantan) Direktur Direktorat Diplomasi Publik, Departemen Luar Negeri RI, di Hotel Borobudur, 31 Juli 2008.

46 Pidato Dr. Nur Hassan Wirayuda pada Lokakarya Nasional Diplomasi

Publik "Membangun Citra Indonesia Demokratis, Moderat dan Progresif: Konsolidasi Soft Power dan Aset Politik Luar Negeri RI."

47 Lihat David R. Smock (ed), *Interfaith Dialogue and Peace Building* (Washington DC: United States Institutes of Peace Press, 2002) dan Achmad Jainuri, Zainuddin Maliki, Syamsul Arifin, dkk, *Terorisme dan Fundamentalisme Agama: Sebuah Tafsir Sosial* (Malang: Pusat Studi Islam dan Filsafat (PSIF) Universitas Muhammadiyah Malang, 2003), 279-280.

48 *Human Development Report* (New York: UNDP, 1994), 3

5 Praktik Dialog Antarumat Beragama di Tingkat Masyarakat

1 Deskripsi tentang Institut DIAN/ Interfidei berdasarkan sumber data informasi Elga Sarapung dalam *Focussed Group Discussion* CRCS UGM, Yogykarta, 28 Januari 2008; website Interfidei http://interfidei.or.id (Akses 4 Juli 2010); leaflet Interfidei; dan tulisan Th. Sumartana, "Sejarah Singkat, Visi dan Misi Institut DIAN/Interfidei", *Newsletter Interfidei*, Edisi Khusus 2001, 5.

2 Deskripsi tentang ICRP berdasarkan sumber data korespondensi atau wawancara dengan Anick HT dan website http://www.icrp-online.org. (Akses 4 Juli 2010)

3 Deskripsi tentang eLaIeM berdasarkan korespondensi atau wawancara dengan Jacky Manuputty dan laporan tahunan Maluku Interfaith Institution 2005-2006.

4 Deskripsi tentang LKiS berdasarkan informasi dari Farid Wajidi pada *Focussed Group Discussion* CRCS UGM, Yogyakarta, 28 Januari dan 17 November 2008; website http://lkis.or.id (Akses 4 Juli 2010); Hairus Salim dan Suhadi, *Membangun Pluralisme dari Bawah: Modul Belajar Bersama* (LKiS, 2007), dan Profil Program Pendirian "Institut Kajian Islam Kali Opak LKiS Yogyakarta".

5 M. Imam Aziz, dkk. (eds), *Agama, Demokrasi & Keadilan* (Jakarta: Gramedia, 1993).

6 Kazuo Shimogaki, *Kiri Islam: Antara Modernisme dan Posmodernisme, Telaah Kritis Pemikiran Hassan Hanafi*, terj. M. Imam Aziz dan M. Jadul Maula (Yogyakarta: LKiS, 1993).

7 Asghar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*, terj. Hairus Salim dan Imam Baehaqy (Yogyakarta: LKiS, 1993).

8 Deskripsi tentang Percik berdasarkan pada informasi dari Pradjarta Dirjosanjoto dalam *Focus Group Discussion* CRCS UGM, Yogyakarta, 17 November 2008 dan website http://www.percik.or.id (Akses 4 Juli 2010)

9 Deskripsi tentang PSAP berdasarkan korespondensi atau wawancara dengan Ahmad Fuad Fanani.

10 Deskripsi tentang Wahid Institute berdasarkan informasi dari Ahmad Suaedy dalam *Focussed Group Discussion* CRCS UGM, Yogyakarta, 17 November 2008; Laporan Tahunan The Wahid Institute 2007, korespondensi dengan Rumadi, Nurul Huda Ma'arif, Ulum; dan website http://www.wahidinstitute.org (Akses 4 Juli 2010).

11 Deskripsi mengenai Fahmina berdasarkan keterangan dari K.H. Husein Muhammad dalam *Focussed Group Discussion* CRCS UGM, Yogyakarta, 28 Januari 2008.

12 Deskripsi tentang Mitra Wacana berdasarkan informasi dari Ovi Hariani Ana dalam *Focussed Group Discussion* CRCS UGM, Yogyakarta, 28 Januari 2008 dan Rofiana dalam *Focussed Group Discussion* CRCS UGM, Yogyakarta, 17 November 2008.

13 Deskripsi tentang Kapal Perempuan berdasarkan http://www.kapalperempuan.org (Akses 4 Juli 2010)

14 Deskripsi tentang PGI berdasarkan informasi dari Pdt. Martin Sinaga dalam *Focussed Group Discussion* CRCS UGM, Yogyakarta, 17 November 2008 dan website http://pgi.or.id/home (Akses 4 Juli 2010).

15 Deskripsi tentang KWI berdasarkan informasi dari Romo Ismartono dalam *Focussed Group Discussion* CRCS UGM, Yogyakarta, 17 November 2008; Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan, *Daftar Kegiatan 2003-2004, 2004-2006;* Pengantar Sosialisasi Komisi HAK (Hubungan Antaragama dan Kepercayaan), presentasi Yohanes Haryono, Paroki St Kristoforus Grogol, Komisi HAK Keuskupan Agung Jakarta, 5 Juni 2005; dan website http://www.kawali.org (Akses 4 Juli 2010).

6 Mengkaji Agama secara Dialogis di Perguruan Tinggi

1 Bernard Adeney-Risakotta, dalam *Focussed Group Discussion* CRCS UGM, Yogyakarta, 28 Januari 2008.

2 J. B. Banawiratma, "To be Religious Today is to be Inter-religious", Kata Pengantar untuk Syafa'atun Almirzanah, *When Mystic Masters*

Meet (Jakarta: Gramedia, 2009).

3 Telah ada beberapa riset mengenai perkembangan studi agama di Indonesia dalam bentuknya yang disebut "perbandingan agama", yang di sini dianggap sebagai awal mula dialog, namun, sejauh pelacakan penulis, sebagian besar terkonsentrasi pada studi agama di Perguruan Tinggi Islam. Lihat misalnya Karel A. Steenbrink, "The Study of Comparative Religion by Indonesian Muslims: A Survey", *Numen*, Vol. 37, No. 2, Desember 1990, 141-167; Jacques Waardenburg, "Observations on the Scholarly Study of Religions as Pursued in Some Muslim Countries", *Numen*, Vol. 45, No. 3, 1998, 235-257; Herman Beck, "A Pillar of Social Harmony: The Study of Comparative Religion in Contemporary Indonesia," *Studies in the History of Religions*, 2002.

4 Thomas L. Benson, "Religious Studies as an Academic Discipline", dalam Mircea Eliade (ed), *Encyclopedia of Religion* (New York: Macmillan Press, 1987, vol. 14), 88-92. Untuk tinjauan kritis pada penilaian mutakhir atas disiplin perbandingan agama, lihat Kimberly Patton dan Benjamin Ray (ed), *A Magic Still Dwells: Comparative Religion in the Postmodern Age* (California: University of California Press, 2000); dan serial artikel yang lebih baru mengenai masa depan studi agama yang diterbitkan di *Journal of the American Academy of Religion* 74:1, Maret 2006.

5 Karel A. Steenbrink, "The Study of Comparative Religion by Indonesian Muslims: A Survey," 154-155. Rujukan Steenbrink adalah pada Bolland, B.J., *Struggle of Islam in Modern Indonesia* (Leiden: The Haque Martinus Nijhoff, 1971).

6 Herman Beck, "A Pillar of Social Harmony: The Study of Comparative Religion in Contemporary Indonesia", *Studies in the History of Religions*, 2002.

7 Atho' Mudzhar, "Kedudukan IAIN Sebagai Perguruan Tinggi", www.dipertais.net/artikel/ atho01.htm. (Akses 8 Februari 2007). Debat itu tampaknya telah berlalu, namun pada tahun 2007 Menteri Agama Maftuh Basyuni kembali mengingatkan bahwa "tujuan awal pendirian IAIN di Indonesia adalah untuk kemakmuran dakwah Islam." (Berita mengenai ini dapat diakses pada http://www.uin-suka.info/projectportal/index.php dan http://hidayatullah.com/ index.php?option=com_content&task=view&id=4516&Itemid=1 (Akses 10 April 2007).

[8] Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

[9] Telah ada 6 IAIN yang berubah menjadi UIN, yaitu: UIN Jakarta, Yogyakarta, Malang, Bandung, Pekanbaru, dan Makassar. Transformasi ini bukan tanpa kontroversi, baik menyangkut perubahan orientasi epistemologis maupun dampaknya pada penerimaan mahasiswa baru dan juga kompetensi lulusannya dalam pasar tenaga kerja. Seperti diberitakan di media massa pada 10 April 2007, Menteri Agama Maftuh Basyuni menyatakan bahwa perubahan ini tidak boleh dilakukan lagi pada IAIN/ STAIN lain. Alasan utamanya adalah kekhawatiran marjinalisasi studi-studi Islam dari UIN, dikalahkan oleh fakultas-fakultas baru ilmu-ilmu umum. Kekhawatiran ini mungkin bukan tanpa alasan. Di beberapa PTAIN, penawaran disiplin-disiplin ilmu baru yang "nonagama" ternyata tampaknya memang diiringi dengan merosotnya secara drastis minat pada Ushuluddin secara signifikan, bahkan setelah ada tawaran beasiswa. Meskipun demikian, kita tak bisa serta-merta mengatakan bahwa kemorosotan ini disebabkan oleh adanya disiplin-disiplin baru itu, karena nyatanya bahkan sebelum perubahan itu peminat Ushuluddin sudah berkurang. Belum ada data pasti mengenai ini; kesimpulan ini ditarik dari pengamatan sepintas di beberapa PTAIN dan keterangan dosen-dosen Fakultas Ushuluddin.

[10] Abdullah Saeed, "Towards Religious Tolerance Through Reform in Islamic Education: The Case of the State Institute of Islamic Studies", *Indonesia and the Malay World*, Vol. 27: 79, 1999, 177-191; Azyumardi Azra, "Teaching Tolerance through Education in Indonesia", makalah yang disajikan pada *International Symposium on Educating for a Culture of Peace*, di Multi-Faith Centre, Griffith University, Australia, 10-13 Agustus 2005. Lebih umum, untuk sumber yang bermanfaat mengenai perkembangan dan dampak IAIN, lihat Fu'ad Jabali and Jamhari (ed), *The Modernization of Islam in Indonesia: An Impact Study on the Cooperation between the IAIN and McGill University* (Jakarta: Indonesia-Canada Islamic Higher Education Project, Montreal dan Jakarta, 2003).

[11] *Focussed Group Discussion* CRCS-UGM, 28 Januari 2008.

[12] Sunardi, '"Lagune Cara Landa Kok Tembunge Basa Jawa": Postcolonial Perspectives in Religious Studies," makalah disampaikan pada *International Conference 'The Problems and Promise of Inter-Religious*

Studies in Indonesia', January 14 – 16, 2007, diselenggarakan oleh Indonesia Consortium for Religious Studies, Yogyakarta.

13 Memandang bahwa UIN kini, setelah transformasi dari IAIN, tampak sedang mendefinisikan orientasi kajian agamanya, pilihan itu mungkin dapat dipertimbangkan: alternatif dari mengubah Fakultas Ushuluddin menjadi lebih "inklusif" adalah mengembangkan suatu program studi berbeda yang sejak awal memang tak berorientasi pada pengembangan teologis keislaman.

14 *Focussed Group Discussion* CRCS UGM, Yogyakarta, 28 Januari 2008.

15 *Focussed Group Discussion* CRCS UGM, Yogyakarta, 28 Januari 2008.

16 Disampaikan Syafa'atun Almirzanah, pada *Focussed Group Discussion* CRCS UGM, Yogyakarta, 18 November 2008.

17 Pembahasan mengenai penelitian tentang dialog antaragama berada di luar cakupan bab ini. Namun untuk sekadar memberikan gambaran jenis-jenis penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa contoh yang bisa disebut dari tesis beberapa lulusan CRCS: Lidya Tandirerung, pendeta asal Toraja, menuliskan perbandingan gagasan teologi pembebasan Kristen dan Islam, yang terfokus pada Paul Knitter dan Farid Esack. Siti Sarah Muwahidah melakukan penelitian empiris mengenai praktik dialog yang dilakukan secara tak langsung di sebuah desa di Jawa Timur, dan dari situ menganalisis beberapa dimensi dialog secara lebih umum. Mega Hidayati menuliskan mengenai dialog dalam konteks hermeneutika Gadamer. Edisi Indonesia tesis Mega telah diterbitkan oleh Impulse-Kanisius, 2008, dengan judul *Jurang di Antara Kita*; sementara artikel yang berdasarkan penelitian Sarah terbit dengan judul "Interfaith Dialogue at the Grassroots Level: A Case Study of an Interfaith Empowerment Program in East Java, Indonesia" *Political Theology* Vol. 9, No. 1, 2008, 79-92. Di luar itu ada pula beberapa tesis yang berupaya mendialogkan aspek-aspek agama-agama berbeda (misalnya yang masuk dalam wilayah perbandingan mistisisme atau perbandingan kitab suci). Secara umum, dalam pengamatan sepintas, tampaknya sejauh ini penelitian mengenai dialog lebih tertuju pada aspek wacananya, dan belum cukup banyak melihat praktik dialog. Wilayah inilah yang perlu dimasuki dengan lebih serius di masa depan.

18 Satu contoh yang khas adalah matakuliah "Religion and Gender" yang pernah diajarkan tiga dosen sekaligus dengan latar belakang Kristen, Islam, dan Buddhisme.

19 Meskipun tak mungkin diuraikan di sini, menarik untuk mencatat bahwa matakuliah-matakuliah yang berbeda memunculkan problematika berbeda menyangkut keterwakilan agama-agama, termasuk dalam hal kerangka teoretis yang digunakan untuk isu tertentu.

20 Karel A. Steenbrink, "The Study of Comparative Religion by Indonesian Muslims: A Survey," 166.

21 Bandingkan dengan Diana Eck, "Dialogue and Method: Reconstructing the Study of Religion", 141.

22 J. B. Banawiratma, "Today To Be Religious is To Be Interreligious", Kata Pengantar untuk buku Syafaatun Almirzanah, *When Mystic Masters Meet* (Jakarta: Gramedia, 2009)

23 Disampaikan Sri Roviana, aktivis LSM Mitra Wacana, pada *Focussed Group Discussion* CRCS UGM, Yogyakarta, 18 November 2008.

24 Ada beberapa perkecualian untuk ini. Lihat, misalnya, penelitian yang dilakukan CRCS pada 2006-2007 mengenai pendidikan agama di SMA negeri, Islam, dan Kristen di Yogyakarta, juga hasil penelitian Interfidei mengenai topik serupa yang telah diterbitkan dalam Listia, Laode Arham dan Lian Gogali (ed), *Problematika Pendidikan Agama di Sekolah* (Yogyakarta: Interfidei, 2007).

25 Lihat Modul Matakuliah Pendidikan Agama 2006 (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2006).

26 Sebuah contoh yang baru dan sangat menarik adalah yang dilakukan Campus Ministry Universitas Sanata Dharma dengan program *live-in lintas iman*-nya. Mahasiswa S1 universitas tersebut (bukan dari Fakultas Teologi, tapi fakultas-fakultas seperti Farmasi, Matematika, Akuntansi, dan sebagainya) tinggal bersama komunitas-komunitas berbeda iman dan bekerja bersama mereka. Kisah-kisah mereka dituangkan dalam Didik Chahyono, SJ, dkk, *Biarlah Berbeda dan Saling Mencinta* (Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma, 2009).

7 Dari Fakta Menuju Cita-cita

1 Herry-Priyono, B. 'Tiga Poros Indonesia', *Kompas* 9 Januari 2004; Herry-Priyono, B. 'Ranah Publik: Dari Mulut Pemerintah ke Rahang Pasar', *Paper Tidak Diterbitkan*, 2004.

2 Daniel Drache, "Introduction: The Fundamentals of Our Time, Values and Goals that Are Inescapably Public" dalam Daniel Drache (ed), *The*

Market or the Public Domain: Global Governance and the Asymmetry of Power (London: Routledge, 2001), 1-34.

3 David Marquand, "Reinventing Gladstone? the Public Conscience and the Public Domain" dalam Daniel Drache (ed) Daniel Drache (ed), *The Market or the Public Domain: Global Governance and the Asymmetry of Power* (London: Routledge, 2001), 72-84.

4 Lihat Melani Budianta, "Tragedi yang Menuai Berkah: Munculnya Aktivisme Perempuan dalam Masa Reformasi", dalam Ariel Heryanto dan Sumit K. Mandal (ed), *Menggugat Otoriterisme di Asia Tenggara*: *Perbandingan dan Pertautan antara Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: KPG, 2004), 285-349; Farsijana Adeney-Risakotta (ed), *Perempuan dan Bencana: Pengalaman Yogyakarta* (Yogyakarta: Selendang Ungu Press, 2007).

5 Aloysius Pieris,"Dialog Antaragama dan Teologi Agama-Agama: Suatu Pendekatan Model Asia" dalam G. Kirchenberger (ed), *Gereja Berwajah Asia*, terj. (Ende: Nusa Indah, 1995), 193-204.

6 J.B. Banawiratma, "To Be Religious Today is To Be Interreligious," kata pengantar pada Syafa'atun Almirzanah, *When Mystic Masters Meet: Paradigma Baru dalam Relasi Umat Kristiani-Muslim* (Jakarta Gramedia, 2008), xiii-xix.

Lampiran

Daftar Peserta

Focused Group Discussion
Interreligious Dialogue
I
CRCS, Sekolah Pascasarjana
UGM
28 Januari 2008

1. Anastasia Novi E. Hariani (Mitra Wacana Yogyakarta)
2. Arqom Kuswanjono (CRCS UGM)
3. Atho Mudzhar (Balitbang Kemenag RI)
4. Bernard T. Adeney-Risakotta (ICRS Yogyakarta)
5. Budi Asyhari (CRCS UGM)
6. Djaka Soetapa (UKDW Yogyakarta)
7. Elga Sarapung (DIAN Interfidei Yogyakarta)
8. Farid Wajidi (LKiS Yogyakarta)
9. Hamim Ilyas (PP. Muhammadiyah)
10. Husein Muhammad (Fahmina Cirebon)
11. Ibnu Mujib (IFPA Yogyakarta)
12. JB. Banawiratma (CRCS UGM)
13. John A. Titaley (UKSW Salatiga)
14. M. Yusuf (CRCS UGM)
15. Mega Hidayati (ICRS Yogyakarta)
16. Romo Benny Susetyo, Pr (KWI)
17. St. Sunardi (USD Yogyakarta)
18. Suhadi Cholil (CRCS UGM)
19. Yusron B. Ambary (Diplik Kemenlu RI)
20. Zainal Abidin Bagir (CRCS UGM)

Daftar Peserta

Focused Group Discussion
Interreligious Dialogue
II
CRCS, Sekolah Pascasarjana
UGM
17 November 2008

1. Ahmad Suaedy (The Wahid Institute)
2. Ahmad Syafii Mufid (Balitbang Kemenag RI)
3. Ali Amin (CRCS UGM)
4. Arqom Kuswanjono (CRCS UGM)
5. JB. Banawiratma (CRCS UGM)
6. Bernard T. Adeney-Risakotta (ICRS Yogyakarta)
7. Budi Asyhari (CRCS UGM)
8. Djaka Soetapa (UKDW Yogyakarta)
9. Farid Wajidi (LKiS Yogyakarta)
10. Frans Toegimin (Satunama Yogyakarta)
11. Martin L. Sinaga (PGI)
12. Mustaghfiroh Rahayu (CRCS UGM)
13. Novita Rakhmawati (CRCS UGM)
14. Pradjarta Dirdjosanjoto (PERCIK Salatiga)
15. Romo Ismartono SJ. (KWI)
16. Sri Roviana (Mitra Wacana Yogyakarta)
17. Suhadi Cholil (CRCS UGM)
18. Syafa'atun El-Mirzana (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
19. Umar Hadi (Diplik Kemenlu RI)
20. Wening Udasmoro (ICRS Yogyakarta)
21. Zainal Abidin Bagir (UGM)

Syllabus

Inter-Religious Dialogue: Theories And Practices
2009

Time: Wednesday, 08.30-11.00 WIB
Lecturers: Prof. Dr. J.B. Banawiratma and
Dr. Fatimah Husein
e-mail: banawiratma@ukdw.ac.id;
fatimahhusein@yahoo.com

Aims

By the end of the semester, students are expected to :

1) become more conscious about the fact and the meaning of inter and intra religious plurality;
2) be able to analyze various models and levels of dialogue;
3) be able to develop a constructive dialogue among religious communities;
4) be able to develop tools in conducting research and to identify potential areas of significance for future research on inter-religious dialogue.

Course Design

This course is an introduction to dialogue and an attempt to conduct a constructive dialogue.

1) It will explore opportunities and challenges in dialogue. The course will be based on dialogue
2) of life as experienced by the participants. The whole

process of the course will be shaped in
3) dialogue. The participants will converse with other participants, with people of other faiths
4) through written materials and through visiting communities of different faiths. The participants will also dialogue with his/her own faith traditions.

Time Table

Class discussions begin in week 2nd. They will be organized thematically. Below is an outline of the discussion series, with the list of readings for each session.

NO.	DATE	SUBJECT
1	28 Jan	Introduction to the course and questionnaire
2	04 Feb	Inter-religous dialogue: Indonesian context
3	11 Feb	Inter-religious dialogue: International context
4	18 Feb	Understanding inter-religious and interfaith dialogues
5	25 Feb	Models and Levels of dialogue
6	04 March	Hinduism and other religions
7	11 March	Field trip to an interfaith community
8	18 March	Discussion on Field trip
9	25 March	Buddhism and other religions
10	01 April	Judaism and other religions
11	08 April	Christianity and other religions
12	15 April	Islam and other religions
13	22 April	Presentation of the students' mini project (1)
14	29 April	Presentation of the students' mini project (2) and wrap up: Holistic paradigm

Sessions

Session 1: Introduction to the course and questionnaire

This session explains the course outline including the assignments. A questionnaire will be distributed to be filled out by the students. This questionnaire will be used to evaluate the course by the end of the semester.

Sessions 2: Inter-religious dialogue: Indonesian Context

Banawiratma, J.B., "Inter-religious Relationship in Indonesia," in Ludwig Bertsch et.al (eds.), *Viele Wege – ein Ziel* (Freiburg: Herder, year?), 273-284.

Lies Marcoes-Natsir, Lies, "Visibility and Invisibility: Women and Inter-faith dialogue in Indonesia," unpublished article, 15 pages.

Mujiburrahman, *Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia's New Order* (Leiden: Amsterdam University Press, 2006), 251-298, available at http://rnb.uin.googlepages.com/thesis

Munjid, Achmad, "Building a Shared Home for Everyone-Interreligious Dialogue at the Grass Roots in Indonesia," in *Interfaith Dialogue at the Grass Roots*, ed., Rebecca Kratz Mays (Philadelphia: Ecumenical Press, 2008), 109-119.

Sunardi, "Building the Dead End of Religious Dialogue in Indonesia," *Interface*, Vol. 4, No. 1 (May 2001): 55-67.

Session 3: Inter-religious dialogue: International Context

Ali-Dib, Edith Szanto, "Inter-religious Dialogue in Syiria: Politics, Ethics and Miscommunication," *Political Theology*, Vol. 9, No. 1 (2008): 93-113.

Fahed, Ziad, "Lebanese Religious Pluralism and Inter-Religious Dialogue: Opportunities and Challenges for the Third Millennium," 25 pages.

Husein, Fatimah, "Konteks Historis Munculnya Wacana dan Dialog antar Agama," forthcoming, 2009 (CRCS), 12 pages.

Yusuf, Imtiyaz, "The Southern Thailand Conflict and the Muslim World," *Journal of Muslim Minority Affairs*, Vol. 27, No. 2 (August 2007): 319-339.

Session 4: Understanding Inter-religious Dialogue

Forward, Martin, "Viewpoints in Dialogue" in *A Short Introduction to Inter-religious Dialogue* (Oxford: Oneworld, 2001), 38-46.

Knitter, Paul, F, *Introducing Theologies of Religions* (New York: Orbis Books, 2002), 50-60, 100-106, 150-169, and 216-246.

Moyaert, Marianne, "The (un-)translatability of Religions? Ricours Linguistic Hospitaity as Model for Inter-religious Dialogue," *Exchange*, No. 37 (2008): 337-364.

Panikkar, Raimundo, "The Rhetoric of the Dialogue," in *The Intra-religious Dialogue* (New York: Paulist Press, 1999), 3-11.

Session 5: Models and levels of dialogue

Banawiratma, "Powers and Inter-religious Relationship," in Carl Stersken, ed., forthcoming 2009 (a draft copy will be made available).

Eck, Diana, "Prospects for Pluralism: Voice and Vision in the Study of Religion," *Journal of the American Academy of Religion*, Vo. 75, No. 4 (December 2007): 743-776.

Panikkar, Raimundo, "The Rhetoric of the Dialogue," in *The Intra-religious Dialogue* (New York: Paulist Press, 1999), 11-22 and "The Rules of the Game in the Religious Encounter," 61-71.

Swidler, Leonard and Paul Mojzes, "From the Age of Monologue to the Age of Global Dialogue," in *The Study of Religion in an Age of Global Dialogue* (Philadelphia: Temple University Press, 2000), 145-178.

Session 6: Hinduism and Other Religions

Departemen Agama, "Unity among People of Different Faiths: from the Hindu Point of View," in MORA, *The*

Theological Frame of Harmonious Religious Communities in Indonesia (Jakarta: MORA, 1997), 145-157.

Kostermaier, Klaus, "Hindu-Christian Dialogue," and "Hindu-Christian Dialogue Posponed: An Exchange between C. Murray Rogers and Sivendra Prakash," in S.J. Samartha, *Dialogue between Men of Living Faiths*, papers presented at a Consultation held at Ajaltoun, Lebanon, 1970 (Geneva: World Council of Churches, 1971), 11-20, and 21-31.

Session 7: Field trip to inter-faith community

Session 8: Discussion and Reflections on the Field trip to inter-faith community

Session 9: Buddhism and Other Religions

Gross, Rita, "Excuse me, but What's the Question? Isn't Religious Diversity Normal?" in Paul Knitter, ed., *The Myth of Religious Superiority: Multifaith Explorations of Religious Pluralism* (Maryknoll, Orbis Books, 2005), 75-87.

King, Sallie, "Towards a Buddhist Model of Interreligious Dialogue," *Buddhist-Christian Studies* 10 (1990): 121-126.

Scott, David, "Buddhism and Islam: Past to Present Encounters and Interfaith Lessons," *Numen*, Vol. 42, No. 2 (1995): 141-155.

Sugunasiri, Suwanda HJ, "'Spiritual Interaction,' Not 'Interfaith Dialogue': A Buddhist Contribution," *Buddhist-Christian Studies*, Vol. 16 (1996): 143-165.

Session 10: Judaism and other religions

Greenberg, Irving, "Grounding Democracy in Reverence for Life : A View from Judaism," in Alan Race and Ingrid Shafer, eds., *Religions in Dialogue: From Theocracy to Democracy* (Aldershot and Burlington: Ashgate, 2002), 29-35.

Weiman, Racelle, "Human Dignity and Rights as Essential Values in Judaism, in Alan Race and Ingris Shafer, eds., *Religions in Dialogue: From Theocracy to Democracy*, 167-175.

Video, *Another Side of Peace,* a film by Ellen Frick & Gretchen Burger, 2004.

Session 11: Christianity and Other Religions

Catholic-Muslim Forum, "First Seminar of the Catholic-Muslim Forum: Final Declaration," Rome, 4-6 November 2008.

Knitter, Paul F., "Christian Attitudes toward Other Religions: The Challenge of Committment and Openness," 9 pages.

Second Vatican Council, "Declaration on the relation of the Church to Non-Christian Religions: Nostra Aetate," 4 pages, and Kasper, Card Walter, "Some Reflections on Nostra Aetate," 3 pages.

World Council of Churches Office on Interreligious Relations, "Documentation: Striving Together in Dialogue: a Muslim-Christian Call to Reflection and Action," *Islam and Christian-Muslim Relations* 12, 4 (2001): 481-488.

Session 12: Islam and Other Religions

Abu-Nimer, Mohammed, "Conflict Resolution, Culture, and Religion: Toward Training Model of Interreligious

Peacebuilding," *Journal of Peace Research*, Vo. 38, No. 6 (Nov. 2001): 685-704.
Rahman, Fazlur, "Islam's Attitude toward Judaism," *The Muslim World*, Vol. 72, No. 1 (1982): 1-13.
Aydin, Mahmut, "Is There Only One Way to God?" in *Studies in Interreligious Dialogue* 10, (2000): 149-159.
Yusuf, Imtiyaz, "Dialogue between Islam and Buddhism through the Concepts of Tathagata and Nur Muhammadi," International Journal of Buddhist Thought & Culture, Vo. 5 (February 2005): 103-114.

Session 13: Presentation of the students' mini project

Session 14: Presentation of the students' mini project (continued) and wrap up: Holistic paradigm

Additional Readings

Bakar, Osman, "The Impact of the American War on Terror on Malaysian Islam," *Islam and Christian-Muslim Relations*, 16,2 (April 2005): 107-127.
Holy Father, "Address of the Holy Father: Meeting with the Muslim Leaders, Omayyad Great Mosque, Damascus (6 May, 2001).
Husein, Fatimah, "An Overview of Muslim-Christian Relations in Indonesia Until 1965," and "The New Order and Muslim-Christian Relations," in *Muslim-Christian Relations in Indonesia: The Exclusivist and Inclusivist Muslims' Perspectives* (Bandung: Mizan, 2005), 59-142.
Larsson, Goran, "The Impact of Global Conflicts on Local Contexts: Muslims in Sweeden after 9/11 – the Rise of Islamophobia, or New Possibilities," *Islam and Christian-Muslim Relations*, 16,1 (January 2005): 29-42.
Madina: A Truly Islamic Magazine, "Merawat Damai Islam

Kristen," No. 09, Th 1, September 2008. Available at www.madina.co.id
Suhadi, *Kawin Lintas Agama* (Yogyakarta : LkiS, 2006).
Swidler, Leonard, "The Dialogue Decalogue," *Journal of Ecumenical StudiesÄJes*, 1984ÄRevised 2003.
United States Institute of Peace, "What Works? Evaluating Interfaith Dialogue Programs," available at http://www.usip.org/

Assessment

1) Class attendance, participation, assignment, and mini project: 50 %
   - A minimum attendance of 11 sessions is required for successful completion of the subject. Full attendance and active contribution to the weekly discussions will be accounted for in the students' final marks.
   - For every meeting, *all students* are required to read selected texts and be prepared to discuss them. However, in each session several students will open the discussion, each for about 15 minutes. These students *are not* expected to give a summary of the readings, or to demonstrate that they have a full mastery of the subject matter under discussion. *Rather, they are invited to highlight selected points of importance from the readings, raise questions about specific issues in the readings, and comment on connections between readings for the week with previous lectures and/ or readings*. The presenters need to submit a journal of 1-2 pages from this reading.
   - From the beginning of the course, each student has to initiate a mini project on inter-religious dialogue as a group assignment. This mini project aims at

giving the opportunity to the students to understand the complexity of the issue of inter-religious dialogue at the grass root level. This project is to be presented on weeks 13-14 of the course as a group report. However each student has to submit an individual transcript of their interviews by the end of their presentation schedule.

2) Final Paper: 50 % due 13 May 2009
   - Every student should write a final paper on his or her personal academic reflection on interfaith dialogue related issues. Topics can be selected or developed from any issues already discussed in the lectures. The paper need not be a product of a new and original research, but must express the individual student's own formulation of a problem in innovative ways, critically developing what has been covered in class. A central part of the essay must be analytical, reflective, and not simply descriptive.
   - The guidelines of the papers are:
     The main body of the paper (including footnotes or endnotes, but excluding bibliography), must be between 3.000 to 3.500 words
     1. The paper is typed and print on A4 paper with 1,5 space and font 12 (standard).
     2. The paper should be submitted in a print-out/ hard copy with a standard CRCS cover sheet.

Biodata Peneliti dan Penulis

J. B. Banawiratma, Ph.D lama bekerja sebagai staf Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Setelah itu, ia mengajar Teologi di STT Jakarta. Sekarang Guru Bessar Teologi pada Fakultas Theologia Universitas Kristen Duta Wacana, dan Guru Besar Ilmu Agama dan Masalah Sosial pada Center for Religious and Cross-cultural Studies, Sekolah Pascasarjana, UGM. Juga pada Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS-UGM), Yogyakarta.

Zainal Abidin Bagir, Ph.D adalah Direktur Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), Sekolah Pascasarjana, UGM, Yogyakarta dan anggota Majelis Konsorsium Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS-Yogya). Pada 2006, dia mengedit *Science and Religion in the Post-colonial World: Interfaith*

Perspectives (Australian Theological Forum Press), dan dua buku dalam subjek yang sama. Kini, dia menjadi koordinator regional wilayah Indonesia untuk the *Pluralism Knowledge Programme*, sebuah kolaborasi pusat akademik antara Belanda, India, Indonesia, dan India. Di CRCS, dia mengajar mata kuliah *Academic Study of Religion, dan Religion, Science and Technology*.

Fatimah Husein, Ph.D adalah dosen pada Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu, dia menjadi anggota Majelis Konsorsium Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS-Yogya) dan selama enam tahun terakhir ini juga terlibat aktif sebagai pengajar dan peneliti pada CRCS, Sekolah Pascasarjana, UGM. Dia menulis dan mempresentasikan tulisan-tulisannya di berbagai forum, termasuk *Muslim-Christian Relations in the New Order Indonesia* (Bandung: Mizan, 2005), dan bersama Frans Wijsen *Dakwah and Mission: Muslim-Christian Encounters in Indonesia* dalam Carl Sterkens, et.al.,eds., *Religion, Civil Society and Conflict in Indonesia* (Berlin: LIT Verlag, 2009).

Suhadi Cholil, Ph.D Candidate adalah pengajar di Sekolah Pascasarjana UGM dan mahasiswa doktoral di Faculty of Religious Studies, Radboud University Nijmegen Belanda. Pernah menjadi peneliti tamu di Asia Research Institute, National University of Singapore (ARI-NUS), dan di Norwegian Center for Human Rights (NCHR), University of Oslo Norwegia.

Di antara karyanya yang telah diterbitkan adalah *Freedom of Religion or Belief in Indonesia and the Challenge of Muslim Exceptionalism* dalam Sinaga dan Sinn (eds), *Freedom and Responsibility: Christian and Muslim Explorations*, (USA: Kirk House Publishers, 2010); *The Politico-Religious Contestation: Hardening of the Islamic Law on Muslim-non-Muslim marriage in Indonesia* dalam Gavin W. Jones et. all *(eds.) Muslim-non-Muslim Marriage Political and Cultural Contestations in Southeast Asia*, (Singapore: ISEAS, 2009); dan *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2006).

Novita Rakhmawati, MA menyelesaikan sarjana mudanya di Departemen Hubungan Internasional, Universitas Indonesia (2002) dan mendapat gelar master dari Center for Religious and Cross-cultural Studies, Sekolah Pascasarjana, UGM. Kini, dia menjadi asisten pengajar di Departemen Hubungan Internasional UI dan menjadi Kepala Program Studi Hubungan Internasional Prof Dr. Moestopo (Beragama), Universitas Jakarta. Dia memiliki ketertarikan dalam bidang kebijakan luar negeri, diplomasi, dialog antaragama, dan studi timur tengah.

Ali Amin, MA meraih gelar dua masternya di bidang *religious studies* masing masing dari CRCS pada 2005 dan di Arizona State University pada 2008. Sepulang dari AS dia bekerja di almamaternya di CRCS, Sekolah Pascasarjana, UGM sebagai Koodinator Akademik kurang lebih dua tahun (2008-2010). Sejak pertenga-

han 2010 bergabung menjadi staf pengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado. Di samping mengajar, saat ini aktif melakukan penelitian tentang *Islam and counter-radicalism di Indonesia.*

Mega Hidayati, Ph.D Candidate menyelesaikan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (sekarang UIN Yogyakarta) jurusan Aqidah Filsafat dan di Universitas Gadjah Mada (UGM) jurusan Sastra Inggris. Gelar master (S2) dia peroleh dari Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) UGM. Saat ini dia tercatat sebagai mahasiswa S3 Indonesian Consortium for Religious Studies Yogyakarta (ICRS-Yogya), sebuah consortium tiga universitas: UGM, UIN Yogyakarta, dan Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW). Buku yang telah diterbitkan: *Jurang di Antara Kita* (Yogyakarta: Kanisius, 2007) dan *Human Finitude and Interreligious Dialogue* (Adelaide: Australian Theological Forum (ATF), 2010).

Budi Asyhari-Afwan, MA telah terlibat sejak lama dalam aktivitas NGO di Yogyakarta sejak mahasiswa S1. Setelah mendapatkan gelar sarjana, dia mengambil master di CRCS, Sekolah Pascasarjana, UGM. Kini, dia menjadi peneliti di CRCS dan terlibat aktif dalam penulisan Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia yang diterbitkan CRCS sejak 2007.

PROGRAM STUDI AGAMA DAN LINTAS BUDAYA
CENTER FOR RELIGIOUS AND CROSS-CULTURAL STUDIES
GRADUATE SCHOOL, UNIVERSITAS GADJAH MADA

DIBANDING banyak negara lain di Asia maupun dunia, Indonesia telah memiliki sejarah panjang praktik dialog antarumat beragama. Dialog sebagai aktivitas yang terlembagakan di Indonesia telah dimulai sejak 1960-an, dipromosikan dengan gencar oleh pemerintah, dilakukan pada tingkat masyarakat dan dikembangkan dalam dunia akademis. Sementara dialog telah sering dilakukan dan banyak gagasan mengenai dialog dikembangkan, namun kajian mengenai praktik dialog tersebut belum jamak.

Buku ini ingin mencatat pengalaman amat kaya tersebut dan sedikit banyak mensistematisasikannya, tanpa bertendensi menyajikan dokumentasi yang lengkap. Berdasarkan seleksi atas sebagian aktivitas yang dilakukan pada wilayah-wilayah dialog yang berbeda, buku ini mencoba menelusuri ragam dialog yang telah terjadi, dan memilah mana yang masih dapat dikembangkan untuk masa depan.

Buku ini berusaha menampilkan praktik dialog antarumat beragama, sebagaimana yang umum dipahami sekarang, dalam beragam bentuknya. Pembaca diharapkan mendapat gambaran yang cukup baik mengenai dialog antar umat beragama, mulai dari sejarah awal hingga perkembangan mutakhir.

Diharapkan juga melalui buku ini, para pelaku dialog sendiri, baik perseorangan maupun lembaga-lembaga masyarakat sipil, dan juga pihak pemerintah yang menaruh perhatian pada dialog, dapat memperoleh gambaran besar, semacam peta tentang dialog antar umat beragama.

ISBN 978-602-97633-1-7
9 786029 763317

mizan KHAZANAH ILMU ISLAM bekerjasama dengan CRCS Center for Religious & Cross-cultural Studies Graduate School, Gadjah Mada University